# DISERTASI

# REKONSTRUKSI KEBIJAKAN KRIMINAL BAGI PERSONIL POLRI PENGGUNA NARKOBA BERBASIS NILAI KEADILAN
# (STUDI PADA POLDA SUMATERA UTARA)

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Oleh**

**AMIR MAHMUD, SH., MH**

**NIM: 10302000105**




**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM**

**(PDIH)FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**(UNISSULA) SEMARANG**

**2022**

# HALAMAN PENGESAHAN DISERTASI

# REKONSTRUKSI PENERAPAN PERJANJIAN BAKU TERHADAP KONSUMEN BERBASIS NILAI KEADILAN

**Oleh**

**AMIR MAHMUD, SH., MH**

**NIM: 10302000105**

**DISERTASI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian**
**Guna Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum Ini.**

**Semarang, Agustus 2022**

| PROMOTOR | CO-PROMOTOR |
|---|---|
| **Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.,Akt.,M.Hum** | **Prof. Dr.Hj. Anis Mashdurohatun, SH.,M.Hum** |
| **NIDN. 06-0503-6205** | **NIDN. 06-2105-7002** |

**Mengetahui,**
**Ketua Program Doktor Ilmu Hukum**
**Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung**

**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum**
**NIDN. 06-2105-7002**

## PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan /atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan masukan Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah dipeoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang ,.....

Yang membuat pernyataan,

**AMIR MAHMUD, SH., MH**

**NIM: 10302000105**

# HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**MOTTO :**

*PEKERJAAN YANG PALING SULIT ADALAH PERKERJAAN YANG TIDAK PERNAH DIMULAI*

**PERSEMBAHAN :**

Disertasi ini saya persembahkan kepada:

1. PIMPINAN POLRI
2. ABANG Ir. AROSEKHI ZEGA
3. ISTRI TERCINTA DAN ANAK TERCINTA

# ABSTRAK

Proses penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oknum polisi yang menggunakan narkotika tetap akan diproses hukum walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan kriminal bagi personil Polri yang menggunakan Narkoba belum berbasis nilai keadilan, melakukan rekonstruksi kelemahan-kelemahan kebijakan kriminal bagi personil Polri yang menggunakan Narkoba di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan menganalisis serta merekonstruksi kebijakan kriminal bagi personil Polri yang menggunakan Narkoba berbasis nilai keadilan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap permasalahan, dilakukan dengan melakukan wawancara dengan menghubungkan dengan berbagai aspek hukum dari segi peraturan-peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa oknum kepolisian yang terlibat dalam penggunaan narkotika sebaiknya di rehabilitisi khusus hanya bagi anggota kepolisian. Selain peradilan umum anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga akan ada tambahan lain yaitu dari internal Kepolisian sendiri yang berupa penegakan hukum melalui sidang kode etik polisi. faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pengguna narkotika oleh oknum anggota Kepolisian di Polda Sumatera Utara adalah faktor mental, faktor lingkungan dalam perkerjaan. Faktor mental merupakan faktor dominan yang menyebabkan atau menimbulkan dorongan untuk menggunakan narkoba saat melakukan penyamaran dalam mengungkapkan kasus narkotika yang ada di Sumatera Utara.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pengguna narkotika oleh oknum anggota Kepolisian dan kendala yang dihadapi di Polda Sumatera Utara adalah melakukan upaya penanggulangan secara Non Penal melalui upaya preventif upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pemggunaan narkotika melalui pengendalian dan pengawasan langsung dengan tujuan agar potensi kejahatan itu tidak berkembang menjadi ancaman faktual. Upaya lainnya adalah membuat tempat khusus rehabilitasi bagi oknum anggota Polri yang terlibat atau kecanduann narkotika.


Kata Kunci : Rekonstruksi, Kebijakan Kriminal, Rehabilitasi, Nilai Keadilan

# ABSTRACT

The process of enforcing the code of ethics of the police profession against members of the police who are caught in a criminal case of narcotics abuse will be examined and if proven they will be subject to sanctions. The imposition of disciplinary sanctions and sanctions for violations of the code of ethics does not remove criminal charges against the police officers concerned. Police officers who use narcotics will still be prosecuted even though they have undergone disciplinary sanctions and sanctions for violating the code of ethics.

The purpose of this study is to analyze criminal policies for Polri personnel who use drugs that are not based on the value of justice, reconstruct the weaknesses of criminal policies for Polri personnel who use drugs in the Regional Police of North Sumatra and analyze and reconstruct criminal policies for Polri personnel who use value-based drugs. Justice. This study uses a descriptive method through an empirical juridical approach, namely an approach to problems, carried out by conducting interviews by connecting with various legal aspects in terms of applicable regulations.

Based on the results of the study, it is shown that police officers who are involved in the use of narcotics should be given special rehabilitation only for members of the police. In addition to the general trial of police officers who commit criminal acts, there will also be other additions, namely from the internal police themselves in the form of law enforcement through the trial of the police code of ethics. the factors behind the occurrence of criminal acts of narcotics users by unscrupulous members of the Police at the North Sumatra Regional Police are mental factors, environmental factors at work. The mental factor is the dominant factor that causes or gives rise to the urge to use drugs when undercover in revealing narcotics cases in North Sumatra.

Efforts that can be made in tackling criminal acts of narcotics users by unscrupulous members of the Police and the obstacles faced at the North Sumatra Regional Police are carrying out non-penal countermeasures through preventive efforts. the potential for crime does not develop into a factual threat. Another effort is to build a rehabilitation center for unscrupulous members of the Police who are involved or addicted to narcotics.

Keywords: Reconstruction, Criminal Policy, Rehabilitation, Value of Justice

# RINGKASAN

## A. Latar Belakang Permasalahan

Pidana penjara bukanlah satu-satunya jalan keluar atas tindakan para pelaku pengguna narkotika, masih ada jalan lain yang bisa ditempuh yaitu dengan cara rehabilitasi. Kepolisian mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberantas pengguna Narkoba.

Seorang pengguna Narkoba adalah orang yang sakit, maka harus dirawat di sebuah institusi kesehatan, dalam hal ini adalah rumah sakit atau panti rehabilitasi dan bukan dikriminalisasikan dan dimasukkan ke penjara. Keputusan ini memberikan keringanan bagi para pecandu narkotika dan psikotropika, karena mereka akan dibedakan dengan pengedar narkotika.

Menurut Direktur Narkotika Alami Badan Narkotika Nasional Benny J Mamoto, para pecandu itu adalah korban atau orang sakit yang butuh penyembuhan. Jika semakin banyak orang yang disembuhkan maka angka konsumsi narkotika dan psikotropika akan menurun. Benny menjelaskan pecandu yang sudah melapor menjadi pecandu, maka prosesnya didata dan direhabilitasi. Seperti yang diketahui, pecandu dibawah umur wajib dilaporkan oleh orangtuanya ke instansi yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Bila pecandu telah cukup umur, ia bisa melaporkan dirinya sendiri ke puskesmas, rumah sakit maupun tempat rehabilitasi. Setelah melapor, pecandu akan diberikan kartu identitas rehabilitasi.

Kartu tersebut digunakan untuk menandai pecandu sedang menjalani rehabilitasi. Masalah pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai NARKOBA (Narkotika dan Bahan/Obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidispliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.

Meskipun dalam Kedokteran, sebagian besar golongan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) masih bermanfaat bagi pengobatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran dijalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda.

Maraknya pengguna Narkoba tidak hanya dikota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil diseluruh wilayah Republik Indonesia. Pada era pembangunan nasional Indonesia yang bertujuan mewujudkan manusia atau masyarakat madani *civil society* adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tugas dari polisi sebagai penegak dan pelaksana hokum adalah untuk mengamankan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia” polisi juga diberi kewenangan untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana. Diatur juga tentang Kode Etik Profesi dalam “Peraturan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri." Keberadaan polisi adalah inti dari pelaksanaan sistem peradilan serta wajib melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai penegak hokum. Tetapi tidak dipungkiri juga ada beberapa oknum yang menyalahgunakan kewenangnya yaitu mengonsumsi barang haram tersebut.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh institusi kepolisian dalam rangka meminimalisir bahkan menghilangkan adanya keterlibatan anggota polisi terhadap masalah narkotika, baik dalam bentuk pemberian pembekalan yang disampaikan pada saat dilaksanakanya pendidikan pembentukan Bintara maupun Perwira, sampai dengan upaya tindakan tegas bagi anggota yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkotika melalui proses peradilan umum dan diperberat dengan mengajukanya kesidang Kode Etik Profesi Polri yang sanksi hukumanya hingga pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas kepolisian. Kurangnya pengawasan dari institusi penegak hokum ialah latar belakang penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh oknom kepolisan.

Akhirnya menimbulkan anggapan pesimis dari kesuksesan aparat kepolisian untuk pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, yang akhirnya menimbulkan saran dari masyarakat awam yang tidak sedikit agar dikehendakinya penetapan hukuman yang berat bukan hanya surat peringatan untuk para aparat polisi yang melanggarnya. Sehingga diharapkan dapat tercapainya visi misi dari penetapan sanksi pidana yang dimana untuk menimbulkan efek jera kepada semua orang yang sudah melanggar peraturan tindak pidana tanpa melihat dari latar belakang orang yang melakukan tindak pidana itu, hal ini diharapkan bisa menjadi sarana penegakan hukum pidana oleh para aparat kepolisian. Terlebih lagi yang melakukan perbuatan tindak pidana itu ialah berasal dari aparat kepolisian. Sudah pasti yang diharapkan ialah pertanggungjawaban dalam bentuk sanksi, baik pidana ataupun penetapan sanksi oleh instansi yang terlibat agar dijatuhkan sanksi yang berat agar hal ini bisa dijadikan pengingat oleh para aparatur negara untuk tidak melakukan kesalahan yang sama.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh institusi Kepolisian dalam rangka meminimalisir bahkan menghilangkan adanya keterlibatan anggota Polisi terhadap masalah narkoba, baik dalam bentuk pemberian pembekalan yang disampaikan pada saat dilaksanakanya pendidikan pembentukan Bintara maupun Perwira. Penyalahgunaan Narkotika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik. Meskipun demikian terkadang beberapa jenis obat masih dipakai dalam dunia kedokteran, namun hanya diberikan bagi pasien-pasien tertentu, bukan untuk dikonsumsi secara umum dan bebas oleh masyarakat. Oleh karena itu obat dan narkotik yang disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai akibat yang beraneka ragam. Dampak tidak langsung narkoba yang disalahgunakan

a. Akan banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan pecandu jika tubuhnya rusak digerogoti zat beracun.
b. Dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang baik-baik. Selain itu biasanya tukang candu narkoba akan bersikap anti sosial.
c. Keluarga akan malu besar karena punya anggota keluarga yang memakai zat terlarang.

d. Tidak dipercaya lagi oleh orang lain karena umumnya pecandu narkoba akan gemar berbohong dan melakukan tindak kriminal.
e. Dosa akan terus bertambah karena lupa akan kewajiban Tuhan serta menjalani kehidupan yang dilarang oleh ajaran agamanya.
f. Bisa dijebloskan ke dalam tembok derita / penjara yang sangat menyiksa lahir batin.

Tindakan pengawasan secara internal baik oleh bidang pengawasan (Inspektorat) maupun bidang Propam (Profesi dan pengamanan internal), baik dengan metode berkala maupun inspeksi mendadak (sidak) yang disertai test urine kepada seluruh anggota Polri dan PNS Polri dari golongan atau pangkat yang paling rendah ( Bintara ) sampai dengan Perwira Tinggi ( Jendral ) yang dilakukan bekerja sama dengan Badan Nasional Narkotika Propinsi ( BNNP), demikian pula upaya tindakan tegas bagi anggota yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba melalui proses peradilan umum dan diperberat dengan mengajukanya kesidang Kode Etik Profesi Polri yang sanksi hukumanya hingga pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas kepolisian.

Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksana sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Namun ada beberapa oknum polisi yang bahkan ikut menyalahgunakan wewenangnya dengan ikut menggunakan dan mengedarkan obat-obat terlarang atau narkotika.

Ditinjau dari data kasus tindak pidana yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal dan Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk priode tahun 2018 kasus 2.651 TSK 3.881, tahun 2019 kasus 2.733 TSK 3.461 dan sampai Februari 2020 kasus 2.480 TSK 3.155, dapat dikatakan bahwa secara umum kasus tindak pidana narkotika masih cukup tinggi ditinjau dari pelanggaran yang terjadi setiap tahunnya.

Disamping itu berdasarkan data yang disampaikan Kabid Propam Polda Sumatera Utara Kasubbidwabprof Bapak Dadi Purba, SH., MH bahwa personil Polda Sumatera Utara yang menyalahgunakan Narkoba pada Tahun 2019 sebanyak 18 pers tahun 2020 sebanyak 34 pers dan tahun 2021 sebanyak 25 orang. Secara sederhana, berdasarkan data tersebut di atas dapat dikatakan bahwa telah terjadi peningkatan perilaku kejahatan atau tindak pidana dari tahun ke tahun, terutama mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta modus operandinya.

Peningkatan angka tindak pidana umum berkorelasi signifikan dengan intensitas tindak pidana narkotika yang terjadi, bahkan termasuk juga dengan modus operandi serta sifat dari perbuatan yang menjurus kepada perilaku sadisme dan brutal.

1. Sehubungan dengan hal itu, jika ditinjau lebih mendalam isi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengganti dan mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun1997 tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3698, dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671, maka akan ditemukan minimal 3 (tiga) klasifikasi yang termasuk pelaku tindak pidana narkotika. Produsen, yakni pembuat atau peracik narkotika secara melawan hukum *(illegal);*

2. Pengedar, yakni orang-perorangan atau kelompok orang yang langsung atau tidak langsung menjual, menyampaikan atau melakukan transaksi kepada pengguna dan atau pemakai narkotika, baik dalam jumlah besar (bandar) maupun dalam jumlah kecil (pengecer); dan
3. Pengguna, yakni orang-orang yang menyalahgunakan narkotika secara melawan hukum, termasuk para pecandu yang tingkat ketergantungan narkotikanya tinggi.

Pentingnya pengelompokan peranan pelaku dalam tindak pidana narkotika tersebut di atas didasarkan pada kasus faktual yang telah, sedang, dan yang akan ditangani oleh para penegak hukum di Indonesia, khususnya dijajaran kepolisian. Peran pelaku di dalam tindak pidana narkotika akan berpengaruh atau berdampak pada pertanggungjawaban pidananya, yaitu berat dan atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan. Kecuali itu, bagi anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika ada sanksi khusus non-penal atau sanksi administratif.

Kebijakan penerapan sanksi non-penal dan administratif bagi anggota Polri sejalan dan searah dengan perkembangan pluralisme hukum. Globalisasi tidak berarti uniformasi sistem hukum, karena masingmasing sistem hukum itu adalah *culturally specific,* sehingga teori dan ilmu hukum saat ini seharusnya diarahkan menjadi *globality* conscious sekaligus *plurality conscious* dan *sensitive.*

Dengan demiikian permasalahan globalisasi menjadi satu hal yang niscaya karena konsekuensi yang harus diterima sebagai zaman yang terus dinamis ke arah perkembangan sekaligus kemajuan.

Mengingat jumlah anggota Polri di Kepolisian daerah Sumatera Utara yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika cukup tinggi, sangat di khawatirkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tugas pokok dari Polri itu sendiri. maka perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah dan pimpinan Polri untuk mencari faktor penyebab, upaya-upaya pencegahan untuk meminimalisasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan serta penegakan hukum dan, pemberian sanksi pidana (*penal policy*) dan non penal terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika demi tercapainya keamanan dalam negeri yang kondusif.

Diharapkan terwujudnya postur Polri yang profesional, bermoral dan modern pada salah satu butir misinya dinyatakan bahwa misi Polri adalah Pengelola secara professional, transparan, akuntabell dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri.

Anggota kepolisian terjerat narkoba dari tahun ke tahun. Berdasarkan catatan Polri, anggota Korps Bhayangkara yang menjadi pemakai bahkan pengedar narkoba terus naik.

Selama tiga tahun terakhir sejak 2018, anggota kepolisian yang terlibat kasus narkoba tak pernah kurang dari 100. Pada 2018, polisi yang terseret kasus narkoba

mencapai 297 orang. Jumlah tersebut naik sekitar dua kali lipat pada 2019 menjadi 515 orang. Sementara pada 2020, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan pihaknya telah memecat 113 anggotanya karena terlibat pelanggaran berat sepanjang Januari-Oktober tahun lalu.

Dari jumlah tersebut, mayoritas anggota terlibat pelanggaran kasus narkoba. Namun, Argo tak merinci berapa anggota polisi yang melakukan pelanggaran pidana narkoba.

Disisi lain khususnya upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkoba belum dilaksanakan secara tuntas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah mengatur secara jelas dalam pasal – pasal tertentu tentang perbedaan hukuman yang harus dilakukan terhadap pelaku Kejahatan Narkoba sesuai dengan peran yang dilakukannya sebagai penyalahguna Narkotika.

Sementara itu pelaksanaan rehabilitasi yang menjadi ruh dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini belum dilaksanakan secara maksimal dan hampir semua kasus Narkotika yang diserahkan penyidik untuk diperiksa dan diadili berakhir dengan putusan penjara. Namun demikian untuk menentukan sebuah putusan terhadap seorang terdakwa penyalahguna Narkotika untuk dijatuhkan/ditetapkan hukuman rehabilitasi,seorang Hakim harus benar – benar mempertimbangkan berdasarkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Ketergantungan saja yang menjadi wajib untuk direhabilitasi sebagaimana bunyi Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Artinya bahwa mereka yang mendapatkan layanan rehabilitasi adalah penyalahgunaan narkotika berdasarkan pada tingkat keparahan penggunanya.

Penyalahguna narkotika dalam hal ini Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika mempunyai posisi sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya, yakni masalah pecandu narkotika menurut ketentuan undang-undang, di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun di sisi lain merupakan korban.

Pecandu narkotika menurut undang-undang di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah dengan adanya ketentuan pidana di dalam undang-undang narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian, di sisi lainnya dapat dikatakan bahwa menurut undang-undang narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.

Hal ini berarti undang-undang di satu sisi masih menganggap pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya. Penyalahgunaan narkotika dalam kepustakaan kriminologi dianggap sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) dimana korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, dalam artian korban adalah pelaku dan pelaku adalah korban. Ia menjadi pelaku dan korban sekaligus,penamaan ini merujuk pada sifat kejahatan tersebut, yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan namun keduanya tidak menderita kerugian atas pihak yang lain.

Apabila dihubungkan dengan permasalahan kedudukan korban dalam tindak pidana narkotika, kedudukan korban tersebut dapat termasuk dalam kategori *self victimizating victims* menurut Stephen Schafer. Dalam perspektif viktimologis, pelaku tindak pidana tersebut adalah *mutual victimization* atau *self victimizating victims*, karena pelaku tidak sadar bahwa dia adalah korban dari kejahatanyang dilakukan oleh dirinyasendiri, korban berpartisipasi penuh terhadap kejahatan tersebut karena korban adalah pelaku. Pecandu sendiri dalam Undang-undang narkotika ini disebutkan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Sedangkan penyalahguna narkotika dijelaskan adalah Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Para ahli membedakan keduanya dengan penjelasana bahwa pecandu adalah penyalahguna narkotika, namun penyalahguna narkotika belum tentu dapat dikatakan sebagai pecandu. Pecandu dan penyalahguna narkotika pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah dan mereka itu semua merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun Negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang.

Karena itu bagaimanapun tingkat kesalahannya, para korban tersebut masih diharapkan dapat menyadari bahwa apa yang telah diputus oleh majelis hakim atas kesalahan mereka adalah merupakan suatu cara atau sarana agar mereka meninggalkan perbuatan tersebut setelah selesai menjalani masa hukuman.

Undang-undang narkotika mempunyai tujuan dalam politik kriminal, yakni untuk mewujutkan masyarakat indonesia yang sejahtera, adil dan makmur, yang merata mareriil dan spirituil. Meningkatkan derajat kesehatan manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyrakat, penguatan kualitas pelayanan kesehatan. Berbicara mengenai kebijakan hukum pidana, tentunya tidak terlepas dan pengertian kebijakan itu sendiri, Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada si pembuat undangundang tetapi juga kepada pengadilan dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang. Oleh karena itu kelemahan atau kesalahan kebijakan pidana dapat dipandang sebagai kesalahan yang sangat strategis, karena hal ini dapat menghambat penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*socialwelfare*).

Dengan demikian, wajar pula apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan terhadap masyarakat.

Dalam hal ini peranan peraturan hukum sangat besar kaitannya dengan pelaksanaan peraturan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dapat diartikan pula bahwa keberhasilan atau kegagalan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya telah dimulai sejak peraturan hukum tersebut dibuat. Misalnya, badan legislatif atau instansi yang berwenang membuat peraturan tersebut telah membuat peraturan yang sulit dilaksanakan oleh masyarakat, sejak saat itulah awal kegagalan produk peraturan yang dibuat oleh badan tersebut. Hal ini dapat diakibatkan dalam peraturan tersebut memerintahkan sesuatu hal yang tidak didukung oleh sarana yang mencukupi, akibatnya, peraturan tersebut gagal untuk dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Dengan demikian Kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas / kejahatan (*Criminal Policy*) harus merupakan bagian integral (tak terpisahkan) dari kebijakan yang berorientasi untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*). Dalam kesempatan lain Sudarto menjelaskan politik kriminal merupakan "suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menaggulangi kejahatan". Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai "*The Rational Organization of the Control of Crime by Society*".

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah "perlindungan masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat". Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (*social policy*) yaitu kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan berorientasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat.

## B. Perumusan Masalah

Bertolak dari uraian tersebut di atas**,** untuk mencari dan menemukan solusi yang tepat dan benar berkaitan dengan kebijakan penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota Kepolisian, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa Kebijakan Kriminal bagi personil Polri yang menggunakan Narkoba belum berbasis nilai keadilan?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan kebijakan criminal bagi personil Polri yang menggunakan Narkoba di Polda Sumatera Utara ?
3. Bagaimana rekonstruksi kebijakan criminal bagi personil Polri yang menggunakan Narkoba berbasis nilai keadilan ?

## C. Tujuan Penelitian

Bertitiktolak dari fokus masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain untuk:

1. Menganalisis Kebijakan Kriminal bagi personil Polri yang menggunakan Narkoba belum berbasis nilai keadilan.
2. Melakukan rekonstruksi kelemahan-kelemahan kebijakan criminal bagi personil Polri yang menggunakan Narkoba di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

3. Menganalisis serta merekonstruksi kebijakan criminal bagi personil Polri yang menggunakan Narkoba berbasis nilai keadilan.

## D. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka sifat penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normative dan yuridis empiris. Namun begitu, untuk mencari dan menemukan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan akan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini dilakukan melalui kajiankajian tentang asas-asas dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban seorang anggota Polri, peran maupun fungsinya serta sanksi pidana dan sanksi administratif (non-penal) yang berlaku terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di samping itu juga dilakukan pengkajian singkronisasi hukum berkaitan dengan pelaksanaan sistem dan mekanisme dalam rangka penerapan norma dan aturan Kode Etik Profesi bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai wujud perlindungan atau kepastian hukum guna tercapainya tujuan untuk merealisasikan nilai-nilai Tribrata Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kaitan dengan permasalahan ini, penelitian deskriftif analitis dengan menggunakan perpaduan antara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis sosiologis oleh Soetandyo Wigjosoebroto disebut sebagai suatu penelitian hukum yang ingin meggambarkan atau mendeskripsikan suatu aturan atau norma yang tersedia di dalam kenyataannya. Dengan kata lain penelitian ini ingin menggambarkan bagaimana sebenarnya proses dan mekanisme pelaksanaan penerapan kebijakan pidana *(penal policy)* dan non-penal terhadap anggota Polri yang terbukti telah melakukan tindak pidana menggunakan narkotika di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Penelitian ini dilaksanakan di dalam Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Alasan memilih lokasi penelitian di Poldasu antara lain karena tingginya kasus atau perkara pengguna narkotika yang terjadi, khususnya pengguna narkotika yang dilakukan anggota Polri serta letak atau posisi Sumatera Utara yang berdekatan dengan Negara tetangga seperti Singapore, Malaysia dan Brunai Darussalam, sehingga memungkinkan Sumatera Utara menjadi tempat transit (keluar dan masuknya) narkotika di Indonesia. Di samping itu, alasan pemilihan lokasi penelitian di Poldasu juga dipengaruhi oleh keterbatasan waktu, biaya dan tenaga serta refrensi yang tersedia. Sedangkan isu sentral penelitian yang dibahas dan dicari/ditemukan solusi pemecahannya akan menjadi pendukung kinerja peneliti yang bertugas sebagai Danyon C di Kesatuan Brimob Polda Sumut.

## E. Hasil Penelitian Disertasi

## KEBIJAKAN KRIMINAL BAGI PERSONIL POLRI YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

### A. KEBIJAKAN PENAL

Pada pembahasan selanjutnya dijelaskan mengenai pemidanaan yang berisi tentang pengertian pemidanaan, kebijakan pemidanaan, dan tujuan pemidanaan. Pembahasan ini sangat penting adanya, karena secara mendasar terlebih dahulu dikemukakan permasalahan pemidanaan ini, sehingga diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman terhadap istilah pemidanaan tersebut. Oleh karena itu pada pembahasan ini mengarah kebijakan penal *policy* dalam menanggulangi anggota Polri pada umumnya, dan khususnya bagi anggota Polri Daerah Sumatera Utara.

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini pemidanaan merupakan "perwujudan dari celaan tersebut".

Chairul Huda menyatakan memang pengertian pemidanaan secara logika dan kebahasaan berisi tentang (dasar) penjatuhan pidana. Secara abolisionis seperti Hulsman masih mengakui pidana jika hal itu mendapat legitimasi. Dikatakannya, sekarang kata 'pidana' tidak netral lagi; dia sudah mengandung tuntutan atas legitimasi. Legitimasi yang dituntutnya di sini adalah persetujuan pembuat. Dalam konteks pembahasan penelitian ini, legitimasi atas pemidanaan hanya dapat dipenuhi jika pembuat memiliki kesalahan dalam melakukan tindak pidana. Minya, pembuat setuju menerima pidana, jika kesalahannya dapat dibuktikan.

Pencegahan terhadap pelaku kejahatan yaitu membujuk si pelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan;

1. Pencegahan terhadap pelaku yang potensial, dalam hal ini memberikan rasa takut kepada orang lain yang potensial untuk melakukan kejahatan dengan melihat contoh pidana yang telah dijatuhkan kepada si pelaku sehingga mendatangkan rasa takut akan kemungkinan dijatuhkan pidana kepadanya;
2. Perbaikan si pelaku, yaitu memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dan ancaman pidana;
3. Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan, sehingga dengan cars ini, secara tidak langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan;
4. Melindungi masyarakat melalui pidana penjara yang cukup lama.

Pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan merupakan isu yang sangat relevan dengan kondisi sosial politik saat ini. Hal ini masih diwarnai oleh pengalaman masa lalu akan adanya pengabaian dan ketidakhormatan atas hukum, yang sekaligus mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap hukum yang sebagian masih pula terjadi hingga kini.

Perubahan sosial yang begitu cepat dan kekosongan atau runtuhnya wibawa hukum memberi konstribusi untuk mendorong perilaku peradilan rakyat, terutama

pada awal masa yang disebut sebagai reformasi. Disisi lain penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polri, baik yang dilakukan ketika menjalankan tugas maupun diluar tugasnya yang selanjutnya berkembang menjadi opini publik, semakin memperburuk citra penegakan supremasi hukum di Indonesia. Salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja Polri saat ini adalah tegaknya supremasi hukum, keluar maupun ke dalam institusi Polri, yang merupakan komitmen yang dideklarasikan dan diamanatkan kepada pemerintah oleh para pencetus reformasi.

Melalui penegakan supremasi hukum, Iangkah terbaik adalah penegakan yang dimulai dari aparat penegak hukum dalam artian Polri. Karena dalam pelaksanaan tugas maupun diluar tugas tidak jarang ditemui anggota Polri melakukan tindak pidana. Permasalahannya adalah, ketika anggota Polri terlibat dalam suatu tindak pidana, kemudian penyidiknya dari fungsi Reserse Polri. Hal ini sangat mempengaruhi obyektifitas penegakannya, karena disinyalir muncul rasa tidak tega dalam keseriusan melakukan penyidikan. Demikian juga dengan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) yang dirasakan kurang obyektif dalam melakukan penindakan terhadap anggotanya bahkan membebaskan tersangka dari jeratan hukuman pidana.

Penyidik Polri dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika memiliki tahapan yang jelas serta proses yang terperinci dimana semua didasarkan atas aturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik tindak pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan atau pengekangan hakhak azasi seseorang dalam rangka usaha untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karenanya, penyidik tindak pidana sebagai salah satu tahap dari pada penegakan hukum pidana harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Penyidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan proses penyidikan setara dengan pelaku tindak pidana Iainnya tanpa ada pengecualian. Kedudukan Polri sebagai penyidik yang mandiri tak dapat terlepas dari fungsi penuntutan dan pengadilan, dimana terjalin adanya hubungan koordinasi fungsional dan instansional serta adanya sinkronisasi pelaksanaan.

Pelaksanakan penyidikan, maka penyidik dalam hal ini terikat pada suatu koridor yang dijadikan patokan dalam pelaksanaan penyidikan yaitu berupa petunjuk pelaksana yang mana merupakan penjabaran dari naskah fungsi Reserse Polri dengan maksud untuk memberikan pedoman dan penjelasan mengenai proses penyidikan tindak pidana sehingga diperoleh keseragaman pengertian tentang kegiatan-kegiatan pokok yang harus dilaksanakan dalam hal ini adalah penanganan penyalahgunaan narkotika.

Untuk mencapai tujuan rehabilitasi sebagai tahap pemulihan bagi penyalahguna narkoba dilaksanakan dengan pembinaan. Hal ini sejalan dengan pemikiran-pemikiran baru tentang fungsi pemidanaan yang tidak lagi bersifat penjeraan tetapi telah berubah menjadi suatu usaha yang rehabilitatif dan reintegratif dengan tujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana lagi dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang

bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan masyarakat serta berguna bagi nusa dan bangsa.

Strategi rehabilitasi ini dilakukan untuk mengobati para penyalahguna narkoba, dengan melakukan pengobatan secara medis, sosial dan spiritual serta upaya untuk mencegah menjalarnya penyakit HIV/AIDS karena pemakai jarum suntik oleh penyalahguna narkoba secara bergantian. Agar mereka yang sudah diberikan rehabiltasi tidak menjadi penyalahguna lagi, perlu dilakukan upaya pencegahan lebih lanjut.

## 2. KELEMAHAN KEBIJAKAN KRIMINAL BAGI PERSONIL POLRI YANG MENGGUNAKAN NARKOBA DI POLDA SUMATERA UTARA

Pada dasarnya berbagai faktor penyebab dapat mempengaruhi seseorang individu untuk melakukan tindak pidana. Faktor-faktor itu sebagaimana telah diuraikan di atas meliputi keadaan ekonomi, pendidikan yang rendah, atau karena tidak memiliki sumber pendapatan yang tetap (mocok-mocok) atau ada pekerjaan tetap akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari, serta kombinasi dari berbagai hal di luar diri pelaku kejahatan (pengaruh lingkungan sosial).

Berkaitan dengan hal tersebut, maka naluri seseorang termasuk Anggota Polri untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan yang akibat perbuatannya diancam dengan sanksi pidana merupakan pilihan dari si pelaku kejahatan itu sendiri, seperti karena unsur keterpaksaan. Artinya, perbuatan tindak pidana yang diperbuat oleh pelaku khususnya dalam kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, seperti faktor tidak memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang cukup dan lain sebagainya jadi tidak relevan, terutama apabila pelakunya adalah seorang anggota Polri yang mempunyai kepribadian kokoh dan sikap mental (moral) yang baik sehingga dapat menghindarkan penyalahgunaan narkotika yang dilarang/diancam sanksi pidana, serta sanksi Kode Etik Profesi Polri yang berlaku dalam peraturan internal Kepolisian Republik Indonesia.

Sejalan dengan faktor-faktor penyebab anggota Polri melakukan kejahatan khususnya penyalahgunaan narkotika, menurut AKBP Juliana Situmorang, SH /Bidkum Polda Sumut karena faktor usia muda, sifatnya ikut-ikutan teman dan kalau tidak ikut mencoba memakai narkotika dianggap kurang macho (kurang jantan) tetapi akhirnya ketagihan. Faktor ekonomi sebagai penyebab kecil kemungkinannya sebab Polri punya penghasilan tetap setiap bulan, kalaupun ada disebabkan ingin memperoleh uang banyak untuk memiliki barang-barang luks atau barang mahal seperti kenderaan, hp, rumah mewah dan lain-lain. Sedangkan faktor dari keluarga; Broken Home dan Broken Heart sehingga menggunakan narkotika sebagai pelarian, tidak lebih sebagai alasan pembenaran saja.

Menyatakan lebih lanjut bahwa bagi anggota Polri yang masih mungkin dibina akan diberikan sanksi administratif seperti penempatan dalam tempat khusus dan lain- lainya. Tetapi kalau anggota Polri itu sudah sering melakukan pelanggaran hukum, bahkan menjadi pengedar narkotika maka akan berikan saran

dan pendapat hukum untuk diberhentikan dengan tidak hormat melalui sidang Kode Etik dan sidang Disiplin Polri.

Kaitannya dengan faktor penyebab seorang Anggota Polri melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika baik sebagai pengguna atau pemakai, pengedar dan peracik/produsen, maka dapat dikatakan bahwa faktor dominan yang berperan adalah karena pelaku tidak mampu mengendalikan hawa nafsu atau karena ada peluang dan atau kesempatan akibat dari pengaruh kebiasaan bergaul pelaku dengan orang-orang tertentu yang sebenarnya merupakan target operasi kepolisian. Contohnya, seorang Anggota Polri yang berstatus sebagai intel atau bertugas di bagian reserse. Karena tugasnya, yang bersangkutan disadari atau tidak akan selalu berhubungan dengan orang¬orang atau pelaku tindak pidana, bahkan dalam kasus-kasus tertentu seperti untuk membongkar jaringan mafia perdagangan orang (traffiking), pembalakan hutan (illegal loging) atau narkotika yang melibatkan berbagai pihak dan adakalanya melibatkan kalangan elite atau pejabat tinggi, maka anggota Polri tersebut harus dapat berprilaku dan bersikap sebagaimana layaknya para pelaku tindak pidana dimaksud.

Apabila petugas atau anggota Polri yang melakukan tugas penyamaran balk sebagai intel maupun petugas reserse mempunyai sikap mental yang balk atau memiliki kepribadian yang kokoh maka yang bersangkutan dapat menghindarkan godaan dan pengaruh ketergantungan pada jenis obat-obatan terlarang. Begitu pula halnya dalam konteks kejahatan perdagangan orang atau traffiking untuk tujuan eksploitasi (seks, mempekerjakan seseorang dengan cara kekerasan atau dengan cara bujuk rayu dan lain-lain), atau dalam tindak pidana pembalakan hutan "illegal logging" maka petugas Polri balk yang berperan sebagai intel maupun reserse harus dapat beradaptasi bahkan adakalanya mesti bermukim/berdomisili dan bergaul dengan para pelaku kejahatan di mana tempat terjadinya tindak pidana bersangkutan.

Melalui fakta tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pendapat ahli kriminologi seperti Lambroso yang menyatakan sebab seseorang menjadi penjahat karena faktor keturunan atau bawaan sejak lahir, karena kurang beres pikiran atau gila, dan karena pengaruh dari minuman alkohol/minuman keras tidak terbukti, kecuali pendapatnya yang menegaskan bahwa faktor penyebab seseorang melakukan perbuatan tindak pidana khususnya yang disengaja karena adanya dorongan hawa nafsu yang tidak terkendali serta kesempatan atau pengaruh kebiasaan.

Pendapat Seelig mengenai sebab seseorang menjadi penjahat antara lain karena faktor dari diri sendiri yang lemah jiwanya sehingga tidak dapat menahan godaan dari luar untuk melakukan perbuatan agresif dan menyimpang dari norma yang berlaku dalam pergaulan masyarakat seperti mencuri, merampok, memeras dan menipu, khususnya menyalahgunakan narkotika untuk menikmati dan membiayai kehidupan glamor atau berfoya-foya, yang jelas-jelas terlarang sedangkan hal tersebut di luar kemampuan yang dimilikinya, sangat relevan

dengan fakta atau kasus inconcreto yang terjadi saat ini, terutama anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, biologis, psikologis dan social.
Dampak pemakaian dan penyalahgunaan narkoba lebih menimbullkan efek buruk bagi pemakai itu sendiri maupun bagi lingkungan sekitarnya. Bagi pemakai sendiri, pemakaian dan penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan keadaan seperti gangguan konsentrasi, penurunan daya ingat, penyimpangan tingkah laku dan berbagai akibat buruk lainnya.Sedangkan lingkungan sosialnya, pemakai dan penyalahgunaan narkoba berdampak pada terjadinya pertikaian antar warga, hubungan kekerabatan menjadi renggang bahkan bisa putus atau menimbulkan penyakit sosial seperti penyimpangan seks, pencurian, penodongan, dan lain sebagainya.

## 3. REKONSTRUKSI KEBIJAKAN KRIMINAL BAGI PERSONIL POLRI YANG MENGGUNAKAN NARKOBA BERBASIS NILAI KEADILAN

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

a) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
b) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.
c) Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
d) Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Dalam upaya rehabilitasi ini penyidik Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara mendasari pada peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

a) Permohonan tertulis untuk dilakukan rehabilitasi dari keluarga atau penasehat hukum pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.
b) Rekomendasi dari hasil gelar perkara.
c) Berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi.
d) Hasil test kit urine/pemeriksaan laboratories dan
e) Barang bukti dalam jumlah tertentu (apabila tertangkap tangan/hasil Razia dengan barang bukti ada padanya).

Indonesia juga sudah memiliki pengalaman mengelola Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) yang diinisiasi sejak 2003 lalu. Selain menurunkan angka penularan HIV/AIDS melalui penggunaan narkoba suntik, program ini bisa meningkatkan kualitas hidup konsumennya. “Kalau dikelola baik itu bakal sangat pengaruh, berarti pasar gelap tidak ada, bandar pada mati. Kalau masih seperti sekarang, barang tetap ada tapi harga tinggi. Kalau tidak ada duit (buat beli

narkoba) ya ujungnya kriminal. Hidup juga pasti tidak benar," kata Adi Marcel, pasien terapi Metadon.

Sementara itu Negara tetangga Singapura mengambil langkah langkah dalam pemberantasan narkoba, setelah adanya Konvensi Tunggal Narkotika yang dilakukan di Jenewa pada tahun 1997. Pemerintah Singapura berencana membuat suatu badan yang khusus menangani prerdaran
narkotika di Singapura. Pemerintah Singapura meminta Manby juga mendukung usulan pemerintah untuk mendirikan suatu badan atau biro narkotika nasional di Singapura.

## F. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari permasalahan diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang terlibat dalam penggunaan narkotika dapat dilihat dari perbuatan yang mereka lakukan. Penegakan hukum pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penggunaan narkotika berlaku bagi semua orang yakni di mata hukum sama. Proses hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana sudah sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oknum polisi harus melaksanakan sidang kode etik kepolisian, dan jika terbukti bersalah dengan dijatuhi hukuman diatas 5 (lima) tahun, maka oknum polisi tersebut dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat dari instansinya atau dicopot jabatannya dan jika hukuman yang dijatuhkan kurang dari 5 (lima) tahun maka oknum polisi tersebut masih bisa dipertimbangkan, apakah hanya diberikan sanksi disiplin atau dimutilasi ke suatu tempat yang jauh dari narkoba.
2. Menyadari bahwa ancaman bahaya yang ditimbulkan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang telah meresahkan masyarakat, maka untuk itu dilakukan upaya penanggulangan dengan mengunakan sarana penal maupun sarana non penal. Kedua sarana ini (penal dan non penal) merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Penegakan hukum dengan sarana penal merupakan salah satu aspek saja dari usaha masyarakat menanggulangi kejahatan. Disamping itu masih dikenal usaha masyarakat menanggulangi kejahatan melalui sarana non penal. Usaha non penal dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya non penal ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non penal. Proses penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus

pidana penyalahgunaan narkotika akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oknum polisi yang menggunakan narkotika tetap akan diproses hukum walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Oknum polisi disangkakan menggunakan narkotika dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun pada kenyataannya, penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika belum terlaksana dengan baik dimana masih banyak oknum polisi yang terlibat penggunaan narkoba tidak direhabilitasi

3. Pihak penyidik Polri cendrung memproses tersangka pencandu narkotika, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika untuk dihukum penjara daripada direhabilitiasi. Oknum polisi harus melaksanakan sidang kode etik kepolisian, dan jika terbukti bersalah dengan dijatuhi hukuman diatas 5 (lima) tahun, maka oknum polisi tersebut dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat dari instansinya atau dicopot jabatannya dan jika hukuman yang dijatuhkan kurang dari 5 (lima) tahun maka oknum polisi tersebut masih bisa dipertimbangkan, apakah hanya diberikan sanksi disiplin atau dimutilasi ke suatu tempat yang jauh dari narkoba.
4. Proses penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oknum polisi yang menggunakan narkotika tetap akan diproses hukum walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.. Anggota kepolisian yang terlibat tindak pidana dan sedang diproses di dalam pengadilan biasanya statusnya diberhentikan sementara dalam pekerjaannya dan bisa juga sampai dilakukan pemecatan apabila memang tidak dapat dipertahankan lagi dalam pekerjaannya.

Oknum Polri yang menggunakan obat-obatan terlarang selain dijatuhkan sanksi pidana yang terdapat dalam UU Narkotika, ikut turut dijatuhkan sanksi oleh instansi yang bersangkutan yang dinamakan sanksi admistratif. Sesuai pasal 13 huruf b yang menjelaskan tentang tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu menegakan hukum, seluruh aparat kepolisian diharuskan untuk menjalankan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua bentuk tindak pidana. Apabila aparat kepolisan sendiri yang melanggar suatu ketentuan yang termasuk dalam tindak pidana maka

hal tersebut tidak sesuai dengan tugas pokok dari polri, sebab polrilah yang seharusnya menjadi contoh warga negara Indonesia dalam menegakan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.

## G. SARAN – SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka merekomendasikan saran-saran sebagai berikut:

a. Perlunya dikembalikan kepada aturan hukum dimana korban penggunaan narkoba harus mendapatkan rehabilitasi sebagaimana amanat dalam Pasal 127 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga untuk mendapatkan rasa keadilan bagi korban serta para penegak hukum mampu menerapkan keadilan yang bersifat religius dengan menetapkan sangsi atau tahapan sesuai dengan aturan yang ada, atau dengan bahasa lain sesuai dengan standart operasional yang telah ditentukan. Selain itu pula pihak pemerintah sudah sewajarnya serta selayaknya memberikan atau menyediakan tempat rehabilitasi sebagaimana amanat dari undang-undang diantaranya Rumah Sakit, Panti Sosial, Serta Pondok Pesantren yang ditunjuk bahkan ditetapkan oleh pemerintah untuk pelaksanaan rehabiltasi, perlu diperhatikan pula kapasitas untuk menampung harus mampu mewadahi keseluruhan.

b. Perlunya peningkatan klasifikasi pendidikan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimilki oleh institusi penegakan hukum dalam hal ini adalah penangan terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba guna terciptanya institusi yang berintegritas, selain itu pula perlu dilakukan peningkatan kemampuan SDM yang dimiliki dengan memberikan pelatihan-pelatihan secara khusus, sehingga nantinya para SDM memiliki kejurusan atau keahlian tersendiri dalam menangani peredaran narkoba. Terkait dengan peningkatan SDM dengan pelatihan sudah sewajarnya pemerintah memberikan fasilitas tersebut, mengingat peredaran narkoba di Indonesia sudah dalam kategori darurat dan termasuk juga dalam kejahatan luar biasa. Agar tindak pidana Narkoba tidak terjadi lagi di kalangan anggota Polri perlu sering mengadakan pengawasan terhadap anggotanya, berupa pengawasan saat melakukan penyamaran saat anggota Polri harus terjun langsung dalam komunitas pengguna narkotika guna memperoleh informasi maupun sasaran.

c. Bagi anggota Polri yang sudah terlibat dalam pengunaan Narkoba sebaiknya segera melaporkan diri kepada atasannya untuk segera di rekomendasikan rehabilitasi. Pemerintah sudah sangat perlu merekonstruksi anggota Polri yang terlibat dalam pengguna Narkoba dibuat pusat rehabilitasi khusus bagi anggota Polri yang terlibat kecanduan Narkoba. Bagi masyarakat pula perlu peningkatan kesadaran, partisipasi atau peran aktif untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang adanya tindakan penggunaan narkoba, perlu diketahui juga bagi

masyarakat bahwa apabila ada salah satu pihak keluarga yang menjadi pecandu narkoba dan kemudian diantar atau diserahkan kepada pihak yang berwajib maka akan dterima dengan baik dan akan menjalani rehabilitasi.

## H. Implikasi Disertasi

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penelitian yang dilakukan, maka terdapat implikasi berdasarkan kajian yang telah dilakukan dan diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi kemajuan penegakan hukum di Indonesia. Implikasi kajian disertasi yang peneliti maksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran baru dalam persoalan oknum anggota Polri yang terlibat kecanduan atau pengguna Narkoba dengan cara melakukan reorientasi paradigma pemikiran konsep pengguna menjadi pasien dengan landasan keadilan yang progresif yang artinya berlandaskan pada nilai keadilan hukum yang berkembang saat ini

## I. Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan implikasi hasil penelitian, maka peneliti memberikan rekomendasi bagi pemerintah baik eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk mengarahkan oknum Kepolisian yang terlibat dalam pengguna Narkoba diberikan tempat khusus rehabilitasi khusus bagi oknum Polisi yang kecanduan narkoba. Hal ini dimaksud agar dalam rehabilitasi, oknum polisi pencandu itu diharapkan dapat kembali pada kesatuannya masing-masing untuk menjadi Polisi yang Presisi sebagaimana yang dicita-citakan.

# SUMMARY

A. Background of the Problem

Imprisonment is not the only way out for the actions of narcotics users, there are other ways that can be taken, namely by way of rehabilitation. The police have a very important role in eradicating drug users.

A drug user is a sick person, so he must be treated in a health institution, in this case a hospital or rehabilitation center and not criminalized and put in prison. This decision provides relief for narcotics and psychotropic addicts, because they will be distinguished from narcotics dealers.

According to the Director of Natural Narcotics of the National Narcotics Agency Benny J Mamoto, the addicts are victims or sick people who need healing. If more people are cured, the consumption of narcotics and psychotropic substances will decrease. Benny explained that addicts who have reported being addicts, then the process is recorded and rehabilitated. As is known, underage addicts must be reported by their parents to the agency appointed by the government. When the addict is old enough, he can report himself to the puskesmas, hospital or rehabilitation center. After reporting, addicts will be given a rehabilitation ID card.

The card is used to mark addicts undergoing rehabilitation. The problem of users of Narcotics, Psychotropics and other Addictive Substances (Drugs) or a term that is popularly known to the public as Narcotics (Narcotics and Dangerous Materials/Drugs) is a very complex problem, which requires comprehensive countermeasures by involving multidisciplinary, multi-sectoral, and multi-sectoral cooperation. and the community actively which is carried out continuously, consistently and consistently.

Although in Medicine, most of the Narcotics and other Addictive Substances (Drugs) are still beneficial for treatment, but if they are misused or used not according to medical indications or treatment standards, especially if accompanied by illegal circulation, it will result in very detrimental effects for individuals and the wider community in particular. young generation.

The rise of drug users is not only in big cities, but has reached small towns throughout the territory of the Republic of Indonesia. In the era of Indonesia's national development which aims to create a just, prosperous, prosperous and peaceful human or civil society based on Pancasila and the 1945 Constitution.

The duty of the police as law enforcers and implementers is to secure the security of the Unitary State of the Republic of Indonesia. In "Law Number 22 of 2002 concerning the Indonesian National Police" the police are also given the authority to eradicate and prevent criminal acts. It also regulates the Code of Professional Ethics in the "Regulation of the Head of the Indonesian National Police for the National Police." The existence of the police is the core of the implementation of the justice system and is obliged to carry out its authority and duties as law enforcers. But it is undeniable that there are also some people who abuse their authority, namely consuming these illicit goods.

Various efforts have been made by police institutions in order to minimize or even eliminate the involvement of police officers in narcotics issues, both in the

form of providing briefings delivered during the implementation of education for the formation of NCOs and Officers, to taking firm action for members who are proven to be involved in narcotics abuse. through the general judicial process and aggravated by submitting it to the trial of the Police Professional Code of Ethics whose punishment is up to dismissal or dishonorable discharge from the police service. The lack of supervision from law enforcement institutions is the background to the abuse of illegal drugs by police officers.

In the end, it gave rise to a pessimistic perception of the success of the police in eradicating drug abuse and trafficking, which ultimately led to suggestions from the general public that not a few were required to impose severe penalties, not just warning letters to police officers who violated them. So that it is hoped that the vision and mission of the determination of criminal sanctions can be achieved which is to create a deterrent effect on all those who have violated the rules of crime regardless of the background of the person who committed the crime, this is expected to be a means of enforcing criminal law by the police. . Moreover, the perpetrators of the crime are from the police. Of course, what is expected is accountability in the form of sanctions, whether criminal or the imposition of sanctions by the agencies involved so that severe sanctions can be imposed so that this can be used as a reminder by state officials not to make the same mistake.

Various efforts have been made by the Police institution in order to minimize or even eliminate the involvement of Police members in drug problems, both in the form of providing briefings that were delivered during the implementation of education for the formation of NCOs and Officers. Narcotics abuse can cause negative effects and impacts for the user. The negative impact is definitely detrimental and has a very bad effect on mental and physical health. However, sometimes certain types of drugs are still used in the medical world, but are only given to certain patients, not for general consumption and free by the public. Therefore, drugs and narcotics that are misused can cause various kinds of consequences. Indirect effects of abused drugs

a. A lot of money will be needed for the healing and health care of addicts if their bodies are damaged by toxic substances.
b. Excluded in society and the association of good people. In addition, drug addicts are usually anti-social.
c. Families will be ashamed because they have family members who use illegal substances.
d. No longer trusted by others because generally drug addicts will like to lie and commit crimes.
e. Sins will continue to increase because they forget God's obligations and live a life that is forbidden by their religious teachings.
f. Can be thrown into the wall of suffering / prison that is very torturous physically and mentally.

Internal control measures both by the field of supervision (Inspectorate) and the field of Propam (Profession and internal security), both by periodic methods and sudden inspections (sidak) accompanied by urine tests to all members of the National Police and PNS Polri from the lowest class or rank (

Non-commissioned officers) to high-ranking officers (General) which are carried out in collaboration with the Provincial National Narcotics Agency (BNNP), as well as efforts to take firm action for members who are proven to be involved in drug abuse through the general judicial process and are made worse by submitting them to the trial of the Police Professional Code of Ethics which is subject to sanctions. the punishment is up to dismissal or dishonorable discharge from the police service.

The police as implementers and law enforcers have the task of maintaining public security and order, upholding the law and providing protection, protection, and services to the community based on Law No. 2 of 2002 Article 13. The existence of the police as the spearhead in the initial position of implementing the judicial system is mandatory. carry out their duties and authorities as law enforcers. However, there are some police officers who even participate in abusing their authority by participating in the use and distribution of illegal drugs or narcotics.

Judging from the data on criminal cases handled by the Directorate of Criminal Investigation and the Director of the Narcotics Investigation of the North Sumatra Regional Police for the period 2018 cases of 2,651 TSK 3,881, in 2019 cases 2,733 TSK 3,461 and until February 2020 cases 2,480 TSK 3,155, it can be said that in general cases Narcotics crime is still quite high in terms of violations that occur every year.

In addition, based on data submitted by the Head of Propam, North Sumatra Regional Police, Kasubbidwabprof, Mr. Dadi Purba, SH., MH, that North Sumatra Police personnel who abused drugs in 2019 were 18 people, in 2020 there were 34 people and in 2021 there were 25 people. In simple terms, based on the data above, it can be said that there has been an increase in criminal behavior or criminal acts from year to year, especially regarding the crime of narcotics abuse and its modus operandi.

The increase in the number of general crimes is significantly correlated with the intensity of narcotics crimes that occur, even including the modus operandi and the nature of the acts that lead to sadistic and brutal behavior.

1. In this regard, if we review more deeply the contents of the provisions of Article 1 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which replaces and revokes Law Number 22 of 1997 concerning Narcotics, State Gazette of 1997 Number 67, Supplement to the State Gazette Number 3698, and Law Number 5 of 1997 concerning Psychotropics, State Gazette of 1997 Number 10, Supplement to the State Gazette Number 3671, it will be found at least 3 (three) classifications which include narcotics criminals. Producers, namely the manufacture or compounding of narcotics against the law (illegal);
2. Dealers, namely individuals or groups of people who directly or indirectly sell, deliver or conduct transactions to narcotics users and or users, both in large quantities (porters) or in small quantities (retailers); and
3. Users, namely people who abuse narcotics against the law, including addicts with a high level of narcotic dependence

The importance of grouping the roles of perpetrators in narcotics crimes is based on factual cases that have been, are being, and will be handled by law enforcers in

Indonesia, especially in the ranks of the police. The role of the perpetrator in a narcotics crime will affect or have an impact on his criminal responsibility, namely the severity and or lightness of the sentence to be imposed. In addition, for members of the National Police who are proven to have committed narcotics crimes, there are special non-penal sanctions or administrative sanctions.

The policy of implementing non-penal and administrative sanctions for members of the National Police is in line and in line with the development of legal pluralism. Globalization does not mean the uniformity of the legal system, because each legal system is culturally specific, so that legal theory and science today should be directed to be globality conscious as well as plurality conscious and sensitive.

Thus, the problem of globalization becomes a necessary thing because of the consequences that must be accepted as an era that continues to be dynamic in the direction of development as well as progress.

Considering the high number of Polri members in the North Sumatra Regional Police who commit criminal acts of narcotics abuse, they are very concerned about disturbing the stability of security and order, law enforcement, as well as protection, shelter and service to the community in accordance with the main tasks of the Polri itself. Therefore, special attention is needed from the government and the leadership of the National Police to look for causal factors, preventive efforts to minimize violations committed and law enforcement and, providing criminal sanctions (penal policy) and non-penal against members of the National Police who commit criminal acts of narcotics abuse. in order to achieve conducive domestic security.

It is hoped that the realization of a professional, moral and modern Polri posture. In one of its mission points it is stated that the National Police's mission is to manage professionally, transparently, accountable and modernly all Polri resources to support the operational tasks of the Police.

Police officers are caught in drugs from year to year. Based on Police records, Bhayangkara Corps members who are users and even drug dealers continue to rise.

In the last three years since 2018, there have never been less than 100 police officers involved in drug cases. In 2018, 297 police officers were involved in drug cases. This number has approximately doubled in 2019 to 515 people. Meanwhile, in 2020, the Head of the Public Relations Division of the National Police Inspector General Pol Argo Yuwono said his party had fired 113 members for being involved in serious violations during January-October last year.

Of these, the majority of members are involved in drug offenses. However, Argo did not specify how many police officers had committed drug offences.

On the other hand, in particular, efforts to eradicate drug abuse have not been carried out completely as referred to in Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics which has clearly regulated in certain articles regarding the different punishments that must be carried out against the perpetrators of Drug Crimes in accordance with the role they play as Narcotics abusers.

Meanwhile, the implementation of rehabilitation which is the spirit of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics has not been implemented optimally and

almost all Narcotics cases submitted by investigators for examination and trial ended with a prison sentence. However, to determine a decision against a defendant who abuses Narcotics to impose a rehabilitation sentence, a judge must really consider based on the recommendations of the Integrated Dependency Assessment Team only those who are obliged to be rehabilitated as stated in Article 54 of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. This means that those who receive rehabilitation services are narcotics abusers based on the severity of the users.

Narcotics abusers in this case addicts and victims of narcotics abuse have a slightly different position from other criminal offenders, namely the problem of narcotics addicts according to the provisions of the law, on the one hand they are perpetrators of narcotics abuse crimes, but on the other hand they are victims.
Narcotics addicts according to the law, on the one hand, are perpetrators of criminal acts of narcotics abuse, with the existence of criminal provisions in the narcotics law which regulates imprisonment given to perpetrators of narcotics abuse. Then, on the other hand, it can be said that according to the narcotics law, the narcotic addict is a victim, it is indicated by the provision that narcotics addicts can be sentenced to rehabilitation.

This means that the law on the one hand still considers narcotics addicts as perpetrators of criminal acts, and on the other hand they are victims of narcotics abuse. Narcotics abuse in the criminology literature is considered a victimless crime where the victim and the perpetrator are single or one, in the sense that the victim is the perpetrator and the perpetrator is the victim. He becomes the perpetrator and the victim at the same time, this naming refers to the nature of the crime, namely the existence of two parties who carry out transactions or relationships but both do not suffer losses to the other party.
If it is related to the problem of the position of the victim in a narcotics crime, the position of the victim can be included in the category of self-victimizing victims according to Stephen Schafer. In a victimological perspective, the perpetrators of these crimes are mutual victimization or self-victimizing victims, because the perpetrator is not aware that he is a victim of a crime committed by himself, the victim participates fully in the crime because the victim is the perpetrator. Addicts themselves in this Narcotics Act are mentioned as people who use or abuse Narcotics and are in a state of dependence on Narcotics, both physically and psychologically.

Meanwhile, narcotics abusers are explained as those who use narcotics without rights or against the law. Experts distinguish the two by explaining that addicts are narcotics abusers, but narcotics abusers cannot necessarily be said to be addicts. Narcotics addicts and abusers are basically victims of narcotics crime abuse that violates government regulations and they are all Indonesian citizens who are expected to be able to build this country from adversity in almost all fields.

Therefore, regardless of the level of guilt, the victims are still expected to be aware that what has been decided by the panel of judges for their mistakes is a way or means for them to leave the act after serving their sentence.

The narcotics law has a goal in criminal politics, namely to realize a prosperous, just and prosperous Indonesian society, which is materially and spiritually equitable. Improving the degree of human health in order to realize the welfare of the community, strengthening the quality of health services. Talking about criminal law policy, of course, it cannot be separated from the understanding of the policy itself, Marc Ancel stated that criminal policy (penal policy) is a science as well as an art which ultimately has a practical purpose to enable positive legal regulations to be formulated better and to provide guidelines not to only to the legislators but also to the courts and also the organizers or implementers of court decisions that apply the law. Therefore, the weakness or error of criminal policy can be seen as a very strategic error, because this can hinder the prevention of crime with criminal law. In addition, efforts to combat crime through the making of criminal laws (laws) are essentially also an integral part of efforts to protect society (social defense) and efforts to achieve community welfare (social welfare).

Thus, it is also natural that criminal law policies or politics are also an integral part of social policies or policies. Social policy can be interpreted as all rational efforts to achieve public welfare and at the same time include the protection of the community.

In this case, the role of legal regulations is very large in relation to the implementation of legal regulations carried out by law enforcement officers. It can also be interpreted that the success or failure of law enforcement officers in carrying out their duties has started since the legal regulations were made. For example, the legislature or the agency authorized to make these regulations have made regulations that are difficult for the public to implement, since that was the beginning of the failure of the regulatory products made by the agency. This can be caused by the regulation ordering something that is not supported by adequate facilities, as a result, the regulation fails to be implemented by law enforcement officials.

Thus the policy to tackle crime/crime (criminal policy) must be an integral part (inseparable) of policies that are oriented to providing community protection (social defense policy) and efforts to achieve public welfare (social welfare policy). On another occasion, Sudarto explained that criminal politics is "a rational effort from the community in dealing with crime". This definition is taken from the definition of Marc Ancel who formulates it as "The Rational Organization of the Control of Crime by Society".

Therefore it can be said that the ultimate goal or main goal of criminal politics is "protection of society and to achieve public welfare". Thus, it can be said that criminal politics is essentially also an integral part of social politics, namely policies or rational efforts to achieve social welfare and are oriented towards fulfilling people's rights.

## B. Problem Formulation

Starting from the description above, in order to seek and find the right and correct solution related to the narcotics crime prevention policy carried out by members of the Police, the following problems are formulated:

1. Why is the Criminal Policy for Police personnel who use drugs not based on the value of justice?
2. What are the weaknesses of criminal policies for Polri personnel who use drugs at the North Sumatra Regional Police?
3. How is the reconstruction of criminal policies for Polri personnel who use drugs based on the value of justice?

## C. Research Objectives

Starting from the focus of the problem that has been formulated above, the objectives of this study include:

1. Analyzing the Criminal Policy for Polri personnel who use drugs has not been based on the value of justice.
2. Reconstructing the weaknesses of criminal policies for Polri personnel who use drugs in the North Sumatra Regional Police.
3. Analyzing and reconstructing criminal policies for Polri personnel who use drugs based on the value of justice.

## D. Research Method

Based on the formulation of the problem that has been stated above, the nature of the research carried out is normative juridical research and empirical juridical research. However, to seek and find answers to the formulation of the problem posed, we will use a normative juridical approach and a sociological juridical approach. The normative juridical approach in this study is carried out through studies of legal principles and norms relating to the rights and obligations of a member of the National Police, their roles and functions as well as criminal sanctions and administrative sanctions (non-penal) that apply to members of the National Police. Indonesian National Police.

In addition, a legal synchronization study is also conducted regarding the implementation of systems and mechanisms in the context of implementing the norms and rules of the Professional Code of Ethics for members of the Indonesian National Police as a form of protection or legal certainty in order to achieve the goal of realizing the Tribrata values of the Indonesian National Police.

In connection with this problem, analytical descriptive research using a combination of a normative juridical approach and a sociological juridical approach by Soetandyo Wigjosoebroto is referred to as a legal research that wants to describe or describe a rule or norm that is available in reality. In other words, this study wants to describe how the actual process and mechanism for implementing the implementation of criminal policies (penal policy) and non-penal against members of the National Police who are proven to have committed criminal acts using narcotics in the jurisdiction of the Regional Police of North Sumatra.

This research was conducted within the Legal Area of the Regional Police of North Sumatra. The reasons for choosing the research location at Poldasu were, among others, because of the high number of cases or cases of narcotics users, especially narcotics users carried out by members of the National Police and the location or position of North Sumatra which was close to neighboring countries

such as Singapore, Malaysia and Brunei Darussalam, thus enabling North Sumatra to become a place for research. transit (exit and entry) of narcotics in Indonesia. In addition, the reasons for choosing a research location at Poldasu were also influenced by the limitations of time, cost and manpower as well as available references. Meanwhile, the central issues of research that are discussed and solutions are sought/found will support the performance of the researcher who serves as Danyon C in the Brimob Unit of the North Sumatra Police.

**E. Dissertation Research Results**

CRIMINAL POLICY FOR POLICE PERSONNEL THAT USE NARCOTICS IS NOT BASED ON JUSTICE VALUE

In the next discussion, it is explained about sentencing which contains the meaning of punishment, sentencing policies, and the purpose of sentencing. This discussion is very important, because fundamentally the problem of punishment is first raised, so that it is hoped that it can add insight and understanding to the term punishment. Therefore, this discussion leads to a policy of penal policy in dealing with members of the National Police in general, and in particular for members of the Regional Police of North Sumatra.

Sentencing is the most important part in criminal law, because it is the culmination of the entire process of holding accountable someone who has been guilty of a crime. Criminal law without punishment means to declare a person guilty without any definite consequences for his guilt. Thus, the conception of guilt has a significant influence on the imposition of punishment and the process of its implementation. If the error is understood as "reproachable", then here punishment is "the embodiment of the reproach".

Chairul Huda stated that the definition of punishment logically and linguistically contains the (basic) imposition of a criminal. An abolitionist like Hulsman still recognizes a crime if it has legitimacy. He said that now the word 'criminal' is no longer neutral; he already contains demands for legitimacy. The legitimacy it demands here is maker approval. In the context of the discussion of this research, the legitimacy of sentencing can only be fulfilled if the maker has made a mistake in committing a crime. Minya, the maker agrees to accept the punishment, if the guilt can be proven.

Prevention of the perpetrators of crimes, namely persuading the perpetrators to refrain or not to violate the law again through their memories of the sentence imposed;

1. Prevention of potential perpetrators, in this case giving fear to other people who have the potential to commit crimes by looking at the examples of crimes that have been imposed on the perpetrator so as to create fear of the possibility of being sentenced to him;
2. Improvement of the perpetrator, namely improving the behavior of the perpetrator so that the perpetrator's awareness appears to tend not to commit another crime even though there is no fear and criminal threat;

3. Educate the public to think more seriously about the occurrence of crime, so that with this method, it can indirectly reduce the frequency of crime;
4. Protecting the community through long imprisonment.

Violation of the law and abuse of authority are issues that are very relevant to the current socio-political conditions. This is still colored by past experiences of neglect and disrespect for the law, which at the same time results in distrust of the law, some of which still occur today.

The rapid social changes and the vacuum or the collapse of the authority of the law contributed to encouraging the behavior of the people's judiciary, especially at the beginning of the so-called reformation period. On the other hand, irregularities committed by members of the National Police, both when carrying out their duties and outside their duties, which subsequently developed into public opinion, further worsened the image of the rule of law enforcement in Indonesia. One of the benchmarks for the success of Polri's current performance is the upholding of the rule of law, both outside and within the Polri institution, which is a commitment declared and mandated to the government by the reformers.

Through the enforcement of the rule of law, the best step is enforcement starting from law enforcement officers in the sense of the Police. Because in carrying out their duties and outside their duties, it is not uncommon for members of the Police to commit criminal acts. The problem is, when a member of the National Police is involved in a criminal act, then the investigator is from the Police Detective function. This greatly affects the objectivity of its enforcement, because it is suspected that there is a sense of inadequacy in the seriousness of conducting an investigation. Likewise, superiors who have the right to punish (Ankum) are felt to be less objective in taking action against their members and even freeing suspects from criminal punishment.

Police investigators in dealing with criminal acts of narcotics abuse have clear stages and detailed processes, all of which are based on applicable laws and regulations. Criminal investigators are essentially a law enforcement effort that limits and/or curbs a person's human rights in an effort to restore the disturbed balance between individual interests and public interests in order to maintain public security and order. Therefore, criminal investigators as one of the stages of criminal law enforcement must be carried out based on the provisions and laws and regulations in force in the Republic of Indonesia.

Investigations of members of the National Police who commit criminal acts of narcotics abuse are carried out an investigation process equivalent to those of other criminal acts without any exceptions. The position of the National Police as an independent investigator cannot be separated from the prosecution and court functions, where there is a functional and institutional coordination relationship and synchronization of implementation.

In carrying out the investigation, the investigator in this case is bound to a corridor that is used as a benchmark in carrying out the investigation, namely in the form of implementing instructions which are an elaboration of the script of the Police Investigation function with the aim of providing guidelines and explanations regarding the process of investigating criminal acts so that a uniform

understanding of the activities can be obtained. The main activity that must be carried out in this case is the handling of narcotics abuse.

To achieve the goal of rehabilitation as a stage of recovery for drug abusers, it is carried out with coaching. This is in line with new ideas about the function of punishment which is no longer a deterrent but has turned into a rehabilitative and reintegrative effort with the aim of making prisoners aware of their mistakes, not repeating criminal acts again and being able to return to being responsible citizens for themselves. family and society as well as useful for the homeland and nation.

This rehabilitation strategy is carried out to treat drug abusers, by carrying out medical, social and spiritual treatment as well as efforts to prevent the spread of HIV/AIDS due to injecting needle users by drug abusers alternately. So that those who have been given rehabilitation do not become abusers again, it is necessary to take further prevention efforts.

## 2. WEAKNESSES OF CRIMINAL POLICY FOR POLRI PERSONNEL USING DRUGS AT THE POLDA OF NORTH SUMATRA

Basically, various causal factors can influence an individual to commit a crime. The factors as described above include economic conditions, low education, or because they do not have a fixed source of income (mocok-mocok) or there is a permanent job but the income is not sufficient to meet the costs of daily living needs, as well as a combination of from various things outside the perpetrators of the crime (the influence of the social environment).

In this regard, the instinct of a person including members of the National Police to commit a crime whose consequences are threatened with criminal sanctions is the choice of the perpetrator himself, such as because of the element of compulsion. This means that criminal acts committed by the perpetrators, especially in relation to the crime of narcotics abuse, such as the factor of not having a permanent job or sufficient income and so on are irrelevant, especially if the perpetrator is a member of the National Police who has a strong personality and mental attitude. good morals) so as to prevent the misuse of narcotics which is prohibited/threatened with criminal sanctions, as well as sanctions for the Police Professional Code of Ethics applicable in the internal regulations of the Indonesian National Police.

According to the AKBP Juliana Situmorang, SH /Bidkum Polda Sumut, because of the young age factor, his nature is joining friends and if he does not participate in trying to use narcotics, he is considered less macho (less manly) but ultimately addicted. Economic factors as a cause are unlikely because the Police have a steady income every month, even if there is it is because they want to get a lot of money to have luxury goods or expensive items such as vehicles, cellphones, luxury homes and others. While the factors from the family; Broken Home and Broken Heart so that they use narcotics as an escape, nothing more than justification.

Stated further that for members of the Police who are still possible to be fostered will be given administrative sanctions such as placement in a special place and others. However, if the member of the National Police has often violated the law, even become a narcotics dealer, he will provide legal advice and opinions to be dishonorably dismissed through the Code of Ethics trial and the Police Disciplinary Session.

In relation to the factors that cause a Police Member to commit a criminal act of narcotics abuse, either as a user or user, dealer and compounder/producer, it can be said that the dominant factor that plays a role is because the perpetrator is unable to control his lust or because there are opportunities and or opportunities as a result of the influence the perpetrator's habit of associating with certain people who are actually the targets of police operations. For example, a member of the National Police who has the status of an intelligence officer or is assigned to the detective department. Because of his duties, the person concerned is aware or not always in contact with people or perpetrators of criminal acts, even in certain cases such as to dismantle the mafia network of trafficking in persons (trafficking), forest logging (illegal logging) or narcotics involving various parties and sometimes involving elites or high-ranking officials, the members of the National Police must be able to behave and behave as the perpetrators of the crime in question.

If the officer or member of the National Police who carries out the task of undercover either as an intelligence officer or a detective officer has a good mental attitude or has a strong personality, then the person concerned can avoid the temptation and influence of dependence on illegal drugs. Likewise, in the context of the crime of trafficking in persons or trafficking for the purpose of exploitation (sex, employing someone by means of violence or by means of persuasion, etc.), or in the crime of logging "illegal logging", the police officers either act as intelligence and detectives must be able to adapt and even sometimes have to live/domicile and associate with the perpetrators of the crime where the crime scene is concerned.

Through the facts mentioned above, it can be said that the opinion of criminologists such as Lambroso who states that the reason a person becomes a criminal is due to heredity or congenital, due to lack of thought or madness, and because of the influence of drinking alcohol / liquor is not proven, except for his opinion which affirms that the factors that cause a person to commit criminal acts, especially those that are intentional, are due to uncontrolled lust and opportunity or the influence of habit.

Seelig's opinion regarding the reason why a person becomes a criminal is partly due to factors from oneself who are weak in spirit so that they cannot withstand external temptations to commit aggressive acts and deviate from the norms that apply in social interaction such as stealing, robbing, extorting and cheating, especially abusing narcotics for sexual purposes. enjoying and paying for a glamorous or extravagant life, which is clearly forbidden while it is beyond their capabilities, is very relevant to the facts or inconcreto cases that are currently happening, especially members of the National Police who are proven to have committed a criminal act of drug abuse.

Narcotics abuse is a problem that involves all aspects of human life, both physical, biological, psychological and social.

The impact of drug use and abuse causes more adverse effects for the users themselves and for the surrounding environment. For the users themselves, the use and abuse of drugs can cause conditions such as impaired concentration, memory loss, behavioral deviations and various other bad consequences. Meanwhile, the social environment, drug users and abuse have an impact on disputes between residents, kinship relations become tenuous and can even break. or cause social ills such as sexual deviation, theft, mugging, and so on.

## 3. RECONSTRUCTION OF CRIMINAL POLICY FOR POLRI PERSONNEL USING JUSTICE VALUE-BASED DRUGS

Narcotics addicts and victims of narcotics abuse are required to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation.

a) Medical rehabilitation for Narcotics Addicts is carried out at a hospital appointed by the Minister.
b) Certain rehabilitation institutions organized by government agencies or the public may carry out medical rehabilitation for Narcotics Addicts after obtaining approval from the Minister.
c) In addition to medical treatment and/or rehabilitation, the healing of Narcotics Addicts can be carried out by government agencies or the community through religious and traditional approaches.
d) Social rehabilitation of former Narcotics Addicts is carried out both by government agencies and by the community.

In this rehabilitation effort, investigators from the Directorate of Drugs at the North Sumatra Police based on the following laws and regulations:

a) Written request for rehabilitation from the family or legal adviser of narcotic addicts and victims of narcotics abuse.
b) Recommendations from the results of the case title.
c) Minutes of examination of suspects and witnesses.
d) Result of urine test kit/laboratory examination and
e) Evidence in a certain amount (if caught red-handed/results of a raid with evidence on hand).

Indonesia also has experience in managing the Methadone Maintenance Therapy Program (PTRM), which was initiated in 2003. In addition to reducing the rate of transmission of HIV/AIDS through the use of injecting drugs, this program can improve the quality of life of its consumers. “If it is managed well, it will have a lot of influence, meaning that there is no black market, the city will die. If it's still like now, the goods are still there but the price is high. If there is no money (to buy drugs) then the end is criminal. Life is definitely not right either,” said Adi Marcel, a methadone therapy patient.

Meanwhile, Singapore's neighboring country took steps to eradicate drugs, after the Single Convention on Narcotics was held in Geneva in 1997. The Singapore government plans to create a body that specifically handles drug trafficking.

drugs in Singapore. The Singapore government asked Manby to also support the government's proposal to establish a national narcotics agency or bureau in Singapore.

## F. CONCLUSION

Based on the discussion of the problems above, the authors can provide the following conclusions:

1. Criminal responsibility for members of the police who are involved in the use of narcotics can be seen from the actions they commit. The enforcement of criminal law against members of the police who commit criminal acts of narcotics use applies to everyone, namely in the eyes of the law the same. The legal process against police officers who commit criminal acts is in accordance with Article 29 paragraph (1) of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. Police officers must carry out a hearing on the police code of ethics, and if proven guilty by being sentenced to a sentence of more than 5 (five) years, then the police officer can be dishonorably dismissed from his agency or removed from his position and if the sentence imposed is less than 5 (five) years then the police officer can still be considered, whether only given disciplinary sanctions or mutilated to a place far from drugs.
2. Realizing that the threat of danger posed as a result of drug abuse has been troubling the community, therefore efforts are made to overcome it by using penal and non-penal means. These two facilities (penal and non-penal) are a pair that cannot be separated from each other, it can even be said that they complement each other in efforts to combat crime in society. Law enforcement by means of a penal is just one aspect of the community's efforts to tackle crime. Besides that, it is still known that the community's efforts to tackle crime through non-penal means. Non-penal efforts in tackling crime are closely related to penal efforts. This non-penal effort by itself will greatly support the implementation of criminal justice in achieving its goals. Prevention and eradication of drug abuse must be carried out with an integral approach, namely between penal and non-penal means. The process of enforcing the code of ethics for the police profession against members of the police who are caught in a case Narcotics abuse will be investigated and if proven, sanctions will be imposed. The imposition of disciplinary sanctions and sanctions for violations of the code of ethics does not remove criminal charges against the police officers concerned. Police officers who use narcotics will still be prosecuted even though they have undergone disciplinary sanctions and sanctions for violating the code of ethics. Police officers who are suspected of using narcotics and subject to investigation must still be considered innocent until proven through a court decision that has permanent legal force (the principle of presumption of innocence) as stipulated in Article 8 paragraph (1) of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power. However, in reality, the enforcement of the police professional code of ethics against members of the police who are entangled in criminal cases of narcotics abuse has not been carried out properly where there are still many police officers involved in drug use that are not rehabilitated.

3. Police investigators tend to process suspected narcotics addicts, abusers and victims of narcotics abuse to be sentenced to imprisonment rather than rehabilitation. Police officers must carry out a hearing on the police code of ethics, and if proven guilty by being sentenced to a sentence of more than 5 (five) years, then the police officer can be dishonorably dismissed from his agency or removed from his position and if the sentence imposed is less than 5 (five) years then the police officer can still be considered, whether only given disciplinary sanctions or mutilated to a place far from drugs.
4. The process of enforcing the code of ethics of the police profession against members of the police who are entangled in criminal cases of narcotics abuse will be examined and if proven they will be subject to sanctions. The imposition of disciplinary sanctions and sanctions for violations of the code of ethics does not remove criminal charges against the police officers concerned. Police officers who use narcotics will still be prosecuted even though they have undergone disciplinary sanctions and sanctions for violating the code of ethics. Police officers who are involved in criminal acts and are being processed in court are usually temporarily suspended in their work and can also be fired if they cannot be maintained again at work.

Police officers who use illegal drugs in addition to being imposed with criminal sanctions contained in the Narcotics Law, are also subject to sanctions by the relevant agencies which are called administrative sanctions. In accordance with Article 13 letter b which explains the main task of the Indonesian National Police, namely to enforce the law, all police officers are required to carry out investigations and investigations into all forms of criminal acts. If it is the police officers themselves who violate a provision which is included in a criminal act, then the this is not in accordance with the main task of the national police, because it is the police who should be an example for Indonesian citizens in enforcing applicable laws and regulations.

## G. SUGGESTIONS

Based on these conclusions, then recommend the following suggestions:

a. The need to return to the rule of law where victims of drug use must receive rehabilitation as mandated in Article 127 paragraph (3) of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics so that in order to get a sense of justice for victims and law enforcers, they are able to apply religious justice by setting sanctions or stages in accordance with existing rules, or in other languages according to predetermined operational standards. In addition, the government is also appropriate and should provide or provide rehabilitation places as mandated by the law including hospitals, social institutions, and Islamic boarding schools that are appointed and even set by the government for the implementation of rehabilitation. .
b. It is necessary to increase the classification of education for Human Resources (HR) owned by law enforcement institutions in this case are handlers related to drug abuse cases in order to create institutions with integrity, besides that it is also necessary to increase the capacity of human resources owned by providing special training , so that later the HR has its own major or expertise in dealing

with drug trafficking. Regarding the increase in human resources with training, it is natural for the government to provide these facilities, considering that drug trafficking in Indonesia is already in the emergency category and is also included in extraordinary crimes. So that drug crimes do not occur again among members of the National Police, it is necessary to carry out frequent supervision of their members, in the form of supervision when undercover when members of the Police have to go directly to the community of narcotics users in order to obtain information and targets.

c. For members of the Police who have been involved in the use of drugs, they should immediately report themselves to their superiors for immediate recommendation for rehabilitation. The government urgently needs to reconstruct Polri members who are involved in drug users and make a special rehabilitation center for Polri members involved in drug addiction. For the community, it is also necessary to increase awareness, participation or active role in reporting to the authorities about any acts of drug use. masyarakat bahwa apabila ada salah satu pihak keluarga yang menjadi pecandu narkoba dan kemudian diantar atau diserahkan kepada pihak yang berwajib maka akan dterima dengan baik dan akan menjalani rehabilitasi.

## H. Dissertation Implications

Based on the results of the research and analysis of the research conducted, there are implications based on the studies that have been carried out and are expected to provide added value for the progress of law enforcement in Indonesia. The implication of this dissertation study is that the researcher intends to contribute new ideas in the matter of unscrupulous members of the Police who are involved in addiction or drug users by reorienting the paradigm of thinking about the concept of a user being a patient with a progressive basis of justice, which means based on the values of legal justice that are currently developing.

## I. Recommendations

Based on the findings and implications of the research results, the researchers provide recommendations for the government, both executive, legislative and judicial to direct police officers involved in drug users to be given a special place for special rehabilitation for police officers who are addicted to drugs. This is so that in rehabilitation, it is hoped that the addicted police officers can return to their respective units to become the Precise Police as aspired to.

# KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunianya Penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Penulisan disertasi ini, berawal dari pengamatan dan kepedulian Penulis terhadap beberapa oknum anggota dari Kepolisian yang terlibat atas penggunaan Narkotika dan Obatan-Obatan terlarang. . Oleh karena itu penulis mengajukan judul disertasi "REKONSTRUKSI KEBIJAKAN KRIMINAL BAGI PERSONIL POLRI PENGGUNA NARKOBA BERBASIS NILAI KEADILAN (STUDI PADA POLDA SUMATERA UTARA)"

Melalui penelitian ini penulis ingin mengembangkan atau membuat suatu program untuk memfasilitasi oknum anggota Polri yang terlibat dalam penggunaan Narkoba untuk direhabilitasi khusus bagi anggota Polri.

Disertasi ini dipersiapkan untuk memenuhi persyaratan agar dapat memenuhi syarat memperoleh gelar doktor dalam bidang ilmu hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semoga disertasi ini memenuhi kriteria/persyaratan untuk menyelesaikan program doktor bidang ilmu hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Penulis mengharapkan penulisan disertasi hingga selesai nantinya disertasi ini dapat bermanfaat.

Medan, Agustus 2022

Penulis

Amir Mahmud

# DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... i
HALAMAN PENGESAHAN ..... ii
HALAMAN DEWAN PENGUJI UJIAN TERTUTUP/TERBUKA ..... iii
KATA PENGANTAR ..... iv
PERNYATAAN ..... x
ABSTRAK ..... xi
ABSTRACT ..... xii
RINGKASAN. ..... xix
SUMMARY ..... xxiv
DAFTAR ISI ..... xxix
BAB I : PENDAHULUAN ..... 1
A. Latar Belakang Permasalahan ..... 1
B. Perumusan Masalah ..... 20
C. Tujuan Penelitian ..... 20
D. Manfaat Penelitian ..... 21
E. Kerangka Teori ..... 22
F. Kerangka Konsep ..... 40
G. Keaslian Penelitian ..... 42
H. Metode Penelitian ..... 42
1. Spesifikasi Penelitian ..... 42
2. Metode Pendekatan ..... 44
3. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel ..... 44
4. Teknik Pengumpulan Data ..... 46
5. Prosedur Pengumpulan Data ..... 47
6. Analisis Data ..... 48
7. Sistematika Penulisan ..... 48

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA ..... 50
A. Kebijakan Kriminal ..... 50
B. Penggolongan Narkotika ..... 71
C. Tindak Pidana Narkoba ..... 76
D. Kepolisian Republik Indonesia Sebagai Penegak Hukum ..... 90

BAB III : KEBIJAKAN KRIMINAL BAGI PERSONIL POLRI YANG MENGGUNAKAN NARKOBA BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN ..... 105
A. Kebijakan Penal ..... 105
B. Kebijakan Non Penal ..... 155

BAB IV : KELEMAHAN KEBIJAKAN KRIMINAL BAGI PERSONIL POLRI YANG MENGGUNAKAN NARKOBA DI POLDA SUMATERA UTARA ..... 182
A. Tinjauan Kriminologi Terhadap Terjadinya Kejahatan ..... 182
B. Faktor Penyebab Anggota Polri Menggunakan Narkoba di Wilayah Polda Sumatera Utara ..... ..... 213

BAB V : REKONSTRUKSI KEBIJAKAN KRIMINAL BAGI PERSONIL POLRI YANG MENGGUNAKAN NARKOBA BERBASIS NILAI KEADILAN ..... 255
A. Rekonstruksi Nilai Nilai Pemidanaan Bagi Anggota Polri Pengguna Narkotika ..... 255
B. Rekonstruksi Nilai Nilai Rehabilitasi Bagi Anggota Polri Penyalahguna dan Pecandu Narkoba ..... 294

BAB VI : PENUTUP
A. Kesimpulan ..... 315
B. Saran ..... 319

# BAB - I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pidana penjara bukanlah satu-satunya jalan keluar atas tindakan para pelaku pengguna narkotika, masih ada jalan lain yang bisa ditempuh yaitu dengan cara rehabilitasi. Kepolisian mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberantas pengguna Narkoba.

Seorang pengguna Narkoba adalah orang yang sakit, maka harus dirawat di sebuah institusi kesehatan, dalam hal ini adalah rumah sakit atau panti rehabilitasi dan bukan dikriminalisasikan dan dimasukkan ke penjara. Keputusan ini memberikan keringanan bagi para pecandu narkotika dan psikotropika, karena mereka akan dibedakan dengan pengedar narkotika.

Menurut Direktur Narkotika Alami Badan Narkotika Nasional Benny J Mamoto, para pecandu itu adalah korban atau orang sakit yang butuh penyembuhan. Jika semakin banyak orang yang disembuhkan maka angka konsumsi narkotika dan psikotropika akan menurun. Benny menjelaskan pecandu yang sudah melapor menjadi pecandu, maka prosesnya didata dan direhabilitasi.

Ketika direhabilitasi lalu tertangkap memakai lagi masih tidak diproses secara hukum. Namun untuk tertangkap ke tiga kali baru diajukan ke proses hukum, tapi vonis hakimnya tetap rehabilitasi.[1]

---

[1]Nur Farida Ahniar dan Syahrul Ansyari, Pecandu itu Adalah Korban atau Orang Sakit yang Butuh Penyembuhan, 2011. available from : url : http://www.VIVAnews.com 864 Jurnal Hukum, Vol XXVIII, No. 2, Desember 2012.

Seperti yang diketahui, pecandu dibawah umur wajib dilaporkan oleh orangtuanya ke instansi yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Bila pecandu telah cukup umur, ia bisa melaporkan dirinya sendiri ke puskesmas, rumah sakit maupun tempat rehabilitasi. Setelah melapor, pecandu akan diberikan kartu identitas rehabilitasi.

Kartu tersebut digunakan untuk menandai pecandu sedang menjalani rehabilitasi. Masalah pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai NARKOBA (Narkotika dan Bahan/Obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidispliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.

Meskipun dalam Kedokteran, sebagian besar golongan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) masih bermanfaat bagi pengobatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran dijalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda.

Maraknya pengguna Narkoba tidak hanya dikota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil diseluruh wilayah Republik Indonesia. Pada era pembangunan nasional Indonesia yang bertujuan mewujudkan manusia atau masyarakat madani *civil society* adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Segala usaha pelayanan di bidang pendidikan, sosial-budaya termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat untuk bidang kesehatan perlu ditingkatkan, dijamin dan diawasi penggunaannya, baik yang bahan bakunya melalui produksi sendiri dan atau impor.[2]

Apabila tidak diawasi, maka akan terjadi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) yang telah begitu meluas di berbagai kalangan dalam masyarakat, baik dikalangan masyarakat ekonomi atas, menengah serta masyarakat ekonomi Iemah/bawah. Penggunanya juga meliputi berbagai strata sosial antara lain para pejabat pemerintah (PNS), aparat penegak hukum sendiri,[3] swasta, bintang dan atau aktor/artis (selebriti) sinetron dan perfilman, bahkan telah merambah ke kalangan mahasiswa, pelajar dan atau siswa Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (untuk selanjutnya disingkat anak SMA dan SMP).

Penyalahgunaan narkoba telah lama menjadi masalah utama yang serius di berbagai negara, baik negara-negara yang sudah maju maupun di negara-negara yang sedang berkembangtidak terkecuali di Indonesia. Kita ketahui bahwa masalah narkoba dewasa ini merupakan masalah yang sangat menarik perhatian dari banyak kalangan baik kalangan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini disebabkan karena narkoba merupakan benda yang dapat merusak bagi pemakai bila tidak digunakan dengan ketentuan medis. Narkoba juga memberikan keuntungan yang besar bagi

---

[2] Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, *PT.* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008; Halaman. 1

[3] Posmetro Medan, *Honorer Satpol PP Sergai Nyabu di Kamar Mandi*, Edisi Kamis Tanggal 25November 2010, Halaman. 1 Kolom. 1 dan Halaman. 2 Kolom. 1-2.

pengedarnya sehingga kejahatan ini menjadi sering dilakukan.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba sekarang ini telah dilakukan secara terang-terangan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara dimasa mendatang.

Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan kecanduan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainya itu.

Tugas dari polisi sebagai penegak dan pelaksana hokum adalah untuk mengamankan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia" polisi juga diberi kewenangan untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana. Diatur juga tentang Kode Etik Profesi dalam "Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri." Keberadaan polisi adalah inti dari pelaksanaan sistem peradilan serta wajib melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai penegak hokum. Tetapi tidak dipungkiri juga ada beberapa oknum yang menyalahgunakan kewenangnya yaitu mengonsumsi barang haram tersebut.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh institusi kepolisian dalam rangka meminimalisir bahkan menghilangkan adanya keterlibatan anggota polisi terhadap masalah narkotika, baik dalam bentuk pemberian pembekalan yang

disampaikan pada saat dilaksanakanya pendidikan pembentukan Bintara maupun Perwira, sampai dengan upaya tindakan tegas bagi anggota yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkotika melalui proses peradilan umum dan diperberat dengan mengajukanya kesidang Kode Etik Profesi Polri yang sanksi hukumanya hingga pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas kepolisian. Kurangnya pengawasan dari institusi penegak hokum ialah latar belakang penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh oknom kepolisan. Akhirnya menimbulkan anggapan pesimis dari kesuksesan aparat kepolisian untuk pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, yang akhirnya menimbulkan saran dari masyarakat awam yang tidak sedikit agar dikehendakinya penetapan hukuman yang berat bukan hanya surat peringatan untuk para aparat polisi yang melanggarnya. Sehingga diharapkan dapat tercapainya visi misi dari penetapan sanksi pidana yang dimana untuk menimbulkan efek jera kepada semua orang yang sudah melanggar peraturan tindak pidana tanpa melihat dari latar belakang orang yang melakukan tindak pidana itu, hal ini diharapkan bisa menjadi sarana penegakan hukum pidana oleh para aparat kepolisian. Terlebih lagi yang melakukan perbuatan tindak pidana itu ialah berasal dari aparat kepolisian. Sudah pasti yang diharapkan ialah pertanggungjawaban dalam bentuk sanksi, baik pidana ataupun penetapan sanksi oleh instansi yang terlibat agar dijatuhkan sanksi yang berat agar hal ini bisa dijadikan pengingat oleh para aparatur negara untuk tidak melakukan kesalahan yang sama.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh institusi Kepolisian dalam rangka meminimalisir bahkan menghilangkan adanya keterlibatan anggota Polisi terhadap

masalah narkoba, baik dalam bentuk pemberian pembekalan yang disampaikan pada saat dilaksanakanya pendidikan pembentukan Bintara maupun Perwira.

Sejak berlakunya undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, banyak pelaku yang terjerat dalam undang-undang ini. Penegakan hukum diharapkan sebagai faktor penanggulangan pencegahan meluasnya peredaran dan penyalahgunaan narkotika bagi seluruh lapisan masyarakat. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika, sanksi yang diterapkan undang-undang tersebut sebetulnya sudah cukup berat, sanksinya berupa pidana penjara dan denda, serta juga paling utama adalah dikenakan minimum ancaman pidana dan adanya ancaman pidana mati menunjukan beratnya sanksi pidana yang mengatur undang-undang tindak pidana narkotika. Peranan penegak hukum juga sangat penting terhadap kejahatan narkotika yang dilakukan masyarakat Indonesia, peran penegak hukum dalam hal menangani kasus tindak kejahatan narkotika untuk meningkatkan produktifitas yang menghambat jalannya peredaran narkotika dan penjualan narkotika secara illegal melalui jalur darat, undara, dan laut yang menjadi sasaran utama bagi sindikat gelap pengedar narkotika. Dengan adanya jalur yang bisa dilewati bagi sindikat peredaran gelap narkotika pengguna narkotika meluas ke semua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pekerja, serta ada pun penegak hukum sendiri ada yang mengkonsumsi narkotika dan lain sebagainya.[4]

Penyalahgunaan Narkotika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat

[4] Citra Umbara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,Bandung

buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik. Meskipun demikian terkadang beberapa jenis obat masih dipakai dalam dunia kedokteran, namun hanya diberikan bagi pasien-pasien tertentu, bukan untuk dikonsumsi secara umum dan bebas oleh masyarakat. Oleh karena itu obat dan narkotik yang disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai akibat yang beraneka ragam. Dampak tidak langsung narkoba yang disalahgunakan

a. Akan banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan pecandu jika tubuhnya rusak digerogoti zat beracun.
b. Dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang baik-baik. Selain itu biasanya tukang candu narkoba akan bersikap anti sosial.
c. Keluarga akan malu besar karena punya anggota keluarga yang memakai zat terlarang.
d. Tidak dipercaya lagi oleh orang lain karena umumnya pecandu narkoba akan gemar berbohong dan melakukan tindak kriminal.
e. Dosa akan terus bertambah karena lupa akan kewajiban Tuhan serta menjalani kehidupan yang dilarang oleh ajaran agamanya.
f. Bisa dijebloskan ke dalam tembok derita / penjara yang sangat menyiksa lahir batin.

Tindakan pengawasan secara internal baik oleh bidang pengawasan (Inspektorat) maupun bidang Propam (Profesi dan pengamanan internal), baik dengan metode berkala maupun inspeksi mendadak (sidak) yang disertai test urine kepada seluruh anggota Polri dan PNS Polri dari golongan atau pangkat yang paling rendah ( Bintara ) sampai dengan Perwira Tinggi ( Jendral ) yang dilakukan bekerja sama

dengan Badan Nasional Narkotika Propinsi ( BNNP), demikian pula upaya tindakan tegas bagi anggota yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba melalui proses peradilan umum dan diperberat dengan mengajukanya kesidang Kode Etik Profesi Polri yang sanksi hukumanya hingga pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas kepolisian.

Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksana sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Namun ada beberapa oknum polisi yang bahkan ikut menyalahgunakan wewenangnya dengan ikut menggunakan dan mengedarkan obat-obat terlarang atau narkotika.

Ditinjau dari data kasus tindak pidana yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal dan Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk priode tahun 2018 kasus 2.651 TSK 3.881, tahun 2019 kasus 2.733 TSK 3.461 dan sampai Februari 2020 kasus 2.480 TSK 3.155, dapat dikatakan bahwa secara umum kasus tindak pidana narkotika masih cukup tinggi ditinjau dari pelanggaran yang terjadi setiap tahunnya.

Disamping itu berdasarkan data yang disampaikan Kabid Propam Polda Sumatera Utara Kasubbidwabprof Bapak Dadi Purba, SH., MH bahwa personil Polda Sumatera Utara yang menyalahgunakan Narkoba pada Tahun 2019 sebanyak 18 pers tahun 2020 sebanyak 34 pers dan tahun 2021 sebanyak 25

orang. [5]

Secara sederhana, berdasarkan data tersebut di atas dapat dikatakan bahwa telah terjadi peningkatan perilaku kejahatan atau tindak pidana dari tahun ke tahun, terutama mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta modus operandinya.

Peningkatan angka tindak pidana umum berkorelasi signifikan dengan intensitas tindak pidana narkotika yang terjadi, bahkan termasuk juga dengan modus operandi serta sifat dari perbuatan yang menjurus kepada perilaku sadisme dan brutal.

Sehubungan dengan hal itu, jika ditinjau lebih mendalam isi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengganti dan mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun1997 tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698, dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671, maka akan ditemukan minimal 3 (tiga) klasifikasi yang termasuk pelaku tindak pidana narkotika,[6] yaitu:

4. Produsen, yakni pembuat atau peracik narkotika secara melawan hukum *(illegal);*
5. Pengedar, yakni orang-perorangan atau kelompok orang yang langsung atau tidak langsung menjual, menyampaikan atau melakukan transaksi kepada

[5] Wawancara Penulis dengan Kabid Propam Polda Sumatera Utara Kasubbidwabprof Bapak DadiPurba, SH., MH

[6] Lihat Pasal 1 angka 3, 6, 9, 13, 14, 15 dan 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

pengguna dan atau pemakai narkotika, baik dalam jumlah besar (bandar) maupun dalam jumlah kecil (pengecer); dan

6. Pengguna, yakni orang-orang yang menyalahgunakan narkotika secara melawan hukum, termasuk para pecandu yang tingkat ketergantungan narkotikanya tinggi.

Pentingnya pengelompokan peranan pelaku dalam tindak pidana narkotika tersebut di atas didasarkan pada kasus faktual yang telah, sedang, dan yang akan ditangani oleh para penegak hukum di Indonesia, khususnya dijajaran kepolisian. Peran pelaku di dalam tindak pidana narkotika akan berpengaruh atau berdampak pada pertanggungjawaban pidananya, yaitu berat dan atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan. Kecuali itu, bagi anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika ada sanksi khusus non-penal atau sanksi administratif.

Kebijakan penerapan sanksi non-penal dan administratif bagi anggota Polri sejalan dan searah dengan perkembangan pluralisme hukum. Globalisasi tidak berarti uniformasi sistem hukum, karena masingmasing sistem hukum itu adalah *culturally specific,* sehingga teori dan ilmu hukum saat ini seharusnya diarahkan menjadi *globality* conscious sekaligus *plurality conscious* dan *sensitive.*[7] Dengan demiikian permasalahan globalisasi menjadi satu hal yang niscaya karena konsekuensi yang harus diterima sebagai zaman yang terus dinamis ke arah perkembangan sekaligus kemajuan.

Mengingat jumlah anggota Polri di Kepolisian daerah Sumatera Utara yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika cukup tinggi, sangat di khawatirkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban, penegakan

[7] Ibid Halaman 43

hukum, serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tugas pokok dari Polri itu sendiri. maka perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah dan pimpinan Polri untuk mencari faktor penyebab, upaya-upaya pencegahan untuk meminimalisasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan serta penegakan hukum dan, pemberian sanksi pidana (*penal policy*) dan non penal terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika demi tercapainya keamanan dalam negeri yang kondusif.

Diharapkan terwujudnya postur Polri yang profesional, bermoral dan modern pada salah satu butir misinya dinyatakan bahwa misi Polri adalah Pengelola secara professional, transparan, akuntabell dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri.

Anggota kepolisian terjerat narkoba dari tahun ke tahun. Berdasarkan catatan Polri, anggota Korps Bhayangkara yang menjadi pemakai bahkan pengedar narkoba terus naik.

Selama tiga tahun terakhir sejak 2018, anggota kepolisian yang terlibat kasus narkoba tak pernah kurang dari 100. Pada 2018, polisi yang terseret kasus narkoba mencapai 297 orang. Jumlah tersebut naik sekitar dua kali lipat pada 2019 menjadi 515 orang. Sementara pada 2020, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan pihaknya telah memecat 113 anggotanya karena terlibat pelanggaran berat sepanjang Januari-Oktober tahun lalu.

Dari jumlah tersebut, mayoritas anggota terlibat pelanggaran kasus narkoba. Namun, Argo tak merinci berapa anggota polisi yang melakukan pelanggaran pidana

narkoba.

"Tindakan tegas polisi yang terlibat berbagai pelanggaran berat khususnya narkoba dipecat. Sepanjang Januari sampai Oktober ada 113 orang," kata Argo Oktober 2020.[8]

Disisi lain khususnya upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkoba belum dilaksanakan secara tuntas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah mengatur secara jelas dalam pasal – pasal tertentu tentang perbedaan hukuman yang harus dilakukan terhadap pelaku Kejahatan Narkoba sesuai dengan peran yang dilakukannya sebagai penyalahguna Narkotika.

Sementara itu pelaksanaan rehabilitasi yang menjadi ruh dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini belum dilaksanakan secara maksimal dan hampir semua kasus Narkotika yang diserahkan penyidik untuk diperiksa dan diadili berakhir dengan putusan penjara. Namun demikian untuk menentukan sebuah putusan terhadap seorang terdakwa penyalahguna Narkotika untuk dijatuhkan/ditetapkan hukuman rehabilitasi,seorang Hakim harus benar –benar mempertimbangkan berdasarkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Ketergantungan saja yang menjadi wajib untuk direhabilitasi sebagaimana bunyi Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Artinya bahwa mereka yang mendapatkan layanan rehabilitasi adalah penyalahgunaan narkotika berdasarkan pada tingkat keparahan penggunanya.

[8] Baca artikel CNN Indonesia "Ratusan Polisi Terjerat Kasus Narkoba dari Tahun ke Tahun" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210413210517-12-629517/ratusan-polisi-terjerat-kasus-narkoba-dari-tahun-ke-tahun.

Penyalahguna narkotika dalam hal ini Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika mempunyai posisi sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya, yakni masalah pecandu narkotika menurut ketentuan undang-undang, di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun di sisi lain merupakan korban.

Pecandu narkotika menurut undang-undang di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah dengan adanya ketentuan pidana di dalam undang-undang narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian, di sisi lainnya dapat dikatakan bahwa menurut undang-undang narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.

Hal ini berarti undang-undang di satu sisi masih menganggap pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya. Penyalahgunaan narkotika dalam kepustakaan kriminologi dianggap sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) dimana korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, dalam artian korban adalah pelaku dan pelaku adalah korban. Ia menjadi pelaku dan korban sekaligus,penamaan ini merujuk pada sifat kejahatan tersebut, yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan namun keduanya tidak menderita kerugian atas pihak yang lain.

Berbeda halnya dengan kejahatan pembunuhan, pencurian, perkosaan dimana jatuhnya korban jelas terlihat. Dalam kamus *crime dictionary* bahwa

istilah korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:

a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misal pada kasus kecelakaan pesawat.
b. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh dimana korban sekaligus pelaku.
c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misal korban obat bius, judi, aborsi, prostitusi.

Sedangkan dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana Stephen Schafer berpendapat bahwa pada dasarnya terdapat empat tipe korban, yaitu:

a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa tetapi tetap menjadi

korban

b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan

c. Mereka yang secara biologis dan sosiol berpotensi menjadi korban

d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku, inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban.[9].

Apabila dihubungkan dengan permasalahan kedudukan korban dalam tindak pidana narkotika, kedudukan korban tersebut dapat termasuk dalam kategori *self victimizating victims* menurut Stephen Schafer. Dalam perspektif viktimologis, pelaku tindak pidana tersebut adalah *mutual victimization* atau *self victimizating victims*, karena pelaku tidak sadar bahwa dia adalah korban dari kejahatanyang dilakukan oleh dirinyasendiri, korban berpartisipasi penuh terhadap kejahatan tersebut karena korban adalah pelaku. Pecandu sendiri dalam Undang-undang narkotika ini disebutkan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Sedangkan penyalahguna narkotika dijelaskan adalah Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.[10] Para ahli membedakan keduanya dengan penjelasana bahwa pecandu adalah penyalahguna narkotika, namun penyalahguna narkotika belum tentu dapat dikatakan sebagai pecandu. Pecandu dan penyalahguna narkotika pada dasarnya

[9] Bambang waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi, Jakarta: Sinar grafika, 2012, hlm13

[10] Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 1 angka 13 dan 15

adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah dan mereka itu semua merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun Negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang.

Karena itu bagaimanapun tingkat kesalahannya, para korban tersebut masih diharapkan dapat menyadari bahwa apa yang telah diputus oleh majelis hakim atas kesalahan mereka adalah merupakan suatu cara atau sarana agar mereka meninggalkan perbuatan tersebut setelah selesai menjalani masa hukuman.[11]

Undang-undang narkotika mempunyai tujuan dalam politik kriminal, yakni untuk mewujutkan masyarakat indonesia yang sejahtera, adil dan makmur, yang merata mareriil dan spirituil. Meningkatkan derajat kesehatan manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyrakat, penguatan kualitas pelayanan kesehatan.[12] Berbicara mengenai kebijakan hukum pidana, tentunya tidak terlepas dan pengertian kebijakan itu sendiri, Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada si pembuat undangundang tetapi juga kepada pengadilan dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-

[11] Moh. Taufik Makaro, Tindak Pidana Narkotika, Bogor: Ghalia Indonesia,2005, hlm 74-75
[12] 1Syaiful bakhri, Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika(Suatu Pendekatan Melalui KebijakanHukum Pidana), Jakarta: gramata publishing, 2012, hlm 22

undang.[13]

Oleh karena itu kelemahan atau kesalahan kebijakan pidana dapat dipandang sebagai kesalahan yang sangat strategis, karena hal ini dapat menghambat penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*socialwelfare*).

Dengan demikian, wajar pula apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan terhadap masyarakat.

Dalam hal ini peranan peraturan hukum sangat besar kaitannya dengan pelaksanaan peraturan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dapat diartikan pula bahwa keberhasilan atau kegagalan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya telah dimulai sejak peraturan hukum tersebut dibuat. Misalnya, badan legislatif atau instansi yang berwenang membuat peraturan tersebut telah membuat peraturan yang sulit dilaksanakan oleh masyarakat, sejak saat itulah awal kegagalan produk peraturan yang dibuat oleh badan tersebut. Hal ini dapat diakibatkan dalam peraturan tersebut memerintahkan sesuatu hal yang tidak didukung oleh sarana yang mencukupi, akibatnya, peraturan tersebut gagal

[13] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,2005, hlm 23

untuk dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*) dan merupakan bagian dari politik sosial (*sosial policy*) yang dilakukan oleh masyarakat dan negara dengan berusaha untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan mendapat mencakup ruang lingkup yang luas.[14] Sehingga itu politik kriminal dapat juga dirumuskan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana.[15]

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan 3(tiga) cara:[16]

a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)

b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*),

c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment*/mass media).

Berdasarkan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu:

a. Kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan ini lebih menitikberatkan pada tindakan represif (pemberantasan/pembalasan/penumpasan) sesudah

[14] Muladi, Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung, Alumni, 2005, Hlm. 1
[15] Teguh Prasetyo, Hukum Pidana. Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2010, Hlm. 17
[16]Barda Nawawi Arief, Op. Cit, Hlm. 42

kejahatan terjadi. Kebijakan ini memberikan pedoman agar dapat merumuskan hukum pidana yang baik bagi kepada pembuat undang-undang.

b. Kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non-penal policy*). Kebijakan ini lebih menitikberatkan pada tindakan preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Dilihat dari sudut politik criminal secara makro dan global, maka upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik criminal.

Dengan demikian Kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas / kejahatan (*Criminal Policy*) harus merupakan bagian integral (tak terpisahkan) dari kebijakan yang berorientasi untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*). Dalam kesempatan lain Sudarto menjelaskan politik kriminal merupakan "suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menaggulangi kejahatan". Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai "*The Rational Organization of the Control of Crime by Society*".[17]

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah "perlindungan masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat". Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial

[17] Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan PenyusunanKonsep KUHP Baru), Jakarta : Prenada Media Group. 2010, Hlm. 3

(*social policy*) yaitu kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan berorientasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara represif. Tindakan represif menitikberatkan pada upaya pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah "perlindungan masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat". Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (*social policy*) yaitu kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan berorientasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat.

**B. Perumusan Masalah**

Bertolak dari uraian tersebut di atas**,** untuk mencari dan menemukan solusi yang tepat dan benar berkaitan dengan kebijakan penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota Kepolisian, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

4. Mengapa Kebijakan Kriminal bagi personil Polri yang menggunakan Narkoba belum berbasis nilai keadilan?
5. Bagaimana kelemahan-kelemahan kebijakan criminal bagi personil Polri yang menggunakan Narkoba di Polda Sumatera Utara ?
6. Bagaimana rekonstruksi kebijakan criminal bagi personil Polri yang menggunakan Narkoba berbasis nilai keadilan ?

**D. Tujuan Penelitian**

Bertitiktolak dari fokus masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain untuk:

4. Menganalisis Kebijakan Kriminal bagi personil Polri yang menggunakan Narkoba belum berbasis nilai keadilan.
5. Melakukan rekonstruksi kelemahan-kelemahan kebijakan criminal bagi personil Polri yang menggunakan Narkoba di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
6. Menganalisis serta merekonstruksi kebijakan criminal bagi personil Polri yang menggunakan Narkoba berbasis nilai keadilan.

**J. Manfaat Penelitian**

Dalam kaitannya dengan tujuan penelitian di atas, diharapkan hasil penelitian dapat berguna untuk :

1. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji;
2. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner;
3. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya

khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama dalam rangka penegakan hukum dan atau penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan juga berguna sebagai bahan masukan dalam rangka merumus dan menyusun aturan hukum Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP)[18] untuk penunjang kedudukan, peran dan fungsinya secara optimal sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kerangka acuan atau pedoman bagi peneliti lanjutan lainnya, dan khususnya bagi para Pimpinan Kepolisian di dalam menerapkan sanksi non-penal di Iuar sanksi pidana terhadap anggota Polri yang terlibat dan atau terbukti menyalahgunakan narkotika.

**E Kerangka Teori**

***1. Teori Criminal Policy***

Sebagai kerangka teori dalam penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa teori dan pendapat beberapa ahli yang dimulai dari kebijakan penanggulan kejahatan atau politik kriminal *(criminal policy)* menurut Muladi adalah suatu kebijakan atau usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan[19].

---

[18] Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian R.I. (Perkap Polri) No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian R.I. menyatakan bahwa anggota Polri dalam menggunakan kewenangannya wajib berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta nilai-nilai kemanusiaan.

[19] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992). hal. 1.

Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas *(law enforcement policy)*, yang seluruhnya merupakan bagian dari politik sosial *(social policy)*, yaitu suatu usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

Hingga saat ini masih terdapat berbagai pendapat dari para ahli mengenai pengertian dari *criminal policy*. Marc Ancel merumuskan *criminal policy* sebagai "*rational organization of the control of crime by society"* atau *"the rational organization of the social reaction of crime"*[20]. Sementara G.P. Hoefnagels memberikan definisi *criminal policy* sebagai berikut:[21]

*"Criminal policy is the science of crime prevention… Criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime… Criminal policy as the science of policy is part of a larger policy: the law enforcement policy… Criminal policy is also manifest as science and as application. "The Legislative and enforcement policy is in turn part of social policy"(* Kebijakan kriminal adalah ilmu pencegahan kejahatan. Kebijakan kriminal adalah organisasi rasional dari reaksi sosial terhadap kejahatan. Kebijakan kriminal sebagai ilmu kebijakan adalah bagian dari kebijakan yang lebih besar: kebijakan penegakan hukum. Kebijakan kriminal juga bermanifestasi sebagai sains dan sebagai aplikasi. "Kebijakan Legislatif dan penegakannya pada gilirannya merupakan bagian dari

---

[20] Marc Ancel, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*, (London: Routledge &Kogan Paul, 1965). pg. 209 sebagaimana dikutip dalam Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995). hal. 7.

[21] Geraldus Petrus Hoefnagels, *The Other Side* of *Criminology*: *An Inversion of the Concept of Crime*, (Deventer: Kluwer, 1973). pg 58. sebagaimana dikutip dalam Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bahan Seminar Kriminologi VI,(Semarang, 1991), hal. 2.

kebijakan sosial)

Kebijakan kriminal *(criminal policy)* diartikan Sudarto dalam pengertian yang sempit, luas dan paling luas sebagai berikut:[22] a. Kebijakan kriminal dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana.

b. Kebijakan kriminal dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

c. Kebijakan kriminal dalam arti yang paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral masyarakat.

Kebijakan kriminal pada dasarnya meliputi ruang lingkup yang cukup luas, dimana menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:[23]

*a.* Penerapan hukum pidana *(criminal law application);*

*b.* Pencegahan tanpa pidana *(prevention without punishment);*

*c.* Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa *(influencing views of society on crime and punishment/mass media).*

Berdasarkan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: melalui sarana "penal" atau hukum pidana dan sarana "non-penal" atau di

[22] Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1981), hal 1.
[23] Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, hal. 2

luar hukum pidana.[24]

Muladi berpendapat bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (penal) pada hakekatnya dilakukan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:[25]

1). Tahap formulasi

Tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.

2). Tahap aplikasi

Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, tahap disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif.

3). Tahap eksekusi

Tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap disebut juga sebagai kebijakan eksekutif atau administratif.

Dari tahapan tersebut, maka kebijakan melalui hukum pidana dimulai dari perumusan suatu undang-undang (hukum pidana), kemudian undang-undang (hukum pidana) tersebut diaplikasikan melalui "sistem peradilan pidana" (*criminal justice system)*.

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang terdapat di dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, dengan komponen-komponen (subsistem) yang terdiri dari kepolisian,

[24] Ibid.
[25] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, hal. 9.

kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.[26] Proses kebijakan kriminal tersebut dimulai dari pembuat undang-undang yang menyediakan aturan-aturan hukum pidana serta wewenang maupun pembatasan dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut. Selanjutnya kepolisian dan kejaksaan, yang merupakan pelaksana hukum, menentukan kebijakan penyidikan dan penuntutan.

Kemudian pengadilan sebagai penguji kebijakan penyidikan dan penuntutan menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak berdasarkan hasil penyidikan dan penuntutan tersebut, serta dalam menuntukan bentuk pidananya yang akan dijatuhkan *(strafmaat)*. Pada akhirnya lembaga pemasyarakatan yang berperan sebagai pelaksana pidana yang dijatuhkan pengadilan, mempunyai kebijakan sendiri dalam ”merawat” terpidana *(strafexecutive)* dan mengusahakannya kembali ke masyarakat pada waktunya (re-sosialisasi).[27]

Dalam pandangan Muladi, sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan dan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas, karena pada hakektanya kejahatan itu merupakan “masalah kemanusiaan” dan “masalah sosial” yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana.[28]

Barda Nawawi Arief berpendapat, jika dilihat dari sudut pandang *crminal*

---

[26] Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal. 84 - 86.

[27] Ibid, hal. 94

[28] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* hal. 7

*policy*, maka upaya penanggulangan *cybercrime* tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial melalui sarana penal semata, namun harus didukung pula oleh pendekatan integral/sistematik melalui sarana non-penal seperti: pendekatan teknologi *(techno prevention)*, pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif dan pendekatan global

Berikut ini akan dikemukakan beberapa definisi yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini, antara lain:[29]

*a.* Kebijakan penanggulangan kejahatan *(criminal policy)*

Kebijakan kriminal *(criminal policy)* adalah suatu usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) dan sarana non-penal (di luar hukum pidana).*[30]*

b. Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana penal *(penal policy).)* Kebijakan hukum pidana *(penal policy)* merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik untuk memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menetapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan.[31]

c. Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana non-penal *(nonpenal policy)* Kebijakan non-penal *(non-penal policy)* merupakan kebijakan

---

[29] Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, op.cit.hal. 2

[30] ibid

[31] Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian KebijakanKriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 18.

penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan ini dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: a). penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; b). peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta c). kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

1. Upaya Non Penal (Preventif) Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya: Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam

terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan

2. Upaya Penal (Represif) Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminil. Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena

merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum (recht staats), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar

larangan tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur, pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

Tujuan pokok dari hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja, adalah ketertiban (order). Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana di masa lalu dan/ atau untuk kepentingan di masa yang akan datang.

**2. Teori Legal System (Sistem Hukum)**

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman, [32] seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada empat elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu:

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

[32] Surakarta, 2004 Friedman L, Teori dan Filsafat hukum: Telaah kritis atasi Teori-Teori Hukum(susunan I)

2. Isi Hukum (*Legal Substance*)

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

4. Dampak Hukum (*Legal Impact*)

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum[33].

1. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Sexon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan "tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya". Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila

[33] Ibid hal 102

perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

2. Struktur Hukum/Pranata Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya

buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

3. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdi hukum ini menentukan kokoh nya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga

terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah

aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum[34]. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (legal structure) merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. komponen substansi hukum (legal substance) merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun, dan komponen budaya hukum (legal culture) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.

Struktur Hukum yang kemudian dikembangkan di Indonesia terdiri dari :

a. Kehakiman (Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok-

[34] Legal Theory, penerjemah: Mohammad Arifin, Cetakan kedua, (Jakarta,PT Raja GrafindoPersada 1993) Friedman Lawrence M, 1977,

pokok kekuasaan Kehakiman)

b. Kejaksaan (Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan)

c. Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI)

d. Advokat (Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat)

Struktur berhubungan dengan institusi dan kelembagaan hukum, bagaimana dengan polisinya, hakimnya, jaksa dan pengacaranya. Semua itu harus ditata dalam sebuah struktur yang sistemik. Kalau berbicara mengenai substansinya maka berbicara tentang bagaimana Undang-undangnya, apakah sudah perundang-undangannya.

Dalam budaya hukum, pembicaraan difokuskan pada upaya-upaya untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat, membentuk pemahaman masyarakat memenuhi rasa keadilan, tidak diskriminatif, responsif atau tidak. Jadi menata kembali materi peraturan terhadap hukum, dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memeproleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound,, atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat.

Pembangunan hukum merupakan suatu tindakan politik, bukan hukum. Pembangunan hukum bukanlah pembangunan undang-undang, apalagi jumlah dan jenis undang-undang. Pembangunan hukum pun bukanlah hukum dalam arti positif, sebagai suatu tindakan politik, maka pembangunan hukum sedikit banyaknya akan bergantung pada kesungguhan aktor-aktor politik. Merekalah yang memegang kendali dalam menentukan arahnya, begitu juga corak dan materinya. Dari para politisilah lahir berbagai macam undang-undang.

Secara formal kelembagaan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berada dijantung utama pembentukan hukum. Dari mereka inilah ide-ide sosial, ekonomi, politik dibentuk dan atau diformulasikan secara normatif menjadi kaedah hukum. Norma hukum hanya merupakan salah satu bagian kecil dari kehidupan hukum.

Secondary rules yang dikonsepkan H.A.L Hart esensinya sama yaitu nilai-nilai, orientasi dan mimpi orang tentang hukum atau hal-hal yang berada diluar norma hukum positif model hart, memainkan peranan yang amat menetukan bagi kapasitas hukum positif.

Walaupun norma-norma hukum yang terdapat dalam setiap undang-undang secara positif dianggap merupakan panduan nilai dan orientasi dari setiap orang, akan tetapi secara empiris selalu saja ada cacat celahnya.perilaku orang selalu tidak sejalan dengan dengan norma-norma yang ada dalam undang-undang. Penyebabnya sangat beragam, salah satunya adalah norma-norma itu tidak sejalan dengan orientasi dan mimpi mereka. Itu

sebabnya sebagian ahli hukum mengatakan bahwa kehidupan hukum lebih merupakan sebuah mitos, bahkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum hanyalah mitos yang indah. Substansi hukum bukanlah sesuatu yang mudah direncanakan, bahkan hal ini dapat dianggap sebagai perkara yang sulit, namun bukan karena kesulitan itulah sehingga substansi hukum perlu direncankan, melainkan substansi hukum juga sangat tergantung pada bidang apakah yang hendak diatur.

Perlu pula dperhatikan perkembangan sosial, ekonomi dan politik, termasuk perkembangan-perkembangan ditingkat global yang semuanya sulit diprediksi. Sikap politik yang paling pantas untuk diambil adalah meletakan atau menggariskan prinsip-prinsip pengembangannya. Sebatas inilah blue printnya. Untuk itu maka gagasan dasar yang terdapat dalam UUD 1945 itulah yang harus dijadikan prinsip-prinsip atau parameter dalam pembentukan undang-undang apa saja, kesetaraan antar lembaga negara, hubungan yang bersifat demokratis antara pemerintah pusat dengan daerah, hak asasi manusia (HAM) yang meliputi hak sosial, ekonomi, hukum, dan pembangunan harus dijadikan sumber sekaligus parameter dalam menguji substansi RUU atau UU yang akan dibentuk.

Berkaitan dengan budaya hukum (legal culture) ini, menurut Roger Cotterrell, konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk

mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.

Aspek kultural menurut Friedman melengkapi aktualisasi suatu sistem hukum, yang menyangkut dengan nilai-nilai, sikap, pola perilaku para warga masyarakat dan faktor nonteknis yang merupakan pengikat sistem hukum tersebut.

Wibawa hukum melengkapi kehadiran dari faktor-faktor non teknis dalam hukum. Wibawa hukum memperlancar bekerjanya hukum sehingga perilaku orang menjadi positif terhadap hukum.

Wibawa hukum tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang rasional, tetapi lebih dari pada itu mengandung unsur-unsur spiritual, yaitu kepercayaan. Kewibawaan hukum dapat dirumuskan sebagai suatu kondisi psikologis masyarakat yang menerima dan menghormati hukumnya.

Menurut Friedman budaya hukum diterjemahkan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan lembaganya, baik secara positif, maupun negatif. Jika masyarakat mempunyai nilai nilai yang positif, maka hukum akan diterima dengan baik, sebaliknya jika negatif, masyarakat akan menentang dan menjauhi hukum dan bahkan menganggap hukum tidak ada membentuk undang-undang memang merupakan budaya hukum. Tetapi

mengandalakan undang-undang untuk membangun budaya hukum yang berkarakter tunduk, patuh dan terikat pada norma hukum adalah jalan pikiran yang setengah sesat. Budaya hukum bukanlah hukum. Budaya hukum secara konseptual adalah soal-soal yang ada di luar hukum.

**F. Kerangka Konsep**

Untuk menghindarkan terjadinya kesalahpahaman di dalam menganalisis pokok masalah yang diajukan pada disertasi ini, maka diperlukan konsep sebagai pedoman serta landasan operasional.[35]

a. Kebijakan penanggulangan di dalam penelitian ini mempunyai arti sebagai suatu perbuatan mengawasi, melindungi dan atau memberantas, yang meliputi tindakan pencegahan serta penindakan atau penghukuman melalui hukum pidana dan non-penal terhadap pengguna narkotika, khususnya bagi anggota Polri yang terbukti menggunakan narkotika, pengguna maupun sebagai pemilik *illegal* dari segala bentuk dan jenis atau golongan narkotika.
b. Tindak pidana yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup semua perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum pidana untuk dilakukan atau tidak dilakukan, khususnya bagi anggota Polri sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 12 ayat PPRI No. 1 tahun 2003 dan Perkap No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara R.I.

---

[35] Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, *Cara Penyelesaian Karya llmiah di Bidang Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, PT. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2006; Halaman. 29- 30: menegaskan bahwa kecuali terdiri dari konsepkonsep, suatu kerangka konseptual atau disebut juga kerangka pemikiran dapat pula mencakup definisi-definisi operasional. Kegunaan kerangka konseptual *"conceptual framework'* dalam penelitian hokum empiris antara lain bersifat eksplanatoris yang mencari penjelasan mengenai hubungan atau dampakdi antara 2 (dua) atau lebih variabel.

c. Narkoba adalah narkotika dan zat atau obat berbahaya yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa dan atau menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya sebagaimana diatur dalam lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

d. Anggota Polri adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo Perkap No. 14 Tahun 2011 dan PP No. 02 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polisi Republik Indonesia.

e. Penerapan hukum pidana *(penal policy)* dan non-penal yang dimaksud di dalam penelitian ini antara lain adalah segala bentuk dan jenis sanksi hukuman pidana dan atau sanksi tambahan atas pelanggaran Kode Etik Profesi yang dapat dikenakan kepada anggota Polri sebagaimana diatur dalam pasal 20, 21 dan 22 perkap No. 14 tahun 2011.

**f. G. Keaslian Penelitian**

Setelah menelusuri beberapa Kepustakaan dari beberapa Universitas untuk memastikan bahwa penulisan ini tidak memiliki persamaan objek penelitian dan atau judul yang bersamaan, maka sepanjang sepengetahuan penulis, sebagaimana judul dan rumusan masalah dalam disertasi. Penelitian ini murni karya penulis sendiri dan tidak plagiat.

**H. Metode Penelitian**

1. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka

sifat penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normative dan yuridis empiris. Namun begitu, untuk mencari dan menemukan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan akan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini dilakukan melalui kajiankajian tentang asas-asas dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban seorang anggota Polri, peran maupun fungsinya serta sanksi pidana dan sanksi administratif (non-penal) yang berlaku terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di samping itu jugs dilakukan pengkajian singkronisasi hukum berkaitan dengan pelaksanaan sistem dan mekanisme dalam rangka penerapan norma dan aturan Kode Etik Profesi bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai wujud perlindungan atau kepastian hukum guna tercapainya tujuan untuk merealisasikan nilai-nilai Tribrata Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kaitan dengan permasalahan ini, penelitian deskriftif analitis dengan menggunakan perpaduan antara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis sosiologis oleh Soetandyo Wigjosoebroto disebut sebagai suatu penelitian hukum yang ingin meggambarkan atau mendeskripsikan[36] suatu aturan atau norma yang tersedia di dalam kenyataannya. Dengan kata lain penelitian ini ingin menggambarkan bagaimana sebenarnya proses dan mekanisme pelaksanaan penerapan kebijakan pidana *(penal policy)* dan non-penal terhadap anggota Polri yang terbukti telah melakukan tindak pidana menggunakan narkotika di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

[36] Penelitian hukum doktriner oleh Soetandyo Wigjosoebroto, 1974, *Penelitian Hukum:Sebuah Tipologi*, Majalah Masyarakat Indonesia, Jakarta; Tabun I No. 2, 1974, Halaman.89

Bahan hukum primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Narkotika serta PPRI No. 1 dan Pasal 12 ayat 1 huruf (a) tahun 2003 serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa doktrin para pakar hukum pidana, hasil hasil penelitian dan bahan bacaan yang berisi fakta berkaitan dengan materi kajian, seperti laporan tahunan atau jurnal dari kegiatan khususnya mengenai penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan Hukum Normatif (yuridis normatif) serta Hukum Empiris (yuridis empiris). Pendekatan Hukum Normatif akan menganalisis pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003 Pasal 12 ayat 1 huruf (a), serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 thn 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Melalui pendekatan Hukum Empiris (yuridis empiris) antara lain akan meneliti pemberlakuan hukum positif yaitu penerapan ketentuan hukum pidana dan khususnya ketentuan Undang-Undang Narkotika dan atau Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap anggota Polri yang terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana

penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Dengan demikian pendekatan hukum empiris tersebut untuk mengetahui kejadian di lapangan penelitian.

3. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel

a. Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di dalam Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Alasan memilih lokasi penelitian di Poldasu antara lain karena tingginya kasus atau perkara pengguna narkotika yang terjadi, khususnya pengguna narkotika yang dilakukan anggota Polri serta letak atau posisi Sumatera Utara yang berdekatan dengan Negara tetangga seperti Singapore, Malaysia dan Brunai Darussalam, sehingga memungkinkan Sumatera Utara menjadi tempat transit (keluar dan masuknya) narkotika di Indonesia. Di samping itu, alasan pemilihan lokasi penelitian di Poldasu juga dipengaruhi oleh keterbatasan waktu, biaya dan tenaga serta refrensi yang tersedia. Sedangkan isu sentral penelitian yang dibahas dan dicari/ditemukan solusi pemecahannya akan menjadi pendukung kinerja peneliti yang bertugas sebagai Danyon C di Kesatuan Brimob Polda Sumut.

b. Populasi

Populasi penelitian ini mencakup semua anggota Polri di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dari tahun 2018, 2019, 2020 sampai dengan 2021, baik yang telah dijatuhi hukuman pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri dan sanksi administratif (non-penal) dari Atasan Langsung atau Markas Besar

Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun yang sedang atau masih dalam proses pemeriksaan Penyidik Bid Propam Poldasu.

c. Sampel

Sebagaimana telah dikemukakan pada alasan penetapan lokasi di atas, yakni terbatasnya ketersediaan waktu, biaya dan tenaga maka sebagai sampel penelitian ditentukan sebanyak 10 (sepuluh) orang anggota Polri pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika priode tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 yang telah dijatuhi hukuman pidana atau sedang menjalankan hukuman pidana, dan atau yang sedang diproses oleh Penyidik Bid Propam Poldasu. Penetapan sampel dilakukan secara *purposif sampling*[37] berdasarkan pada kesamaan karakteristik dan tujuan dari penelitian.

Untuk melengkapi data primer yang diperlukan, dalam menganalisis dan menemukan jawaban atas masalah yang diajukan, akan dilakukan wawancara kepada 5 (lima) orang unsur Pimpinan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang berwenang mengambil kebijakan dan atau melaksanakan kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri serta BNP Sumut.

4. Tekhnik Pengumpulan Data

Tekhnik yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain adalah:

1). Untuk mendapatkan data sekunder; instrumen atau alat pengumpulan data

[37] Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum*, EdisiRevisi, Cetakan Kedua, PT. Mitra Kebijakan Pertanahan, Yogyakarta; 2005, Halaman. 34-36.

yang digunakan adalah penelitian kepustakaan *(library research)* dan studi dokumentasi di Propam Kepolisian Daerah Sumatera Utara serta melalui media cetak, elektronik dan atau internet.

2). Untuk memperoleh data primer yang diperlukan; instrumen dan atau alat pengumpulan data yang akan digunakan adalah wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika atau keluarganya (untuk mengetahui faktor penyebab menggunakan narkotika), baik yang telah dan atau sedang menjalani hukuman pidana serta sanksi administratif dari atasannya, atau yang berdasarkan Keputusan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Demikian juga dalam rangka untuk mendapatkan informasi, akan melakukan wawancara secara langsung dengan para Pimpinan Polri di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara. yang sifatnya tertutup dan terbuka.

5. Prosedur Pengumpulan Data

1). Untuk mengambil data yang diperlukan dalam penelitian dilakukan melalui perpustakaan maupun studi dokumen di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, sehingga diperoleh konsep, teori-teori dan pendapatpendapat para ahli yang relevan dengan masalah, khususnya kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri dan penerapan sanksi non-penalnya.

2). Wawancara *(interview)* untuk mengumpulkan data primer dari responden serta informan yang terkait dengan kebijakan penanggulangan tindak pidana

penyalahgunaan narkotika oleh anggota Polri, dilakukan secara langsung dengan mendatangi responden yang bersangkutan ke Rumah Tahanan atau ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara tempat Informan bertugas.

Tempat maupun waktu wawancara, khususnya terhadap responden maupun keluarganya akan dilaksanakan secara terpisah/tidak terstruktur (disesuaikan dengan situasi dan kondisi lapangan). Hal ini disebabkan karena sebahagian responden beserta keluarganya, sudah banyak yang pindah domisili atau telah dimutasi jabatan atau dipindahkan tugas ke Polres lain, sehingga pelaksanaan pengumpulan datanya menjadi terhambat.

6. Analisis Data

Sifat penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bertujuan antara lain untuk mencermati penerapan asas-asas, norma dan sinkronisasi hukum, dalam kasus *inkonkreto* atau kenyataanya,[27] yang didasarkan analisa data kualitatif. Berkaitan dengan itu teknis analisis yang digunakan adalah melalui metode kualitatif. Melalui dua cars analisis tersebut hasilnya diharapkan dapat mendeskripsikan penerapan peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku dalam rangka Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri di dalam wlayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara khususnya, dan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

7. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang sistematis, maka penulisan akan dibagi menjadi 6 (lima) bab, yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan, yang berisi antara lain Latar Belakang, Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Teori, Kerangka Konsep; Keaslian Penelitian; Metode Penelitian; dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, yang berisi antara lain Kebijakan Kriminal, Tindak Pidana Narkoba dan Kepolisian Republik Indonesia Sebagai Penegak Hukum.

BAB III Kebijakan Kriminal bagi Personil Polri yang menggunakan narkotika belum berbasis nilai keadilan.

BAB IV Kelemahan-kelemahan kebijakan kriminal bagi personil Polri yang menggunakan narkotika di Polda Sumatera Utara;

BAB V Rekonstruksi Kebijakan, menggambarkan pelaksanaan hukuman rehabilitasi yang efektif dengan melakukan beberapa perubahan dalam beberapa Pasal Undang-Undang Narkotika.

BAB VI berisi kesimpulan dan saran sebagai solusi untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang ada dalam rangka melaksanakan hukuman rehabilitasi terhadap anggota Polri yang menjadi pecandu narkotika

# BAB – II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Kebijakan Kriminal

Hukum selalu berkembang mengikuti gerak perubahan yang sering kali disesuaikan dengan zaman, budaya, sosial, politik bahkan berkembangnya suatu lingkungan dalam masyarakat. Hukum selalu mengalami perubahan-perubahan dan pembaharuan yang digunakan untuk menjawab segala tantangan dan tuntutan pada modern kini. Pembaharuan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membentuk dan menciptakan hukum yang lebih baik sehingga kesejahteraan masyarakat, ketertiban, keamanan dan kedamaian dapat tercapai. Pembaharuan hukum pidana juga di latarbelakangi oleh berbagai aspek kebijakan khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum. Hakikat dari pembaharuan hukum pidana merupakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan

politik hukum pidana (*penal policy*).[38]

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Sehingga kebijakan atau politik hukum pidana atau penal policy merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan pidana.[39] Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana).Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement).[40]

Kebijakan criminal sebagai bagian dari pembaharuan hukum berdasarkan pendekatan kebijakan tidak dapat dilepaskan dari politik hukum pidana. Menurut Mahfud MD, ada hubungan antara politik dan hukum dimana hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai *dependent variable* (variabel terpengaruh) dan politik sebagai *independent variable* (variabel berpengaruh).[41]

Politik hukum pidana (dalam tataran mikro) sebagai bagian dari politik hukum (dalam tataran makro) dalam pembentukan undang-undangan harus mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang berhubungan dengan keadaan itu dengan cara-cara yang diusulkan dan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai agar hal-hal tersebut dapat diperhitungkan dan dapat

[38] Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru,Jakarta, Prenada Media Group, 2010, Halaman. 29
[39] ibid
[40] ibid
[41] Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, LP3ES. 1998. Halaman. 1-2

dihormati.[42] Kebijakan (*beschiking*) adalah suatu produk kewenangan yang sudah berbentuk aturan atau perbuatan dalam mengatur hal-hal yang sebelumnya tidak diatur.Hukum itu bersifat memaksa dengan adanya sanksi yang nyata dan tegas. Hukum (*recht*) berasal dari bahasa latin yang berarti bimbingan atau tuntutan pemerintahan. Sedangkan hukum (*ius*) dalam bahasa latin berarti mengatur atau memerintah yang berpangkal pada kewibawaan. Sehingga dapat dipandang hukum merupakan peraturan yang memaksa, menentukan tingkah laku dalam masyarakat dibuat badan resmi dan pelanggaran akan diberi tindakan yaitu hukuman.[43] Prof. Sudarto, SH pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :[44]

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas / kejahatan (*Criminal Policy*) harus merupakan bagian integral (tak terpisahkan) dari kebijakan yang berorientasi untuk

---

[42] Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, Halaman. 13

[43] Omer, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Informasi Data di Dunia Maya at http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2012/06/27/kebijakan-hukumpidana- terhadap-kejahatan-penyalahgunaan-informasi-data-di-dunia-maya/, 20 otober 2015, 21.30 WIB

[44] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung,2005), Halaman. 1

memberikan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*).

Dalam kesempatan lain Sudarto menjelaskan politik kriminal merupakan "suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menaggulangi kejahatan". Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai "*The Rational Organization of the Control of Crime by Society*".[45] Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah "perlindungan masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat". Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (*social policy*) yaitu kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan berorientasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat. Pada hakikatnya politik kriminal merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Hubungan tersebut dapat digambarkan didalam sekema. Skema tersebut mengemukakan *Criminal Policy as a science of policy.The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy.* Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat dan untuk mencapai tujuan utama yaitu kebahagiaan warga masyarakat (*happines of the citizens*), kebudayaan kultural yang sehat dan unggul ( *a wholesome and cultural living*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) atau untuk mencapai keseimbangan (*equality*).[46] Ditambahkan oleh Barda Nawawi Arief berdasarkan skema tersebut dapat

[45] ibid
[46] ibid

diidentifikasi hal-hal pokok sebagai berikut :[47]

1) Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus menunjang tujuan (goal), *social welfare* (SW) dan *social defense* (SD). Aspek *social welfare* dan social defence yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat immateril, terutama nilai-nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan.
2) Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus dilakukan dengan "pendekatan integral" ada keseimbangan sarana penal dan dan non penal. Karena dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis adalah melalui sarana non-penal karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan dan kelemahan yang bersifat fragmentaris, simplisitis, tidak struktural-fungsional, simptomatik, tidak kausatif, tidak eliminatif, individualistik, atau *offender-oriented*, tidak *victim offender*, lebih bersifat represif/tidak preventif, harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi.

Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*) dan merupakan bagian dari politik sosial (*sosial policy*) yang dilakukan oleh masyarakat dan negara dengan berusaha untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan mendapat

[47] Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Citra Adiya Bakti 2001, Halaman. 74

mencakup ruang lingkup yang luas.[48] Sehingga itu politik kriminal dapat juga dirumuskan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana.[49]

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan 3(tiga) cara yakni : [50]

a. Penerapan hukum pidana(criminal law application)

b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment),

c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment*/mass media).

Berdasarkan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu: [51]

a. Kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal policy). Kebijakan ini lebih menitikberatkan pada tindakan represif (pemberantasan/pembalasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.Kebijakan ini memberikan pedoman agar dapat merumuskan hukum pidana yang baik bagi kepada pembuat undangundang.

b. Kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non-penal policy*) .Kebijakan ini lebih menitikberatkan pada tindakan preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian)sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Dilihat dari sudut politik criminal secara makro dan

[48] Muladi, Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung, Alumni, 2005, Halaman.1
[49] Teguh Prasetyo, Hukum Pidana. Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2010, Halaman. 17
[50] Barda Nawawi Arief, Op. Cit, Halaman. 42
[51] Ibid halaman 42

global, maka upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik criminal.

Dengan demikian Kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas / kejahatan (*Criminal Policy*) harus merupakan bagian integral (tak terpisahkan) dari kebijakan yang berorientasi untuk memberikan perlindungan masyarakat (social *defence policy*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*). Dalam kesempatan lain Sudarto menjelaskan politik kriminal merupakan "suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menaggulangi kejahatan". Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai "*The Rational Organization of the Control of Crime by Society*".[52] Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah "perlindunan masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat".Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (*social policy*) yaitu kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan berorientasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat.[53] Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara represif. Tindakan represif menitik beratkan pada upaya pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana.[54] Dalam bingkai kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang lebih bersifat pragmatis dan

[52] Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan PenyusunanKonsep KUHP Baru), Jakarta : Prenada Media Group. 2010, Halaman. 3
[53] Ibid halaman 4
[54] Soedjono Dirdjosisworo, Ruang Lingkup Kriminologi, Remaja Karya, Bandung, 1987, Halaman.28.

rasional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai. Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai. Terlebih bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya bertujuan membentuk manusia seutuhnya. Apabila pidana yang digunakan sebagai sarana untuk tujuan tersebut, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu, pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau yang paling berharga bagi kehidupan manusia. Sementara itu, Marc Ancel mengemukakan bahwa kebijakan pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada si pembuat Undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-undang dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.[55]

Pada hakekatnya masalah kebijakan hukum pidana disamping menggunakan pendekatan yuridis normative, kebijakan hukum pidana juga harus menggunakan pendekatan yuridis factual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan kompparatif, dan bahkan memerlukan pendekatan komprehensip dari berbagai disiplin ilmu lainnya serta pendekatan integral dengan kebijakan social dan pembangunan nasional. Dengan kata lain masalah kebijakan hukum pidana termasuk salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat

[55] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Loc. Cit, Halaman. 23

perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor–faktor yang membawa timbulnya kejahatan– kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai "*older philosophy of crime control*"[56] Menurut Barda Nawawi Arief, hakikat adanya pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis. Termasuk dalam klasifikasi masalah yang demikian antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan / merumuskan suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana dan sanksi yang dapat dikenakan. Pada hakikatnya pendekatan kebijakan bukan hanya berorientasi pada kebijakan hukum pidananya saja tetapi juga melalui pendekatan kebijakan sosial yang sasaran utamanya adalah pembangunan dan perwujudan hukum nasional kearah yang lebih baik. Pendekatan kebijan hukum pidana sangat penting terutama terhadap persoalan-persoalan sentral mengenai penentuan perbuatan pidana sehingga atas perbuatan pidana tersebut dapat dikenakan sanksi kepadanya. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagai bagian dari hukum positif (hukum yang berlaku di suatu wilayah dalam waktu tertentu) telah dinyatakan mulai berlaku pada tanggal

[56] Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Balai Penerbitan Undip, Semarang, 1996, Halaman. 3

12 Oktober 2009 dan diundangkan dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Politik hukum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini dengan pertimbangan:[57]

a. Bahwa kebijakan pemerintah terhadap narkotika dan merupakan pertimbangan yang menjadi dasar pembenaran perbuatan (*act of choice*), yang juga sebagai latar belakang pertimbangannya, ialah Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum.
b. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terusmenerus, termasuk derajat kesehatannya;
c. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
d. Bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan

[57] Siswanto, Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009), Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Halaman. 20-21

pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

e. Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

f. Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini, diatur beberapa ketentuan, yang membahas pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam Undang-undang narkotika tersebut. Ketentuan tentang dasar, asas

dan tujuan pengaturan Narkotika, yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini, diselegarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilainilai ilmiah dan kepastian hukum. Sedangkan tujuan Undang-undang narkotika ini adalah:

a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Ruang lingkup Undang-undang Narkotika mencakup pengaturan Narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Serta narkotika dalam Undangundang ini digolongkan ke dalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II; dan Narkotika Golongan III. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penentuan perbuatan yang dijadikan tindak pidana mempunyai hubungan yang erat dengan masalah “kriminalisasi” yaitu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses kriminalisasi tersebut diakhiri dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan dimana perbuatan tersebut diancam dengan suatu sanksi berupa pidana

(tahap formulasi), terbentuklah peraturan hukum pidana yang siap diterapkan oleh hakim (tahap aplikasi), dan selanjutnya apabila dijatuhkan pidana dilaksanakan oleh kekuasaan administrasi (tahap eksekusi). Hal ini sejalan dengan Asas legalitas menghendaki tidak hanya adanya ketentuan-ketentuan yang pasti tentang perbuatan yang bagaimana dapat dipidana, tetapi juga menghendaki ketentuan atau batas yang pasti tentang pidana yang dapat dijatuhkan. Asas kesalahan menghendaki agar hanya orang-orang yang benar-benar bersalah sajalah yang dapat dipidana, tiada pidana tanpa kesalahan. Undang-undang narkotika ini masih menggunakan sarana politik penal (penal policy) dalam menanggulangi bahaya penyalahgunaan Narkotika. Contoh kebijakan penal tersebut tertuang dalam hal pemidanaan yang di atur dalam pasal 111 sampai dengan pasal 148 yang mengatur tentang perbutan-perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, yakni:[58]

a. Tindak pidana yang berkaitan dengan penggolongan narkotika dan prekursor narkotika.
b. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor atau setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana dalam pasal 111 sampai dengan pasal.
c. Dalam hal tindak pidana dalam pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129 yang dilakukan oleh korporasi atau dilakukan secara terorganisir.
d. Membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana dalam pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129

[58] Siswanto, Op.Cit, Halaman. 2547

Undang-undang ini.

e. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri atau keluarga dari pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut.

f. Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh para pejabat yang berkaitan dengan narkotika.

g. Ketentuan lain dalam rangka pemeriksaan terhadap tindak pidana narkotika yang meliputi:

1. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dalam pasal 111 sampai dengan psal 126 dan pasal 129;
2. Pemberantasan tindak pidana tersebut tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidan penjara seumur hidup dan pidana penjara 20 tahun;
3. Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan/ tindak pidana precursor narkotika di muka sidang pengadilan;
4. Narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika dan/ atau tindak pidana prekursor narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika dirampas untuk Negara;

5. Saksi yang member keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika di muka pengadilan dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda;
6. Apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;
7. Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 tahun melakukan pengulangan tindak pidana narkotika dalam pasal 111 sampai dengan pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan sepertiga.

Barda Nawawi mengutarakan masih pentingnya menggunakan sarana penal atau pidana dalam rangka menanggulangi kejahatan yaitu:

a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Kebijakan dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, disamping dengan menggunakan teori-teori represif dan prefentif, tidak kalah

pentingnya ialah dengan menggunakan strategi pengobatan dan rehabilitasi. Hal ini mengandung pemikiran bahwa para korban penyalahgunaan narkotika, tidak hanya sekedar dianggap sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi juga dianggap sebagai korban kejahatan yang memerlukan penyembuhan dan rehabilitasi. Program rehabilitasi dan rehabilitasi sosial, difokuskan untuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/ atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain melalui pengobatan dan/ atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu dan korban penyalahgunaan dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagaaman dan tradisional. Sekali lagi kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Oleh karenanya pembuatan undang undang pidana, merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan sosial masyarakat, meliputi politik sosial, sehingga diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan dan sekaligus perlindungan masyarakat. Undang-undang narkotika, adalah suatu hasil dari kebijakan legislatif yang rasional, bertujuan untuk pencegahan dari bahayanya narkotika bagi umat manusia, termasuk upaya pencegahan perdagangan gelap narkotika

Satjipto Raharjo sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh Nyoman

Sarikat Putra mengatakan, bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum/undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan.[59]

Dalam rangka membangun kerangka dasar hukum nasional, maka perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi dibidang hukum. Oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti perubahanperubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini merupakan proses sosial dan proses politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh luas. Proses pembentukan Undang-undang ini akan memberi bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat terutama dalam hal penyalahgunaan narkotika. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini digunakan oleh penguasa untuk mencapai dan mewujudkan tujuantujuan tertentu. Kebijakan hukum pidana dalam pandangan politik hukumnya, dikatakan bahwa politik hukum di sini merupakan kebijakan dasar pemerintah (penyelenggara Negara) dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di

[59] Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, Halaman. 189

masyarakat, untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Pengertian pemerintah adalah meliputi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan keputusan bersama antara DPR Republik Indonesia dengan Presiden Republik Indonesia sebagai produk hukum dari hasil proses politik.

Khusus terhadap pecandu atau penyalahguna Narkotika yang telah ketergantungan pakai untuk dilakukan pelaksanaan keputusan Rehabilitasi sebagaimana bunyi pasal 4, 54, 55,56, 57, 58, 59, 103 dan 127 serta pasal 128 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

Pasal 4

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib

melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

(1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.

(2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 57

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 58

Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pasal 59

(1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Menteri.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 103

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pasal 127 (1) Setiap Penyalah Guna:

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara

paling lama 4 (empat) tahun;

b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 128

(1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.

(3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali

masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.

(4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

**B. Penggolongan Narkotika**

Sebelum membahas aturan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota Polri, terlebih dahulu perlu dijelaskan penggolongan narkotika. Menurut UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:[60]

a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
b. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mengakibatkan potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. (Daftar narkotika golongan I, II dan III terlampir)

[60] UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, Halaman 12

**GOLONGAN DAN JENIS PREKURSOR**

TABEL I

1.Acetic Anhydride.

2.N-Acetylanthranilic Acid.

3.Ephedrine.

4.Ergometrine.

5.Ergotamine.

6.Isosafrole.

7.Lysergic Acid.

8.3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone.

9.Norephedrine.

10.1-Phenyl-2-Propanone.

11.Piperonal.

12.Potassium Permanganat.

13.Pseudoephedrine.

14.Safrole.

TABEL II

1.Acetone.

2.Anthranilic Acid.

3.Ethyl Ether.

4.Hydrochloric Acid.

5. Methyl Ethyl Ketone.

6. Phenylacetic Acid.

7. Piperidine.

8. Sulphuric Acid.

9. Toluene.

Narkotika memiliki tiga sifat yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkramannya yaitu daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat, daya toleran (penyesuaian) dan daya bitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009, jenis narkotika dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu:

a. Narkotika golongan 1 (satu) adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.

b. Narkotika golongan 2 (dua) adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah petidin, benzetidin, betamatedol, dan lain-lain

c. Narkotika golongan 3 (tiga) adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah kodein Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan ke dalam tiga golongan yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis, narkotika sintetis:

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuhan (alam) contohnya:

1) Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus. Tumbuhan ini banyak tumbuh di beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Pulau Jawa dan lain-lain. Daun ganja sering digunakan sebagai bumbu penyedap masakan. Bila digunakan sebagai bumbu masak daya adiktifnya rendah. Namun, tidak demikian bila dengan dibakar asapnya dihirup. Cara penyalahgunaanya dengan dikeringkan dan dicampur dengan tembakau rokok atau dijadikan lalu dibakar serta dihisap.
2) Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa. Daun ganja, hasis, dan mariyuana juga dapat disuling dan diambil sarinya. Dalam bentuk cair, harganya sangat mahal. Gunanya adalah untuk disalahgunakan oleh pemadat-pemadat “kelas tinggi”.
3) Koka adalah tanaman perdu mirip pohon kopi. Buahnya yang matang bewarna merah seperti biji kopi. Dalam komunitas masyarakat Indian kuno, biji koka sering digunakan untuk menambah kekuatan orang yang berperang atau berburu binatang. Koka kemudian diolah menjadi kokain.
4) Opium adalah bunga dengan bentuk warna yang indah. Dari getah bunga opium dihasilkan candu (opiat). Di Mesir dan daratan Cina, opium dulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi

kekuatan, atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka saat berperang atau ketika sedang berburu. Narkotika Semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya:

1) Morfin dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan). Morphin merupakan hasil olahan dari opium atau candu mentah dan merupakan alkaloida yang terdapat dalam opium berupa serbuk putih. Konsumsi morphin biasa dilakukan dengan cara dihisap atau disuntikkan. Karena morphin tergolong dalam jenis turunnya aktifitas neuron, pusing, perubahan perasaan dan kesadaran berkalut.
2) Kodein dipakai untuk obat penghilang batuk
3) Heroin merupakan senyawa narkotika yang sangat keras dengan sifat adiktif yang tinggi, berbentuk butiran, tepung atau cairan.

Jenis heroin yang populer saat ini saat ini adalah "putauw". Heroin diperoleh dari morphin melalui suatu proses kimiawi yang dikenal dengan istilah "*acetylion*" (karena menggunakan *acetica anhidrida dan acety chloride*). Heroin (*diacetylmorphine*) adalah obat illegal yang sangat adiktif dan penggunaannya merupakan masalah serius di amerika. Heroin adalah golongan opiat yang paling banyak disalahgunakan dan paling adiktif. Heroin diproses dari morphin,

suatau zat alami yang di ekstrak dari biji varietas tanaman poppy tertentu.

4) Kokain olahan dari biji koka. Kokain merupakan berasal dari tanaman *Erythroxylon coca* di Amerika Selatan. Biasanya daun tanaman ini dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan, yaitu dengan cara dikunya. Kokain dapat memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat . Narkotika Sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan obat (subsitusi).

Contohnya:

1) Petidin adalah obat untuk bius local, operasi kecil, sunat, dan lain-lain.
2) Methadone adalah obat untuk pengobatan pecandu narkoba.
3) Naltrexone adalah obat untuk pengobatan pecandu juga.

Selain untuk pembiusan, narkotika sintesis biasanya diberikan oleh dokter kepada penyalahguna narkoba atau pecandu untuk menghentikan kebiasaannya yang tidak kuat melawan sugesti (relaps) atau sakaw. Narkotika sintetis berfungsi sebagai obat "pengganti sementara". Bila sudah benar-benar bebas, asupan narkoba sintetis ini dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya berhenti total.

## C. Tindak Pidana Narkoba

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai

perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas *(Principle of legality)* asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari Von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.

Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:[61]

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.

2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.

3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yaitu, straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari starbaarfeit tetapi tidak terdapat penjelasannya. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*.[62]

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk

[61] Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, halaman. 25-27
[62] Ibid, halaman. 28

adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaan.

Dikatakan bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.[63]

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah "pidana" dengan istilah "hukuman". Sudarto mengatakan bahwa istilah "hukuman" kadangkadang digunakan untuk pergantian perkataan "straft", tetapi menurut beliau istilah "pidana" lebih baik daripada hukuman[64]. Menurut Muladi "Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukan cirri-ciri atau

[63] Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003,halaman.33
[64] Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, halaman. 8

sifat-sifatnya yang khas". Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan strafbaarfeit.

Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai strafbaarfeit tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.[65]

Pengertian tindak pindana menurut para ahli: [66]

1. Pengertian Tindak Pidana menurut Simons ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
2. Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
3. Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang

[65] Muladi dkk, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni Bandung, 1992, halaman 13
[66] http://prasko17.blogspot.co.id/2011/05/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html

hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

4. Menurut E.Utrecht, Pengertian Tindak Pidana dengan isilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (handelen atau doen positif) atau suatu melalaikan (natalen-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).
5. Sementara itu, Moeljatno meyatakan bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.
6. Van Hmamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari simons, tetapi menambahkan adanya "sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum". Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi lima unsur, sebagai berikut :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum,
2. Bertentangan dengan hukum,
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld),
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya,
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undangundang

mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana. Rumusan mengenai definisi tindak pidana menurut para ahli hukum. Wirjono mengatakan bahwa:[67] "Dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni pasal 12 (1). Secara substansif, perngertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam". Teguh Prasetyo merumuskan juga bahwa:[68] "Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang berifat pasif.

Tindak Pidana menurut Jan Remelink, yaitu:[69] "Perilaku yang ada pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat di tolerir dan harus di perbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum". Dalam KUHP sendiri, tindak pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku II dan buku III KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian strafbaarfeit, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

Unsur-unsur tindak pidana

---

[67] Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003,halaman.33

[68] Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman.49

[69] Jan Remelink, Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab UndangUndangHukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia), Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, halaman. 1

1. Unsur formal meliputi :

a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.

b. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.

d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

2. Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak

patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Lamintang menjabarkan unsur-unsur subjektif yaitu:[70]

a. Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa).

b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll.

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Adami menjabarkan unsur-unsur objektif yaitu:[71]

*a*. Sifat melawan hukum atau *wederrechttelijkheid.*

b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri.

c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

---

[70] Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman.24

[71] Adami Chawazi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, halaman.79

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:[72]

a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.

b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum.

d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat. Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum.

Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya hanya benar-benar dipidana.

R. Tresna dalam buku Adami Chawazi berpendapat tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:[73]

a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia).

b. Yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan.

c. Diadakan tindakan penghukuman.

Sifat melawan hukum dalam tindak pidana adalah suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Tidak semua tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum karena ada alasan pembenar, berdasarkan pasal 50, pasal 51

[72] Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, 2011, halaman.98

[73] Adami Chazawi, Op Cit, halaman.80

KUHP. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :[74]

a. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang.

b. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undangtetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Sifat melawan hukum untuk yang tercantum dalam undang-undang secara tegas haruslah dapat dibuktikan. Jika unsur melawan hukum dianggap memiliki fungsi positif untuk suatu delik maka hal itu haruslah dibuktikan. Jika unsur melawan hukum dianggap memiliki fungsi negative maka hal itu tidak perlu dibuktikan. Sifat Kesalahan, berkaitan dalam asas hukum pidana yaitu *Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sir rea*, bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, maka pengertian tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud pertanggungjawaban tindak pidana.

Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan opzet merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan opzettelijk, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan. Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu.

Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya

[74] Erdianto Efendi,Op Cit, halaman.33

itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan willens atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur wettens atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

Disamping unsur kesengajaan diatas ada pula yang disebut sebagai unsur kelalaian atau kelapaan atau culpayang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau onbewuste schuld dan kealpaan disadari atau bewuste schuld. Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati.

Wilayah culpa ini terletak diantara sengaja dan kebetulan. Kelalaian ini dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, atau pelaku dapat tidak melakukan perbuatan itu sama sekali.

Dalam culpa atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu

akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang. Maka dari uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa jika ada hubungan antara batin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang itu, maka hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu. Teori pemidanaan dibagi dalam tiga golongan besar, dapat diuraikan sebagai berikut:[75]

1. Teori absolut atau teori pembalasan (retributive/vergeldings theorieen). Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.
2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*) Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mampunyai tujuan tertentu yang bermafaat. Dasar pembenar adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang yang membuat kejahatan (quia peccatum est) melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (ne peccetur). Menurut teori ini, pemidanaan merupakan sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.
3. Teori gabungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pidana itu

[75] Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Bina Cipta, Bandung, 1996

mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

a) Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*).

b) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*).

c) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya menganggu ketahanan nasional.

Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional.36Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sitensis maupun semi sitensis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa pengertian narkotika: "Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifatsifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.[76]

[76]Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia, Alumni, Bandung, 1987, halaman.7

Narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanaman papever, opium mentah, opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfin dan kokaina. Bahan lain, baik alamiah, atau sitensis maupun semi sitensis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan mentri kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan, dan campuran- campuran atau sediaan-sediaan yang mengandung garam-garam atau turunan-turunan dari morfina dan kokaina, atau bahanbahan lain yang alamiah atau olahan yang ditetapkan mentri kesehatan sebagai narkotika.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan pasal 6 ayat 1 :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Kebijakan Hukum Pidana Yang Tertuang Dalam Undang- Undang Narkotika Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika.

Siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undangundang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Sebagai pengguna Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.
2. Sebagai pengedar Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Nnarkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 + denda.
3. Sebagai produsen Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undangundang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda.

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika.Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk

menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN).

## D. Kepolisian Republik Indonesia Sebagai Aparat Penegak Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 ayat (1) Polisi Republik Indonesia merupakan Kepolisian Nasional dan bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. Polri memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri) dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Sejak tanggal 19 Agustus 1945 Polri dibentuk dan dikenal sebagai Kepolisian, Polri mencoba memakai sistem kepolisian federal membawahi Departemen Dalam Negeri dengan kekuasaan terkotak-kotak antar provinsi bahkan antar *karasidenan*. Maka mulai tanggal 1 Juli 1946 Polri menganut sistem

Kepolisian Nasional (*The Indonesian National Police*). Sistem kepolisian ini dirasa sangat pas dengan Indonesia sebagai negara kesatuan, karenanya dalam waktu singkat Polri dapat membentuk komando-komandonya sampai ke tingkat sektor (kecamatan), sistem inilah yang dipakai Polri sampai sekarang. Dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah "politeia" di Jerman dikenal dengan istilah "polizei" di Amerika Serikat dikenal dengan nama "sheriff.

Istilah "polisi" pada semulanya berasal dari perkataan Yunani "*Politeia*", yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan "Polis". Jadi pada jaman itu arti "Polisi" demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.[77]

Polisi adalah alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa:[78]

> "Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat".

Menurut Van Vollenhoven yang dikutip oleh Momo Kelana istilah polisi didefenisikan sebagai:[79]

---

[77] Momo Kelana, *Hukum Kepolisian,* PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2014, hal 13.

[78] Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme danReformasi POLRI*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2015.

[79] Van Vollenhoven, Cornelis, *Penemuan Hukum Adat,* Djambatan, Jakarta, 2016.

"organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah".

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah:[80]

"suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia [81]menyebutkan:

Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah;
b. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan negara;
c. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
d. menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
e. hormat-menghormati antar pemeluk agama;
f. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
g. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;

[80] W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, 2016, hal 763.

[81] Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

h. melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan/atau merugikan negara/ pemerintah;
i. bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat;
j. berpakaian rapi dan pantas.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

a. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaikbaiknya kepada masyarakat;
b. memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat;
c. menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesiaserta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab;
e. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
f. menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
g. bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
h. membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;
i. memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya;
j. mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;
k. memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier;
l. menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang;
m. menaati ketentuan jam kerja;
n. menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya;
o. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.

Pasal 5

Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. melakukan kegiatan politik praktis;
c. mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
d. bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;

e. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;
f. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
g. bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;
h. menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
i. menjadi perantara/makelar perkara;
j. menelantarkan keluarga.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

a. membocorkan rahasia operasi kepolisian;
b. meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan;
c. menghindarkan tanggung jawab dinas;
d. menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi;
e. menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya;
f. mengontrakkan/menyewakan rumah dinas;
g. menguasai rumah dinas lebih dari 1 (satu) unit;
h. mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak;
i. menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi;
j. berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani;
k. memanipulasi perkara;
l. membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan/atau kesatuan;
m. mengurusi, mensponsori, dan/atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
n. mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materil perkara;
o. melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya;
p. melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
q. menyalahgunakan wewenang;
r. menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
s. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
t. menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas;
u. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas
secara tidak sah;

v. memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya;
w. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
x. memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

Pasal 8

(1) Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik.
(2) Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan Ankum untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Pasal 9

Hukuman disiplin berupa:
a. teguran tertulis;
b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
c. penundaan kenaikan gaji berkala;
d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
e. mutasi yang bersifat demosi;
f. pembebasan dari jabatan;
g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 10

(1) Bilamana ada hal-hal yang memberatkan pelanggaran disiplin, penempatan dalam tempat khusus sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, dapat diperberat dengan tambahan maksimal 7 (tujuh) hari.
(2) Hal-hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila pelanggaran dilakukan pada saat:
    a. negara atau wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat,
    b. dalam operasi khusus kepolisian, atau
    c. dalam kondisi siaga.

Pasal 11

(1) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dijatuhkan secara kumulatif.
(2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijatuhkan secara alternatif atau kumulatif.

Pasal 12

(1) Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana.
(2) Penjatuhan hukuman disiplin gugur karena pelanggar disiplin:
    a. meninggal dunia,
    b. sakit jiwa yang dinyatakan oleh dokter dan/atau badan penguji kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh Undang-Undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk padatugas dan wewenang yang diberikan Undang-Undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya norma-norma yang berlaku di masyarakat.

1. Fungsi Polisi

Adapun fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

> “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih menjabarkan fungsi pemerintah dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.

Adapun dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

> “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggihak asasi manusia”.

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian mengtur hal-hal yang berkaitan dengan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut:

> “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi, yaitu sebagai berikut:

Dimensi yuridis

Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri atas dua fungsi, yaitu sebagai berikut:

1) Kepolisian umum

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan Undang-Undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum, yaitu sebagai berikut:

a) Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik;
b) Lingkungan kuasa orang;
c) Lingkungan kuasa tempat; dan
d) Lingkungan kuasa waktu.

2) Kepolisian khusus

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa Undang-Undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa Undang-Undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.

b. Dimensi sosiologis

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban dilingkungannya,

sehingga dari waktu kewaktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban dilingkungannya, sehingga dari waktu kewaktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:[82]

a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
c. Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
d. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari padapenindakan kepada masyarakat.

[82] Sadjijono, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 2013, hal 17.

e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sebagai berikut:[83]

a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakatdalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasidan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinyagangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturannegara.

b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:

   1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau

[83] Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan danHarapan*, POLRI, Bandung, 2015, hal 255.

tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

2. Tugas Pokok Polri

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
b. Menegakan hukum.
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggungjawabnya dimasyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas, yaitu sebagai berikut:

a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.

d. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang daat membahayakan masyarakat dan negara.

e. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib di dalam mayarakat.

Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas:

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan;

d. Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya;

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

# BAB - III

# KEBIJAKAN KRIMINAL BAGI PERSONIL POLRI YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

## A. KEBIJAKAN PENAL

Pada pembahasan selanjutnya dijelaskan mengenai pemidanaan yang berisi tentang pengertian pemidanaan, kebijakan pemidanaan, dan tujuan pemidanaan. Pembahasan ini sangat penting adanya, karena secara mendasar terlebih dahulu dikemukakan permasalahan pemidanaan ini, sehingga diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman terhadap istilah pemidanaan tersebut. Oleh karena itu pada pembahasan ini mengarah kebijakan penal *policy* dalam menanggulangi anggota Polri pada umumnya, dan khususnya bagi anggota Polri Daerah Sumatera Utara.

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana.[84] Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap

[84] Chairul Huda, *Dan Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada PertanggungjawabanPidana Tanpa Kesalahan, Kenna,* Jakarta, 2008, Halaman. 128.

kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini pemidanaan merupakan "perwujudan dari celaan tersebut".

Chairul Huda menyatakan memang pengertian pemidanaan secara logika dan kebahasaan berisi tentang (dasar) penjatuhan pidana. Secara abolisionis seperti Hulsman masih mengakui pidana jika hal itu mendapat legitimasi. Dikatakannya, sekarang kata 'pidana' tidak netral lagi; dia sudah mengandung tuntutan atas legitimasi. Legitimasi yang dituntutnya di sini adalah persetujuan pembuat. Dalam konteks pembahasan penelitian ini, legitimasi atas pemidanaan hanya dapat dipenuhi jika pembuat memiliki kesalahan dalam melakukan tindak pidana. Minya, pembuat setuju menerima pidana, jika kesalahannya dapat dibuktikan.

**1. Kebijakan Pemidanaan**

Menurut Mahmud Mulyadi istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yaitu *"policy"* atau bahasa belanda *"politiek"*. Istilah ini dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan kata "politik", oleh karena itu kebijakan hukum pidana bisa disebut juga politik hukum pidana. Berbicara mengenai kebijakan pemidanaan, maka tidak terlepas dari pembicaraan mengenai politik hukum pidana, oleh karena itu dalam penelitian ini sangat penting untuk dibicarakan secara umum tentang politik hukum.[85]

[85] Menurut Kamus Hukum dijelaskan bahwa kebijakan adalah sesuatu yang menjadi garis besar dan rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi; Arah tindakan yang memiliki maksud yang ditetapkan oleh seseorang aktor atau

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, politik hukum adalah displin hukum yang mengkhususkan dirinya pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh masyarakat tertentu.[86] Pendapat lainnya dikemukakan oleh Soedarto politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang balk dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan.[87]

Solly Lubis juga menyatakan bahwa pilitik hukum adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[88] Sedangkan menurut Mahfud MD, menjelaskan politik hukum adalah sebagai kebijakan mengenai hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Hal ini juga mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Dalam konteks ini hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai pasal-pasal

---

sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perbuatan. (Lihat: M. Marwan & Jimmy P. *Kamus Hukum,* Reality Publisher, Jakarta, Halaman. 334).

[86] Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar I/mu Hukum,* Rajawali Press, Jakarta, 1991, Halaman. 48.

[87]Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana,* Alumni, Bandung, Alumni, 1983, Halaman. 159.

[88] Solly Lubis, *Serba Sethi Politik dan Hukum,* Mandar Maju, Bandung, 1989, Halaman. 49.

yang bersifat imperatif, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataannya bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materinya (pasal-pasal), maupun dalam penegakannya.[89]

Berdasarkan pengertian di atas dianalisa bahwa politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana politik pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini. Hal ini juga berkaitan dengan konseptualisasi hukum pidana yang paling balk untuk diterapkan.[90]

Mengutip pendapat Sudarto bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan dalam rangka mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dengan memenuhi syarat keadilan dan Jaya guna.[91] A. Mulder menyakatan ruang lingkup politik hukum pidana adalah garis kebijakan yang menentukan sebagai berikut: (a). Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui, (b). Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah

---

[89] Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998, Halaman. 1-2. Para ahli juga mengemukakan pengertian politik hukum, antara lain adalah Abdul Hakim Nusantara menyatakan politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan hukum *(legal policy)* yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tersebut. Hal yang sama dikemukakan oleh C.F.G. Sunaryati Hartono, menyatakan politik hukum adalah sebagai alat *(tool)* atau sarana dan Iangkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita- cita bangsa Indonesia. (Lihat: Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Halaman. 30-31).

[90] Mahmud Mulyadi, op.cit., Halaman. 66.

[91] Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, Halaman.20.

terjadinya kejahatan, (c). Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.[92]

Berdasarkan pengertian politik hukum pidana yang dikemukakan A. Mulder di atas, maka ruang Iingkup kebijakan hukum pidana ini sesungguhnya meliputi masalah yang cukup luas, yaitu meliputi evaluasi terhadap subtansi hukum pidana yang berlaku saat ini untuk pembaruan suntansi hukum pidana pada masa akan datang, dan bagaimana penerapan hukum pidana ini melalui komponen sistem paradilan pidana, serta yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pencegahan terhadap kejahatan. Upaya pencegahan ini berarti bahwa hukum pidana juga harus menjadi salah satu instrumen pencegah kemungkinan terjadinya kejahatan. Ini juga berarti bahwa penerapan hukum pidana harus mempunyai pengaruh yang efektif untuk mencegah sebelum suatu kejahatan terjadi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dianalisa bahwa kebijakan pemidanaan merupakan satu kebijakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan pidana, sehingga diperlukan berbagai instrumen hukum untuk mencegah kejahatan pidana. Oleh karena itu kebijakan pemidanaan ini sangat perlu untuk menegakkan dan menerapkan hukum secara efektif dan terarah guna di kemudian hari dapat meminimalisir kejahatan pidana yang ada di masyarakat.

**2. Tujuan Pemidanaan**

---

[92] Barda Nawawi Arief, *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Citra Aditya Bakti, Bandung,1996,

Setelah menjelaskan pengertian dan kebijakan pemidanaan, selanjutnya dijelaskan tujuan dari adanya pemidanaan. Semua hukum yang ditetapkan dalam bentuk peraturan yang tertulis dan juga yang tidak tertulis mempunyai tujuan, termasuk di dalamnya dalam pemidanaannya. Setiap kasus pidana yang dapat dipastikan terdapat unsur pidananya, konsekuensinya pasti dipidana. Begitu pentingnya terhadap pemidanaan ini, maka pada tulisan ini dijelaskan tujuan pemidanaan berdasarkan teori-teori yang dijelaskan para ahli hukum pidana.

*a.* Teori *Retributif*

Pelopor teori *retributif* ini adalah Kant. [108] Paham ini sangat berpengaruh dalam hukum pidana, terutama dalam menentukan tujuan pemidanaan. Pada pokoknya, paham ini menentukan bahwa tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan adalah membalas perbuatan pelaku. Hal ini umumnya dijelaskan dengan teori *retributif* atau teori pembalasan. Teori ini diikuti secara luas oleh para ahli hukum pidana seperti Van Bemmelen, mengatakan,"pada dasarnya setiap pidana adalah pembalasan." Hal yang sama juga dikemukakan oleh Knigge yaitu "menghukum pada dasarnya adalah melakukan pembalasan, dan hal itu bukan suatu hal yang jelek dalam dirinya sendiri, melakukan pembalasan sebagai reaksi atas perilaku yang melanggar norma adalah tindakan manusia yang teramat wajar. [93]

Menurut Romli Atmasasmita sebagaimana dikutip oleh Mahmud

[93] Jan Remmelink, *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (terjemah. P.Moeliono), Gramdia, Jakarta, 2003, Halaman. 618.

Mulyadi, menyatakan penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dalam teori retributif ini mempunyai sandaran pembenaran sebagai berikut:[94]

1. Dijatuhkannya pidana akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya, maupun keluarganya. Perasaan ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe aliran retributif ini disebut *vindicative;*
2. Penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lainnya bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, maka akan menerima ganjarannya. Tipe aliran retributif ini disebut *fairness.*
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya perbandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe aliran retributif ini disebut *proportionality.*

Menurut Chairul Huda pada pokoknya teori retributif ini tujuan pengenaan pidana adalah membalas atas tindakan pidana yang dilakukan oleh pembuat.

Dengan demikian tindakan pembalasan setimpal ini dilandaskan pada pemikiran bahwa setiap individu bertanggung jawab dan mempunyai kebebasan penuh secara rasional dalam mengambil keputusan. Sedangkan dasar pemikiran secara politik disandarkan bahwa setiap individu berhak atas penghargaan dan harga diri yang sama. Seorang pelaku kejahatan dalam

[94] Mahmud Mulyadi, *op.cit.*, Halaman. 71-72.

kondisi ini tidak kehilangan haknya atas penghukuman tersebut, dan mempunyai hak untuk tidak dihukum secara tidak proposional terhadap kejahatan yang dilakukannya.

Proposional merupakan kunci dari konsep teori pembalasan setimpal. Ukuran yang utama dari proposionalitas ini adalah semua ukuran dari tingkatan pemidanaan ini tidak boleh melewati batas secara kesesuaian dengan keseriusan suatu perbuatan.[95]

*b.* Teori *Deterrence*

Tujuan yang kedua dari pemidanaan adalah *"deterrence"*. Terminologi *"deterrence"* menurut Zimring dan Hawkins, digunakan Iebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pemidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Namun, dari ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.[96]

Nigel walker menamakan aliran ini sebagai paham reduktif karena dasar pembenaran dijatuhkannya pidana dalam pandangan aliran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Penganut reduksi meyakini bahwa pemidanaan dapat mengurangi pelanggaran melalui satu atau beberapa cara berikut ini:

Pencegahan terhadap pelaku kejahatan yaitu membujuk si pelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan;

---

[95] ibid
[96] Ibid halaman 72

5. Pencegahan terhadap pelaku yang potensial, dalam hal ini memberikan rasa takut kepada orang lain yang potensial untuk melakukan kejahatan dengan melihat contoh pidana yang telah dijatuhkan kepada si pelaku sehingga mendatangkan rasa takut akan kemungkinan dijatuhkan pidana kepadanya;
6. Perbaikan si pelaku, yaitu memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dan ancaman pidana;
7. Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan, sehingga dengan cars ini, secara tidak langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan;
8. Melindungi masyarakat melalui pidana penjara yang cukup lama.

Tujuan pemidanaan sebagai *deterence effect* sebenamya telah menjadi sarana yang cukup lama dalam kebijakan penanggulangan kejahatan karena tujuan *detereence* ini berakar dari aliran klasik tentang pemidanaan, dengan dua orang tokoh utamanya, yaitu Cessare Beccaria (1738-1794) dan Jeremy Bentham (1748-1832). Beccaria menegaskan dalam bukunya yang berjudul *dei Delitti e De/le Pene* (1764) bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah seseorang supaya tidak melakukan kejahatan, dan bukan sebagai sarana balas dendam masyarakat. Tujuan pemidanaan sebagai *deterrence effect* ini, dapat dibagi menjadi pencegahan umum *(general deterrence)* dan pencegahan khusus.

c. Teori Treatment

Teori ini berpendapat, pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan dimaksudkan untuk memberikan tindakan perawatan (rehabilitasi) dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari hukuman. Pada dasarnya teori ini dilandasi pemikiran aliran positif. Aliran positif ini dipelopori oleh Cesare Lambroso (1835-1909), Enrico Ferri (1856-1928) dan Raffaele Garafalo 91852-1934).[97] Aliran positif melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengkomfirmasi fakta-fakta di lapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan. Aliran ini beralaskan faham *determinisme*, menyatakan seseorang yang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas *(free will)*, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pribadinya sendiri, faktor biologis dan Iingkungan. Oleh karena itu, pelaku kajahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan diberikan perlakuan *(teratment)* untuk resosialisasi dan perbaikan si pelaku. Perbuatan seseorang tidak bisa hanya melihat dari aspek yuridis semata terlepas dari orang yang melakukan.

Perbuatan seseorang itu harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadi, biologis dan Iingkungan.

Aliran ini menolak pandangan adanya pembalasan berdasarkan

[97] Mahmud Mulyadi & Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi,PT.* SOFMEDIA, Jakarta, 2010. Halaman. 99.

kesalahan subjektif. Aliran positif melihat kejahatan tidak dari sudut pandang perbuatannya, melainkan pelakunya sendiri yang harus dilihat dan didekati secara nyata dan persuasif. Tujuan pendekatan kepada pelaku ini adalah untuk mempengaruhi pelaku kejahatan secara posiitf sepanjang masih dapat dibina dan diperbaiki.

Pokok-pokok pikiran yang melandasi aliran ini sebagai berikut:[98]

1. Kehendak bebas (free *will)* adalah ilusi, karena tingkah laku manusia ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang terkandung di dalam kekauatan diri seseorang untuk mengubahnya;
2. Tanggung jawab moral juga merupakan ilusi, karena dosa tidak dapat dibebankan kepada suatu tingkah laku yang memang dibentuk;
3. Tingkah laku manusia seharusnya dipelajari secara ilmiah dan dikendalikan;
4. Fungsi hukum pidana seharusnya secara sederhana dan urni membawa seseorang ke dalam suatu proses pengubahan kepribadian tingkah laku mereka yang telah melakukan kejahatan sehingga mereka tidak akan melakukannya lagi di masa mendatang.

Bertolak dari pokok-pokok pikiran di atas, aliran ini menegaskan bahwa tantangan yang harus dihadapi dalam memepertahankan dan menyelamatkan Hukum Pidana adalah agar tetap memepertahankan Hukum Pidana dalam kedudukan dan perspektif retributivisme atau meninggalkan

[98] Ibid halaman 100

setiap upaya untuk memberikan beban tanggung jawab pidana terhadap kejahatan.

*d.* Teori *Social Defece*

Teori *social defence* merupakan aliran pemidanaan yang berkembang setelah perang dunia H. Aliran ini dipelopori Fillipo Gramatica. Selanjutnya perkembangannya, aliran ini terpecah menjadi 2 (dua) bagian yaitu: aliran radikal dan aliran moderat. Pandangan radikal dipelopori oleh F. Gramatica. Menurutnya hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum yang ada sekarang, sedangkan aliran atau pandangan moderat, dipelopori oleh Marc Ancel. Menurut Marc Ancel, tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial yaitu seperangkat peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Beberapa pokok dari aliran ini dalam pandangan moderat, antara lain:

1. Pandangan moderat bertujuan mengintegrasikan ide-ide atau konsep-konsep perlindungan masyarakat ke dalam konsep baru Hukum Pidana;
2. Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai Hukum Pidana dan tidak kurang pentingnya dari kehidupan masyarakat itu sendiri;
3. Dalam menggunakan sistem Hukum Pidana, aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi dan teknis-teknis yang terlepas dari kenyataan sosial. Ini merupakan reaksi terhadap legisme dari aliran klasik.

Menurut teori ini tujuan pemidanaan yang dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan suatu sanksi itu harus dilandasi dengan ideide dasar yang bersumber pada filsafat pemidanaan. Memahami filsafat pemidanaan dari teori-teori pemidanaan dan aliran-aliran Hukum Pidana, maka dengan mudah dapat ditemukan ide-ide dasar suatu aksi di dalam Hukum Pidana sehingga tujuan pemidanaan dengan jelas dapat ditetapkan. Perumusan tujuan pemidanaan dalam rangka pembaruan Hukum Pidana (Konsep KUHP), pada hakikatnya adalah untuk perlindungan masyarakat dan perlindungan individu pelaku tindak pidana.[99]

e. Teori Gabungan

Teori ini menitikberatkan kepada suatu kombinasi dari teori absolut dan relatif. Menurut teori ini, tujuan pidana selain untuk pembalasan kepada si pelaku juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Grotius memandang, pidana berdasarkan keadilan absolut berwujud pembalasan terbatas kepada apa yang berfaedah bagi masyarakat. Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan masyarakat, mengadopsi pemikiran bahwa secara prevensi umum terletak pada ancaman pidananya. Teori gabungan ini dipelopori oleh Vos. [100]
Penjelasan teori di atas menjadi dasar dari adanya pemidanaan bagi seseorang yang sudah melakukan kejahatan pidana. Dengan demikian semua teori yang dijelaskan menjadi titik dasar dari adanya pemidanaan.

Pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan merupakan

[99] Ibid halaman 102
[100] Ibid halaman 98-99

isu yang sangat relevan dengan kondisi sosial politik saat ini. Hal ini masih diwarnai oleh pengalaman masa lalu akan adanya pengabaian dan ketidakhormatan atas hukum, yang sekaligus mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap hukum yang sebagian masih pula terjadi hingga kini.

Perubahan sosial yang begitu cepat dan kekosongan atau runtuhnya wibawa hukum memberi konstribusi untuk mendorong perilaku peradilan rakyat, terutama pada awal masa yang disebut sebagai reformasi. Disisi lain penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polri, baik yang dilakukan ketika menjalankan tugas maupun diluar tugasnya yang selanjutnya berkembang menjadi opini publik, semakin memperburuk citra penegakan supremasi hukum di Indonesia. Salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja Polri saat ini adalah tegaknya supremasi hukum, keluar maupun ke dalam institusi Polri, yang merupakan komitmen yang dideklarasikan dan diamanatkan kepada pemerintah oleh para pencetus reformasi.

Melalui penegakan supremasi hukum, Iangkah terbaik adalah penegakan yang dimulai dari aparat penegak hukum dalam artian Polri. Karena dalam pelaksanaan tugas maupun diluar tugas tidak jarang ditemui anggota Polri melakukan tindak pidana. Permasalahannya adalah, ketika anggota Polri terlibat dalam suatu tindak pidana, kemudian penyidiknya dari fungsi Reserse Polri. Hal ini sangat mempengaruhi obyektifitas penegakannya, karena disinyalir muncul rasa tidak tega dalam keseriusan melakukan penyidikan. Demikian juga dengan Atasan Yang Berhak

Menghukum (Ankum) yang dirasakan kurang obyektif dalam melakukan penindakan terhadap anggotanya bahkan membebaskan tersangka dari jeratan hukuman pidana.

Bahwa dasar penyidikan terhadap Anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana adalah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat. Laporan atau pengaduan tersebut disampaikan melalui Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Bidang Profesi dan Pengamanan ( Kasi Yanduan Bid Propam), selanjutnya Kabid Propam mendisposisikan kepada Kepala Sub Bagian Provos (Kasubbid Provos) melalui Kepala Unit Penyidik (Kanit Idik) untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota dimaksud berikut saksi korban dan saksi-saksi lainnya.

Jika dari hasil pemeriksaan Kanit Idik atau anggota Idik, mengarah pada tindak pidana, maka Kabid Propam setelah meminta saran dan pendapat hukum pada Bid Binkum melimpahkan perkara tersebut kepada Dit Reskrim (untuk tingkat Mapolda) atau Kasi Propam melimpahkan perkara ke Satuan Reskrim (untuk kewilayahan) dengan tembusan Ankum di mana anggota tersebut ditugaskan kecuali dalam hal tertangkap tangan

Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1), (2) dan ayat (3) PP No 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri dijelaskan bahwa : [101]

1. Anggota Polri yang dijadikan tersangka / terdakwa dapat diberhentikan

[101] PP. No. 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi AnggotaKepolisian Negara RI, Halaman. 119.

sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri dapat dilakukan secara langsung.
3. Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana di maksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pemberhentian sementara dari dinas Polri sebagaimana dimaksud Pasal 10 di atas, bertujuan untuk memudahkan proses penyidikan, dalam arti bahwa status anggota Polri ketika dilakukan penyidikan dikembalikan sebagai anggota masyarakat, sehingga proses penyidikan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.Namun yang perlu dipahami adalah bahwa Pasal 10 ayat (1) tersebut menggunakan kata dapat, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna dapat diartikan bisa, mampu, sanggup, boleh, mungkin. Dengan demikian kata "dapat" bisa diartikan "dilakukan pemberhentian sementara dari dinas Kepolisian dan bisa tidak dilaksanakan pemberhentian sementara dari dinas Kepolisian", karena kata "dapat" tidak mengandung suatu kewajiban atau perintah. Pengertian ini sangat memungkinkan digunakan oleh pejabat yang berwenang terhadap anggota Polri yang dalam proses penyidikan, tidak dilakukan pemberhentian sementara.

Selain dari hal di atas, hasil penyidikan masih belum menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya atau kurang dilakukan pendalaman terhadap

kasus yang ada, dan tidak jarang berdampak pada penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti atau kasus yang ditangani bukan perkara pidana dan atau kasus anggota yang melakukan tindak pidana tersebut sudah diselesaikan melalui mekanisme internal Polri, yaitu sidang disiplin dan atau sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri.[102] Melalui Sidang disiplin dan atau sidang Komisi Kode Etik Profesi tersebut diharapkan anggota Polri yang terlibat dengan penyalahgunaan narkotika dapat memahami bahwa tindak pidana yang sudah dilakukannya salah, sehingga melalui prosedur tersebut dapat diketahui sanksi apa yang diberikan kepada anggota Polri tersebut.

**1. Penyidikan**

Pada pembahasan ini poin khususnya adalah yang berkaitan dengan penyidikan Polri yang berhubungan dengan pelanggaran pidana. Dalam kasus penyidikannya tidak terlepas dari penyidikan dan penyidik. [103]Dengan demikian dalam lingkungan Polri jika melakukan tindak pidana maka proses hukumnya juga tidak terlepas dari istilah penyidikan dan penyidik.

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.[104] Penyidikan adalah

---

[102] PERKAP. Nomor 7 tahun 2006

[103] Menurut Kamus Hukum dijelaskan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (H.Acara Pidana), sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (H. Acara Pidana). (Lihat:
M. Marwan & Jimmy P., *op.cit.*, Halaman. 504).

[104] Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Fungsi Teknis Reserse*, Semarang, 2009,Halaman. 12..

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.[105]

Yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan penyidikan terdapat dalam Pasal 1 butir 1 dan 2, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 106, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111 KUHAP. [106] a). Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP

> Menurut KUHAP Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa penyidik adalah polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan Pasal 1 ayat (2) penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Mengomentari Pasal di atas Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Jadi dapat dikatakan secara tegas bahwasannya fungsi dan ruang Iingkup penyidik adalah untuk melakukan

---

[105] Ibid
[106] Ibid halaman 142

penyidikan.[107]

Pasal 6 KUHAP

Penyidik adalah:

a). Pejabat polisi negara Republik Indonesia,

b). Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penjelasan pasal di atas mempertegas bahwa yang diberikan wewenang sebagai penyelidik hanya terdiri dari polisi negara saja, sebagaimana yang ditentukan pasal 6 KUHP tersebut. Kemudian dijelaskan persyaratan Polisi sebagai penyelidik harus berpangkat sekurang-kurangnya pembantu Letnan Dua Polisi. sedangkan bagi pegawai negeri yang diberi wewenang penyidikan adalah yang berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I/Golongan b atau yang disamakan dengan itu.

b). Pasal 7 KUHAP

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

[107] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan,* Citra Adiya Bakti, Bandung, 2002, Halaman 18-19.

d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. mengambil sidik jari dan mmoteret seorang;
g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
i. mengadakan penghentian penyidikan;
j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui tugas ataupun wewenang penyidik yang diberikan KUHAP begitu besar, sehingga setiap penyidik harus mematuhinya agar tidak menyalahi wewenang yang sudah ditetapkan undang-undang tersebut.

c). Pasal 8 KUHAP

Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.

d). Pasal 9 KUHAP

Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana is diangkat dengan ketentuan undangundang.

e). Pasal 11 KUHAP

Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

f. Pasal 106 KUHP

Penyidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

g). Pasal 109 KUHAP

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

h). Pasal 110 KUHP

Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.

i). Pasal 111 KUHP

Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas keteriban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik.

Semua rangkaian penyidikan yang merupakan wewenang Kepolisian menjadi titik acuan dalam melakukan semua tindak pidana, seperti penyidikan penyalahgunaan narkotika bagi anggota Polri. Dengan demikian secara perundang-undangan prosedur penyidikan tersebut harus dilalui oleh

penyidik guna memperoleh data yang akurat dari pihakpihak bersangkutan.

Penjelasan di atas menerangkan petugas penyidikan bagi setiap tindak pidana termasuk kejahatan penggunaan narkotika, penyidikan yang diterangkan dalam KUHAP di atas berlaku secara umum, tanpa terkecuali. Oleh karena itu setiap penyidikan yang dilakukan oleh setiap penyidik tidak terlepas dari ketentuan di dalam KUHAP di atas. Kemudian pada pembahasan selanjutnya dijelaskan tentang penyidik Polri dalam kasus tindak pidana narkotika

Penyidik Polri dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika memiliki tahapan yang jelas serta proses yang terperinci dimana semua didasarkan atas aturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik tindak pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan atau pengekangan hakhak azasi seseorang dalam rangka usaha untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karenanya, penyidik t indak pidana sebagai salah satu tahap dari pada penegakan hukum pidana harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Penyidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan proses penyidikan setara dengan pelaku tindak pidana Iainnya tanpa ada pengecualian. Kedudukan Polri sebagai penyidik yang mandiri tak dapat terlepas dari fungsi penuntutan dan

pengadilan, dimana terjalin adanya hubungan koordinasi fungsional dan instansional serta adanya sinkronisasi pelaksanaan.

Pelaksanakan penyidikan, maka penyidik dalam hal ini terikat pada suatu koridor yang dijadikan patokan dalam pelaksanaan penyidikan yaitu berupa petunjuk pelaksana yang mana merupakan penjabaran dari naskah fungsi Reserse Polri dengan maksud untuk memberikan pedoman dan penjelasan mengenai proses penyidikan tindak pidana sehingga diperoleh keseragaman pengertian tentang kegiatan-kegiatan pokok yang harus dilaksanakan dalam hal ini adalah penanganan penyalahgunaan narkotika.

Tujuan dari petunjuk pelaksana dalam penyidikan adalah penyidik tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilaksanakan secara berdaya dan berhasil guna dengan tidak melanggar hukum. Adapun ruang lingkup adalah :

1. Kegiatan penyidikan
2. Bantuan teknis operasional
3. Administrasi penyidikan
4. Komando dan pengendalian

Menurut Hukum Acara Pidana dikenal beberapa asas penting yang menjadi dasar dalam proses beracara pidana yaitu:[1]

1. Kemerdekaan hakim.
2. Praduga Tak bersalah
3. Pemeriksaan di persidangan dilakukan Iangsung dan Iisan
4. Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

5. Pemeriksaan di persidangan terbuka untuk umum
6. Oportunitas
7. Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatnannya dan tetap
8. Ganti kerugian dan rehabilitasi
9. Hak untuk memperoleh bantuan hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dianalisa bahwa dalam Kitab Hukum Acara Pidana ada sembilan asas ataupun prinsip dalam bercara pidana, sehingga kesemuanya harus ditegakkan dalam rangka menuju keadilan, kemanfaatan dan terciptanya ketertiban umum yang disepakati bersama dengan harapan untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri.

Penyidik dalam melaksanakan tugasnya perlu memperhatikan azas-azas yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyangkut hak-hak azasi manusia antara lain :

*1.* Praduga tak bersalah *(Presemption of innocence)*

*2.* Persamaan dimuka hukum *(Equality before the Law)*

3. Hak pemberian bantuan / penasehat hukum *(Legal aid / assistance)* artinya setiap orang yang tersangkut perkara penyalahgunaan narkotika wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan. Sebelum dimulainya pemeriksaan terhadap tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang

disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapat bantuan hukum dalam perkaranya itu wajib didampingi penasehat hukum.

4. Penangkapan, penahanan, penggelahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan yang diatur dengan undang-undang.

5. Kepada sesorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan azas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukum administrasi.

Selesai pemeriksaan ditingkat penyidikan dan dianggap telah cukup alat bukti objektif dan subjektif maka berkas perkara anggota Poiri yang melakukan tindak pidana tersebut diserahkan ke JPU oleh penyidik untuk dilaksanakan penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan.

**2. Tindak Pidana Narkotika**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan tindak adalah perbuatan. Sedangkan pidana adalah kejahatan; kriminal. Jadi tindak pidana adalah suatu perbuatan yang jahat atau perbuatan kriminal. Barda Nawawi Arief' tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum balk secara formal maupun secara materiil". Sedangkan

menurut Sudarto menyatakan" tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (crime atau Verbrechen atau misdaad) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Perbuatan jahat atau menyimpang dari tata perilaku ini adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehudupan manusia dimanapun, dan menjadi fenomena yang selalu dimusuhi dan atau mendapat respons positif dari masyarakat untuk diberantas Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa unsur utama tindak pidana adalah perbuatan tersebut memenuhi rumusan undang-undang. Sementara itu berdasarkan data yang berhasil dihimpun peneliti pada jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

## C. REKAPITULASI TINDAK PIDANA NARKOBA TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018 SEJAJARAN POLDA SUMUT

| NO | TAHUN | JUMLAH | | PERSENTASE | JUMLAH TERSANGKA | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TINDAK PIDANA | PENYELESAIAN TINDAK PIDANA | | | |
| 1. | 2017 | **5.990** | **5.546** | **93** | **7.894** | |
| 2. | 2018 | **6.611** | **6.101** | **92** | **8.827** | |

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

# REKAPITULASI TINDAK PIDANA NARKOBA TAHUN 2017 SEJAJARAN POLDA SUMUT

**a. DATA JUMLAH TINDAK PIDANA (JTP) DAN JUMLAH PENYELESAIAN TINDAK PIDANA (JPTP)**

| NO | KESATUAN | JTP | JPTP | PERSENTASE (%) | TERSANGKA | RANGKING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | DIT RES NARKOBA | 271 | 369 | 136 | 423 | **8** |
| 2. | POLRESTABES MEDAN | 1.795 | 1.605 | 89 | 2.396 | **1** |
| 3. | POLRES TEBING TINGGI | 117 | 107 | 91 | 147 | |
| 4. | POLRES DELI SERDANG | 379 | 356 | 94 | 536 | **5** |
| 5. | POLRES BINJAI | 252 | 204 | 81 | 325 | **9** |
| 6. | POLRES LANGKAT | 408 | 354 | 87 | 475 | **3** |
| 7. | POLRES SIMALUNGUN | 212 | 196 | 92 | 331 | **10** |
| 8. | POLRES ASAHAN | 273 | 287 | 105 | 379 | **7** |
| 9. | POLRES LABUHAN BATU | 559 | 508 | 91 | 679 | **2** |
| 10. | POLRES TAPANULI TENGAH | 44 | 46 | 105 | 51 | |
| 11. | POLRES TAPANULI UTARA | 37 | 41 | 111 | 42 | |
| 12. | POLRES TAPANULI SELATAN | 94 | 98 | 104 | 122 | |
| 13. | POLRES MADINA | 64 | 54 | 84 | 82 | |
| 14. | POLRES TANAH KARO | 107 | 112 | 105 | 138 | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | POLRES DAIRI | 36 | 25 | 69 | 43 | |
| 16. | POLRES NIAS | 15 | 14 | 93 | 17 | |
| 17. | POLRES PELABUHAN BELAWAN | 401 | 315 | 79 | 510 | **4** |
| 18. | POLRES SERDANG BEDAGAI | 115 | 101 | 88 | 147 | |
| 19. | POLRES PEMATANG SIANTAR | 132 | 120 | 91 | 168 | |
| 20. | POLRES TANJUNG BALAI | 283 | 251 | 89 | 353 | **6** |
| 21. | POLRES SIBOLGA | 63 | 58 | 92 | 82 | |
| 22. | POLRES PADANG SIDEMPUAN | 65 | 66 | 102 | 108 | |
| 23. | POLRES TOBASA | 30 | 31 | 103 | 46 | |
| 24. | POLRES SAMOSIR | 13 | 13 | 100 | 15 | |
| 25. | POLRES HUMBAHAS | 12 | 8 | 67 | 18 | |
| 26. | POLRES NIAS SELATAN | 11 | 8 | 73 | 15 | |
| 27. | POLRES PAK-PAK BARAT | 3 | 5 | 167 | 3 | |
| 28. | POLRES BATUBARA | 199 | 194 | 97 | 243 | |
| | **JUMLAH** | **5.990** | **5.546** | **93** | **7.894** | |

b. **DATA PERKASUS DAN TERSANGKA**

| JENIS NARKOBA | | | | | | | | | | | | | | JUMLAH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NARKOTIKA | | | | | | PSIKOTROPIKA | | OBAT-OBAT / ZAT-ZAT BERBAHAYA | | | | | | | |
| GANJA | | SHABU | | ECSTASY | | PIL HAPPY FIVE | | PIL PCC | | OBAT PALSU | | PIL XANAX | | | |
| KSS | TSK | KSS | TSK | KSS | TSK | KSS | TSK | KSS | TSK | KSS | TSK | KSS | TSK | KSS | TSK |
| 736 | 883 | 5.050 | 6.710 | 191 | 281 | 10 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.990 | 7.894 |

c. **DATA TERSANGKA MENURUT UMUR**

| U M U R T E R S A N G K A | | | | | Jumlah | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umur ≤15 Thn | 16 – 19 Thn | 20 – 24 Thn | 25 – 29 Thn | Umur ≥ 30 Thn | | |
| 25 | 474 | 1.253 | 1.444 | 4.698 | 7.894 | |

d. **DATA TERSANGKA MENURUT STATUS**

| STATUS TERSANGKA | | | | | | | | | Jumlah | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNS | TNI | POLRI | Peg. Swasta | Wiraswasta | Mahasiswa | Pelajar | Buruh | Pengangguran | | |
| 47 | 6 | 31 | 807 | 4.150 | 85 | 125 | 1.099 | 1.544 | 7.894 | |

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

g. **DATA BARANG BUKTI YANG DISITA**

| NO | JENIS | U R A I A N |
|---|---|---|
| 1. | Ganja | • 2.842,65 Kg<br>• 83.613 batang pohon<br>• Areal ladang ganja seluas 11 Ha 2 rante |
| 2. | Pil Ecstasy | 29.817¾ butir |
| 3. | Shabu | 211.533,02 gram |
| 4. | Pil Happy Five | 772¾ butir |
| 5. | PIL PCC | 2.130 butir |
| 6. | PIL XANAX | 9 butir |

h. Hasil Operasi Mandiri Kewilayahan dengan sandi "Antik Toba - 2017" pada periode tanggal 14 Agustus 2017 pukul 00.00 Wib s/d tanggal 28 Agustus 2017 pukul 24.00 Wib (selama 15 hari) sebagai berikut :

1) Kasus : **583** Kasus

2) Tersangka : **730** Tersangka

3) Barang bukti :

- 167.069,7 gram ganja
- 3.023 batang pohon ganja
- areal ladang ganja seluas 1 Ha
- 12.924,78 gram shabu
- 955 butir Pil Ecstasy
- 2 butir pecahan Pil Ecstasy
- 10 gram pecahan Pil Ecstasy
- 6 butir Pil Happy Five

Dari hasil pengungkapan **583** Kasus dan **730** Tersangka, berhasil mengungkap **TO Orang** sebanyak **77 TO Orang (77 Kasus 77 Tersangka)** dari **82 TO Orang** yang dimiliki atau jika dipersentasekan baru mencapai **94%** dan berhasil mengungkap **TO Lokasi** sebanyak **59 TO Lokasi** (**59 Kasus 77 tersangka)** dari **72 TO Lokasi** yang dimiliki atau jika dipersentasekan telah mencapai **82%** Sedangkan untuk pengungkapan Non TO sebanyak **447 kasus 576 tersangka**

**DATA JUMLAH TINDAK PIDANA DAN JUMLAH PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MENURUT JENIS NARKOBA**

| NO | JENIS NARKOBA | TAHUN 2018 | |
|---|---|---|---|
| | | JTP | JPTP |
| **TINDAK PIDANA NARKOTIKA** | | | |
| 1 | Ganja | 630 | 748 |
| 2 | Shabu | 5.810 | 5.150 |
| 3 | Pil Ecstasy | 152 | 194 |
| 4 | Pil Epilon | 1 | - |
| **TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA** | | | |
| 5 | Pil Happy Five | 13 | 8 |
| **TINDAK PIDANA OBAT-OBAT/ZAT-ZAT BERBAHAYA** | | | |
| 6 | Obat Palsu | 2 | 1 |
| 7 | Kosmetik | 1 | - |
| 8 | Ketamin | 1 | - |
| 9 | Pil Alprazolam | 1 | |
| | JUMLAH | **6.611** | **6.101** |

**g. DATA BARANG BUKTI YANG DISITA**

| NO | JENIS | U R A I A N |
|---|---|---|
| 1. | Ganja | • 1.711,09 Kg<br>• 66.480 batang pohon<br>• 2.152 gram biji<br>• Areal ladang ganja seluas 8 Ha |
| 2. | Pil Ecstasy | 215.918¼ butir |
| 3. | Shabu | 535.263,08 gram |
| 4. | Pil Epilon | 55 butir |
| 5. | Pil Happy Five | 16.155 butir |
| 6. | Pil Alprazolam | 1.500 butir |
| 7. | Obat Berbahaya | 952 butir |
| 8. | Ketamin | 6.750 gram |
| 9. | Kosmetik | 30 kotak |

h. Hasil Operasi Mandiri Kewilayahan dengan sandi "Antik Toba - 2018" pada periode tanggal 27 Agustus 2018 pukul 00.00 Wib s/d

tanggal 10 September 2018 pukul 24.00 Wib (selama 15 hari) sebagai berikut :

1) Kasus : **589** Kasus

2) Tersangka : **751** Tersangka

3) Barang bukti :

- 7.318,06 gr shabu
- 335.044,03 gr ganja
- 3 linting rokok bercampur ganja
- 1.752,76 gr biji ganja
- 60 batang pohon ganja
- 10.200 bibit pohon ganja
- 1.112½ Butir Pil Extasy
- 314 butir Pil Happy Five

Dari hasil pengungkapan **589** Kasus dan **751 Tersangka**, dimana berhasil mengungkap **TO Orang** sebanyak **36 TO Orang (36 Kasus 36 Tersangka)** dari **36 TO Orang** yang dimiliki atau jika dipersentasekan baru mencapai **100%** dan berhasil mengungkap **TO Lokasi** sebanyak **29 TO Lokasi** (**29 Kasus 32 tersangka)** dari **29 TO Lokasi** yang dimiliki atau jika dipersentasekan telah mencapai **100%** Sedangkan untuk pengungkapan **Non TO** sebanyak **524 kasus 683 tersangka**

**DATA TINDAK PIDANA NARKOBA**
**DITRESNARKOBA POLDA SUMUT SEJAJARAN**
**TAHUN 2018 S/D BULAN AGUSTUS 2021**

**1. DATA JTP, PTP DAN TSK**

| NO | JENIS BARANG BUKTI | 2018 | 2019 | 2020 | JAN S/D AGST 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GANJA | • 1.711.101,39 gram<br>• 66.480 batang pohon<br>• 2.152 gram biji<br>• 8 Ha Ladang | • 1.665.476,02 gram<br>• 450.286 batang pohon<br>• 12 Ha Ladang | • 1.712.800,77 gram<br>• 15.692 batang pohon<br>• 2.480 gram biji<br>• 4,5 Ha Ladang | • 1.131.472,69 gram<br>• 144 batang pohon<br>• 207,55 gram biji |
| 2 | SABU | 535.256,71 gram | 677.769,56 gram | 621.484,82 gram | 791.128,84 gram |
| 3 | PIL ECSTASY | 215.918 butir | 96.817 butir | 222.570 butir | 65.484¾ butir |
| 4 | PIL EPILON | 55 butir | 96,94 gram | - | - |
| 5 | DAUN KATION | - | 15.900 gram | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | PIL HAPPY FIVE | 16.155 butir | 22.836 butir | 7.383 butir | 425 butir |
| 7 | PIL ALPRAZOLAM | 1.500 butir | 95 butir | 4.558 butir | 24 butir |
| 8 | KETAMIN | 6.750 gram | 11,36 gram | 1.486 gram | 0,5 gram |
| 9 | OBAT PALSU | 93 butir | 15 butir | 300 butir | |
| 10 | KOSMETIK BERBAHAYA | 30 kotak | 204 Kotak | - | - |
| 11 | DAFTAR G | 952 butir | - | - | - |
| 12 | MIRAS | 109 botol | - | - | - |

| NO | TAHUN | JTP | PTP | TSK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 6.611 | 6.101 | 8.827 |
| 2 | 2019 | 6.466 | 5.865 | 8.416 |
| 3 | 2020 | 7.288 | 7.265 | 9.470 |
| 4 | Jan s/d Ags 2021 | 4.558 | 4.408 | 5.897 |
| **JUMLAH** | | **24.923** | **23.639** | **32.610** |

**2. DATA JUMLAH BARANG BUKTI NARKOBA**

**3. DATA TERSANGKA BERDASARKAN UMUR**

| NO | TAHUN | UMUR | | | | | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Umur ≤ 15 Thn | 16 – 19 Thn | 20 – 24 Thn | 25 – 29 Thn | Umur ≥ 30 Thn | |
| 1 | 2018 | 25 | 474 | 1.393 | 1.657 | 5.278 | **8.827** |
| 2 | 2019 | 23 | 446 | 1326 | 1525 | 5096 | **8.416** |
| 3 | 2020 | 23 | 526 | 1452 | 1741 | 5728 | **9.470** |
| 4 | Jan s/d Agst 2021 | 10 | 223 | 773 | 838 | 4.053 | **5.897** |
| **JUMLAH** | | **81** | **1669** | **4944** | **5761** | **20155** | **32610** |

**4. DATA TERSANGKA BERDASARKAN STATUS PEKERJAAN**

| NO | TAHUN | STATUS PEKERJAAN | | | | | | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PNS | TNI | POLRI | Peg. Swasta | Wiraswasta | Mahasiswa | Pelajar | Buruh | Penganggu ran | |
| 1 | 2018 | 35 | 4 | 34 | 822 | 4.927 | 64 | 91 | 1.078 | 1.772 | **8.827** |
| 2 | 2019 | 29 | - | 19 | 744 | 4671 | 61 | 81 | 1.078 | 1.733 | **8.416** |
| 3 | 2020 | 39 | - | 38 | 789 | 5.060 | 115 | 122 | 1221 | 2086 | **9.470** |
| 4 | Jan s/d Agst | 16 | 1 | 31 | 395 | 2392 | 50 | 57 | 649 | 2306 | **5897** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | | | | | | | | | | |
| **JUMLAH** | | **119** | **5** | **122** | **2750** | **17050** | **290** | **351** | **4026** | **7897** | **32610** |

**5. DATA TERSANGKA BERDASARKAN KLASIFIKASI**

| NO | TAHUN | KLASIFIKASI | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | KULTIVASI | PRODUSEN | DISTRIBUSI | KONSUMEN |
| 1 | 2018 | 5 | 1 | 4685 | 4136 |
| 2 | 2019 | 4 | - | 4230 | 4182 |
| 3 | 2020 | 10 | 9 | 5387 | 4074 |
| 4 | Jan s/d Agst 2021 | 7 | - | 2966 | 2424 |

**6. DATA OKNUM PERSONIL POLRI YANG TERLIBAT NARKOBA**

| NO | TAHUN | REHABILITASI (BERKAS TIDAK MAJU) | REHABILITASI (BERKAS MAJU KE JPU) | BERKAS MAJU KE JPU (TIDAK DIREHABILITASI) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | - | - | 34 PERS |
| 2 | 2019 | - | - | 14 PERS |
| 3 | 2020 | 2 PERS | - | 36 PERS |
| 4 | Jan s/d Agst 2021 | 5 PERS | - | 26 PERS |

Pembahasan selanjutnya dijelaskan tersangka penyalahgunaan narkotika pada tahun 2018 sampai 2021 berdasarkan status pelaku atau mata pencaharian sehari-hari. kalangan yang menyalahgunakan narkotika adalah kalangan pengangguran sebanyak 2.472 tersangka, sedangkan di kalangan Polri relatif kecil yaitu 30 orang tersangka. Adapun di tahun 2020 golongan Pegawai swasta yang menyalahgunakan narkotika meningkat jumlahnya yaitu tersangka, sedangkan di kalangan pengangguran mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya, dan kalangan Polri juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 14 orang tersangka.

Penyalahgunaan berasal dari dua suku kata yaitu "salah" yang berarti

tidak benar, tidak betul atau keliru (tidak sebagaimana mestinya atau tidak pantas), dan kata "guna" yang mempunyai arti sebagai faedah, manfaat, atau kebaikan.[108]

Secara harfiah penyalahgunaan mempunyai arti sebagai perbuatan atau tindakan yang tidak benar atau melanggar aturan atau pedoman yang ada sehingga dapat menimbulkan akibat buruk atau tidak balk bagi diri sendiri atau orang lain. Sejalan dengan pendapat ini, Dadang Hawari menegaskan penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan beberapa dampak antara lain merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan produktivitas kerja secara drastic, kesulitan membedakan mana perbuatan baik dan buruk, merubah perilaku menjadi anti sosial *(maladaptif),* gangguan kesehatan fisik dan mental, mempertinggi tindak kekerasan, kecelakaan lalu lintas dan kriminalitas lainnya.'

Dalam hubungan dengan tujuan penelitian ini, penyalahgunaan narkotika yang akan ditelaah dibatasi kepada perbuatan sebagai berikut: "penggunaan segala bentuk dan atau jenis narkotika serta obat-obatan berbahaya (narkotika) secara illegal oleh siapa-pun, di mana-pun, dan dengan alasan apa-pun khususnya yang dilakukan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian, bagaimana tindakan atau kebijakan penanggulangan bagi anggota Polisi yang terbukti menyalahgunakan narkotika secara hukum pidana dan non-penal sesuai kode etik profesi Kepolisian Negara Republik

[108] Indrawan WS. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* Lintas Media, Jombang, 1999, Halaman 448.

Indonesia yang berlaku."

Sanksi pidana maupun denda terhadap bagi siapa saja yang menyalahgunakan narkotika terdapat dalam ketentuan pidana Bab XV, Pasal 111 sampai dengan pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009. Dalam bab ini dijelaskan sebagai contoh adalah Pasal 111, 112, 113, 114, 115.

Pasal 111

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Penjelasan pasal di atas memberikan pemahaman bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum yang menyalahgunakan narkotika

tanpa terkecuali bagi anggota Polri, yakni maka dikenakan hukuman penjara paling sedikit selama 4 (empat tahun), dan paling lama 12 (dua belas tahun) dan dipidana denda paling sedikit sebanyak delapan ratus juta rupiah, dan paling banyak sebanyak delapan milyar rupiah. Kemudian pada pasal selanjutnya dijelaskan jika seseorang memiliki satu kilogram atau melebihi lima batang pohon, maka hukumannya paling sedikit lima tahun dan paling lama dua puluh tahun,, dan denda ditambah sepertiga hukuman seperti pasal sebelumnya. Kemudian pada pasal selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 112

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidanan denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal di atas menjelaskan bahwa jika seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika seperti menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan bukan tanaman, maka dipidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan pidana denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah, dan denda paling banyak delapan milyar rupiah. Kemudian ayat selanjutnya jika seseorang memiliki narkotika sebanyak melebihi lima gram, maka pelakunya dipidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun, dan pidana denda maksimum sebagaimana pada ayat sebelumnya ditambah sepertiga. Selanjutnya Pasal 113 dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 113

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5

(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pada Pasal 113 tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan narkotika golongan satu seperti mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika, maka dipidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun, dan dipidana denda paling sedikit satu milyar rupiah, dan paling banyak sepuluh milyar rupiah. Kemudian jika seseorang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi lima gram, maka pelaku pidananya dikenakan hukuman penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun, dan denda pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya sepertiga. Selanjutnya pada Pasal 114 dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 114

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal selanjutnya menerangkan bahwa setiap orang yang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, maka dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun, dan pidana denda paling sedikit satu milyar rupiah dan paling banyak sepuluh milyar rupiah. Kemudian dalam ayat selanjutnya jika seseorang menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya satu kilogram atau melebihi lima batang pohon dalam bentuk bukan tanaman, dan beratnya lima gram, maka pelaku dipidana penjara paling singkat enam tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda maksimum ditambah sepertiga dari sebelumnya.

Pasal 115

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa,

mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pada pasal 115 di atas dijelaskan jika seseorang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan satu dipidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan pidana denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah, dan paling banyak delapan milyar rupiah. Kemudian jika seseorang mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan satu sebagaimana dimaksud pada ayat satu dalam bentuk tanaman beratnya melebihi satu kilogram, atau melebihi lima batang pohon beratnya melebihi lima gram, maka pelaku pidananya dipidana penjara paling singkat lima tahun, dan paling lama dua puluh tahun, dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya ditambah sepertiga.

Berdasarkan penjelasan undang-undang di atas terlihat ruang lingkup perbuatan yang dilarang dan diancam dalam undang-undang narkotika tersebut bagi semua orang termasuk juga anggota polri, sangat besar dan tinggi baik sanksi pidana maupun sanksi dendanya. Hal ini dicantumkan karena mengingat tujuan regulator dan pemerintah untuk melindungi dan memelihara warga negara Indonesia dari pengaruh penyalahgunaan narkotika tersebut memiliki peranan yang sangat penting.

Melalui keterangan di atas, jika dianalisa tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia, baik di tingkat nasional maupun regional.

Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika.[147]

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dilakukan secara terorganisir dan memiliki jaringan kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional. Dalam

undang-undang nomor 35 Tahun 2009 diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkot ika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Pada pembahasan selanjutnya dijelaskan tentang pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika. Untuk dimintai pertanggungjawaban pidananya, maka seseorang tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni ketentuan pasal 116, 121 dan pasal 127 yaitu sebagai berikut:[109]

1. Adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan penyalahgunaan narkotika, hal tersebut berarti telah memenuhi unsur sengaja yang merupakan bagian dari unsur adanya kesalahan.
2. Dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menyalahgunakan narkot ika, maksudnya ia ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya yang telah menyalahgunakan narkotika dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya untuk melakukan perbuatan tersebut. Kemampuan berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh

[109] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Halaman 48.

sebab itu kemampuan berfikir dapat diduga pada si pembuat. Dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku penyalhgunaan narkotika tersebut, apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsafi arti perbuatannya.

3. Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab.
4. Tidak memenuhi syarat-syarat alasan penghapusan pidana, dan dalam hal penyalahgunaan narkotika, apabila pelaku tersebut tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 is merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi.

Adapun Proses Persidangan Terhadap Anggota Polri di Pengadilan Negeri dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di Iingkungan peradilan umum sebagai berikut:

1. Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan. Pembacaan Surat Dakwaan tersebut dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum, kecuali untuk perkara-perkara tertentu. Surat Dakwaan berisi rangkaian perbuatan pidana yang menurut Jaksa Penuntut Umum telah dilakukan oleh Terdakwa, pasal apa yang diduga dilanggar, kapan serta dimana perbuatan tersebut dilakukan.

   a. Atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dapat

mengajukan keberatan atau Eksepsi. Yang dipermasalahkan dalam Eksepsi ini bukan menyangkut benar atau salahnya dakwaan dari JPU, 152 mengenai benar salahnya dakwaan akan dibuktikan dalam proses pembuktian. Permasalahan dalam tahap ini seperti misalnya apakah dakwaan tidak disusun secara jelas *(obscuur libel)*, apakah JPU salah mendakwa orang *(error in persona)*, dakwaan diajukan pada pengadilan yang tidak berwenang, dakwaan tidak disusun sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya. Atas Eksepsi ini JPU diberikan kesempatan untuk memberikan Tanggapan. Tanggapan pada intinya berisi bantahan JPU atau Eksepsi Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

b. Apabila Majelis Hakim menilai bahwa Eksepsi dari pihak cukup beralasan maka Majelis Hakim dapat menyatakan Surat Dakwaan JPU tidak dapat diterima dan memerintahkan kepada JPU untuk memperbaiki Surat Dakwaannya tersebut. Apabila Majelis berpendapat sebaliknya Majelis Hakim akan menyatakan Eksepsi tidak dapat diterima. Keputusan Majelis tersebut dituangkan dalam putusan yang bernama Putusan Sela. Apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan atau tidaknya Eksepsi Terdakwa hanya dapat diputuskan setelah memeriksa pokok perkara maka Putusan Sela akan diputuskan bersamaan dengan Putusan Akhir.

2. Jika Majelis menolak Eksepsi Terdakwa atau berpendapan Putusan Sela diputus bersamaan dengan Putusan Akhir, persidangan dilanjutkan ke

tahap Pembuktian. Pada tahap ini JPU diberikan kesempatan untuk membuktikan seluruh Dakwaan dituduhkan pada Terdakwa, dan Terdakwa diberikan juga kesempatan untuk membuktikan sebaliknya. Pembuktian dilakukan dengan memeriksa keterangan saksi-saksi, keterangan ahii (jika diperlukan), Surat-Surat, dan Keterangan Terdakwa.

3. Setelah proses pemeriksaan atau pembuktian dinyatakan seiesai maka JPU mengajukan Surat Tuntutan *(Requisitor).* Requisitor berisi kesimulan JPU atas proses pembuktian, dakwaan apa yang menurut' JPU teiah terbukti berdasarkan hasil pembuktian, serta berapa tuntutan pidana yang diminta untuk dijatuhkan kepada Terdakwa.
4. Atas Requisitor JPU serta hasil pemeriksaan alat-alat bukti tersebut Terdakwa berhak mengajukan pembelaan (Pledoi). Dalam pledoi ini terdakwa dapat memberikan bantahan atas unsur-unsur tindak pidana yang menurut JPU tel ah terbukti dalam Requisitornya, maupun adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Atas Pledoi dari Terdakwa tersebut JPU diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapanya (Replik), dan atas Replik ini Terdakwa diberikan kesempatan untuk memberikan Tanggapan atas Tanggapan JPU tersebut (Duplik), dan seterusnya dengan ketentuan terdakwa selalu mendapatkan giliran yang terakhir.

5. Apabila proses di atas telah selesai, Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa pemeriksaan ditutup, dengan catatan bahwa dapat dibuka sekali lagi

balk karena kewenangan Hakim Ketua Sidang ataupun atas permintaan Penuntut Umum ataupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya. Setelah ditutupnya proses pemeriksaan, Majelis Hakim akan mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusannya. Musyawarah Majelis Hakim ini dilakukan secara tertutup. Untuk dapat menjatuhkan pidana kepada Terdakwa hakim harus mendasarkan keyakinannya tersebut pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang sebelumnya telah diajukan dimuka persidangan dalam proses pembuktian. [155]

Alat Bukti yang sah tersebut yaitu :

a. Keterangan Saksi
b. Keterangan Ahli
c. Surat
d. Petunjuk
e. Keterangan Terdakwa

6. Setelah Majelis Hakim dapat mengambil keputusannya, Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Sidang Pembacaan Putusan ini harus dihadiri oleh Terdakwa. Putusan dapat berupa penghukuman, yaitu apabila Majelis berpendapat terdakwa terbukti bersalah, putusan bebas, yaitu apabila terdakwa tidak terbukti bersalah, atau putusan lepas dari segala tuntutan, yaitu apabila perbuatan yang didakwakan terbukti namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

   Apabila Putusan atas permohonan Eksepsi baru dapat diputus setelah pemeriksaan pokok perkara maka pada Putusan akhir dibacakan jugs

Putusan Sela. Apabila ternyata Eksepsi Terdakwa beralasan maka Hakim dapat menyatakan mengabulkan permohonan eksepsi Terdakwa. Apabila hal ini yang terjadi maka pada Putusan Akhir akan dinyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima atau N.O (*Niet ontvankelijk verklaard*).

7. Atas putusan bersalah Terdakwa maupun JPU dapat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi. Pengajuan Banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut dijatuhkan. Permohonan banding disampaikan melalui Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut Atas putusan yang membebaskan terdakwa tidak dapat diajukan Banding oleh JPU, namun JPU dapat membuktikan bahwa putusan bebas tersebut bukan merupakan putusan bebas murni.
8. Jika Terdakwa maupun JPU tidak mengajukan upaya hukum Banding dalam jangka waktu 7 hari maka Putusan akan berkekuatan hukum tetap. Eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dilaksanakan oleh Jaksa.

Setelah menjelaskan proses pengadilan di pengadilan Negeri, selanjutnya dijelaskan penahanan di lembaga pemasyarakatan. Bagi anggota Polri yang sudah divonis bersalah di Pengadilan, maka anggota Polri dieksekusi atau ditahan di lembaga Pemasyarakatan dengan disamakan sepertia masyarakat biasa, sehingga bagi anggota Polri yang sudah dinyatakan bersalah karena menyalahgunakan narkotika, maka langsung dieksekusi di lembaga Pemasyarakatan yang sudah

ditetapkan.[110]

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana perampasan kemerdekaan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari banyak negara jenis pidana ini tergolong ke dalam pidana pokok, termasuk Indonesia. Di dalam Reglemen Penjara 1917, pasal 28 (1) dijelaskan bahwa tujuan atau inti pidana penjara di Indonesia telah tergambar walaupun secara samar-samar. Pidana penjara mempunyai inti dan tujuannya yaitu: pembalasan yang setimpal dan pembinaan nara pidana. Mengenai penegasan adanya dua faktor itu dapdat dilihat dari sisi pasal tersebut beserta penjelasannya bahwa pegawaai-pegawai penjara diwajibkan memperlakukan nara pidana secara perikemanusiaan dan keadilan dengan tujuan untuk mempengaruhi narapidana ke jalan perbaikan.

Melihat uraian di atas dapat dilihat bahwa bagi anggota Polri yang sudah divonis di Pengadilan karena menyalahgunakan narkotika, maka dikenakan hukuman penjara sebagai hukuman yang setimpal karena sudah melanggar ketentuan pidana disebabkan menyalahgunakan narkotika. Tujuan pemidanaan dengan penjara agar dapat menyadarkan anggota Polri bahwa penyalahgunaan narkotika itu adalah sangat tidak dibenarkan dalam hukum.

[110] AKBP Edi Waluyo, Kasubbid Profeshi Propam Polda Sumut, wawancara pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 di Mapolda Sumut, menjelaskan bahwa dalam eksekusi hukuman di penjara maka anggota Polri yang sudah melanggar tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada dasarnya digabungkan, tapi harus dipisahkan antara pengedar, penjual dan pemakai, hal ini disebabkan dapat menjadi peluang lebih jahat, bahkan dapat mengakibatkan hal yang lebih negatif bagi proses pencegahan. .

## A. KEBIJAKAN NON PENAL

Rehabilitasi, menurut pasal 1 angka 23 KUHAP adalah: “hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang- undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Menurut Soeparman re habilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini.Rehabilitasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkotika.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rehabiliasi merupakan salah satu upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi penyalahguna maupun korban penyalahguna narkotika agar dapat kembali melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar.

Program rehabilitasi dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan narkotika Cipinang Jakarta Timur merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental,

psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Program ini dilaksanakan untuk membantu Warga Binaan terlepas dari ketergatungan narkotika dan psikotropika, dengan rehabilitasi ini menjadikan pusat penanggulangan terpadu dalam satu atap atau One StopCenter(OSC).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas diperlukan program rehabilitasi yang meliputi rehabilitasi medik, psikiatrik, psikososial, dan psikoreligius sesuai dengan definisi sehat dari WHO (1984), dan American association/APA (1992).[111]

Proses pelayanan dan rehabilitasi terpadu bagi penyalahguna narkotika baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, harus memenuhi sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan ataupun kriteria, karena untuk penanggulangan penyalahguna narkotika bukan hal yang mudah, demikian diperlukan keterampilan dan keahlian yang khusus.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi oleh Departemen Sosial terhadap mereka yang mengalami ketergantungan narkotika berlandaskan beberapa peraturan, yaitu :

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 jo Undang- undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 45, Pasal 46

[111] Dadang Hawari, Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alcohol, & Zat Adiktif),Gaya Baru 2006 Jakarta FKUI, halaman. 134

ayat (1), (2), (3), Pasal 47, ayat (1) dan (2), Pasal 48 ayat (1) dan(2), Pasal 49 ayat (1), (2), (3), Pasal 50.

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Pelaksanaan terapi terhadap penyalahguna narkotika disesuaikan dengan permasalahan kelompok tingkat kecanduannya. Menurut Nalini Muhi, ada kelompok yang potensial yang mudah terpengaruh narkoba:[112]

a. Kelompok primair yaitu kelompok yang mengalami masalah kejiwaan, penyebabnya bisa karena kecemasan, depresi dan ketidak mampuan menerima kenyataan hidup yang dijalani. Hal ini diperparah lagi karena mereka ini biasanya orangyang memiliki kepribadian introfet atau tertutup. Dengan jalan mengkomsumsi obat-obatan atau sesuatu yang diyakini bisa membuat terlepas dari masalah kendati hanya sementara waktu. Kelompok primair sangat mudah dipengaruhi untuk mencoba narkoba jika lingkungan pergaulannya menunjang dia memakai narkoba.

b. Kelompok sekunder yaitu kelompok mereka yang mempunyai sifat anti sosial. Kepribadiannya selalu bertentangan degan norma-norma masyarakat. Sifat egosentris sangat kental dalam dirinya. Akibatnya dia melakukan apa saja semaunya. Perilaku

[112] Hari Sasangka, Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hokum Pidana, Bandung ; Mandar Maju, 2003, hlm. 10

ini disamping sebagai konsumen juga dapat sebagai pengedar. Ini merupakan pencerminan pribadi yang ingin mempengaruhi dan tidak senang jika ada orang lain merasa kebahagiaan, kelompok ini harus diwaspadai.

c. Kelompok tersier adalah kelompok ketergantungan yang bersifat reaktif, biasanya terjadi pada remaja yang labil dan mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungannya, juga pada mereka yang kebingungan untuk mencari identitas diri selain mungkin adanya ancaman dari pihak tertentu untuk ikut mengkonsumsi narkoba.

Kelompok pertama dan ketiga dapat dilakukan dengan terapi yang serius dan intensif, sedangkan untuk kelompok kedua selain terapi juga harus menjalani pidana penjara sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Apabila pengedar narkotika hanya di terapi, akan kecil sekali sembuhnya. Pengedar adalah kelompok yang paling berbahaya terhadap penyebaran narkotika.

Pelaksanaan terapi disini adalah bertujuan untuk mendapat kesembuhan bagi narapidana supaya lepas dari ketergantungan Narkoba sebagaimana dalam tujuan pengobatan adalah untuk mendapat efek pengobatan (efek terapeutik) yang diinginkan. Efek terapeutik merupakan tujuan agar pasien menjadi sembuh. Masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika,dan zat adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang popular dikenal masyarakat sebagai narkoba (Narkotika dan Bahan/obat berbahaya)

merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner dan peranserta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.

Terus meningkatnya jumlah korban penyalahguna narkotika membuat peran terapi dan rehabilitasi bagi korban narkotika menjadi penting dan strategis. Untuk itu bidang terapi dan rehabilitasi diminta untuk proaktif terus mencari terobosan agar perannya menjadi efektif.Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur penjeraan dan penggunaan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu, semata-mata dipandang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[113]

Bentuk rehabilitasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasya- rakatan Narkotika merupakan wujud dari sistem pemasyarakatan yang pelaksanaannya adalah bersifat rehabilitasi terpadu.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa tujuan rehabilitasi adalah juga tujuan dari pada pembinaan. Hal ini dapat dipertegas bahwa yang menjadi pedoman di Lapas-Lapas lain juga sama pedoman di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang UUP dan Peraturan-peraturan yang lain. Arti penting diperlukannya terapi dan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan di sebabkan

[113] Adi Sujatno, Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri, Teraju, Jakarta,2008, hlm. 123

oleh:[114]

a. Dampak negatif narkoba dalam jangka panjang.

b. Peningkatan angka kematian rata-rata akibat penyakit penyerta sebagai dampak buruk penyalahgunaan narkoba seperti TB, HIV-AIDS dan Hevatitis.

c. Mengurangi penularan penyakit TB, HIV-AIDS dan Hevatitis.

Untuk mencapai tujuan rehabilitasi sebagai tahap pemulihan bagi penyalahguna narkoba dilaksanakan dengan pembinaan. Hal ini sejalan dengan pemikiran-pemikiran baru tentang fungsi pemidanaan yang tidak lagi bersifat penjeraan tetapi telah berubah menjadi suatu usaha yang rehabilitatif dan reintegratif dengan tujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana lagi dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan masyarakat serta berguna bagi nusa dan bangsa.

Strategi rehabilitasi ini dilakukan untuk mengobati para penyalahguna narkoba, dengan melakukan pengobatan secara medis, sosial dan spiritual serta upaya untuk mencegah menjalarnya penyakit HIV/AIDS karena pemakai jarum suntik oleh penyalahguna narkoba secara bergantian. Agar mereka yang sudah diberikan rehabiltasi tidak menjadi penyalahguna lagi, perlu dilakukan upaya pencegahan lebih lanjut.

Penyalaguna narkoba merupakan bagian dari masyarakat yang harus

[114] Adi Sujatno, Pencerahan Dibalik Penjara Dari Sangkar Menuju Sanggar Menuju Manusia Mandiri, Teraju, Jakarta, 2008, hlm. 85

ditolong dan diberikan kasih sayang dalam mempercepat proses penyembuhan. Perlu diberikan pengobatan dan rehabilitasi secara gratis kepada penyalahguna yang tidak mampu melalui subsidi pemerintah dan sumbangan para donatur, kaena pengobatan dan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar.

Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu :

1. Rehabilitasi Medis (Medical Rehabilitation)

Rehabilitasi medis menurut undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. M.Min memberikan pengertian rehabilitasi medis bahwa Rehabilitasi medis adalah lapangan specialisasi ilmu kedokteran baru, berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/ cedera (*impairment*), kehilangan fungsi/cacat (*disability*), yang berasal dari susunan otot-tulang (*musculos keletal*), susunan otot syaraf (*neuromuscular*), serta gangguan mental, sosial dan kekaryaan yang menyertai kecacatan tersebut.[115]

Tujuan dari rehabilitasi medis ini ada dua, yaitu:

a. Jangka panjang, dimana pasien segera keluar dari tempat tidur dapat berjalan tanpa atau dengan alat paling tidak mampu memelihara diri sendiri.

[115] http://vhasande.blogspot.co.id/2014/03.jenis-pelayanan-rehabilitasi.html, diakses pada tanggal 2 Maret 2014

b. Jangka pendek, dimana pasien dapat hidup kembali ditengah masyarakat, paling tidak mampu memelihara diri sendiri, ideal dan dapat kembali kepada kegiatan kehidupan semula atau mendekati.

2. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial Menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar narapidana narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi sosial dimaksudkan dalam kaitannya dengan layanan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus di bidang sosial, yaitu meningkatkan kemampuan bersosialisasi, mencegah agar ke- mampuan sosialnya tidak menurun atau lebih parah dari kondisi sosial sebelumnya.

Tujuan dari rehabilitasi sosial yaitu :

a. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat, atau lingkungan sosialnya.

b. Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk mendapatkan fungsi sosial secara wajar

c. Metode Rehabilitasi Bagi Narapidana

Rehabilitasi pemakai narkotika memerlukan waktu yang panjang, fasilitas dan obat yang memadai, serta tenaga professional yang berkompeten dan biaya yang cukup besar. Rehabilitasi ini melibatkan berbagai profesi dan

keahlian, yaitu : dokter, perawat, psikolog, pembimbing keagamaan, petugas pembimbing dan pembina panti rebilitasi sosial, psikiater dan pekerja sosial yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pemakai narkotika.

Efektifitas program dan proses rehabilitasi terhadap pemakai narkotika ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Kemauan kuat serta kerjasama pemakai narkotika.
2. Profesionslisme, kompetensi serta komitmen pelaksananya.
3. Sistem rujukan antara lembaga yang baik.
4. Prasarana, sarana, dan fasilitas yang memadai.
5. Perhatian dan ketertiban orang tua dan keluarga serta dukungan dana yang memadai.
6. Kerjasama dan koordinasi lintas profesi dan instansi yang baik.

Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajib-kan pelaku penyalahgunaan narkotika mengikuti program rehabilitasi. Beberapa macam bentuk atau metode dalam pelaksanaan rehabilitasi pemakai narkotika, dalam hal ini narapidana pemakai narkotika seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi, tetapi dalam pelaksanaannya metode rehabilitasi dan medis digabung menjadi satu sehingga menjadi empat tahap proses pemulihan pemakai narkotika, yaitu:

1. Tahap pemeriksaan kesehatan, pada tahap ini seorang dokter dan perawat mempunyai peranan yang sangat penting untuk memeriksa awal apakah kondisi kesehatan pasien/narapidana baik atau tidak, riwayat penyakit yang pernah diderita dan

selanjutnya seluruh data tentang ciri fisik sampai dengan kesehatannya dicatat dalam lembar medical record.

2. Tahap detoksifikasi, terapi lepas narkotika dan terapi fisik yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan racun dari tubuh, mengurangi akibat putus dari narkotika serta mengobati komplikasi mental penderita. Ada beberapa cara seperti coldturkey (berbicara terus terang tentang hal- hal yang tidak menyenangkan), konvensional (simptomatik), substitusi (penggantian zat).

3. Tahap stabilitas suasana mental dan emosional penderita, sehingga gangguan jiwanya yang menyebabkan perbuatan penyalahgunaan narkotika dapat diatasi. Pada tahap ini dilakukan dengan cara melibatkan beberapa keahlian seperti petugas pembimbing dan pembina sertapsikolog, yaitu melalui metode pekerjaan sosial :

a. Bimbingan Sosial/Terapi Individu

Bimbingan sosial dalam bentuk terapi individu dilakukan untuk mengungkapkan atau menggali permasalahan-permasalahan yang bersifat mendasar yang sedang dialami oleh narapidana sehingga dapat membantu proses rehabilitasi selanjutnya. Selain itu juga, dilakukan untuk menemukan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang sedang dihadapi pasien/ narapidana. Metode ini dilakukan dengan cara tatap muka antara petugas pembimbing dengan narapidana.

b. Bimbingan Sosial/Terapi Kelompok

Bimbingan ini dilakukan dengan menggunakan kelompok, yaitu dengan adanya pembagian-pembagian kelompok narapidana/ tahanan berdasarkan usia, lama pidana/ hukuman. Latar belakang masalah, jenis kelamin dan sebagainya. Kelompok ini dimaksudkan sebagai media pengembangan nilai orientasi dan perubahan sikap menjadi pro-sosial yang produktif. Petugas disini diharapkan mampu mendorong untuk memecahkan suatu permasalahan.

Tahap pemulihan fungsi fisik, mental dan sosial pasien/narapidana melalui kegiatan-kegiatan yang langsung bersosialisasi dengan masyarakat seperti adanya penyuluhan, menerima kunjungan kerja, mengikuti perlombaan antar narapidana.

D. Ketentuan Rehabilitasi Bagi Narapidana

Ketentuan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009, disebutkan pada Pasal 54 Pecandu Narkotika dan Korban Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini diperjelas dalam pasal 3 ayat (1) Perturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Peraturan BNN 11/2014) yang mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Korban penyalahguna Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan,

penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

Pada waktu diputuskan rehabilitasi hakim yang menentukan apakah yang bersangkutan (dalam hal ini Pecandu Narkotika) menjalani rehabilitasi atau tidak berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan.Hal ini diatur sebagaimana dalam Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentag Narkotika.

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melaluirehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbuktibersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

Penjelasan ;

Ketentuan ini menegaskan bahwa pengguna kata memutuskan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bai pecandu narkotika yang bersangkutan.

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Penjelasan;

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata menetapkan bagi Pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa Pecandu Narkotika tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Penentuan terhadap Penyalahguna narkotika (termasuk yang kemudian menjadi korban penyalahguna narkotika), apakah dapat direhabilitasi atau tidak tetap melalui pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal ini penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitas.

Dalam memutuskan dapat atau tidaknya tersangka/ terdakwa direhabilitasi hakim dalam putusannya masih memperhatikan komposisi pemakaian hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Narkotika kedalam Lembaga Medis dan Sosial, pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1

(satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
3. Kelompok heroin : 1,8 gram
4. Kelompok kokain : 1,8 gram
5. Kelompok Ganja : 5 gram
6. Daun Koka : 5 gram
7. Meskalin : 5 gram
8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide : 2 gram
10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
11. Kelompok Fentanil : 1 gram
12. Kelompok metadon : 0,5 gram
13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
14. Kelompok Petidin : 0.98 gram
15. Kelompok Kodein : 72 gram
16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg

Demikian meski masih dalam proses peradilan, baik penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang di pengadilan tanpa menunggu putusan hakim terlebih dahulu, penyidik, jaksa penuntut umum, atau hakim bisa saja meminta asesmen terhadap tersangka atau terdakwa sebelum ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi yang ketentuanya diatur dalam PP No 11 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika untuk mendapatkan

layanan rehabilitasi, serta Menteri Kesehatan RI mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan (KEPMENKES) No 1305/MENKES/SK/VII/2011.

Terdapat beberapa Ketentuan persyaratan permohonan rehabilitasi adalah;

1. Surat permohonan bermaterai BNN berisi antara lain;

a. Identitas pemohon/tersangka

b. Hubungan pemohon/ tersangka

c. Uraian kronologis dan pokok permasalahan penangkapan tersangka

2. Pas foto tersangka 4x6 (1 lembar)

3. Foto copy surat nikah bila pemohon suami/istri tersangka

4. Foto copy surat ijin beracara bila pemohon adalah kuasa hukum/pengacara tersangka dan surat kuasa dari keluarga

5. Surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi/ lembaga pendidikan, bila tersangka adalah pelajar/ mahasiswa

6. Surat keterangan dari tempat kerja, bila tersangka sebagai pegawai/pekerja

7. Foto copy surat penangkapan dan surat penahanan

8. Surat keterangan dari tempat rehabilitasi, bila yang bersangkutan pernah atau sedang proses rehabilitasi

9. Surat rekomendasi dari penyidik, jaksa penuntut umum atau hakim direhabilitasi/asesmen

10. Foto copy surat permohonan rehabilitasi kepada penyidik, jaksa

penuntut umum atau hakim

11. Surat pernyataan bermaterai
12. Menunjukan surat penangkapan dan penahanan asli
13. Foto copy ktp orang tua/wali tersangka dan pengacara/kuasa hukum
14. Foto copy keluarga
15. Foto copy ijin dari pengacara

Tata cara pengajuan permohonan rehabilitasi narkotika bagi pecandu narkotika;

1. Dalam hal pecandu narkotika belum cukup umur orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, da/ atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dn/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Dalam hal pecandu narkotika sudah cukup umur pecandu narkotika wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Tata cara mengenai permohonan rehabilitasi dalam konteks

pertanyaaan permohonan rehabilitasi dalam pengadilan, bahwa permohonan dilakukan kepada Jaksa (tingkat penuntutan) atau Hakim (tingkat pemeriksaan). Kemudian, setelah itu Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan dan Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat meminta bantuan kepada Tim Assessment Terpadu setempat untuk melakukan assessment terhadap terdakwa. Jadi, jaksa penuntut umum atau Hakim lah yang meminta bantuan untuk terlebih dahulu melakukan asesment terhadap terdakwa. Bantuan asesment ini dilakukan berdasarkan Peraturan BNN 11 Tahun 2014 dan hasilnya diserahkan kepada Jaksa atau Hakim dengan Berita Acara Penyerahan rekomendasi hasil asesment.

Meskipun peraturan BNN No. 11 Tahun 2014 pada dasarnya adalah pedoman teknis penyidik (tingkat penyidikan) untuk memohon penempatan rehabilitasi kepada tersangka/terdakwa setelah dilakukan asesment, namun dalam tingkat penuntutan atau pemerikasaan di pengadilan, jaksa atau hakim dapat memohon asesment kepada Tim Asesment Terpadu yang tata caranya berdasarkan pada Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka/Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahguna Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi.

Terdapat ketentuan mengenai rehabilitasi bagi narapidana dalam pelaksanaan pembinaan rehabilatasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan-ketentuan peraturan diatas sebagai berikut;

1. Masa pembinaan residen selama 6 (enam) bulan.
2. Selama detoksifikasi dan entry unit, residen tidak dapat dikunjungi oleh pihak keluarga.
3. Residen dapat dikunjungi setelah memasuki fase primary dan re-entry.
4. Bila residen melarikan diri dari tempat rehabilitasi dan kembali ke keluarga, keluarga wajib menginformasikan kepada BNN serta mengantar kembali untuk melanjutkan rehabilitasi.

Selain di Lembaga Pemasyarakatan Pemerintah bersama BNN juga memanfaatkan lembaga non rehabilitasi di lingkungan lembaga/instansi pemerintah dengan guna mendayagunakan fasilitas layanan kesehatan dan layanan sosial untuk rawat jalan dan rawat inap bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Kondisi ini dilakukan mengingat permasalahan Narkotika merupakan tanggung jawab seluruh Kementerian dan Lembaga termasuk TNI dan Polri, serta Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KaPolri). Sesuai dengan karakteristik utamanya sebagai aparat penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki wewenang yang cukup besar dalam menegakkan hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa

Polri adalah kepolisian nasional Indonesia atau lembaga penegak hukum, sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran;

1. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan

masyarakat.

2. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

**1. Tugas dan Wewenang Polri**

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, bertugas sebagai berikut: [116]

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,

[116] Budi Rizki Husin, Studi Lembaga Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, halaman152

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;

4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Menurut Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;

10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12 Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan dipriksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara;

8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang di sangka melakukan tindak pidana;
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

**2. Kode Etik POLRI**

Organisasi kepolisian, sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki "Etika" yang menunjukan perlunya tingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan "Kedisplinan" dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan misi yang diembannya selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan,peranan,fungsi,wewenang dan tanggung jawab dimana mereka bertugas dan semua itu demi masyarakat. Persoalan etika adalah persoalan-persoalan kehidupan manusia. Tidak berlaku semata-mata menurut naluri atau dorongan hati, tetapi dan bertujuan dan bercita-cita dalam satu komunitas. Etika berasal dari bahasa latin disebut ethos atau ethikos. Kata ini merupakan kata tunggal, sedangkan dalam bentuk jamak adalah ta etha istilah ini juga kadang-kadang disebut juga dengan

mores, mos yang juga berarti adat istiadat atau kebiasan yang baik sehingga dari istilah ini lahir penyebutan moralitas atau moral.

Rangkuman Etika Polri yang dimaksud yang telah dituangkan dalam pasal 34 dan 35 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002. Pasal-pasal tersebut mengamanatkan agar setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian bhayangkara negara seutuhnya. Mengabdikan dirinya sebgai alat negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya tersangkut dengan hak dan kewajiban warga negara secra langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan tehnis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Polri harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian dan sikap dan perilakunya.

Tujuan dibuatnya kode etik Polri yaitu berusaha meletakan Etika Kepolisian secara proposional dalam kaitannya dengan masyarakat sekaligus juga bagi Polri berusaha memberikan bekal keyakinan bahwa internalisasi Etika kepolisian yang benar,baik dan kokoh merupakan sarana untuk:

a. Mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggaan sebgai seorang polisi, yang kemudian dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat.
b. Mencapai sukses penugasan.
c. Membina kebersamaan,lemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi masyarakat.
d. Mewujudkan polisi yang profesional, efektif, efesien dan modern, yang bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat.

Pada dasarnya, Polri harus menjujung tinggi kehormatan dan martabat

negara, pemerintah dan kepolisian negara republik Indonesia dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum. Dengan melakukan tindak pidana, ini berarti Polri melanggar aturan disiplin.

Pelanggaran aturan displin adalah ucapan, tulisan atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan displin dan/atau hukuman disiplin.Tindakan disiplin berupa teguran lisan atau tindakan fisik (Pasal 8 ayat (1) PP 2/2003). Tindakan displin tersebut tidak menghapus kewenangan atasan yang berhak menghukum (Ankum) untuk menjatuhkan hukuman Disiplin. Adapun hukuman disiplin tersebut berupa (Pasal 9 PP 2/2003):

a. Teguran tertulis ;

b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;

c. Penundaan kenaikan gaji berkala;

d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;

e. Mutasi yang bersifat demosi;

f. Pembebasan dari jabatan;

g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pelanggaran disiplin Polri, penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin dan apabila anggota Polri melakukan tindak pidana penyalagunan narkotika, pemerkosaan, penganiayaan dan pembunuhan (penembakan) terhadap warga sipil maka anggota Polri tersebut tidak hanya

melakukan tindak pidana, tetapi juga telah melanggar disiplin dan kode etik kepolisian.

# BAB – IV

# KELEMAHAN KEBIJAKAN KRIMINAL BAGI PERSONIL POLRI YANG MENGGUNAKAN NARKOBA DI POLDA SUMATERA UTARA

## A. Tinjauan Kriminologi Terhadap Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang miliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan "ke" dan mendapat akhiran "an" yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).[117]

Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana.Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja *(intentional act)* maupun kelalaian *(oomission)* yang melanggar hukum

[117] Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia"* Cv. Widya Karya,Semarang, hal.196

pidana tertulis maupunputusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.[118]

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.[119] Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label

[118] M.Ali Zaidan, 2016, *"Kebijakan Kriminal",* Sinar Grafika, Jakarta, 11-12
[119] Yermil Anwar Adang, 2010, "*Kriminologi*", PT. Refika Aditama, Bandung, hal 179

atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya.

Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.[120]

Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman.

Aspek sosial artinya bahwa sesorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat

[120] Anang Priyanto, 2012, *"Kriminologi*" , Penerbit Ombak, Yogyakarta, hal 77

sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/,*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.[121]

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori

[121] Abintoro Prakoso, 2013, *" Kriminologi dan Hukum Pidana"*, Laksbang Grafika, Yogyakarta,hlm 78-79

kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

1. Teori Biologis

   Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.

2. Teori Psikogenesis

   Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi,

rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.

Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustasi. Orang yang frustasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun.

Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan diatasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan

karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi,termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.

Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan.

Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya.[122] Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan

[122] Indah Sri Utami, 2012, "*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi",* Thafa Media, Bantul Yogyakarta, hal 72-73

kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.

4. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi.[123]Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah

[123] Ende Hasbi Nassarudin, 2016, " *Kriminologi* ", CV. Pustaka Setia, Bandung, hal 121-122

penyebab kejahatandilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.[124] Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaran bermotor.Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk beremigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

Ada 8 tipe kejahatan yang ada di muka bumi ini:

[124] Chandra adiputra, 2014, dalam makalah" *Kriminologi dan Kejahatan*".

1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk bentuk perbuatan kriminil seperti pembunuhan dan pemerkosaan.
2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, misalnya pencurian kendaraan bermotor.
3. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.
4. Kejahatan politik yang meliputi penghianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya.
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggar hukum memandang dirinya jahat apabila mereka terus menerus ditetapkan orang lain sebagai orang jahat, misal pelacuran.
6. Kejahatan konvensional antara lain yaitu : perampokan, pencurian terutama denan kekerasan dan pemberatan.
7. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkotika.
8. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang.

Pelaku sering kali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan.

Tipe-tipe kejahatan diatas memiliki beberapa faktor penyebab diantaranya adalah, faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan juga faktor tipologis, termasuk juga kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni :

1. Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah

merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil.

2. Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasikan bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian.
3. Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin meiliki.
4. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.
5. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan

kejahatan.[125]

Kesulitan-kesulitan bagi orang orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakat, keluarga, tempat kerja, maupun lingkungan sekolahnya. Faktor ini juga bisa menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Mengendurnya ikatan sosial di masyarakat bisa mengakibatkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena kurangnya rasa solidaritas antar masyarakat yang membuatnya bersikap acuh tak acuh terhadap masyarakat lain, sehingga jika melakukan kejahatan ini pelaku tak memiliki rasa canggung terhadap korbannya.

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni : teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, dan teori *differential association.*

1. Teori Ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin

[125] Abintoro Prakoso, 2013, "*Kriminologi dan Hukum Pidana",*Laksbang Grafika, Yogyakarta, hal98-101

meningkatnya saranna transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam.

Urbanisasi juga dapat memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin banyak terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut, karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam system keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.

2. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

3. Teori-teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan

persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

*4.* Teori *Differential Association*

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:

a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan jugamotif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
f. Sesesorang menjadi delinkeun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
g. *Differential Association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-

pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.

i. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.

Secara umum kejahatan berasal dari kata "jahat" yang berkaitan dengan suatu perbuatan, tindakan atau kelakuan dan atau tabiat yang sangat tidak baik, buruk, atau jelek.[126] Kejahatan itu sendiri merupakan kristalisasi dari sifat seseorang yang jahat (penjahat) yang dinilai dari perbuatannya sesuai atau tidak sesuai dengan ukuran norma dan atau kaedah di lingkungan mana orang atau penjahat tersebut berada.

J. E. Sahetapy berpendapat (mengutip buku *Victimologi Perlidungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)* menyatakan kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap waktu dan tempat. kehadirannya di bumi ini dapat dianggap setua dengan umur manusia. [127]

Merujuk kepada referensi Iainnya dijelaskan pemakaian istilah kata penjahat itu

[126]JS Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia,* Pustaka Graha, Jakarta, 1998, Halaman.394. pengertian Iainnya adalah kejahatan suatu tindakan yang termasuk dalam tindak pidana berat dari sekedar pelanggaran; perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat, juga membagi kejahatan anak muda, kejahatan apartheid, kejahatan dunia maya, kejahatan genosida, kejahatan internasional, kejahatan jabatan, kajahatan perdamaian, kajahatan pasar modal, kejahatan perang, kejahatan perbankan, kajahatan perusakan, kajahatan politik, kejahatan profesi, kejahatan secara praktis, kejahatan secara religius, kejahatan korporasi, kejahatan terorganisasi. (Lihat: M. Marwan & Jimmy *P,Kamus Hukum,* Reality Publisher, Surabaya, 2009, Halaman, 339-342). Hal yang sama dikemukakan Arif Gosita, mendefenisikan kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi. (Lihat: Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan, CV.* Akademika pressindo, Jakarta, 1993, Halaman, 98).

[127] Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu. Yogyakarta, 2010, Halaman. 83.

sendiri di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) tidak ada diketemukan. Dengan demikian istilah kejahatan ini muncul pada masa setelah lahirnya KUHP, sehingga dalam KUHP sama sekali tidak dijumpai kata kejahatan ataupun penjahat.

Dari beberapa ahli kriminologi kategori penjahat dibagi dalam berbagai jenis, bentuk dan atau tipe sebagai berikut:

Menurut Lambroso,[128] Jenis penjahat antara lain yang merupakan keturunan atau bawaan sejak lahir, penjahat karena kurang beres pikiran atau gila, karena adanya pengaruh dari minuman alkohol/minuman keras, karena dorongan hawa nafsu yang tidak terkendali, penjahat yang melakukan perbuatan karena kesempatan atau pengaruh kebiasaan, dan bentuk penjahat campuran dari tipe-tipe tersebut di atas.

Menurut teori di atas pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan dimaksudkan untuk memberikan tindakan perawatan (rehabilitasi) dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari hukuman. Pada dasarnya teori ini dilandasi pemikiran aliran positif.[129]

Menurut Seelig, tipologi penjahat dikelompokkan karena sebab dari dalam dirinya sendiri yang lemah jiwanya sehingga tidak dapat menahan godaan

[128] Mahmud Mulyadi menyatakan bahwa Cesare Lambroso (1835-1909), dan Enrico Ferri (1856-1928) dan Raffaele Garafalo (1852-1934) para pelopor aliran positif. (Lihat: Mahmud Mulyadi & Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT. SOFMEDIA, Jakarta, 2010, Halaman, 99).

[129] 31 Ibid.

dari luar dirinya untuk melakukan perbuatan agresif menyimpang dari norma yang berlaku dalam pergaulan masyarakat, seperti melakukan pencurian, perampokan atau pemerasan dan penipuan untuk menikmati dan membiayai kehidupan glamor atau berfoya-foya, memakai narkotika atau obat-obatan yang berbahaya atau perbuatan lainnya di luar kemampuan yang dimilikinya.[130]

Van Apeldoorn dalam kajian tentang peristiwa pidana membagi sisi obyektif yakni suatu tindakan berbuat atau lalai berbuat yang bertentangan dengan hukum positif (yang bersifat tanpa hak menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman), dan sisi subyektif "kesalahan atau *schuldzijde"* yakni akibat perbuatan yang tidak diinginkan undang-undang yang dilakukan pelaku serta akibatnya dapat dibebankan pada pelakunya.[131]

Berdasarkan pertanggungjawabannya digolongkan ke dalam ajaran *determinisme* yaitu yang didasarkan pada kebebasan atau kemerdekaan kehendak untuk berbuat atau tidak berbuat. Sebaliknya dalam ajaran *indeterminisme* menegaskan manusia tidak bebas menentukan kehendak/wataknya, atau kehendak/watak tersebut ditentukan sejak lahir dan atau oleh alam sekitarnya *(milieu),* sehingga kehendak/watak tunduk pada hukum kausalitas atau hukum sebab dan akibat. Menurut ajaran ini manusia atau penjahat dianggap berkuasa menentukan kehendaknya kearah lain atau menghindarkan dari apa yang telah diperbuatnya. Penjahat karena pengaruh dari lingkungan; mendorong dan atau

[130] Chainur Arrasjid, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil,* Kelompok Hukum dan Masyarakat, FH-Usu, Medan, 1999; Halaman.35-36.

[131] *Ibid.*

memaksanya untuk berperilaku seperti apa yang berlaku umum. Penjahat tipe ini lebih merupakan korban dari sosial-budaya yang berlaku. Pada dasarnya jiwa atau sifat hakiki dari penjahat tipe ini adalah balk . Perbuatannya yang menyimpang merupakan respon terhadap akibat dari kondisi dan situasi yang ada disekitarnya, yang tidak mungkin dihindarkan.[132]

Menurut Mamik Sri Supatmi dan Herlina Permata Sari mengutip pendapat Sutherland bahwa proses terjadinya suatu tingkah laku jahat dijelaskan ada 9 (sembilan) dalil dalam asosiasi yang berbeda-beda. Sembilan dalil tersebut adalah sebagai berikut:[133]

Pertama. Tingkah laku jahat itu dipelajari. Hal ini berarti, tingkah laku jahat tidak diwariskan secara biologis. Analoginya adalah seseorang tidak akan menemukan penemuan baru dalam bidang permesinan jika tidak pernah terlatih/belajar tentang mesin.

Kedua. Tingkah laku jahat dipelajari dalam suatu interaksi melalui proses komunikasi (baik verbal, isyarat maupun sikap).

Ketiga. Interaksi untuk belajar itu terjadi dalam kelompok yang intim. Dengan demikian, film, sandiwara, surat kabar, dan lain-lain relatif tidak penting dalam proses lahirnya tingkah laku jahat.

Keempat. Yang dipelajari termasuk teknik/cara melakukan kejahatan, petunjuk/arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi dan sikap.

---

[132] Chainur Arrasjid, *Ibid;*, Halaman.35-36.

[133] Mamik Sri Supatmi & Herlina Permata, *Dasar-Dasar Teori Sosial Kejahatan*, PTIK Press,Jakarta, 2007, Halaman. 45-46.

Kelima. Petunjuk/arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari defenisi-defenisi hukum yang mendukung dan yang tidak mendukung tingkah laku jahat. Di dalam beberapa masyarakat, seorang individu dikelilingi oleh orang-orang yang mendefenisikan hukum sebagai peraturan yang harus dipatuhi. Sementara di masyarakat lain individu ini dikelilingi oleh orang-orang yang mendefenisikan pelanggaran hukum sebagai hal biasa atau dapat diterima.

Keenam. Seseorang menjadi jahat karena defenisi-defenisi yang mendukung pelanggaran hukum sangat banyak sehingga melebihi defenisi-defenisi yang tidak mendukung pelanggaran hukum. Artinya individu tersebut berasosiasi dengan tingkah laku jahat dan terisolasi dari tingkah laku baik. Dalil keenam ini merupakan prinsip utama teori asosiasi yang berbeda-beda.

Ketujuh. Asosiasi yang berbeda-beda (baik dengan tingkah laku baik maupun dengan tingkah laku jahat) bervariasi dalam hal frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.

Kedelapan. Proses mempelajari tingkah laku jahat melalui asosiasi dengan pola-pola tingkah laku jahat dan tidak jahat melibatkan seluruh mekanisme yang dibutuhkan proses mempelajari hal lain. Hal ini berarti mempelajari tingkah laku jahat tidak terbatas hanya pada peniruan saja.

Kesembilan. Meskipun tingkah laku jahat merupakan ekspresi kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku jahat tidak dapat dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut karena tingkah laku tidak jahat juga merupakan ekspresi kebutuhan nilai-nilai yang sama. Hal ini berarti jika pencuri mencuri agar memperoleh uang muka buruh bekerja agar juga

memperoleh uang. Dengan kata lain, untuk dapat menjadi jahat, seseorang itu harus melalui proses pembelajaran.

Melalui uraian di atas dapat diringkas bahwa interaksi sosial dapat menghasilkan penyimpangan atau kejahatan. Seorang individu akan menjadi penjahat karena dia berhubungan dengan pola tingkah laku jahat dan terisolasi dari pola tingkah laku tidak jahat. Dengan demikian individu tersebut menyerap apa yang terjadi dalam Iingkungannya.[13437]

Kejahatan yang merupakan fenomena dari perbuatan tercela, jahat atau buruk di mata masyarakat dapat saja terjadi tanpa ada batas ruang, waktu dan tempat, bahkan tidak mengenal dan memperdulikan apa dan siapa korban yang akan menderita akibat perbuatannya. Berbagai faktor penyebab dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan jahat atau melakukan kejahatan, diantaranya karena rendahnya pendidikan, kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain yang semuanya dapat dan telah terbukti (kasuistis) kebenarannya.

Ditinjau dari perspektif teologis atau keagamaan semua faktor pemicu dari perilaku jahat tersebut pada dasarnya dapat dikendalikan oleh pribadi-pribadi yang kokoh memegang dan mentaati ajaran agamanya masing-masing secara konsisten dan konsekuen. Artinya, pengendalian diri dengan landasan ajaran agama pada diri pribadi seseorang akan mampu menghalanginya untuk melakukan perbuatan atau tindakan serta sikap yang tercela.

Secara faktual pengaruh rendahnya pendidikan, kemiskinan dan pengangguran sebagai salah satu faktor penyebab dari seseorang melakukan

[134] *Ibid.,* Halaman. 46-47.

kejahatan seperti pencurian, perampokan atau pemerasan,[38] bahkan melacurkan diri sebagai pekerja sek komersial (PSK) dapat diterima dan terbukti kebenarannya, meski bukan berarti melegitimasinya. Namun demikian, apabila dicermati teori ini secara khusus terhadap para pelaku tindak pidana tertentu seperti pelaku tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan narkotika, maka latar belakang dari pengaruh rendahnya pendidikan, kemiskinan dan atau pengangguran sebagai faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana, terutama penyalahgunaan narkotika menjadi tidak relevan dengan kenyataan yang terjadi *inconcreto.*

Lebih komprehensifnya pembahasan ini dijelaskan faktor penyebab terjadinya kejahatan. Faktor terjadinya kejahatan ini terbagi dua bagian yaitu faktor internal dan eksternal, pertama faktor biologis atau psikologis, kedua faktor lingkungan sosial.[135]

**1. Faktor Internal (Biologis atau Psikologis)**

Teori-teori dari persfektif biologis dan psikologis ini sama-sama memiliki asumsi bahwa tingkah laku kriminal disebabkan oleh beberapa kondisi fisik dan mental yang mendasari yang memisahkan penjahat dan bukan penjahat. Mencari, mencoba mengidentifikasi "macam manusia" mana yang menjadi penjahat dan mana yang bukan. Teori-teori tersebut menjelajah kepada kasus-kasus individu, tetapi tidak menjelaskan mengapa angka kejahatan berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, antara satu kelompok dengan kelompok lain, di dalam satu wilayah yang luas, atau di

[135] Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Penal Policy dalam penanggulangan Kejahatan Kekerasan,* Pustaka USU, 2008, Halaman. ix.

dalam kelompok-kelompok individual.[136]

Tokoh yang terkenal sebagai seorang yang mengungkap sebab sebab munculnya kejahatan dari perspektif biologis adalah Cesare Lambroso (1835 - 1909) yang dikenal sebagai dari kriminologi modern saat ini dan menandai lahirnya aliran positif kriminologi.[137]

Basis utama aliran ini adalah konsepsinya bahwa kejahatan disebabkan oleh multi faktor yang menyangkut kehidupan natural manusia di dunia ini, antara lain faktor biologis dan faktor lingkungan sosial. Oleh karena itu aliran positif berdasarkan pada paham *indeterminisme* yang mengakui bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas *(free will)* karena dibatasi oleh faktor-faktor tadi. Dalam hal penjatuhan pidana, aliran ini menganut sistem *"indefinite sentence"*, yaitu pidana dijatuhkan tidak ditentukan secara pasti karena setiap pelaku kejahatan mempunyai kebutuhan yang berbeda. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Lombroso, bahwa penerapan pidana yang sama pada semua pelaku kejahatan, merupakan suatu kebodohan karena setiap pelaku mempunyai kebutuhan yang berbeda.[138]

Perbuatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari aspek yuridis semata terlepas dari orang yang melakukannya. Perbuatan seseorang itu harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, maupun faktor-

[136] Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Knminologi*, PT Raja Jakarta, 2001, Halaman. 57.

[137] Mahmud Mulyadi, *Loc. Cit.*, Halaman. 101.
[138] *Ibid.* Halaman. 102.

faktor lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban sipembuat lebih bersifat tindakan *(treatment)* untuk melindungi kepentingan masyarakat.[139]

Konsepsi di atas mulai meninggalkan tataran yuridis normatif dan memasuki ranah kajian kausalitas, yaitu bidang ilmu yang berupaya menjelaskan ihwal sebab akibat secara empirik. Pola pikir inilah yang melahirkan dan mencirikan pemikiran kriminologis positivis yang berkembang di Italia dan Perancis, dengan 2 aliran yaitu pemikiran Antropologis dan aliran Sosiologis.

Melalui faktor internal di atas maka kalangan aliran positif melihat kejahatan tidak dari sudut pandang perbuatannya, melainkan pelakunya sendiri yang harus dilihat dan didekati secara nyata dan persuasif. Tujuan pendekatan kepada pelaku ini adalah untuk mempengaruhi pelaku kejahatan secara positif sepanjang masih dapat dibina dan diperbaiki.

Paham rehabilitasi sebagai tujuan pemidanaan dalam perjalanannya tidak semulus yang diperkirakan. Paham ini banyak mendapatkan kritikan, pertama, ditujukan pada kenyataan bahwa sedikit negara yang mempunyai fasilitas untuk menerapkan program rehabilitasi pada tingkat dan kebijakan yang menekankan penggunaaan tindakan untuk memperbaiki. Kedua, adanya tuduhan yang serius bahwa pendekatan yang mengundang tirani dan penolakan hak asasi manusia.

**2. Faktor Eksternal (Lingkungan Sosial)**

Setelah menjelaskan faktor penyebab terjadinya kejahatan yang

[139] Ibid halaman. 222

bersifat internal di atas, selanjutnya dijelaskan faktor kedua yang bersifat eksternal (lingkungan sosial).

Terjadinya kejahatan tidak semata dipandang sebagai bagian dari pembawaan sifat manusia secara alami. Kejahatan dari sudut pandang soiologis disebabkan oleh adanya pengaruh eksternal dari lingkungan sosial.[140] Untuk lebih jelasnya pembahasan ini, maka dikemukakan dari semua teori tersebut.

Pertama. Teori Anomi.[141] Teori anomi pertama kali dikemukakan oleh Emile Durkheim (1858-1917).[142] Satu cara mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, kita melihat kepada struktur dari suatu masyarakat guna melihat bagaimana is berfungsi. Jika masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan-susunan sosial berfungsi.

Masyarakat seperti ini ditandai oleh kepaduan, kerja sama, dan kesepakatan. Namun, jika bagian-bagian komponennya tertata dalam satu keadaan yang membahayakan keteraturan/ketertiban sosial, susunan

[140] Mahmud Mulyadi menjelaskan bahwa untuk mengetahui faktor kejahatan yang bersifat eksternal ini dapat dilihat melalui teori anomi, teori Differential Association, teori konflik budaya *(cultur conflict),* dan teori sub budaya *(sub culture),* teori differential opportunity structure. (Lihat: Mahmud Mulyadi, *op.cit.,* Halaman. 106-112).

[141] Anomi adalah suatu konsep mengenai situasi tidak adanya kaidah-kaidah yang dapat dijadikan landasan tingkah laku serta tata tertib, atau keadaan dimana terjadi konflik kaidah-kaidah. (Lihat: M. Marwan & Jimmy P., *op.cit.,* Halaman. 50

[142] Ibid

masyarakat itu disebut *dysfunctional* (tidak berfungsi).[143] Sebagai analogi, jika kita melihat sebuah jam dengan seluruh bagian-bagiannya sangat sinkron. la berfungsi dengan tepat. la menunjukkan waktu dengan akurat. Namun, jika satu pernya yang kecil itu rusak, keseluruhan mekanisme tidak lagi berfungsi secara baik.

Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju satu masyarakat yang modern dan kota maka kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma-norma umum akan merosot. Kelompok-kelompok menjadi terpisah-pisah, dan dalam ketiadaan satu set aturan-aturan umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain.[144] Dengan demikian, tidak dapat diprediksinya perilaku, sistem tersebut secara bertahap akan runtuh, dan masyarakat itu berada dalam kondisi *anomi*.

Kedua. Teori Differential Associantion. Teori ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland dalam dua versi, yaitu pertama 1939 dan versi kedua tahun 1947.[145] Menurut Sutherland, perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial dan tidak diwariskan dari orang tua.[146] Melalui pernyataan Suterland bahwa perilaku kriminal itu dipelajari, hal ini berarti bahwa perilaku kriminal tersebut tidak diwariskan. Bagian

[143] Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *op.cit.*, Halaman. 58-59.

[144] Ibid
[145] Mahmud Mulyadi, *op.cit.*, Halaman. 107
[146] Lihat: Mamik Sri Supatmi & Herlina Permata, *op. cit.,* Halaman. 45-46).

terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi dalam kelompok-kelompok yang intim atau dekat. Keluarga dan kawan-kawan dekat mempunyai pengaruh yang paling besar dalam mempelajari tingkah laku yang menyimpang ini. Ketika tingkah laku kriminal ini dipelajari, pembelajaran itu termasuk: (a) teknik-teknik melakukan kejahatan; (b)arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasirasionalisasi, dan sikap- sikap. Pelaku bukan saja belajar bagaimana mencuri di toko, membongkar kotak, membuka kunci, dan sebagainya, tetapi belajar bagaimana merasionalisasi dan membela tindakan-tindakan mereka.[147]

Asosiasi differensial itu mungkin bermacam-macam dalam frekuensi, Iamanya, prioritasnya, dan intensitasnya. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola tingkah laku kriminal dan anti kriminal melibatkan setiap mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain. Walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhankebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

Ketiga. Teori Konflik Budaya *(Cultur Conflict).* Teori ini dikemukakan oleh Thorsten Sellin dalam bukunya yang berjudul *Culture Conflict and Crime.* Sellin menyatakan bahwa terdapat suatu norma tingkah laku yang mengatur kehidupan manusia sehari-hari. Norma tingkah laku ini bertujuan untuk mendefenisikan tingkah laku apa yang dianggap pantas (normal) dan apa

[147] Mahmud Mulyadi, op.cit., Halaman. 108-109

yang dianggap tidak pantas (abnormal).[148]

Menurut Sellin, setiap kelompok memiliki *conduct norms-nya* sendiri dan bahwa *conduct norms* dari satu kelompok mungkin bertentangan dengan *conduct norms* kelompok lain. Seorang individu yang mengikuti norma kelompoknya mungkin saja dipandang telah melakukan suatu kejahatan apabila norma-norma kelompoknya itu bertentangan dengan norma-norma dari masyarakat yang dominan. Menurut penjelasan ini perbedaan utama antara seorang kriminal dengan seorang non kriminal adalah bahwa masing-masing menganut perangkat *conduct norms* yang berbeda.[149]

Sellin membedakan antara konflik primer dan konfilk sekunder. Konflik primer terjadi ketika norma-norma dari dua budaya bertentangan. Pertentangan itu bisa terjadi di perbatasan antara area-area budaya yang berdekatan; apabila hukum dari satu kelompok budaya meluas sehingga mencakup wilayah dari kelompok budaya yang lain; atau apabila anggotaanggota dari satu kelompok berpindah ke budaya yang Iain.

Konflik sekunder muncul jika satu budaya berkembang menjadi budaya yang berbeda-beda, masing-masing memiliki perangkat conduct norms-nya sendiri. Konflik jenis ini terjadi ketika satu masyarakat homogen atau sederhana menjadi masyarakat-masyarakat yang kompleks di mana sejumlah kelompok-kelompok sosial berkembang secara konstan dan norma-norma seringkali

[148] ibid
[149] Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *op.cit.,* Halaman. 79.

tertinggal.[150]

Keempat. Teori Sub Budaya (Sub Culture). Teori ini dikemukakan oleh Albert K. Cohen. Cohen menyatakan bahwa terjadinya peningkatan perilaku kejahatan di daerah kumuh *(slum).* Cohen menyatakan bahwa perilaku kejahatan di kalangan remaja usia muda, kelas bawah merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi budaya Amerika.[151]

Para remaja berlomba mencari status sosialnya, akan tetapi bagi remaja berlomba mencari status sosialnya, akan tetapi bagi remaja kalangan bawah akan mengalami hambatan bersaing dengan kalangan atas karena mereka cenderung tidak memiliki materi dan keuntungan simbolis. Hal ini mengakibatkan kelompok usia muda kelas bawah mengalami konflik budaya yang disebut *"status frustation"*. Akhirnya para pemuda kalangan bawah ini melibatkan diri dalam gang-gang dan berperilaku menyimpang yang sifatnya tidak bermanfaat, dengki, dan jahat.[152] Kelima. Teori Differential Opportunity Structure.

Teori ini dikemukakan oleh Cloward dan Ohlin yang dibangun atas dua asumsi, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa terhalangnya aspirasi di bidang perekonomian yang disebabkan oleh kemiskinan sehingga secara umum menjadikan perasaan frustasi.
2. Bahwa frustasi ini mendorong kearah terjadinya kenakalan dalam konteks

[150] *lbid.* Lihatjuga Mahmud Mulyadi, *op.cit.,* Halaman.111
[151] Mahmud Mulyadi, *op.Cit.,* Halaman. 111
[152] *Ibid.,* Halaman. 112.

gang khusus, yang sifat kejahatannya secara alami bervariasi sesuai dengan struktur dan nilai konvensional dalam lingkungan pemuda.

Menurut Cohen, sub budaya yang nilainya bertentangan dengan nilai-nilai dari budaya dominan muncul di daerah-daerah kumuh dari kota- kota besar Amerika Serikat. Menurut Cohen, posisi relatif keluargakeluarga muda dalam struktur sosial menentukan problem-problem yang akan dihadapi anak-anak sepanjang hidupnya.

Keluarga-keluarga kelas bawah yang tidak pernah mengenal gaya hidup keluarga menengah, sebagai contoh, tidak dapat mensosialisasikan anak-anak mereka untuk memasuki kelas menengah. Anak-anak tumbuh dengan keterampilan komunikasi yang miskin, lemah dalam komitmen pendidikan, dan ketidakmampuan menunda keinginan.

Penyimpangan di wilayah perkotaan merupakan akibat dari adanya perbedaan yang dimilki oleh pemuda untuk mencapai tujuan, baik yang sifatnya sah ataupun tidak sah. Bila kesempatan untuk memperoleh sesuatu secara legal terhalang, maka kejahatan kemungkinan besar terjadi, dan bila kejahatan tidak terjadi, kecenderungan ketertlibatan dalam penggunaan narkotika dan kekerasan akan akan terjadi. Oleh karena itu Cloward dan Ohlin mengemukakan ada tiga tipe kenakalan geng ini, yaitu sebagai berikut:

a. *Criminal subculture,*

   Tipe ini terjadi pada masyarakat yang terintegrasi. Geng-geng berlaku sebagai kelompok remaja yang belajar dari orang dewasa. Aktivitas gang Iebih menekankan pada aktivitas yang menghasilkan

keuntungan materi dan berusaha untuk menghindari kekerasan;

b. *A retreatist subculture*

Pada tipe ini, para remaja tidak memiliki struktur kesempatan sehingga mereka cenderung melakukan mabuk-mabukan. Aktivitas mencari uang dalam geng ini untuk tujuan mabukmabukan;

c. *Conflik subculture.*

Tipe ini terjadi dalam masyarakat yang tidak terintegrasi, sehingga geng-geng mempunyai perilaku yang bebas, berupa melakukan kekerasan dan perampasan hak milik orang lain.

Berbicara mengenai kejahatan ini, dikalangan dunia Internasional juga sangat konsen untuk membahasnya, bahkan menjadi fokus utama guna meminimalisir terjadinya kejahatan tersebut. Menurut Kongres PBB tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders.* Kongres PBB ke-6 Tahun 1980 yang berlangsung di Caracas, Venezuela menyatakan dalam pertimbangan resolusinya menegani *Crime Trends and Crime Prevention Strategies,* antara lain:[153]

1. Bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas kehidupan yang layak bagi semua orang.
2. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
3. Bahwa penyebab utama banyaknya terjadi kejahatan diberbagai negara adalah disebabkan oleh ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan

[153] *Ibid.*, Halaman. 55.

diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan diantara sebagian besar penduduk.

Kejahatan di kalangan masyarakat tidak terjadi semata-mata unsur pribadi ataupun psikologis pelakunya saja, tapi juga dari faktor Iuar yang disebut faktor eksternal sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu jika dianalisa ternyata faktor yang mendominasi adalah faktor Iingkungan ataupun dari luar diri pelaku kejahatan tersebut. Dengan demikian menurut PBB ternyata kejahatan yang terjadi di kalangan masyarakat penyebab utamanya adalah terjadinya ketimpangan sosial.

Mahmud Mulyadi mengutip Dokumen NCONF. 144/L.3, menjelaskan bahwa faktor terjadinya kejahatan yaitu sebagai berikut:

2. Kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan, ketiadaan perumahan yang Iayak dan sistem pendidikan serta pelatihan yang tidak cocok;
3. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial dan karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;
3. Mengendornya ikatan sosial dan keluarga;
4. Keadaan-keadaan atau kondisi yang menyulitkan bagi orang yang berimigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain;
5. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan Iingkungan pekerjaan;
6. Menurunnya atau mundurnya kualitas Iingkungan perkotaan yang

mendorong peningkatan kejahatan dan tidak cukupnya pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas Iingkungan kehidupan bertetangga;

7. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam Iingkungan masyarakatnya, di Iingkungan keluarga, tempat pekerjaannya atau di Iingkungan keluarga, tempat pekerjaannya atau di Iingkungan sekolahnya;

8. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut di atas;

9. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisir, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;

10. Dorongan-dorongan (Khususnya oleh media massa) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap tidak toleran.

## B. Faktor Penyebab Anggota Polri Menggunakan Narkoba Di Wilayah Polda Sumatera Utara

### 1. Faktor Internal

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan suatu lembaga yang bertugas melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat. Polri juga bertugas menjaga seluruh keamanan seluruh wilayah hukum Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki markas besar yang menjadi pusat komando Kepolisian diseluruh Indonesia yang disebut Markas Besar Polri (Mabes Polri) berada di Jakarta. Kepolisian Negara Republik

Indonesia mempunyai kesatuan yang tersebar di seluruh daerah propinsi di Indonesia yang bertanggung jawab atau berwenang atas wilayah hukum daripada Propinsi tersebut yang disebut dengan Kepolisian Daerah (Polda). Salah satu kesatuan setingkat Polda tersebut adalah Polda Sumatera Utara yang berkedudukan/ berada di Medan (Ibu Kota Propinsi Sumatera Utara) berlokasi di Jalan Sisingamagaraja Medan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara memiliki banyak anggota. Dari seluruh anggota tersebut mempunyai kepribadian masing-masing antara satu dengan yang lainnya, dari sekian banyak anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara ini diperlukan pengawasan yang optimal juga dari pimpinan, tidak mudah melakukan pengawasan kepada semua anggotanya jika tidak ada kerjasama yang baik didalamnya. Dalam hal ini pimpinan sudah melakukan pengawasan terhadap masing-masing anggotanya bahkan dilakukan pengawasan yang melekat, diharapkan bahwa setiap anggota baik itu dilingkungan dinas maupun di lapangan dapat melaksanakan tugas dengan profesional dan tidak melakukan penyimpangan yang dapat mencoreng nama baik institusi dan merugikan diri sendiri. Pada umumnya secara keseluruhan penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan menjadi :

1. Alasan Internal dari Pelaku Ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus kedalam tindak pidana narkotika, penyebab internal itu antara lain sebagai berikut :
    a. Kurangnya rasa pengendalian diri, Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang, sifat ini sering kali mendominir perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan

narkotika/para pengguna dan pengedar narkotika. Pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong seseorang untuk memiliki atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkotika.

b. Kehendak Ingin merasakan kebebasan berperilaku tanpa dibatasi oleh norma-norma yang ada. Sifat ini adalah juga merupakan sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud dalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pemikiran maupun perasaan. Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkotika, maka dengan sangat mudah orang tersebut akan terjerumus pada tindak pidana narkotika.

c. Keadaan jiwa/psikis yang labil sehingga dengan mudah terlibat dalam tindak pidana narkotika. Hal ini sebelumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadap/diatasinya.dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkotika maka dia dengan mudah terlibat tindak pidana narkotika.

d. Adanya rasa ingin tahu yang besar dan perasaan ingin mencoba. Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin tidak terbatas pada hal-hal yang positif,

tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkotika, ini juga dapat mendorong seseorang melakukan tindak pidana narkotika.

Secara umum terdapat berbagai faktor penyebab yang dapat mempengaruhi seseorang individu untuk melakukan tindak pidana, termasuk di dalamnya tindak pidana narkotika.[154]

Faktor-faktor itu antara lain bersumber dari keadaan ekonomi yang ingin berlebih, dan merasa pendapatan dari gaji yang diterima masih sangat kecil sehingga tak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kombinasi dari berbagai hal di luar diri individu pelaku kejahatan (pengaruh lingkungan sosial).

Menganalisa uraian di atas, naluri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan yang menurut hukum tidak tertulis khususnya hukum tertulis diancam dengan sanksi pidana merupakan suatu pilihan dari dalam diri pelaku kejahatan, meskipun pelaku tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan atau tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi si pelaku mempunyai kepribadian yang kokoh dan jugs sikap mental (moral) yang balk maka yang bersangkutan akan dapat menghindarkan perbuatan jahat tersebut.

[154] Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman balk sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. (Lihat Undang-Undang Narkotika, Halaman. 3 & M. Marwan & Jimmy P., Op.cit., Halaman. 447).

Menurut banyak contoh yang dapat untuk dikedepankan sebagai pendukung pernyataan serta menolak alasan miskin, dan seterusnya sebagai penyebab melakukan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sebab apabila hal itu benar maka tidak dapat dibayangkan bagaimana konsekuensinya.

Sebaliknya, jika dicermati lebih jauh fakta dalam berbagai tindak kejahatan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, maka pelaku kejahatan seperti pencurian, pemerasan, perampokan dan penipuan khususnya pelaku tindak pidana korupsi yang umumnya dilakukan oleh orang-orang elite dan mempunyai jabatan (pekerjaan tetap sebagai pegawai negeri), termasuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika maka dasar untuk menolak alasan faktor kemiskinan sebagai penyebab seseorang melakukan tindak pidana dan atau kejahatan akan menjadi relevan. [155] Dengan kata lain, teori yang menekankan faktor kemiskinan merupakan penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan tidak dapat diterima dan atau dijadikan suatu alasan pembenaran.

Dengan demikian menjadi relevan ungkapan yang menyatakan bahwa kejahatan dapat terjadi di mana saja dan dilakukan oleh siapa saja tanpa mengenal batas ruang, waktu serta korbannya. Dalam pada itu, secara kasuistis kejahatan juga dapat terjadi dengan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu oleh pelaku. Contoh, dalam kejahatankejahatan tertentu seperti

[155] AKBP KAM Sinambela, Kabag Bin Ops Dit Res Narkoba Polda Sumut, wawancara pada hariKamis tanggal 06 Januari 2011 di Markas Polda sumut

perampokan dan pemerasan pada awalnya pelaku tidak mempunyai (merencanakan) niat untuk melakukannya, tetapi karena ada kesempatan antara lain korban yang lalai dan memakai perhiasan berlebihan serta situasi kondisi setempat yang sepi dan lain sebagainya akan memicu atau mendorong pelaku untuk merampok atau merampas serta memeras korban.

Kejahatan atau tindak pidana secara umum yang telah diuraikan di atas terjadi karena terpaksa.[156] Pada kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika khususnya maka teori yang menyatakan bahwa faktor pengangguran, tidak mempunyai pekerjaan atau pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan kemiskinan sebagai pemicu atau penyebab terjadinya kejahatan juga menjadi suatu pendapat yang kurang tepat, paling tidak masih memerlukan kajian lebih lanjut. Hal ini dikarenakan bahwa sebahagian besar dari pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah orangorang yang tergolong (dari perspektif ekonomi) miskin atau mempunyai pendapatan rendah,[157] bahkan ada diantaranya berstatus pelajar, pekerja seks komersial (PSK), supir angkot dan tukang becak.

Menurut kajian literatur ternyata ada beberapa faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab individu menyalahgunakan narkotika dalam kehidupannya. Oleh karena itu pada pembahasan selanjutnya dikemukakan faktor internal dan eksternal tersebut,

---

[156] P. Soemitro, *Kriminologi aktual,* Sebelas Maret University Press, Surakarta,1998, Halaman 163

[157] AA (Inisial), wawancara pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 di LP Tanjung Gusta Medan.

Menurut Sudarsono bahwa penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di latarbelakangi oleh beberapa sebab yaitu sebagai berikut:[158]

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakantindakan yang berbahaya seperti ngebut dan bergaul dengan wanita.
2. Menunjukkan tindakan yang menentang orang tua, guru, dan norma sosial.
3. Mempermudah penyaluran dan mempermudah perbuatan seks;
4. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
5. Mencari dan menemukan arti hidup.
6. Mengisi ke kosongan dan kesepian hidup.
7. Menghilangkan kegelisahan, frustasi dan kepepet hidup.
8. Mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas.
9. Iseng-iseng saja dan rasa ingin tahu.

Menurut penelitian Dadang Hawari, di antara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika dan psikotropika adalah sebagai berikut:[159]

1. Faktor kepribadian anti sosial dan psikopatik;
2. Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi;

[158] Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineke Cipta, Jakarta, 1992, Halaman. 67.

[159] Mardani, Penyalahgunaan Narkotika dalam Persfektif Hukum Islam dan Hukum Pidana nasional, P.T. Raja Grafindo, jakarta, 2007, Halaman. 102.

3. Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak;
4. Kelompok teman sebaya; dan
5. Narkotika dan psikotropika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran yang resmi maupun tidak resmi.

Menurut keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa terjadinya pemakaian narkotika di kalangan masyarakat diakibatkan faktor internal pribadi bagi si pemakai sendiri. Dengan demikian kejahatan yang dikerjakannnya berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan faktor lainnya seperti lingkungan.

Menurut Tim Badan Narkotika Nasional, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang atau individu menyalahgunakan narkotika dan psikotropika antara lain sebagai berikut:

1. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berfikir panjang tentang akibatnya dikemudian hari;
2. Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran;
3. Keinginan untuk bersenang-senang;
4. Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya hidup;
5. Keinginan untuk diterima dalam suatu kelompok;
6. Lari dari masalah, kebosanan atau kegetiran hidup;
7. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkotika dan psikotropika; dan

8. Tidak dapat atau mampu mengatakan "tidak" pada narkotika dan psikotropika.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dianalisa bahwa setiap individu didorong oleh beberapa faktor untuk menyalahgunakan pemakaian narkotika dan psikotropika tersebut, sehingga menjadi individu yang mengalami ketergantungan, berikut ini dijelaskan beberapa faktor yaitu:

(1). Ingin dianggap lebih hebat dari orang lain (pada orang muda).

(2). Dianggap membuktikan kesetiakawanan (pada orang muda).

(3). Dianggap paling tepat untuk mengatasi perasaan kecewa, jengkel, dan frustasi (pada suami istri yang mengalami konflik rumah tangga).

(4). Dianggap cara yang paling mudah untuk menghalau rasa sakit pada tubuh (pada penderita penyakit kronis);

(5). Dianggap cara yang paling mudah untuk mendapatkan perasaan tenang, damai, atau gembira (pada suami istri yang menghadap konflik rumah tangga).

(6). Dianggap cara paling mudah untuk melangsingkan tubuh (pada ibu-ibu rumah tangga atau wanita yang bertubuh gemuk).

(7). Dianggap metode yang sederhana untuk belajar giat dan bekerja keras dalam mengatasi masalah yang menumpuk dan harus dihadapi tanpa tidur.

Setelah menjelaskan faktor internal yang menyebabkan pemakaian narkotika, selanjutnya dijelaskan faktor penyebab eksternal orang menggunakan

narkotika.

Mardani menjelaskan faktor penyebab eksternal seseorang menyalahgunakan narkotika antara lain adalah sebagai berikut:[160]

a. Hubungan dalam keluarga kurang harmonis/disfungsi dalam keluarga;
b. Orang tua bercerai, berselingkuh atau kawin lagi;
c. Orang tua terlalu sibuk atau tidak acute;
d. Orang tua otoriter atau serba melarang;
e. Orang tua yang serba membolehkan (permisif);
f. Kurangnya orang yang dapat dijadikan model atau teladan;
g. Orang tua kurang peduli dan tidak tahu dengan masalah narkotika;
h. Tata tertib atau disiplin keluarga yang selalu berubah (kurang konsisten);
i. Kurangnya kehidupan beragama atau menjalankan ibadah dalam keluarga;
j. Orang tua atau anggota keluarga yang menjadi penyalahguna narkotika dan psikotropika.

Situasi buruk dalam keluarga dapat menyebabkan anak menyalahgunakan narkotika dan psikotropika, adalah disebabkan sebagai berikut:[161]

1. Anak merasa kurang mendapatkan kasih sayang dalam keluarga, merasa kesal, kecewa dan kesepian;
2. Anak merasa kurang dihargai, kurang mendapatkan kepercayaan,

[160] Mardani, *op.cit.*, Halaman. 99.

[161] Ibid halaman 100

dan selalu dianggap salah;

3. Anak mengalami konfilk dengan orang tua dalam masalah pacaran, memilih pasangan hidup, atau menentukan pilihan profesi, cita-cita dan sebagainya;
4. Anak kesal dan kecewa karena ayah ibunya kurang harmonis dan sering bertengkar.
5. Suami frustasi karena tidak mampu mengatasi masalah yang dihadapinya dengan istrinya;
6. Istri frustasi akibat konflik dengan suami tentang masalah ekonomi atau adanya wanita lain di samping suaminya.

Pihak-pihak yang menyalahgunakan narkotika ini tidak mengenal usia tertentu, bahkan di kalangan anak-anak sekolah, sehingga di usia mereka yang sangat dini sudah terkena penyalahgunaan narkotika. Kartini, Kartono menjelaskan bahwa penyebab anak sekolah menyalahgunakan narkotika adalah sebagai berikut:[162]

a. Sekolah yang kurang disiplin;
b. Sekolah yang terletak dekat tempat hiburan dan penjual narkotika atau penjual psikotropika;
c. Sekolah yang kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif;
d. Adanya murid pengguna narkotika atau psikotropika.

[162] Kartini, Kartono, *Psichology Abnormal*, Alumni, Bandung, 1972, Halaman. 124.

**2. Anggota Polri**

Pada dasarnya berbagai faktor penyebab dapat mempengaruhi seseorang individu untuk melakukan tindak pidana. Faktor-faktor itu sebagaimana telah diuraikan di atas meliputi keadaan ekonomi, pendidikan yang rendah, atau karena tidak memiliki sumber pendapatan yang tetap (mocok-mocok) atau ada pekerjaan tetap akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari, serta kombinasi dari berbagai hal di luar diri pelaku kejahatan (pengaruh lingkungan sosial).

Berkaitan dengan hal tersebut, maka naluri seseorang termasuk Anggota Polri untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan yang akibat perbuatannya diancam dengan sanksi pidana merupakan pilihan dari si pelaku kejahatan itu sendiri, seperti karena unsur keterpaksaan. [163] Artinya, perbuatan tindak pidana yang diperbuat oleh pelaku khususnya dalam kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, seperti faktor tidak memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang cukup dan lain sebagainya jadi tidak relevan, terutama apabila pelakunya adalah seorang anggota Polri yang mempunyai kepribadian kokoh dan sikap mental (moral) yang baik sehingga dapat menghindarkan penyalahgunaan narkotika yang dilarang/diancam sanksi pidana, serta sanksi Kode Etik Profesi Polri yang berlaku dalam peraturan internal Kepolisian Republik Indonesia.

Sejalan dengan faktor-faktor penyebab anggota Polri melakukan

[163] P. Soemitro, *op.cit.*, Halaman 163.

kejahatan khususnya penyalahgunaan narkotika, menurut AKBP Juliana Situmorang, SH /Bidkum Polda Sumut karena faktor usia muda, sifatnya ikut-ikutan teman dan kalau tidak ikut mencoba memakai narkotika dianggap kurang macho (kurang jantan) tetapi akhirnya ketagihan. Faktor ekonomi sebagai penyebab kecil kemungkinannya sebab Polri punya penghasilan tetap setiap bulan, kalaupun ada disebabkan ingin memperoleh uang banyak untuk memiliki barang-barang luks atau barang mahal seperti kenderaan, hp, rumah mewah dan lain-lain. Sedangkan faktor dari keluarga; *Broken Home* dan *Broken Heart* sehingga menggunakan narkotika sebagai pelarian, tidak lebih sebagai alasan pembenaran saja.

Menyatakan lebih lanjut bahwa bagi anggota Polri yang masih mungkin dibina akan diberikan sanksi administratif seperti penempatan dalam tempat khusus dan lain- lainya. Tetapi kalau anggota Polri itu sudah sering melakukan pelanggaran hukum, bahkan menjadi pengedar narkotika maka akan berikan saran dan pendapat hukum untuk diberhentikan dengan tidak hormat melalui sidang Kode Etik dan sidang Disiplin Polri.[164]

Berkaitan dengan kejahatan yang merupakan kristalisasi dari sifat seseorang yang jahat, yang bertentangan dengan ukuran norma dan atau kaedah di lingkungan mana orang atau penjahat itu berada, maka bagi seorang Anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika akan menjadi wajar diberlakukan atau diterapkan sanksi pidana

[164] AKBP Juliana Situmorang SH, Bidkum Polda Sumut, wawancara pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 di Mapolda Sumut

sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sekaligus sanksi tambahan (non-penal) sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, PP No. 2 pasal 12 ayat 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri yang melakukan tindak pidana Jo Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan :

Pasal 20

(1) Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar.

(2) Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP.

Pasal 21

(1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:

a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;

b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;

c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;

d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurangkurangnya 1 (satu) tahun;

e. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurangkurangnya 1 (satu) tahun;

f. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurangkurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau

g. PTDH sebagai anggota Polri.

(2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi.

(3) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:

a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;

b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;

c. melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;

d. melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau

KEPP;

e. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga

puluh) hari kerja secara berturut-turut;

f. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:

1. kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;
2. perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan
3. kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.

g. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat

tindak pidana yang dilakukannya;

h. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan

i. dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.

(4) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan pasal 16 peraturan ini.

Pasal 22

(1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:

a. pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan

b. pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam

pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.

(2) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana

dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kaitannya dengan faktor penyebab seorang Anggota Polri melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika baik sebagai pengguna atau pemakai, pengedar dan peracik/produsen, maka dapat dikatakan bahwa faktor dominan yang berperan adalah karena pelaku tidak mampu mengendalikan hawa nafsu atau karena ada peluang dan atau kesempatan akibat dari pengaruh kebiasaan bergaul pelaku dengan orang-orang tertentu yang sebenarnya merupakan target operasi kepolisian. Contohnya, seorang Anggota Polri yang berstatus sebagai intel atau bertugas di bagian reserse. Karena tugasnya, yang bersangkutan disadari atau tidak akan selalu berhubungan dengan orangorang atau pelaku tindak pidana, bahkan dalam kasus-kasus tertentu seperti untuk membongkar jaringan mafia perdagangan orang *(traffiking),* pembalakan hutan *(illegal loging)* atau narkotika yang melibatkan berbagai pihak dan adakalanya melibatkan kalangan elite atau pejabat tinggi, maka anggota Polri tersebut harus dapat berprilaku dan bersikap sebagaimana layaknya para pelaku tindak pidana dimaksud.

Apabila petugas atau anggota Polri yang melakukan tugas penyamaran balk sebagai intel maupun petugas reserse mempunyai sikap mental yang balk atau memiliki kepribadian yang kokoh maka yang

bersangkutan dapat menghindarkan godaan dan pengaruh ketergantungan pada jenis obat-obatan terlarang. Begitu pula halnya dalam konteks kejahatan perdagangan orang atau *traffiking* untuk tujuan eksploitasi (seks, mempekerjakan seseorang dengan cara kekerasan atau dengan cara bujuk rayu dan lain-lain), atau dalam tindak pidana pembalakan hutan *"illegal logging"* maka petugas Polri balk yang berperan sebagai intel maupun reserse harus dapat beradaptasi bahkan adakalanya mesti bermukim/berdomisili dan bergaul dengan para pelaku kejahatan di mana tempat terjadinya tindak pidana bersangkutan.

Melalui fakta tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pendapat ahli kriminologi seperti Lambroso yang menyatakan sebab seseorang menjadi penjahat karena faktor keturunan atau bawaan sejak lahir, karena kurang beres pikiran atau gila, dan karena pengaruh dari minuman alkohol/minuman keras tidak terbukti, kecuali pendapatnya yang menegaskan bahwa faktor penyebab seseorang melakukan perbuatan tindak pidana khususnya yang disengaja karena adanya dorongan hawa nafsu yang tidak terkendali serta kesempatan atau pengaruh kebiasaan.

Pendapat Seelig mengenai sebab seseorang menjadi penjahat antara lain karena faktor dari diri sendiri yang lemah jiwanya sehingga tidak dapat menahan godaan dari luar untuk melakukan perbuatan agresif dan menyimpang dari norma yang berlaku dalam pergaulan masyarakat seperti mencuri, merampok, memeras dan menipu, khususnya menyalahgunakan narkotika untuk menikmati dan membiayai kehidupan glamor atau berfoya-

foya, yang jelas-jelas terlarang sedangkan hal tersebut di luar kemampuan yang dimilikinya, sangat relevan dengan fakta atau kasus *inconcreto* yang terjadi saat ini, terutama anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Berangkat dari pandangan Van Apeldoorn mengenai kajian peristiwa pidana sisi obyektif yakni suatu tindakan berbuat atau (alai berbuat yang bertentangan dengan hukum positif, dan sisi subyektif yakni akibat perbuatan yang tidak diinginkan undang-undang serta pertanggungjawaban yang dapat dibebankan pada pelakunya sebagaimana inti ajaran *determinisme* yang mendasarkanpada kebebasan atau kemerdekaan kehendak untuk berbuat atau tidak berbuat, kecuali *indeterminisme* yang menegaskan manusia tidak bebas menentukan kehendak dari apa yang telah diperbuatnya,[165] menjadi sangat relevan dan terbukti kebenarannya.

Hal ini didasarkan pada faktual kasus penyalahgunaan narkotika oleh anggota Polri yang mendapat hukuman pidana penjara 2 (dua) tahun dan Dipecat Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari anggota Kepolisian[166] sesuai Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 Perkap.

Apabila teori ini dikaitkan dengan anggota Polri yang melakukan

[165] L.J van Apeldoorn, *Pengantar I/mu Hukum (Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht),* Cetakan Kelimabelas, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1978; Halaman.338-340: menyatakan Iebih jauh bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana muncul aliran modern yang memandang kejahatan semata-mata sebagai hasil dari kepribadian, bakat kodrat dari pelaku pidana dan pengaruh keadaan-keadaan masyarakat tempat pelaku hidup sehingga tiap-tiap orang bertanggung jawab atas perangainya sendiri atau atas kepribadiannya.

[166] FS (inisial), Mantan Anggota Polri, wawancara pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan.

tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan maka khusus pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika tipe ini Iebih merupakan korban dari sosial dan budaya yang berlaku atau tugas serta misi yang diemban. Dengan perkataan lain, dasarnya jiwa atau sifat hakiki dari penjahat tipe ini adalah balk. Perbuatannya menyimpang adalah respon ataupun pengaruh dari kondisi dan situasi disekitarnya yang tidak terelakkannya. [167]

Sehubungan dengan sebab-sebab seorang Anggota Polri melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP Edi Waluyo/Kasubid yang pernah menjabat sebagi kasubdit Propam Polda Sumut Faktor lebih dominan karena faktor ekonomi, faktor *trand* atau kecenderungan dan lain-lain. Dalam kaitannya dengan hukuman terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana narkotika menurut AKBP Edi Waluyo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tergantung dari klasifikasinya yakni sebagai pemakai, pengedar atau penjual dan seterusnya. Kecuali itu, dalam hal pertanggungjawaban pidana bagi anggota Polri yang terbukti terlibat menyalahgunakan narkotika ada perlakuan atau tindakan khusus (non-penal) seperti rehabilitasi karena oleh dokter dinyatakan jiwanya sakit/tidak sehat atau terganggu. Sedangkan bagi anggota yang memang sudah tidak dapat dibina kembali maka yang bersangkutan dikenakan

[167] MN (inisial), Anggota Polri yang sedang menjalani hukuman atau sanksi administratif ditunda kenaikan pangkat satu tahun dan dimutasi jabatan serta dipindah tugaskan dari Bag. Serse ke Bag. Denma Poldasu. Wawancara pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 di Mapolda Sumut.

hukuman sesuai dengan Kode Etik Kepolisian yaitu Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) dari anggota Kepolisian. Pelaksanaan PTDH harus dilakukan sesuai dengan keputusan ANKUM.

Sementara itu kejahatan yang merupakan fenomena dari perbuatan tercela, jahat atau buruk di mata masyarakat dapat terjadi di mana saja (tanpa ada batas ruang, waktu dan tempat), bahkan tidak mengenal dan memperdulikan siapa korban yang akan menderita dari akibat perbuatannya. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang (tak terkecuali anggota Polri) melakukan perbuatan jahat atau kejahatan, khususnya penyalahgunaan narkotika. Kecuali dari perspektif teologis terutama dikaitkan dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPRI No. 2 Pasal 14 Ayat 1 Tahun 2003 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin yang melakukan tindak pidana, Jo Perkap Polri No.PoI: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan PP No. 3 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri, seharusnya Anggota Polri yang memiliki kepribadian kokoh dan terikat Sumpah Tribrata mampu mengendalikan diri untuk menghindari perilaku jahat tersebut.

Berdasarkan pada faktual yang telah diuraikan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa faktor penyebab seorang anggota Polri menggunakan narkotika antara lain karena pengaruh Iingkungannya, cenderung terikut trend yang keliru dalam bergaul (ikut-ikutan dan ingin dianggap macho/jantan), jiwa/psikis sakit atau labil, pengaruh dalam proses tugas sebagai fungsi anggota reserse narkoba yang selalu melakukan penyamaran

sehingga tidak mampu mengendalikan hawa nafsu dan menolak godaan ingin cepat kaya. Namun begitu hampir dapat dipastikan secara umum anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan narkotika khusus pemakai adalah korban karena tuntutan dari tugas dan misi yang diembannya, kecuali yang terlibat sebagai pengedar/bandar narkotika. Namun demikian anggota polri yang melakukan suatu pelanggaran pidana maupun pelanggaran disiplin harus harus menjalani proses pemeriksaan dan penututan baik dim sidang di pengadilan negeri maupun di sidang kode etik profesi serta sidang disiplin polri dengan tujuan utuk memberikan kepastian hukum terhadap anggota polri yang melakukan suatu pelanggaran sebagaimana di uraikan di atas.

Kepolisian pada hakikatnya adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan yang bergerak dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai suatu lembaga atau institusi kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.Lembaga atau organisasi kepolisian ini mencakup personil kepolisian. Dimana dalam menjalankan tugasnya, personil kepolisian ini harus patuh terhadap norma atau kaidah yang mengatur tentang bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan sebagai seorang personil kepolisian. Setiap anggota kepolisian memiliki susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.Kepolisian Negara Republik Indonesia berada dibawah Presiden

yang dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang kepolisian juga ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia baik yang bertugas di tingkatan daerah maupun ditingkatkan pusat terdapat personil kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika tentu mencoreng citra kepolisian, pasalnya polisi yang seharusnya ikut memberantas peredaran narkoba tetapi yang terjadi justru sebaliknya ada oknum kepolisian yang menjadi musuh dalam selimut dalam upaya pemberantasan narkotika dan obat-obat terlarang.

Pada saat ini pemerintah sedang gencar memerangi penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika sudah bersifat transnasional karena dapat melintasi batasbatas negara yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih dengan jaringan manajemen yang rapi serta didukung oleh jaringan organisasi yang luas lalu masuk ke Indonesia sebagai Negara tujuan perdagangan narkotika secara illegal (point of market state) dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa hingga tingkat yang mengkhwatirkan sehingga sangat membahayakan sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, biologis, psikologis dan social.

Dampak pemakaian dan penyalahgunaan narkoba lebih menimbullkan efek buruk bagi pemakai itu sendiri maupun bagi lingkungan sekitarnya. Bagi pemakai sendiri, pemakaian dan penyalahgunaan narkoba

dapat menyebabkan keadaan seperti gangguan konsentrasi, penurunan daya ingat, penyimpangan tingkah laku dan berbagai akibat buruk lainnya.Sedangkan lingkungan sosialnya, pemakai dan penyalahgunaan narkoba berdampak pada terjadinya pertikaian antar warga, hubungan kekerabatan menjadi renggang bahkan bisa putus atau menimbulkan penyakit sosial seperti penyimpangan seks, pencurian, penodongan, dan lain sebagainya.

Tindak kejahatan narkoba saat ini tidak lagi dilakukan lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Oleh karena itu, maka pemerintah mengamanatkan pemberian wewenang untuk melakukan penegakan hukum penyalahgunaan narkoba kepada Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan No.35 Pasal 81 Undang-Undang Narkotika Nomor Tahun 2009.

Tetapi dalam kenyataannya polisi yang seharusnya menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum khususnya penegak hukum penyalahgunaan narkoba seharusnya menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab tetapi dalam kenyataannya banyak oknum-oknum polisi yang terlibat di dalam penyalahgunaan narkoba dan penegakannya tidak berjalan semestinya. Banyak indikasi yang mengarah pada anggota polisi yang menyalahgunakan narkotika, yaitu indikasi pertama bahwa anggota polisi menggunakan cara lama dalam membuktikan, apakah itu adalah sebuah narkotika dengan cara di rasa secara tidak langsung dimana hal ini dapat

membuat seorang anggota kepolisian menjadi kecanduan. Indikasi kedua adalah pergaulan anggota polisi di luar dinas berpengaruh negatif baginya sehingga dapat terjadi hal-hal yang merugikan dirinya dengan menyalahgunakan narkotika. Indikasi ketiga yaitu anggota polisi yang bergaul atau mengenal seseorang baik itu teman, sahabat atau keluarga dengan di iming-imingi sejumlah uang atau apapapun itu agar supaya membantu seseorang tersebut melancarkan aksinya, hal tersebut jelas termasuk perbuatan melanggar hukum yakni percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika diancam dengan pidana yang sama sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal di dalam Undang-Undang Narkotika. Anggota Kepolisian yang turut mem-backup aktivitas sindikat narkoba, ikut mengedarkan dan pemakai narkoba tersebut sudah melanggar kode etik profesi kepolisian.Kode etik profesi kepolisian berlaku bagi polisi dan fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesionalisme, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Negara Republlik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.[168] Anggota Polri dan Tentara Nasional Indonesia ada yang terlibat ikut terlibat sebagai pengedar dan pemakai narkotika tersebut.Padahal mereka diharapkan mampu memberikan contoh pada masyarakat untuk menjauhi narkotika, mengingat anggota Polri dan Tentara Nasional Indonesia identik dengan suatu institusi yang sangat taat

[168] PudiRahardi , "Hukum Kepolisian (Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri)",(Surabaya:Laksbang Grafika, 2014), hlm.147

dan disiplin terhadap hukum yang ada.

**2. Faktor Eksternal**

Alasan Eksternal dari Pelaku Alasan yang datang dari luar ini banyak sekali, di antaranya yang paling penting adalah berikut ini.

a. Kurangnya penghasilan sehingga mereka berusaha keluar dari himpitan ekonomi Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (Dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orangorang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orangorang berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut. Dalam hubungannya dengan narkotika, bagi orang-orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi baik dapat mempercepat memenuhi keinginan-keinginan untuk mengetahui, menikmati dan sebagainya tentang narkotika. Sedangkan bagi yang keadaan ekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut, tetapi kemungkinannya lebih kecil dari pada mereka yang ekonominya cukup.

b. Pergaulan/Lingkungan yang memberikan pengaruh negatif Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbukan

oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila di lingkungan tersebut narkotika dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana narkotika semakin besar adanya Berdasar pada hasil wawancara dengan responden yang tidak ingin disebutkan identitasnya−namun penulis menggunakan teknik anonimitas responden dalam penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan keaslian datanya−menyatakan bahwa: " Saya makai narkotika mulanya karena kenal sama orang yang jual narkotika . nah, kebetulan saya punya temen yang cari barang begituan, jadinya saya ambilin barang di temen saya yang jual tadi sekalian amabil untung harga dari situ. Sembari saya jual saya juga dikasi jatah buat sekedar memakai, jarang jarang kan bisa makai gratis. "

c. Mudahnya mendapatkan narkotika Kemudahan disini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkotika di pasar gelap maka akan semakin besarlah peluang terjadinya tindak pidana narkotika.

d. Kurangnya Pengawasan dari Aparat Penegak Hukum. Pengawasan di sini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkotika, penggunaaan, dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang di lakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi dan pemakaian narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produkso gelap, dan populasi pecandu narkotika akan semakin meningkat. Pada gilirannya, keadaan semacam itu sulit untuk

dikendalikan. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat keperbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan seperti dimaksudkan di atas, maka tindak pidana narkotika bukan merupakan perbuatan yang sulit untuk dilakukan.

e. Ketidaksenangan dengan Keadaan Sosial Bagi seseorang yang tehimpit dengan keadaan sosial maka narkotika dapat menjadi sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang, dan sebagainya, tidaka saja dapat menggunakan narkotika sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi lebih jauh dapat dijadikan alat sebagai pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Mengenai penyebab terjadinya tindak pidana oleh anggota Polri yaitu mereka rata-rata melakukan Tindak Pidana Narkotika karena 4 alasan, yaitu :

1. Alasan pribadi di dalam alasan pribadi terdapat beberapa dorongan-dorongan yang timbul di dalam dirinya antara lain:

a. Rasa ingin tahu dan ingin mencoba Dalam berbagai permasalahan manusia yang meliputi mental, fisik dan sosial yang terjadi fenomena yang saling mempengaruhi, sehingga timbul interaksi dan hubungan sebab akibat antara berbagai peristiwa yang menjadi permasalahan manusia, seperti terjadinya kejahatan, dimana ada korban dan pelaku. Salah satu hasil interaksi tersebut adalah penyalahgunaan narkotika dikalangan Kepolisian. Hal ini dapat

disebabkan oleh beberapa alasan seperti adanya rasa ingin tahu dan ingin mencobacoba untuk menggunakan narkotika. Rasa ingin tahu dan ingin mencoba-coba adalah sesuatu hal yang memang sudah menjadi sifat manusia, dan bisa dilakukan akibat dari adanya rasa penasaran dengancara meniru orang lain dengan berbuat hal yang sama yaitu dengan mencoba menggunaka narkotika. Dorongan rasa ingin tahu dan ingin mencoba-coba bagi anggota Polri yaitu dorongan tersebut berasal dari keinginan yang timbul didalam dirinya sendiri untuk mencoba barang terlarang (narkotika) tanpa memikirkan dirinya adalah seorang aparat penegak hukum (Polri) dan juga anggota Polri tersebut tidak dapat mengendalikan diri sendiri dengan kata lain tingkat emosional masih terbilang labil tidak dapat memikirkan baik atau buruknya melakukan hal tersebut.

b. Mengatasi stress merupakan suatu situasi dan kondisi emosional seseorang yang tidak stabil akibat dari banyaknya suatu permasalahan, kejenuhan dan tidak tercapai suatu keinginan/harapan. Masalah tersebut merupakan suatu hal yang biasa dan terdapat pada setiap orang namun jika tidak dapat mengendalikan emosional akan mengakibatkan timbulnya stress. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa ada banyak hal yang menyebabkan anggota polri menjadi stres, bisa karena alasan keluarga ekonomi, dan beban pekerjaan yang sangat berat karena dituntut bekerja secara profesional serta harus mempertanggungjawabkan semua tindakan yang dilakukan. Dengan banyaknya masalah tersebut, mereka mengatasi masalah stresnya dengan melakukan perbuatan menyimpang yaitu penyalahgunaan narkotika bahkan

sampai menjual atau mengedarkan narkotika di wilayah masyarakat bahkan ada beberapa anggota polri yang ikut terjerumus ke hal yang negatif.

2. Alasan lingkungan

a. Lingkungan Keluarga Alasan tersebut dapat berupa alasan psikologis, pekerjaan, organ biologis dan sosial budaya. Alasan keluarga merupakan alasan awal pembentuk kepribadian seseorang menjadi pribadi yang baik dan berkualitas. Didalam lingkungan keluarga ini dibutuhkan suatu pengawasan, keterbukaan, dan kepercayaan terhadap sesama anggota keluarga. Dimaksudkan agar didalam suatu keluarga tidak terjadi konflik maupun hal-hal yang akan membuat salah satu dari anggota keluarga tersebut melakukan suatu perbuatan negatif akibat salahnya bimbingan dan pengawasan maupun kurangnya perhatian dari keluarga. Seperti halnya dalam sebuah keluarga yang tidak mampu memberikan bimbingan dan pengawasan serta perhatian kepada sesama anggota keluarga maka segala tindakanyang dilakukan salah satu dari anggota keluarga tersebut merasa tindakan yang ia lakukan aman-aman saja dan tidak memikirkan apakah itu baik ataukah buruk kedepan baginya. Maka dari keluargalah perlu ditanamkan suatu nilai-nilai dan norma-norma sebagai bekal bagi seseorang dalam menjalani kehidupan. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa anggota Polri merupakan aparatur negara yang siap ditugaskan diseluruh wilayah negara republik Indonesia dan jauh dari keluarga yang membuat minimnya pengawasan maupun nasehat dari keluarga kepadanya sehingga segala bentuk perbuatan positif maupun negatif dapat ia lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja meskipun ia adalah seorang

anggota Polri seperti perbuatan menyalahgunakan narkotika maupun mengedarkan narkotika. Sebagian besar keluarga dari anggota Polri yang percaya bahwa suami/anak/saudaranya adalah anggota Polri yang patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, namun hal tersebut belum tentu benar karena pada saat ini anggota Polri banyak tersandung masalah hukum sebagai contoh yaitu dalam hal tindak pidana narkotika.

b. Lingkungan masyarakat sebagai kontrol sosial (social control) sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup manusia dan merupakan kaidah atau norma agar manusia dapat teratur dan saling menghormati. Seseorang melakukan suatu tindakan negatif atau kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya. Masyarakat juga sangat berperan dalam menentukan keterlibatan seorang anggota kepolisian dalam tindak pidana narkotika.

2. Alasan Mudah Didapatkan

Alasan mudah di dapatkan bagi anggota Polri dalam mendapatkan narkotika bisa di dapatkan dari pergaulan di lingkungan, karena secara tidak langsung anggota polri dalam tugasnya berhubungan langsung dengan para pengedar maupun pengguna narkotika. Melakukan penyamaran dengan tujuan memperoleh informasi tentang adanya tindak pidana narkotika, dan adanya kedekatan dengan komunitas pengguna narkotika tersebut mereka bisa dengan mudah terjerumus dan mendapatkan narkotika. Seperti diketahui bahwa Polisi sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk dapat bertindak secara profesional sesuai dengan tugas Polisi. Oleh karena itu Polisi melakukan

upaya-upaya dalam menangani Tindak Pidana narkotika oleh Anggota Polri.

1. Pre-emtif (Pembinaan) Pembinaan merupakan salah satu upaya antisipasi cegah dini yang dilakukan oleh Polri melalui kegiatan-kegiatan dengan tujuan menghilangkan alasan peluang dan pendorong Anggota Polri melakukan Tindak Pidana Narkotika. Tujuan dilaksakannya kegiatan ini untuk menghilangkan faktor peluang dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna, serta menciptakan daya tangkal dan memotivasi membangkitkan kesadaran anggota Polri agar tidak melakukan Tindak Pidana Narkotika, Contoh langkah yang di ambil ialahdengan diadakannya tes urine

a. Peranan hasil Tes Urine dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika sangat penting dalam pembuktian khususnya bagi pengguna. Seseorang yang ada pada sampel urine dinyatakan positive mengandung narkotika berarti memiliki indikasi kuat sebagai pelaku Tindak Pidana Narkotika. Karena dengan proses inilah seseorang pengguna dapat diproses karena dia telah memakai narkotika dan dapat dijadikan bukti yang kuat untuk diproses di pengadilan dan dijadikan sebagi pelaku Tindak Pidana Narkotika dengan hokum yang berlaku.Penerapan hasil tes urine dalam menentukan Tindak Pidana Narkotika telah diterapkan untuk menentukan pengguna narkotika untuk menjadikannya tersangka. Karena hasil Tes Urine tersebut memiliki kekuatan yang kuat dalam pembuktian tindak pidana narkotika sesuai yang diatur dalam undang-undang 35 Tahun 2009. Akan tetapi setiap pelaku tindak pidana narkotika yang diproses harus mempunyai bukti yang ada sebelum dilakukan tes urine dan ditetapkan sebagai tersangka. Hasil tes urine ini sangat berpengaruh pada

kekuatan pembuktian dikarenakan hasil tes urine tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu pembuktian menurut undang-undang yang telah diatur dalam menentukan bersalahnya seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika. Sasaran kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi kepada anggota Polri tentang bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari Tindak Pidana Narkotika penerapannya dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan secara aktif tentang bahaya Narkotika, sehingga dapat mengerti tentang dampak negatif dari tindak Pidana Narkotika.

b. Dalam menangani Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Polri, Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara yaitu memberikan penyuluhan agama agar setiap anggotanya memiliki iman yang kuat dan tidak melanggar norma Agama, Penyuluhan tentang Narkoba selama 2x seminggu berupa penyuluhan tentang narkotika, dan memberikan tontonan film yang berisi tentang dampak-dampak negatif dari Tindak Pidana Narkotika.. Preventif (Pencegahan) Merupakan tindakan lanjut yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Narkotika melalui pengendalian dan pengawasan terhadap tiap-tiap anggotanya.

Langkah ini bentuknya adalah:

a) Melakukan kerjasama antar sesama anggota Polri untuk mengawasi dan saling mengingatkan saat adanya kegiatan yang berhubungan langsung dengan jalur peredaran narkotika

b) Anggota-anggota Polri diterjunkan langsung ke wilayah-wilayah yang mencurigakan dijadikan tempat penampungan, penyimpanan, dan peredaran

narkotika, juga mengadakan razia untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan bahkan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika.

3. Represif (Penindakan)

Represif merupakan upaya terakhir dalam memberantas tindak pidana narkotika yaitu dengan cara melakukan penindakan terhadap orang yang diduga menggunakan, menyimpan, menjual narkotika. Langkah represif inilah yang dilakukan kepada setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika sebagai tindakan tegas dan konsisten sehingga membuat jera para pelaku tindak pidana narkotika.

Kalau kita melihat upaya pemberantasan Narkotika dan kebijakan yang dilakukan di Indonesia terutama kebijakan untuk penyalahgunaan/pecandu narkoba yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, maka bagaimana kebijakan-kebijakan negara-negara Asia sekitar kita dalam penanganan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sebagaimana kutipan sebagai berikut:

1. Negara Brunei Darussalam

Kebijakan Negara ini dalam melakukan pemberantasan Narkotika adalah sebagai berikut :

a. Hukuman mati untuk perdagangan Narkoba

b. Penyalahgunaan Narkoba merupakan pelanggaran hukum dan dilaksanakan rehabilitasi serta berada dibawah pengawasan

c. Apabila mengikuti program sampai selesai, maka kasusnya ditutup

Program rehabilitasi yang dilaksanakan adalah :

a. Rawat inap di pusat rehabilitasi pusat Al Islah dengan melakukan program detoksifikasi selama 14 hari dan perawatan selama 2 tahun.

b. Program pengawasan selama 30 Bulan

c. Apabila mengikuti program sampai selesai, maka kasusnya ditutup.

2. Negara Kamboja

Kebijakan Negara ini khususnya terhadap penyalahgunaan Narkoba sebagai berikut :

a. Penyalahguna umumnya tidak ditangkap dan dipenjara, melainkan dikirim ke pusat perawatan sementara.

b. Penyalahguna sukarela yang ingin dilakukan pengobatan tidak ditangkap.

c. Penyalahguna akan dihukum 1-6 bulan atau 6 bulan sampai 1 tahun bila kembali melanggar

Program rehabilitasi yang dilakukan terhadap tersangka yang dari hasil penyidikan hanya sebagai penyalahguna wajib direhabilitasi selama minimal 6 bulan atau maksimal 2 tahun di pusat rehabilitasi.

3. Negara Vietnam

Kebijakan Negara Vietnam terhadap Penyalahguna Narkoba:

a. Dilakukan rehabilitasi 1-2 tahun sebagai putusan Pengadilan.

b. Kebijakan hukum mendorong untuk rehabilitasi secara sukarela

Kebijakan rehabilitasi dilakukan berbasis masyarakat dengan program Detoksifikasi di masyarakat dan fasilitas rehab, terapi methadone.

4. Negara Laos

Memiliki sebelas tempat rehab dengan pusat vokasional.

Belum ada kebijakan khusus dalam penanganan penyalahgunaan narkotika yang terkait hukum kedalam lembaga rehabilitasi.

Kebijakan rehabilitasi negara ini adalah:

a. Melakukan program detoksifikasi 21-42 hari

b. rehab 3-6 bulan dengan program konseling dan vokasional.

c. Persiapan untuk selesai program antara 6-9 bulan

d. Program tindak lanjut 6-12 bulan serta cek urine setiap 15 hari.

5. Negara Malaysia

Terdapat beberapa kebijakan dari negara ini berupa :

a. Mengembangkan program rehab bagi penyalahguna Narkotika.

b. Tersangka Pecandu dilakukan tes urine dan pemeriksaan medis selama 14 hari untuk menentukan kondisi ketergantungan.

c. Memberikan rekomendasi untuk dikirim ketempat rehab dan dibawah pengawasan petugas anti narkoba di masyarakat.

Kebijakan tentang rehabilitasi dilakukan sebagai berikut :

a. Pembebasan bersyarat hanya diberikan kepada yang memiliki syarat setelah penilaian yang komprehensif

b. Departemen penjara akan melaporkan mengenai kegiatan rehabilitasi terhadap penyalahguna.

c. berkoordinasi dengan Badan Anti Narkotioka Nasional untuk menyediakan latihan kerja.

d. Melaksanakan urine tes selama dua tahun

e. Therapi subsitusi Methadon di Penjara.

6. Negara Myanmar

Kebijakan Negara Myanmar adalah sebagai berikut :

a. Terhadap pengguna Narkoba yang tidak mendaftar ditempat yang ditentukan oleh Departemen Kesehatan atau pusat medis yang diakui oleh Pemerintah atau yang tidak mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan untuk melaksanakan perawatan medis dipidana dengan pidana penjara dan dapat diperpanjang minimal 3 tahun dengan maksimal 5 tahun.

b. Siapapun yang bersalah dalam pengembangan, kepemilikan, transportasi dan pengedaran narkotika dihukum penjara untuk jangka waktu minimal 5 tahun sampai maksimal 10 tahun.

Kebijakan program rehabilitasi :

a. Penyalahguna narkotika direhabilitasi di klinik metadon dan pusat rehabilitasi lainnya.

b. Program rehabilitasinya meliputi kegiatan vokasional, seminar dan kegiatan keagamaan.

Dari data tersebut diatas, kita dapat melihat dan membandingkan bahwa negara-negara di Asia juga sudah membedakan hukuman terhadap pelaku kejahatan narkotika antara pemakai atau pecandu, pengedar maupun bandar.

Oleh karena itu pantaslah Undang-Undang No.35 tahun 2009 juga telah membedakan hukuman terhadap para pelaku kejahatan Narkotika sesuai dengan perannya masing-masing, dimana apabila diperhatikan tujuan dari Undang-Undang

Narkotika saat ini memiliki sisi humanis yang memperhatikan kemanfaatan hukum yaitu tindakan Depenalisasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan sisi kerasnya dengan adanya ancaman hukuman mati terhadap mereka sebagai pengedar atau Bandar Narkotika.

Namun setelah diperhatikan lebih jauh tentang bunyi Pasal 127 dari Undang-Undang Narkotika tersebut, mengakibatkan terjadinya beberapa hal yang menghambat pelaksanaan upaya rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan itu sendiri.

Dalam pasal ini Penyalahguna masih dihukum berdasarkan golongan dari jenis Narkotika yang dikonsumsi, padahal semua jenis Narkoba dinyatakan berbahaya jika dikonsumsi, kemudian pada ayat selanjutnya menyatakan agar dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan mereka para pecandu untuk menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial yang mengartikan bahwa seorang pecandu boleh saja dihukum atau bisa juga direhabilitasi. Akibatnya akan sangat mungkin terjadi permainan kasus terhadap mereka (para tersangka) yang positif pecandu narkotika oleh para penyidik, Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim dengan opsi pilihan dihukum atau direhabilitasi.

Kata Narkotika di Indonesia sesungguhnya sudah akrab ditelinga kita sejak lama, terutama telinga kita menjadi semakin akrab serta membuat masyarakat tercengang setelah pada tanggal 7 Februari 2018 lalu, TNI AL menggagalkan penyelundupan sabu-sabu seberat 1 ton yang diangkut kapal ikan berbendera Singapura, MV Sunrise Glory. Penangkapan ini semakin menegaskan bahwa Indonesia merupakan pasar empuk bagi sindikat narkotika internasional.

Informasi dari Dinas Penerangan TNI AL (Dispenal) menyebutkan, penangkapan ini dilakukan KRI Sigurot-864 saat melaksanakan Operasi Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI – Singapura 2018 pada Rabu malam, 7 Februari 2018. ”Dalam pemeriksaan ternyata diketahui bahwa kapal dengan 4 ABK asal Taiwan itu tidak hanya melakukan pelanggaran dokumen, tetapi ditemukan membawa 41 karung berisi narkoba,”kata Kadispenal Laksamana Pertama TNI Gig Jonias Mozes Sipasulta. [169].

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebelumnya menyatakan bahwa Indonesia pasar narkoba terbesar di Asia. Berbagai jenis narkoba yang dipasarkan di sini terserap pasar. Ini berbeda dengan negara-negara lain yang hanya sekitar 5 sampai 6 jenis narkoba saja beredar di wilayahnya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menegaskan bahwa "narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghiiangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Dari berbagai sumber literatur, diketahui bahwa narkotika berasal dari kata *"narke"* atau *"narcissus",* dalam bahasa Yunani berarti sejenis bunga yang dapat membuat orang terbius atau menjadi tidak sadar. Pada dasarnya penggunaan narkotika atau obat bius yang dibutuhkan dalam dunia medis dan atau kedokteran serta untuk kepentingan penelitian ilmu

[169] iNews.id, Sabtu (10/2/2018)

pengetahuan tidak dilarang, sampai dengan ada kecenderungan pada dekade 1960-an dipakai atau dipergunakan untuk hal-hal di luar kepentingan medis.[170]

Menurut pemerhati Gerakan Anti Narkotika Heriadi Willy, tidak ada pembedaan secara jelas antara narkotika dan psikotropika kedua jenis obat-obatan tersebut dikelompokkan menjadi satu masalah berbahaya yang harus diawasi penggunaannya. Di Inggris dan Amerika Serikat, kedua jenis obat tersebut dikenal dengan istilah *narcotic and dangerous drug* (narkotika dan obat berbahaya).

Pada hakekatnya, narkotika dan psikotropika sering digunakan oleh dokter untuk kepentingan pengobatan (medis), antara lain mengobati dan sebagai bahan pembius atau penghilang rasa sakit bagi seorang pasien yang akan menjalani operasi, dan lain sebagainya. Dalam dunia medis, narkotika dikenal dengan nama NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya).

Sedangkan pengertian psikotropika tidak ditemukan dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun psikotropika termasuk golongan I di dalam kelompok narkotika.

Pengertian psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan berlakunya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut; "psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik

[170] FM. Marwan & Jimmy P., op.cit., Halaman 447.

alamiah maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan prilaku.

# BAB - V

# REKONSTRUKSI KEBIJAKAN KRIMINAL BAGI PERSONIL POLRI YANG MENGGUNAKAN NARKOBA BERBASIS NILAI KEADILAN

## A. REKONSTRUKSI NILAI - NILAI PEMIDANAAN BAGI ANGGOTA POLRI PENGGUNA NARKOTIKA

Berdasarkan kasus yang telah dijelaskan sebelumnya aparat polisi yang terseret kasus tindak pidana narkotika sudah dijelaskan dalam Pasal 29 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam hal ini, diatur pelaksanaanya pada Peraturan Pemeritah Repuklik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Intitusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada peradilan umum, maka terhadap anggota polisi yang melakukan atau terjerat dalam tindak pidana wajib menjalankan proses hukum sesuai dengan acara yang telah ada pengaturannya dalam peradilan umum. Pemberian sanksi untuk para aparat kepolisian yang telah terbukti berbuat tindak pidana khususnya tindak pidana narkotika maka penyelesain perkaranya sama dengan masyarakat pada umumnya

yaitu melalui peradilan umum. Dalam kasus polisi yang melakukan perbuatan tindak pidana dengan mengonsumsi narkotika dan dijelaskan dalam kasus yang ditemukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur berupa 2 putusan pengadilan yaitu "Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim" dimana Manat Silaban (terdakwa) selaku anggota polisi dan "Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim." dimana Jepri Maha putra (terdakwa) selaku anggota polisi telah terbukti bersalah melakukan suatu perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang secara khusus yaitu dalam Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 11 Narkotika yang didalamnya terdapat ancaman atau sanksi bagi pelanggar. Keduanya terbukti melakukan suatu perbuatan pidana yaitu sebagaimana yang telah diatur dalam "Pasal 127 ayat 1 huruf a yang menyatakan bahwa setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dan dalam pasal tersebut juga terdapat ancaman pidana penjaranya paling lama 4 (empat) tahun."

Sebelumnya telah dijelaskan pula bahwa tindak pidana atau yang disebut perbuatan pidana oleh Moeljatno yaitu segala perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. Perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa Manat Silaban dan Jepri Maha Putra yang merupakan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sudah jelas dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan, selain itu juga mengandung unsur melawan hukum. Dengan begitu perbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai tindak pidana atau perbuatan pidana. Pengaturan hukum pidana di Indonesia mengenal hukum pidana umum yaitu

peraturan yang ada dalam KUHP dan hukum pidana khusus yang pengaturannya terdapat diluar KUHP atau terdapat pengaturannya dalam undang-undang khusus.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh kedua anggota polisi dalam kasus yang telah dijelaskan diatas tentunya melanggar UU Narkotika, karena adanya salah satu kejahatan menyangkut penyalahgunaan narkotika yang berdampak buruk dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat, bangsa, manusia, dan negara serta ketahanan nasional sebagaimana yang telah disebutkan dalam pertimbangan dikeluarkannya "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika."

Dengan adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh kedua anggota polisi tersebut, maka hukum harus ditegakan sebagaimana mestinya. "Menurut Syafruddin Ainor Rapier selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, terkait aparat penegak hukum yang menyalahgunakan narkoba tetap diberlakukan atau diproses sama dengan masyarakat biasa dan tidak ada pembeda dalam pelaksanaan proses peradilan di peradilan umum. Anggota polisi yang terjerat dalam tindak pidana selain diproses melalui peradilan umum, anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga akan ada tambahan lain yaitu dari internal kepolisian sendiri yang berupa penegakan hukum melalui sidang kode etik yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengenai proses hukum yang dilalui oleh anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dapat diuraikan dalam beberapa proses yaitu di internal

kepolisian dan di peradilan umum yang diantaranya sebagai berikut:

1. Internal Kepolisian Mengenai hal-hal yang terkait terhadap aparat polisi yang terseret tindak pidana dilakukan proses penegakan Kode Etikdi Kepolisian yang terdapat pengaturannya dalam "Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (PERKAP KEPP)." Dalam "Pasal 17 ayat 1 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berhak melakukan penegakan kode etik adalah:

a. Propam Polri;

b. Komisi Kode Etik Profesi (KKEP);

c. Komisi Banding;

d. Pengembangan fungsi hukum Polri;

e. SDM Polri;

f. Propam Polri dibidang Rehabilitasi;

Terkait dengan anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkotika, orang tersebut juga melanggar Kode Etik Profesi Polisi (KEPP), ketika polisi melakukan tindak pidana narkotika yang diutamakan proses peradilan umum.

Sementara itu Polisi yang melakukan tindak pidana narkotika itu diproses hingga ada putusan pengadilan yang tetap. Berdasarkan "Pasal 17 ayat 2 penegakan KEPP dilaksanakan melalui:

a. Pemeriksaan pendahuluan

yaitu dalam PERKAP KEPP Pasal 17 ayat 3 menyatakan bahwa, pemeriksaan yang dilakukan dengan cara audit pemeriksaan,

investigasi, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi.

b. Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP)

yaitu dalam PERKAP KEPP Pasal 17 ayat 4 menyatakan bahwa, Sidang KKEP dijalankan oleh KKEP guna memeriksa dan memutus perkara pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar.

c. Sidang komisi banding

yaitu dalam PERKAP KEPP Pasal 17 ayat 5, dilakukan oleh Komisi Banding guna memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh pelanggar.

d. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman dilakukan oleh fungsi Sumber Daya Manusia Polri setelah didapatkan putusan dari atasan Ankum sebagaimana disebutkan dalam PERKAP KEPP Pasal 17 ayat 6.

e. Pengawasan pelaksanaan putusan dilakukan oleh fungsi Propam Polri yang menangani bidang rehabilitasi untuk para personel sebagaimana disebut dalam PERKAP KEPP Pasal 17 ayat 7.

f. Rehabilitasi personel." didalamnya "terkandung sistematik berasal bagian-bagian penyokongnya yakni Kejaksaan, Pengadilan, Kepolisian, dan Lembaga Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan ialah satu bagian yang berupaya mewujudkan masukan menjadi luaran yang merupakan visi misi dari sistematik peradilan pidana dalam proses

pemidanaan yaitu menangani kejahatan atau mengkontrol segala tindak pidana yang masih berada dalam titik toleransi masyarakat."

Berdasarkan teori pemidanaan juga menyatakan bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir untuk membuat para warga melaksanakan tindakan tertentu seperti yang diinginkan. Menurut Adam Chazawi dalam bukunya, negara melalui alatalatnya diberikan kewenangan dan hak untuk menjalankan maupun manjatuhkan pidana.

Sebagaimana telah dijelaksan dalam teori pemidanaan, pemidanaan merupakan salah satu pembalasan bagi seseorang dalam melakukan tindak pidana dan juga pemidanaan sebagai tujuan agar seseorang tidak melakukan suatu tindak pidana, maka dari itu pemidanaan dapat dijalankan agar seseorang merasa jera dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Berikut diuraikan pula proses peradilan umum yaitu:

a. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Dari sederetan tugas kepolisian, salah satu tugas yang mencuri banyak perhatian adalah tugas untuk menegakkan hukum. Sebagai pemegang kewenang untuk penegakan hukum, tugas kepolisian telah dicantumkan dalam KUHAP. Penyelidikan sendiri telah terdapat penjelasannya dalam "Pasal 1 angka 5 KUHAP", sedangkan penyidikan telah dijelaskan dalam "Pasal 1 angka 2 KUHAP." Dalam rangka menjalankan pekerjaannya kepolisian mempunyai fungsi yang berdasarkan "Pasal 2 UU Kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; penegakan dan perlindungan hukum; pengayoman dan

pelayanan masyarakat." Penyelidikan dilakukan apabila ada indikasi polisi telah melakukan tindak pidana narkotika, biasanya diketahui saat tes urine secara berkala yang dilakukan kepolisian apabila hasilnya positif, dilakukan pengecekkan ulang dan apabila hasilnya positif lagi, maka dilaksanakan pengembangan kasus agar dapat ditentukan apakah ia patut diduga menyalahgunakan narkotika atau tidak, apabila benar maka kemudian dilakukan penyidikan.

1) Penindakan

a) Penangkapan dan Penggeledahan Berdasarkan "Pasal 1 angka 20 KUHAP" telah dijelaskan mengenai penangkapan. Dalam hal telah dilakukan penyelidikan oleh penyidik dan telah ditemukan "bukti permulaan yang cukup" maka penyelidik yang akan melakukan pemanggilan terhadap tersangka pelaku tindak pidana narkotika sebanyak 2 (dua) kali secara sah berturutturut. Apabila tidak memenuhi panggilan tanpa alasan maka dilakukan penangkapan disertai dengan surat penangkapan, biasanya penangkapan ini dibarengi dengan penggeledahan dan dalam penggeledahan ini sering ditemukan alat buktinya yang disini biasanya adalah narkotika. Hasil dari penggeledahan tersebut dan penemuan tersangka yang kemudian dibawa ke Polres Jakarta Timur untuk dilakukan serangkaian tindakan lain.

b) Pemanggilan dan Penahanan "Berdasarkan Pasal 1 angka 21 KUHAP" telah dijelaskan mengenai penahanan. Penahanan dapat membantu penyidikan oleh penyidik dalam memeriksa tersangka atau terdakwa. Penahanan terhadap

polisi yang melakukan tindak pidana narkotika sama halnya dengan masyarakat pada umumnya, penahanan untuk memperoleh keterangan mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukannya.

c) Penyitaan Penyitaan dijelaskan dalam "Pasal 1 angka 16 KUHAP"[171]. Penyitaan ini dilakukan oleh penyidik dengan surat izin pengadilan negeri setempat atau apabila dalam keadaan yang mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan terlebih dahulu hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

d) Pemeriksaan

(1) Pemeriksaan Saksi-Saksi Dalam "Pasal 1 angka 26 KUHAP telah dijelaskan mengenai pengertian saksi. Pemeriksaan saksi-saksi mempermudah proses penyidikan yaitu berupa keterangan saksi untuk menemukan bukti." Saksi tindak pidana narkotika berdasarkan putusan yang ditemukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dari lingkungan tersangka yaitu lingkungan teman sekantor yang menggunakan narkotika atau lingkungan di sekitar tempat tinggal. Jadi saksi-saksi ini bisa berasal dari internal ataupun dari luar instansi kepolisian.

(2) Pemeriksaan Ahli

"Pemeriksaan ahli dilaksanakan dengan mendengarkan keterangan ahli sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai keterangan ahli dalam Pasal 1 angka

[171] Sinta Ayu Lestari & Hery Firmansyah Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak PIdana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

29 KUHAP.” Guna keterangan ahli dalam pemeriksaan tersangka atau terdakwa ini yaitu untuk mengetahui tentang barang sitaan atau barang bukti yang telah diperoleh masuk kedalam golongan narkotika jenis apa. Mekanisme ini polres Jakarta Timur mengirimkan barang bukti ke BARESKRIM Polri, barang bukti dicek dengan menjelaskan berat, jenis barang, narkotika masuk golongan apa, urine positif atau negatif.

(3) Pemeriksaan Tersangka

Pasal 1 angka 14 KUHAP telah dijelaskan mengenai tersangka”.Keterangan tersangka merupakan terpenting karena dia yang melakukan tindak pidana narkotika. Dalam hal pelakunya seorang anggota kepolisian selalu mengakui perbuatannya.

a) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara Menurut Didit Koko Prastowo selaku jaksa yang menuntut dalam kasus penyalahgunaan narkotika oleh kepolisian, pelimpahan tersangka ke JPU pada saat proses penyidikan telah dianggap apabila penuntut umum menyatakan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap atau P21.

b. Tahap Penuntutan Dalam “Pasal 1 angka 7 KUHAP telah disebutkan mengenai penuntutan.” Penuntut umum melakukan penuntutan didahului dengan prapenuntutan yang tujuannya adalah mengetahui Berita Acara Perkara (BAP) sudah lengkap atau belum. “Apabila sudah terkumpul maka dilaksanakannya penuntutan, secepatnya harus langsung diserahkan kepada PN, dengan permintaan untuk cepat diadili

perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam memberikan tuntutan kepada anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkotika lebih berat karena dia seorang penegak hukum."

c. Pemeriksaan Persidangan Proses pemeriksaan sidang di pengadilan dimulai dengan penetapan majelis hakim yang dilanjutkan dengan penetapan kapan hari sidang." "Pertimbangan hakim untuk memutus polisi yang melakukan tindak pidana narkotika yang seharusnya adalah memberatkan karena polisi menjadi penegak hukum yang mengayomi malah polisi yang melakukan tindak pidana narkotika."

d. Putusan Pengadilan Putusan pengadilan terhadap aparat hukum yaitu kepolisian yang dalam hal ini telah melakukan tindak pidana narkotika, keduanya menghasilkan putusa pemiidanaan yang merupakan isi putusan hakom yang menyimpulkan suatu perinta kepada terdakwa agar menjalani hukuman atas perbuatan yang sudah dilakukan berdasarkan amar putusan.

Berdasarkan kasus dalam putusan pertama yaitu "Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim" hakim memutus 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara dan putusan kedua dengan "Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim" yang diputus 10 (sepuluh) bulan penjara dan rehabilitasi. "Menurut Syafruddin Ainor Rapier selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ia beranggapan bahwa hakim terkait kasus aparat penegak hukum

yang melakukan penyalahgunaan narkotika harus mempertimbangkan profesinya sebagai aparat penegak hukum namun ia malah melanggar hukum untuk dijadikan sebagai hal-hal yang memberatkan." Namun sangat disayangkan dalam "Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim" tidak dinyatakan bahwa profesinya sebagai anggota kepolisian selaku aparat penegak hukum tidak dijadikan pertimbangan sebagai salah satu hal-hal yang memberatkan dalam putusannya.

Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika pada "UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" lebih berat dari Undang-Undang terdahulunya yaitu "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika." Perubahan tersebut terlihat dalam pengaturan tanaman yaitu 1kg atau 5 batang dan bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gr. Serta juga pengaturan pidanaa mati terhadap yang memproduksi, mengekspor dan impor, mengedarkan dan menggunakan narkotika pada orang lain. Pidana mati selain diterapkan pada Narkotika Golongan I juga diterapkan dalam Narkotika Golongan II. Ketentuan tersebut diharapkan dapat membuat efek yang sangat jera bagi para pelaku tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Undang-Undang ini sudah memiliki daya tarik dan daya pengikat dalam hal untuk menegakan hukom terhadap pelaku pidana narkotika. Dalam hal penerimaan sanksi pidana oleh oknum Polri yang mlakukan tindak pidana narkotika telah tepat dan dapat dikatakan bahwa aparat polisi yang telah menyalahgunakan penggunaan narkotika dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan UU Narkotika. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam bukunya, Moeljatno menyatakan bahwa seseorang telah

dapat dipertanggungjawabkan apabila terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan yang dilakukannya.

Kesalahan sendiri, terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu adanya kesengajaan dan adanya kelalaian. Dalam kasus anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkotika diatas, terdapat unsur kesalahan yang dilakukan oleh kedua terdakwa yaitu Manat Silaban dan Jepri Maha Putra yakni ia telah mengonsumsi barang haram itu untuk dirinya sendiri tanpa ada persetujuan medis (dokter) atau termasuk dalam klasifikasi penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dengan begitu keduanya dijerat dengan UU Narkotika.

Selain terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan yang dilakukannya, seseorang bisa dinyatakan dapat bertanggungjawab jika terdapat unsur-unsur Pasal 44 KUHP. Dimana kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwanya dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikirnya. Dengan begitu dalam kedua kasus diatas terhadap Manat Silaban (terdakwa) dan Jepri Maha Putra (terdakwa) telah tepat untuk diproses secara hukum pidana, karena keduanya tidak dalam keadaan jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. “Terhadap anggota kepolisian yang terjerat tindak pidana narkotika tetap diberlakukan UU Narkotika, tidak ada perbedaan dalam proses peradilannya dan diperlakukan sama seperti masyarakat biasa.

Anggota kepolisian yang terlibat tindak pidana dan sedang diproses di dalam pengadilan biasanya statusnya diberhentikan sementara dalam

pekerjaannya dan bisa juga sampai dilakukan pemecatan apabila memang tidak dapat dipertahankan lagi dalam pekerjaannya.

Oknum Polri yang menyalahgunakan obat-obatan terlarang selain dijatuhkan sanksi pidana yang terdapat dalam UU Narkotika, ikut turut dijatuhkan sanksi oleh instansi yang bersangkutan yang dinamakan sanksi admistratif. Sesuai pasal 13 huruf b yang menjelaskan tentang tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu menegakan hukum, seluruh aparat kepolisian diharuskan untuk menjalankan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua bentuk tindak pidana. Apabila aparat kepolisan sendiri yang melanggar suatu ketentuan yang termasuk dalam tindak pidana maka hal tersebut tidak sesuai dengan tugas pokok dari polri, sebab polrilah yang seharusnya menjadi contoh warga negara Indonesia dalam menegakan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Hukum berlaku untuk siapapun yang melanggarnya tanpa terkecuali untuk aparat kepolisian sehingga selain dijatuhkan sanksi yang tterdapat didalam UU Narkotika juga dijatuhkan sanksi administratif bagi aparat yang melanggar dari instansinya masing-masing.” Jika aparat kepolisian terbukti melakukan tindak pidana narkotika, menurut Jaksa Didit Koko Prastowo, oknum tersebut harus tetap dihukum. Penerapan hukum selain UU Narkotika, proses dalam mengadilinya mengacu kepada KUHAP yang bisa telaah dalam ketentuan Undang- Undang Kepolisian. Terdapat beberapa sanski yang bisa dijatuhkan kepada aparat kepolisian yaitu:

1. Dikenakan sesuai Peraturan Kepolisian;

2. Dibawa ke sidang profesi atau sidang disiplin yang selanjutnya ancaman hukuman dijatuhakn sesuai dengan putusan dari sidang itu sendiri;

3. Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH);

4.Penurunan pangkat;" Kesempatan aparat kepolisian dalam penyalahgunakan narkoba sangat besar, karena aparat kepolisian juga belum tentu memiliki iman yang kuat serta mempunyai tugas yang selalu terlibat dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Sanksi atau hukuman yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada aparat kepolisian yang tebukti menyalahgunakan narkotika harus tegas. Dengan demikian, diharapkan dapat menimbulkan rasa jera bagi mereka untuk melakukan kejahatan narkotika. Harus ada kebijakan khusus dalam menangani hal ini, tidak hanya sanksi berupa pemecatan tetapi juga dikenakan dengan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Kepada para tersangka penyalagunaan narkotika terdapat beberapa alasam tertentu untuk menambah masa hukumannya, dikarenakan perbuatannya dilakukan tergolong sangat membahayakan kepentingan masyarakat."

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan umum sesuai dengan "Pasal 29 UU Kepolisian",. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa anggota Polri termasuk warga sipil dan tidak merupakan subjek dari hukum militer.

Akan tetapi terhadap anggota polri diberlakukan Kode Etik Profesi serta Peraturan Disiplin walaupun mereka termasuk warga sipil sebagaimana terdapat

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia" dan pengaturan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian terdapat di "PERKAP Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi seperti penyalahgunaan narkotika dijatuhkan sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Terbukti bersalahnya ataupun tidaknya, oknum polisi tetap harus menjalankan persidangan dalam hal kode etik yang diatur didalam PERKAP Nomor 14 Tahun 2011. "aparat kepolisian yang menyalahgunakan obat-obatan terlarang sudah melenceng dari peraturan mengenai kedisiplinan dan kode etik sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Jo. Pasal 6 dan Pasal 7 PERKAP Nomor 14 Tahun 2011, seluruh aparat kepolisian diharuskan untuk menjaaga tegakanya hukum dan juga melindungan kehormatan, reputasii serta martabat Polri" Etika profesi kepolisian adalah kristalisasi nilai-nilai Tribata yang didasari dan dimaknai oleh Paancasila yang mengambarkan sikap seluruh aparat kepolisian yang mencangkup etika kenegaraan, etika kelembagaan etika kemayarakatan serta etika kepribaian, yang setelah itu dimasukan kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indoensia.

Dibutuhkan ketelitian dalam penyusunan etika kepolisia karena itu merupakan landasan etika kepolisian. Sebelumnya Tribata memberikan identitas kepada Polri, mengenai penyusnan undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lalu berubah menjadi kode etik. Perbuatan melanggar aturan

kode etik dan kedisiplinan akan dperiksa dan apabila memang bersalah maka dapat dijatuhkan hukuman.

Penjatuhan sanski disiplin dan juga sanksi pelanggaran kode etik tidak memberikan pengaruh pada tuntutan pidana untuk aparat kepolisian yang terbuti melanggar tindak pidana narkotika dijelaskan didalam Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Jo. Pasal 28 ayat 2 PERKAP Nomor 14 Tahun 2011. Sehingga, aparat kepolisian yang menyalahgunakan obat-obatan terlarang akan menjalani proses hukum acara pidana meskipun sudah dijatuhkan sanksi pelanggaran kode etik serta sanksi disiplin.

Selain itu, aparat kepolisian yang diperkirakan menyalahgunakan obat-obatan terlarang sedang berjalan proses penyidikannya dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan yang inkrah atau yang sedebut dengan asas praduga tak bersalah seperti yang sudah diatur didalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selanjutnya, ia akan diancam dengan pemberhentian secara tidak hormat sesuai Pasal 12 ayat 1 hurf a PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia jika putusan pidana telah inkrah." Anggota Polri akan diberhentikan dengan tidak terhormat dari dinas kepolisian apabila memang dibuktikan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan pertimbangan dari pejabat-pejabat berwenang tidak bisa diberikan keringanan agar tetap bisa berada didalam dinas Polri.

Pemberhentian tersebut dilaksanakan setelah melewati masa persidangan di Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijelaskan didalam Pasal 12 ayat 2 PP Nomor 1 Tahun 2003. Jadi walaupun aparat kepolisian merupakan warga sipil, akan tetapi terlihat dari perbedaan proses penyidikan perkara oleh warga negara lain karena anggota Polri juga terikat pada aturan disiplin dan kode etik yang juga harus dipatuhi, serta juga selain tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pemberantasan sesuai dengan hukum yang berlaku penyidik di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara telah melakukan upaya dari mulai kegiatan penyelidikan yang diawali dengan adanya Laporan Polisi dari masyarakat, adapun rangkaian kegiatan penyelidikan sesuai dengan keterangan Unit di Sub Direktorat Reserse Narkoba adalah sebagai berikut :

1. Pengolahan TKP;
    a) mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan Saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;
    b) mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti; dan
    c) memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi;
2. Pengamatan (observasi);
    a) melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan;

dan

b) mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya;

3. wawancara (interview);

a) mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan

b) mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana;

4. Pembuntutan (surveillance);

a) mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana;

b) mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana; dan

c) mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan;

5. Penyamaran (under cover);

a) menyusup ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi;

b) menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana;

c) khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (*undercover buy*), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu (*controlled delivery*), penyamaran disertai penindakan/pemberantasan (*raid planning execution*);

6. Pelacakan (*tracking*);

a) mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi;

b) melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol, kementerian/ lembaga/badan/komisi/instansi terkait; dan

c) melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan;

7. Penelitian dan Analisis Dokumen.

Penelitian dan analisis dokumen, yang dilakukan terhadap kasus-kasus tertentu dengan cara:

a) mengkompulir dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika seperti transaksi keuangan melalui perbankan dan data komunikasi melalui telepon seluler.

b) meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya.

Kegiatan penyelidikan merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:

1. menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau

bukan;

2. membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan

3. dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa

Untuk selanjutnya apabila dalam kegiatan penyelidikan didapatkan bukti dan tersangka penyalahgunaan narkotika dan psykotropika penyidik akan melakukan kegiatan penyidikan.

Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

1. penyelidikan;

2. pengiriman SPDP;

3. upaya paksa meliputi:

a) pemanggilan;

b) penangkapan;

c) penahanan;

d) penggeledahan;

e) Penyadapan

f) Penyitaan

4. gelar perkara;

Penyidik dalam menentukan tersangka harus melalui kegiatan gelar perkara yang diikuti oleh unsure internal yaitu pengawas penyidik, anggota penyidik dan penyidik pembantu serta unsur eksternal yang terdiri dari personel Profesi dan Pengamanan, Inspektorat dan Bidang Hukum

Polda Sumatera Utara. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan opini yang obyektif dari berbagai pihak dan sebagai upaya transparansi penyidik dalam penanganan perkara pidana termasuk perkara penyalahgunaan narkotika.

5. penyelesaian berkas perkara;
6. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
7. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
8. penghentian Penyidikan.

menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanyadugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan Sumatera Utara yakni:

1. Penyalahgunaan narkoba dari tahun ketahun semakin meningkat tajam di Indonesia khususnya di Sumatea Utara, hal ini dapat dilihat dari konfrensi pers yang dilakukan oleh Kapolda Sumut tentang beberapa penangkapan yang dilakukan diantaranya yang terjadi pada 11 Januari 2021, 3 oknum polisi diciduk warga karena menggunakan narkoba dan diserahkan kePolres Labuhan Batu.

2. Menurut Bapak, apa yang melatarbelakangi oknum polri yang terlibat dalam penggunaan narkoba akhir akhir ini ?

   Jawab :

   a. Karena ingin merasakan narkoba dengan kesenangan sesaat
   b. Ingin mendapat narkoba dan menggunakannya tanpa ada biaya dengan imbalan sebagai becking atau pemberi informasi kepada

bandar/pengedar.

c. Mungkin berat dan banyaknya beban kinerja setelah pandemi covid-19 yg mengharuskan oknum Polri harus ekstra mengeluarkan tenaga dan pikiran dalam bekerja ditambah masalah keluarga dan Mudahnya mendapat pasokan narkoba dari bandar.

3. Sepertinya ada beberapa factor yang diduga menjadi penyebab anggota polri menyalahgunakan narkoba, kira kira apa saja factor tersebut

   Jawab :

   1. Fakto pekerjaan yg dimasa pandemi ini semakin berat
   2. Faktor keluarga
   3. Faktor lingkungan
   4. Faktor Ekonomi

4. Semisal sedang melaksanakan tugas yakni menjadi undercover atau penyamaran untuk mengungkap kasus narkoba yang marak saat ini, tidak jarang anggota Polri tersebut ikut terjerumus sebagai pemakai narkoba, dalam hal ini bagaimana seharusnya langkah Polri menghadapi anggota yang terlibat dalam pemakaian narkoba?

   Jawab :

   Dilaksanakan Sosialisasi dengan materi :

   a. Menyalahgunakan narkoba itu adalah melanggar hukum sedangkan Polri adalah penegak hukum.
   b. Merusak fisik dan psikis kepada anggota sehingga merusak pelaksanaan tugas.

5. Biasanya langkah tegas yang diambil oleh pihak kepolisian adalah melakukan pemecatan, apakah hal ini bukan malah menambah preseden buruk terhadap oknum yang memakai narkoba tersebut ?

   Jawab :

Tidak menjadi preseden apabila sesuai dengan aturan perundan-undangan yang berlaku yang baik yang ada dalam kode etik maupun Undang-Undang.

Bagi pengguna atau korban masih bagus dilakukan pembinaan agar dapat Pulih dan berubah, bagi yang terlibat jaringan bandar maupun pengedar langsung diterapkan sesuai Undang-Undang yang ada

6. Salah satu contoh, oknum tersebut bisa saja stress karena telah dipecat dari kesatuannya, hingga akhirnya menjadi pengeder narkoba, bukankah hal ini malah memperburuk keadaan, bagaimana langkah yang harus diambil ?

   Jawab :

   Langkah yang diambil yaitu sejak anggota Polri ditanamkan dalam diri personil tersebut bahwa narkoba adalah musuh, sehingga dalam setiap diri Personil Polri sudah menjadi komitmen tidak menyalahgunakan narkoba. Hal tersebut tidak akan memperburuk keadaan apabila personil Polri tersebut komit sebagai penegak hukum.

7. Menurut hemat saya, apakah pantas bila anggota polri yang terlibat dalam penggunaan narkoba untuk di rehabilitasi?

   Jawab :

   Sangat pantas dilakukan Rehabilitasi terhadap anggota Polri, karena bagi pengguna atau pecandu harus dihilangkan racun-racun dalam syaraf.

8. Apakah oknum angota polri yang saat ini sebagai pecandu narkoba dapat melakukan permohonan kepada BNN untuk di rehabilitasi ?

   Jawab :

   Dapat, sesuai Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 setiap pengguna atau pecandu wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

9. Bila terhadap oknum Polri yang terlibat penggunaan narkoba di rehabilitasi ditempat terkhusus bagi oknum anggota polri yang terlibat penggunaan narkoba dilaksanakan pada tempat yang berbeda dengan umum untuk menghindari "kerajaan-kerajaan kecil" bagi oknum yang terlibat penggunaan narkoba, apakah hal ini dapat di wujudkan?

   Jawab :

   Tidak perlu secara khusus karena pelaksanaan rehabilitasi terhadap pengguna atau korban sudah ada komit untuk pulih sehingga tidak akan ada yang mengarah pada kerajaan-kerajaan kecil.

10. Apa saja tahapan rehabilitasi pada pengguna narkoba di BNN?

    Jawab :

    Tahapannya adalah :

    a. Pecandu/pengguna datang untuk dilakukan scrining yg meliputi assesment riwayat penggunaan narkoba, dari hasil asesment didapat rencana terapi yang akan dilaksanakan yaitu :
       1. Intervensi singkat
       2. Rehabilitasi rawat jalan
       3. Rehabilitasi rawat inap
    b. Dalam pelaksaan rehabilitasi rawat inap ada yang cepat (3 Bulan ) ada yg 6 Bulan dan ada yang 1 tahun.
    c. Apabila rehabilitasi sudah selesai akan dilaksanakan program Pasca Rehabilitasi untuk menghindari Relapse dengan kegiatan pendampingan dan pemantauan (Bimbingan Lanjut sehingga akan didapat menjadi klien yang pulih, produktif dan berfungsi sosial.

11. Apa saja program yang dirancang untuk rehabilitasi?

    Jawab :

Pada rehabilitasi rawat inap klien mendapatkan Detoksifikasi, Entri Unit/Orientasi, Program rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis, dan Re entri Unit. Sedangkan pada rehabilitasi rawat jalan hanya mendapatkan program rehabilitasi medis dan sosial saja.

12. Apa saja faktor penghambat atau kesulitan selama menjalankan pondok dengan program rehabilitasi narkoba?
    Jawab :
    Sejauh ini kendala yang dihadapi kurangnya respon atau minat si korban dalam menjalani proses rehabilitasi karena paksaan untuk menjalani rehabilitasi sehingga menyulitkan konselor dalam memberikan program

13. Apa saja faktor pendukung dalam menjalankan pondok dengan program rehabilitasi narkoba?
    Jawab :
    1. Adanya komit dan kemauan dari pengguna/pecandu
    2. Adanya lokasi rehabilitasi yang lengkap
    3. Adanya sarana dan prasarana untuk menjadikan pengguna/pecandu pulih

14. Apa saja kelemahan dari program rehabilitasi ?
    Jawab :
    1. Tidak adanya komit dari pengguna/pecandu
    2. Tempat rehabilitasi tidak memadai (tidak adanya pengobatan medis dan Psikiater)

15. Apa saja ancaman dalam menjalakan program rehabilitasi bagi santri yang sedang direhabilitasi?
    Jawab :

Tidak ada ancaman dalam program rehabilitasi

16. Bagaimana pandangan bapak bila institusi kepolisian membuat suatu tempat rehabilitasi khusus bagi anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan narkoba, hal ini mengingat anggota Polri yang terlibat pemakaian narkoba sudah semakin meningkat tiap tahunnya?

    Jawab :

    Setuju, akan tetapi sangat membutuhkan biaya yang besar dan pendirian tempat rehab sangat rumit ( BNN baru ada 3 Balai Rehabilitasi dan 3 Loka Rehabilitasi di seluruh Indonesia)

17. Apa harapan bapak terhadap anggota polri yang terlibat penggunaan narkoba?

    Jawab :

    Harapannya apabila si oknum hanya pemakai narkoba dan ikut-ikutan sesuai UU Narkotika No.35 Tahun 2009 pemakai narkoba wajib direhabilitasi medis dan sosial agar pulih kembali seperti semula, namun apabila oknum tersebut sudah masuk dalam jaringan pengedar narkoba maka wajib menjalani hukuman sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu juga peneliti melakukan wawancara dengan Kabid Propam Polda Sumatera Utara Kasubbidwabprof Bapak Dadi Purba, SH., MH

1. Berapakah jumlah personil Polda Sumatera Utara yang menyalahgunakan Narkoba ? Tahun 2019 sebanyak 18 pers tahun 2020 sebanyak 34 pers. Tahun 2021 sebanyak 25 orang.
2. Berapakah jumlah anggota personil Polri Polda Sumatera Utara yang disidangkan melalui sidang disiplin dan sidang kode etik bagi

yang terlibat penyalahgunaan narkoba? Sidang Kode Etik dan Sidang Displin sebanyak 44 (empat puluh empat) orang (tahun 2019 sebanyak 11 Personel, tahun 2020 sebanyak 19 Pers, tahun 2021 sebanyak 14).

3. Apakah upaya upaya dari Propam Polda Sumatera Utara untuk mencegah dan menekan angka jumlah personil Polri Polda Sumatera Utara yang menyalahgunakan Narkoba?

    a. Upaya Pre-Emtif:

    1) Keteladanan/Role Model
    2) Memperbanyak Lingkungan/Giat Positip
    3) Kepedulian perilaku negatif
    4) Pemulihan dan pembinaan profesi

    b. Upaya Pencegahan

        1) Penguatan Gaktiblin
        2) Larangan masuk jona merah
        3) Perbanyak kehadiran Propam
        4) Perkuatan First Line Suvervisor

    c. Upaya Penegakan Hukum

        1) Penguatan operasi bersih dan OTT
        2) Penyelesaian tunggakan kasus
        3) Penanganan cepat kasus menonjol
        4) Pemberatan sanksi hukuman

4. Apa saja jenis hukuman yang telah diterapkan terhadap anggota personil Polri Polda Sumatera Utara yang menyalahgunakan narkoba?

   Putusan Sidang Disipilin yang diterapkan terhadap Anggota Polri yang menyalahgunakan Narkoba adalah Penempatan Khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari dan Putusan Sidang Kode Etik berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri.

5. Apa harapan secara institusi terhadap anggota Polri Polda Sumatera Utara yang menyalahgunakan Narkoba ?

   Anggota yang sudah terlanjur menyalahgunakan Narkoba kedepannya tidak menggunakan narkoba dengan upaya Rehablitasi.

Disisi lain, peneliti juga melakukan wawancara dengan Kasubbid Bankum Bidkum Polda Sumatera Utara Bapak Ramles Napitupulu, SH., MH. Berikut hasil wawancara peneliti:

1. Berapa jumlah personil Polda Sumatera Utara yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba ?

   Jawab : Bahwa untuk Tahun Anggaran 2021 (bulan Januari s.d Agustus), personil Polda Sumatera Utara yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika adalah sebanyak 50 personil dengan rincian

a. Bulan Januari = 3 personil

b. Bulan Februari = 4 Personil

c. Bulan Maret = 13 Personil

d. Bula April = 10 Personil

e. Bulan Mei = 3 Personil

f. Bulan Juni = 6 Personil

g. Bulan Juli = 7 Personil

h. Bulan Agustus = 4 Personil

2. Apakah saran dan pendapat hukum saudara terhadap personil Polda Sumatera Utara yang menyalahgunakan Narkoba ?

Jawab :

a. Bahwa pendapat dan saran hukum yang diberikan oleh Bidkum Polda Sumatera Utara khususnya terhadap personil Polda Sumatera Utara yang urinenya positif mengandung zat Narkoba maka, Bidkum menyarankan agar terhadap perkara personil tersebut disidangkan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan mendasari surat Kapolda Sumut Nomor : B/5380/VI/WAS.2.1/2020/A/Bidpropam, tanggal 18 Juni 2020, perihal petunjuk dan arahan penegakan KKEP terhadap personil yang menyalahgunakan narkoba, yang ancaman hukum terberatnya adalah pemecatan dari Dinas Polri, dengan mengacu kepada PP RI No. 1 Tahun 2003 tentang

Pemberhentian Anggota Polri, Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri.

b. Bahwa untuk personil yang terlibbat dalam peredaran gelap narkotika maka, Bidkum menyarankan agar terhadap perkara personil tersebut disidangkan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan ancaman hukuman pemecatan dari Dinas Polri, dengan mengacu kepada PP RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri.

3. Apakah upaya – upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bidkum Polda Sumatera Utara untuk menekan jumlah personil anggota Polri Polda Sumatera Utara yang menyalahgunakan Narkoba?

Jawab :

Bahwa ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Bidkum Polda Sumatera Utara khususnya dan Polda Sumatera Utara pada umumnya untuk menekan jumlah personil anggota Polri menyalahgunakan narkoba, yaitu antara lain : memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada seluruh personil Polri

jajaran Polda Sumatera Utara tentang bahaya yang ditimbulkan apabila mengkonsumsi narkotika terlebih apabila telah menjadi pecandu narkoba serta ancaman pidana yang akan diterima oleh personil Polri apabila terlibat dalam peredaran gelap Narkoba maka akan diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Polri. Polda Sumatera Utara dan Bidkum Polda Sumatera Utara telah mengirimkan Jukrah (Petunjuk dan Arahan) kepada Satwil dan jajaran Polda Sumatera Utara terkait penyalahgunaan Narkoba agar personil Polri memahami tentang aturan-aturan dan hal-hal yang harus dilakukan atau dihindari terkait Narkoba, salah satu Jukrah yang telah diberikan adalah surat Kapolda Sumatera Utara Nomor B/5380/VI/WAS.2.1/2020/A/Bidpropam, tanggal 18 Juni 2020, perihal petunjuk dan arahan penegekan KKEP terrhadap personil yang menyalahgunakan narkoba.

4. Apakah harapan dari Bidkum Polda Sumatera Utara terhadap personil di Polda Sumatera Utara untuk dapat berkerja secara professional sesuai dengan tupoksi Polri

   Jawab :

   a. Bahwa Bidkum Polda Sumatera utara sangat berharap agar seluruh personil Polda Sumatera Utara dapat memahami dan mengamalkan norma-norma atau aturan-aturan yang menjadi kesatuan landasan etik atau filosofis berkaitan dengan perilaku

maupun ucapan mengenai hal hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab jabatannya

b. Agar personil Polri tidak ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba baik sebagai pengedar maupun sebagai pengguna, dimana hal tersebut tentunya sangat berpengaruh kepada personil dalam rangka pelaksanaan tugasnya dimana personil menjadi malas untuk masuk kerja dan pada akhirnya merugikan personil itu sendiri, terlebih apabila personil terlibat sebagai pengedar narkoba yang akibatnya dapat dijatuhi tindak pidana dan pemecatan sebagai seorang perrsonil Polri

c. Agar personil melaksanakan tugasnya secara professional dan procedural sebagai wujud nyata amal ibadahnya dan kewajibannya

Disamping itu juga peneliti melakukan wawacara dengan para pengguna Narkoba

1. Darma Yuda Putra ( 45 Tahun ) Menggunakan Narkoba Jenis Sabu Sabu Sejak Tahun 2017 dan Menggunakannya lebih kurang selama 2 (dua) tahun, namun tidak menjadikannya suatu kebutuhan yang harus terpenuhi, Digunakan pada saat timbul keinginan hati. Awal mula

menggunakan sabu sabu karena diajak teman sepergaulan untuk mencoba sedikit – sedikit. Setelah menggunakan pertama kali, belum ada merasakan efek atau reaksi apapun. Lalu seminggu kemudian beliau kembali mengunakan sabu sabu untuk kedua kalinya, saat itu sudah merasakah efek tenang dan bahagia seperti tidak mempunyai masalah apapun. Atas dasar hal itulah beliau menjadi kecanduan dan ketagihan, dimana mendapakan barang haram tersebut membeli dari teman dan terkadang dikasi gratis oleh teman beliau sehingga tidak menganggu perekenomian keluarga. Penggunaan selama 2 tahun tersebut menimbulkan efek yakni mata kabur atau kurang jelas bila melihat dari jarak jauh. Berdasarkan hal itu pengguna ini berhenti menggunakan sabu sabu dengan cara niat dari hati karena dari diri sendirilah dapat mengehentikan penggunaan sabu sabu tersebut.

2. Roky A Aritonang menggunakan jenis narkoba sabu sabu selama 1 tahun sejak tahun 2010. Roky juga menggunkan barang haram ini berawal dari coba coba dan terpengaruh dari teman sekolahnya serta lingkungan komplek tempat beliau tinggal karena melihat temannya setelah memakai narkoba tesebut merasa sangat bahagian dan aktif selama hampir 12 jam setelah menggunakan narkoba tersebut. Namun beliau setelah menjadi kecanduan jenis narkotika sabu sabu itu maka menimbulkan efek atau rekasi merasa capek yang sangat berlebihan, tidur gelisah dan tidak lagi peduli dengan lingungan sekitar.

Selanjutnya efek yang sangat buruk dari kecanduan tesebut menjadi malas dan sering tidak masuk kerja karena merasa capek yang belebihan sehinga membuat keluarga menjadi berantakan dan ekonomi keluarga menjadi kacau. Untuk menghindari hal yang lebih buruk lagi maka beliau mencoba melakukan rehabilitasi dan sudah sampai selama 6 (enam) bulan tidak menggunakan narkoba, namun karena persoalan rumah tangga yang tidak kunjung selesai maka beliau kembali menggunakan narkoba jenis sabu sabu tersebut dan hingga saat ini beliau juga sudah tidak lagi mengunakan sabu sabu tersebut untuk kesenangan sesaat.

3. Daniel Purba, menggunakan sabu sabu sejak tahun 2016 hingga 2020, berawal juga dari mencoba coba karena merasa sangat penasaran untuk menggunakan sabu sabu. Akibat kecanduan tesebut juga beliau juga menjadi pemalas dalam berkerja dan untuk memberhentikan kecanduan barang haram itu beliau pada tahun 2018 sempat merasakan rehabilitasi selama satu bulan. Karena masih terus berpikiran mengenai nikmatnya sabu sabu itu maka setelah 6 bulan lepas dari kencanduan beliau kembali meenggunakan sabu sabu. Karena memikirkan keadaan orang tua beliau yang sudah sakit sakitan maka pencandu ini lepas dengan sendirinya dari bahaya sabu sabu itu. Dan kini sudah kembali ke keluarga dengan harapan tidak menggunakan lagi barang haram tersebut.

Untuk lebih memperluas penelitian dalam disertasi ini peneliti juga kembali melakukan wawancara langsung dengan para mantan pengguna Narkoba yakni :

HOTLIN L.S. PURBA

1. Berapa lama dan sejak kapan menggunakan Narkoba kemudian Narkoba jenis apa yang saudara gunakan?

   Saya menggunakan Narkoba ± selama 5 tahun sejak tahun 2009 hingga 2014 dan jenis narkoba yang saya gunakan adalah sabu-sabu.

2. Bagaimana awal mula bisa menggunakan narkoba ?

   Awal mula nya pada saat bertugas diintel terpengaruh oleh lingkungan disekitar, pertama hanya ingin masuk kedalam lingkungan pengguna tersebut guna untuk melakukan penyelidikan peredaran narkoba. Kemudian pada saat melakukan penyelidikan dengan terpaksa harus ikut serta mencoba barang haram tersebut dan lama kelamaan malah ketagihan untuk menggunakannya.

3. Bagaimana kehidupan saudara pada saat sewaktu masih menggunakan narkoba ?

```Pada saat masih menggunakan narkoba kehidupan saya berantakan dan tidak terarah, tidak pernah ada` perhatian kepada keluarga, hanya memikirkan kepentingan dan kesenangan diri sendiri, selalu emosi jika bertemu dan diajak ngomong dengan istri kemudian meyebabkan psikis istri terganggu.
```

4. Berapa kali sehari menggunakan narkoba ?

   Saya sering menggunakan narkoba, lebih dari 5 kali dalam sehari karena dulu saya sempat menjadi kurir juga demi untuk bisa menggunakan narkoba.

5. Apa faktor utama saudara dapat berhenti menggunakan narkoba ?

   Awalnya saya terpukul karena salah satu putri kembar saya meninggal dunia akibat lahir secara prematur dan menurut penjelasan dokter lahir secara prematur tersebut karena psikis istri saya terganggu dan sering stres, dari situlah saya niatkan dari dalam hati saya untuk benar-benar berhenti menggunakan narkoba.

6. Apa efek kepada diri saudara setelah berhenti menggunakan narkoba tersebut ?

   Efeknya sekarang yang saya rasakan daya ingat saya berkurang.

7. Apakah saudara pernah direhabilitasi ?

   Saya tidak pernah direhabilitasi.

8. Apa pesan-pesan saudara kepada orang-orang yang masih menggunakan narkoba ?

   Pesan saya, kepada yang masih menggunakan narkoba segeralah berhenti menggunakan narkoba jangan sampai narkoba yang menghentikan hidupmu.

M. SYAHLAN PASARIBU

1. Berapa lama dan sejak kapan menggunakan Narkoba kemudian Narkoba jenis apa yang saudara gunakan?

   Saya menggunakan Narkoba ± selama 7 tahun sejak tahun 2010 hingga 2017 dan jenis narkoba yang saya gunakan adalah sabu-sabu.

2. Bagaimana awal mula bisa menggunakan narkoba ?

   Awal mula menggunakan narkoba karena terpengaruh dengan lingkungan sekitar, pertama ingin mencoba dan lama kelamaan jadi ketagihan.

3. Apa yang saudara rasakan pada saat menggunakan Narkoba ?

   Pada saat sedang menggunakan narkoba saya hanya mementingkan diri sendiri tidak pernah sedikit pun memikirkan keluarga.

4. Bagaimana saudara mendapatkan Narkoba tersebut ?

   Saya mendapatkan narkoba awalnya minta dari teman, lama lama teman saya tidak mau kasih lagi kemudian saya mulai menjadi pengedar/kurir agar mendapatkan uang untuk membeli narkoba.

5. Bagaimana kehidupan saudara pada saat sewaktu masih menggunakan narkoba ?

   Pada saat masih menggunakan narkoba kehidupan saya sangat berantakan dan tidak terarah, ekonomi tidak stabil, selalu berpikiran kriminal untuk mendapatkan uang, malas untuk masuk kerja.

6. Apa faktor utama saudara dapat berhenti menggunakan narkoba ?

   Awalnya pada saat saya akan berangkat tugas ke aceh, saat itu istri saya

sedang hamil kemudan istri saya bertanya , “ mau anak apa?” saya jawab aku mau anak perempuan, kemudian istri saya berkata lagi “ kalau lahir anak perempuan janji untuk berhenti menggunakan narkoba?” saya jawab iya saya janji. Pada saat saya di Aceh istri saya melahirkan dan saya dapat kabar bahwa anak saya yang lahir perempuan, kemudian istri saya minta kepada saya untuk menepati janji. Dari situlah saya niatkan dari hati saya sendiri untuk berhenti menggunakan narkoba.

7. Apa efek kepada diri saudara setelah berhenti menggunakan narkoba tersebut ?

   Efeknya sekarang yang saya rasakan karir saya terhambat.

8. Apakah saudara pernah direhabilitasi ?

   Saya tidak pernah direhabilitasi.

9. Apa pesan-pesan saudara kepada orang-orang yang masih menggunakan narkoba ?

   Pesan saya, jangan pernah menggunakan narkoba sekalipun karena menggunakan narkoba itu sedikit pun tidak ada manfaatnya yang ada hanya kerugian dan kehancuran.

MARADONA BARUS

Berapa lama dan sejak kapan menggunakan Narkoba kemudian Narkoba jenis apa yang saudara gunakan?

- Saya menggunakan Narkoba ± selama 12 tahun sejak

tahun 2002 hingga 2014.

- Tahun 2002 s/d 2005 saya menggunakan narkoba jenis pil ekstasi
- Tahun 2006 s/d 2014 saya menggunkan narkoba jenis sabu

Bagaimana awal mula bisa menggunakan narkoba ?

Awal mula menggunakan narkoba karena terpengaruh dengan lingkungan sekitar dan ajakan oleh senior.

Apa yang saudara rasakan pada saat menggunakan Narkoba ?

Pada saat sedang menggunakan narkoba saya hanya mementingkan diri sendiri tidak pernah sedikit pun memikirkan keluarga.

Bagaimana saudara mendapatkan Narkoba tersebut ?

Saya mendapatkan narkoba awalnya dikasih secara gratis lama kelamaan mulai kecanduan, setelah kecanduan terpaksa harus beli kepada kurir atau pengedar.

Apa faktor utama saudara dapat berhenti menggunakan narkoba ?

Awalnya pada saat itu istri saya minta cerai kepada saya karena dia tidak tahan dengan perilaku saya, kemudian saya niatkan dari hati untuk berhenti menggunakan narkoba demi untuk menyelamatkan rumah tangga saya.

Apakah saudara pernah direhabilitasi ?

Saya tidak pernah direhabilitasi.

Apa pesan-pesan saudara kepada orang-orang yang masih menggunakan narkoba ?

Pesan saya, berhentilah menggunakan narkoba kalau mai hidup tenang dan bahagia dengan keluarga.

YOAS S. SIBORO

Berapa lama dan sejak kapan menggunakan Narkoba kemudian Narkoba jenis apa yang saudara gunakan?

Saya menggunakan Narkoba ± selama 3 tahun sejak tahun 2014 hingga 2017 dan jenis narkoba yang saya gunakan adalah sabu-sabu.

Bagaimana awal mula bisa menggunakan narkoba ?

Awal mula karena stres yang berkepanjangan sebab orangtua saya meninggal dunia, kemudian dating teman saya menawarkan narkoba agar tidak stres lagi katanya. Dari situlah saya mulai mencoba - coba lama lama jadi ketagihan.

Apa yang saudara rasakan pada saat menggunakan Narkoba ?

Pada saat menggunakan narkoba pertama kali saya merasa bingung karena belum pernah sebelumnya menggunakan itu tetapi lama kelamaan saya nikmati kemudian terasa enak.

Bagaimana kehidupan saudara pada saat sewaktu masih menggunakannarkoba ?

Pada saat masih menggunakan narkoba kehidupan saya sangat berantakan dan tidak terarah, malas untuk masuk kerja yang mengakibatkan saya sering mangkir dari kerjaan. Akibat sering mangkir saya menjalani 3 kali sidang disiplin.

Apa faktor utama saudara dapat berhenti menggunakan narkoba ?

Awalnya pada saat saya melaksanakan sidang disiplin yang ketiga, ibu saya datang untuk mendampingi saya sidang. Saat itu saya iba melihat beliau kenapa harus ikut dalam permasalahan saya ini, kemudian mucul lah niat saya untuk berubah dan berjanji tidak akan menggunakan narkoba lagi.

Apa efek kepada diri saudara setelah berhenti menggunakan narkoba tersebut ?

Efeknya sekarang yang saya rasakan karir saya terhambat.

Apakah saudara pernah direhabilitasi ?

Saya pernah direhabilitasi selama 3 bulan tetapi hasilnya Nihil, setelah keluar dari panti rehabilitasi saya tetap menggunakan narkoba juga. Pada intinya harus ada niat dari hati untuk berhenti manggunakan narkoba itu.

Apa pesan-pesan saudara kepada orang-orang yang masih menggunakan narkoba ?

Pesan saya, untuk kawan-kawan yang masih menggunakan narkoba berhentilah menggunakan narkoba karena tidak ada

gunanya menggunakan narkoba itu dan untuk kawan-kawan yang belum pernah menggunakan narkoba, jangan sekali-sekali sentuh narkoba itu karena akan susah untuk memberhentikannya.

HERMANTO BUTAR-BUTAR

Kapan saudara mulai menggunakan Narkoba kemudian Narkoba jenis apa yang saudara gunakan?

Saya menggunakan Narkoba pada tahun 2012 jenis narkoba yang saya gunakan adalah pil ekstasi.

Bagaimana awal mula bisa menggunakan narkoba ?

Awal mula menggunakan narkoba karena pengaruh masalah keluarga yang sering bertengkar dengan istri dan menyebabkan saya bergaul diluar dan mengenal narkoba jenis pil ekstasi.

Apa yang saudara rasakan pada saat menggunakan Narkoba ?

Pada saat sedang menggunakan narkoba jenis pil ekstasi saya merasa gembira/bahagia, badan saya rasanya ingin dibawa berjoget dan merasa sangat riang. Tetapi setelah efek dari pil itu habis tubuh saya banyak mengeluarkan keringat, tidak ada selera makan, badan ini rasanya ingin bermalas-malasan saja yang mengakibatkan saya malas masuk dinas, emosi tidak terkontrol.

Bagaimana kehidupan saudara pada saat sewaktu masih menggunakan

narkoba ?

Pada saat masih menggunakan narkoba kehidupan saya sangat berantakan, rumahtangga saya hancur, dinas saya terbengkalai.

Apa faktor utama saudara dapat berhenti menggunakan narkoba ?

Awalnya saya merenung kenapa kehidupan saya hancur seperti ini, rumah tangga hancur karena sudah bercerai dengan istri, dinas pun terbengkalai dan saya pikir ini semua karen apengaruh narkoba itu. Kemudian dari situ saya berniat untuk berhenti menggunakan narkoba itu sebelum saya merasa lebih hancur lagi.

Apakah saudara pernah direhabilitasi ?

Saya tidak pernah direhabilitasi.

Apa pesan-pesan saudara kepada orang-orang yang masih menggunakan narkoba ?

Pesan saya, jangan pernah coba-coba mendekati narkoba jika tidak mau kehidupan berumah tangga hancur begitu saja. Saya adalah salah satu korban dari jahatnya narkoba itu dan berhentilah menggunakan narkoba jika masih mau hidup sehat dan tenang di dunia ini. Menggunakan narkoba hanya mendatangkan kehancuran bagi diri kita.

**B. REKONSTRUKSI NILAI – NILAI REHABILITASI BAGI**

**ANGGOTA POLRI PENYALAHGUNA DAN PECANDU NARKOBA.**

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

a) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.

b) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

c) Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

d) Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Dalam upaya rehabilitasi ini penyidik Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara mendasari pada peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

a) Permohonan tertulis untuk dilakukan rehabilitasi dari keluarga atau penasehat hukum pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

b) Rekomendasi dari hasil gelar perkara.

c) Berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi.

d) Hasil test kit urine/pemeriksaan laboratories dan

e) Barang bukti dalam jumlah tertentu (apabila tertangkap tangan/hasil Razia dengan barang bukti ada padanya).

Setelah melakukan penelitian administrasi, atasan penyidik membuat surat pengantar permintaan asessmen kepada tim asesmen terpadu.

Strategi penanggulangan penyalahgunan narkoba yang dilakukan Polda Sumatera Utara melalui cara sebagai berikut :

1. Upaya Pencegahan

a) Pre-empetif

Dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obat berbahaya di wilayah Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara mengadakan upaya pre-empetif. Upaya pre-empetif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab yang disebut faktor korelatif kriminogen (fkk) sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup bebas narkoba termasuk kewaspadaan instansi terkait dan seluruh lapisan masyarakat. Polisi Daerah Sumatera Utara dalam upaya pre-empetif ini mengadakan kegiatan sebagai berikut :

1) Mengadakan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Narkoba bekerjasama dengan Bagian Pembinaan Masyarakat Sejajaran Polisi Daerah Sumatera Utara dengan sasaran adalah masyarakat yang terdiri dari pelajar SMP, SMA, Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta, di samping itu juga

melakukan penyuluhan ditingkat Ibu-ibu PKK, Dharma Wanita dan mengadakan tanya jawab dengan masyarakat melalui media radio, sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi.

2) Pemasangan spanduk yang berisi ajakan untuk menghindari narkoba, spanduk itu dipasang di tempat-tempat yang strategis dan yang mudah dilihat oleh masyarakat. Pemasangan spanduk yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polisi Daerah Sumatera Utara dipasang setiap memperingati "Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan Narkoba" dan bekerjasama dengan pihak sponsor.

b) Preventif Polisi Daerah Sumatera Utara selain mengadakan upaya pre-empetif dalam mencegah terjadinya penyalahgunan narkoba juga mengadakan upaya preventif. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba melalui pengadilan dan pengawasan jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar police hazard (ph) tidak berkembang menjadi ancaman faktual (af) antara lain dengan tindakan :

1) Mengadakan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba, misalnya : di tempat-tempat hiburan, hotel dan penginapan serta tempat kos yang diindikasikan sebagai tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba.

2) Melakukan operasi-operasi kepolisian dan razia di tempat-tempat

yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan Narkoba seperti tempat hiburan, lembaga pemasyarakatan dan kos - kosan. Polisi Daerah Sumatera Utara juga mengadakan operasi-operasi baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasi khusus. Operasi rutin dilaksanakan setiap hari yaitu melalui pengawasan atau pengamatan di tempattempat yang rawan terjadiya penyalahgunaan Narkoba. Macam-macam operasinya antara lain :

i. Operasi Antik

ii. Operasi Bersinar.

2. Upaya Penanggulangan

a) Upaya Represif Dalam proses penyidikan pihak Kepolisian telah diatur dengan beberapa peraturan sebagai dasar untuk menentukan tersangka apakah sebagai pengedar, pemakai dalam hal ini masuk kategori pecandu atau sebagai korban. Peraturan – peraturan ini penting untuk dijadikan dasar penyidikan selain Undang – undang 35 tahun 2009 agar dapat menjadi pertimbangan Penuntut Umum maupun Pengadilan dalam menetapkan putusan hukuman bagi tersangka. Peraturan – peraturan tersebut adalah :

1) Surat Edaran Mahkamah Agung no 4 tahun 2010

2) Peraturan Bersama antara Badan Narkotika Nasional, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Departemen Sosial dan Departemen

Kesehatan.

3) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal No 1 tahun 2016

b) Treathment dan Rehabilitasi Treathment dan rehabilitasi merupakan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pihak Departemen Sosial, Departemen Kesehatan dan instansi swasta lainnya dan bekerjasama dengan pihak Polri. Treathment merupakan tempat untuk perawatan atau pengobatan pasien. Secara konseptual, pola penanggulangan penyalahgunan Narkoba adalah dengan melibatkan seluruh golongan dan lapisan masyarakat untuk turut berperan serta, Direktorat Reserse Narkoba Polisi Daerah Sumatera Utara bekerjasama dengan pihak (Badan Narkotika Kota / BNK), dan pihak Satuan Narkoba Polres sejajaran Polisi Daerah Sumatera Utara.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly mengungkapkan keresahannya soal kasus narkotika di Indonesia. Dia menyoroti kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang mayoritas diisi narapidana dan tahanan kasus narkoba.

“Di lembaga pemasyarakatan isinya 50 persen pengguna narkoba, dan di kota-kota besar jumlah terpidana narkotika mencapai 70 persen dari total warga binaan. Ini momok bagi pemasyarakatan," ujar Yasonna usai memimpin upacara Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan di Lapas Khusus Narkotika kelas IIA

Cipinang Jakarta, Sabtu, 27 April 2019.[172]

Menurut Yasonna, seharusnya pemerintah menggunakan pendekatan kesehatan alih-alih penegakan hukum pada pengguna narkoba. “Ini menjadi pertanyaan fundamental, pengguna (narkoba) itu mau kita hukum atau kita beri perawatan,” ujar Yasonna. Menurut dia, pengguna narkoba yang sudah memasuki fase ketergantungan tidak berbeda dari seseorang yang menderita sakit parah sehingga harus diberikan pengobatan, yang dalam hal ini adalah rehabilitasi. Pendekatan ini juga yang digunakan oleh berbagai negara maju. “Yang kita buat tekanan paling besar adalah bandar dan pengedar, bukan pengguna,” kata Yasonna.

Dampak negatif dari kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan itu terlihat pada kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Langkat, Sumatera Utara, pertengahan Mei 2019 lalu. Ratusan penghuni penjara ‘berontak’ saat rekannya yang kedapatan membawa sabu ditindak petugas.

Perlawanan dari para warga binaan itu berujung pembakaran, perusakan fasilitas lembaga pemasyarakatan, hingga warga binaan yang melarikan diri. Kapasitas di sana hanya untuk 915 orang, tapi pemerintah menempatkan 1.635 narapidana dan tahanan.

Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Heru Winarko menolak pendekatan pengelolaan narkoba oleh negara. Menurutnya, narkoba

[172]https://www.beritasatu.com/nasional/570823/belajar-pemberantasan-narkoba-dari-negaranegara-lain

tetaplah barang terlarang dan yang mengedarkan atau menggunakannya patut dikenai hukuman. Sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

"Undang-undang di kita menyatakan narkoba ada sanksi hukumannya. Jadi kita tetap komit itu adalah illegal dan kita harus berantas," ujarnya di sela-sela peresmian gedung BNN Provinsi Jawa Barat, Februari 2019 lalu.

Menurut dia, pemerintah perlu menurunkan tingkat produksi dan paparan narkoba di masyarakat. "Kita banyak belajar bagaimana narkoba bisa kita tangani sebaik-baiknya termasuk *supply* dengan *demand*. Yang paling pokok adalah bagaimana *demand* bisa tidak ada, *demand* itu paling penting," tutur Heru.

Jurnal data Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN Tahun 2018 "Indonesia: Narkoba dalam Angka Tahun 2017" melansir, angka penyalahgunaan narkoba cenderung relatif stagnan dalam periode 2017-2022. Angka penyalahgunaan narkoba berkisar di angka 3,3 juta orang dalam lima tahun ke depan.

Hal ini mengindikasikan upaya penurunan angka absolut penyalahgunaan narkoba telah memasuki angka yang semakin sulit (*hard roc*k) untuk bisa semakin mengecil secara absolut. Ibarat sebuah per, maka jika ditekan akan ada bagian yang sudah tidak mungkin dapat ditekan lagi.

Kepala Bagian Humas Badan Narkotika Nasional, Komisaris Besar Sulistiyo Pudjo menyatakan upaya pemberantasan narkoba itu harus dilihat dalam konteks menekan angka penyalahgunaan narkoba.

"Jangan dilihat anggaran naik tapi tidak berhasil karena angka tersangka kasus narkoba terus bertambah. Kalau penangkapan tinggi itu berarti

pencegahannya berhasil. Petugasnya rajin," ungkap Sulistiyo.

Cara pandang seperti ini bisa dipertanyakan jika melihat keluhan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly. Menurut dia, pemerintah pada akhirnya harus menanggung biaya bagi warga binaan yang terdiri dari bandar dan pengguna narkoba.

Indonesia juga sudah memiliki pengalaman mengelola Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) yang diinisiasi sejak 2003 lalu. Selain menurunkan angka penularan HIV/AIDS melalui penggunaan narkoba suntik, program ini bisa meningkatkan kualitas hidup konsumennya. "Kalau dikelola baik itu bakal sangat pengaruh, berarti pasar gelap tidak ada, bandar pada mati. Kalau masih seperti sekarang, barang tetap ada tapi harga tinggi. Kalau tidak ada duit (buat beli narkoba) ya ujungnya kriminal. Hidup juga pasti tidak benar," kata Adi Marcel, pasien terapi Metadon.

Sementara itu Negara tetangga Singapura mengambil langkah langkah dalam pemberantasan narkoba, setelah adanya Konvensi Tunggal Narkotika yang dilakukan di Jenewa pada tahun 1997. Pemerintah Singapura berencana membuat suatu badan yang khusus menangani prerdaran narkotika di Singapura. Pemerintah Singapura meminta Manby juga mendukung usulan pemerintah untuk mendirikan suatu badan atau biro narkotika nasional di Singapura.

Manby, membayangkan bahwa badan narkotika itu akan mempunyai karyawan sebanyak sekitar 60 -100 orang dan badan tersebut mempunyai fungsi

yang luas seperti:

a. Pelatihan aparat hukum dengan pembekalan khusus Narkotika
b. Memberikan pendidikan bagi masyarakat terhadap perdagangan narkoba dan bahaya penyalahgunaannya.
c. Membentuk intelijen narkotika
d. Penegakan hukum terhadap narkotika,
e. Administrasi tentang narkotika

Lembaga penegak hukum dibidang Narkotika di Singapura adalah *Central Narcotics Bureau* atau yang biasa disingkat dengan CNB, yang didirikan pada tahun 1971.

Akibat maraknya pengedar narkotika di Singapura, maka pada tahun 1994 lembaga ini diberikan penambahan kewenangan yaitu melakukan pencegahan, penegakkan hukum yang tegas, melakukan rehabilitasi hingga menyiapkan para pecandu narkotika kembali kedalam masyarakat. CNB merupakan gabungan dari *Central Investigation Department* (CID) dan *Central Narcotics IntelligenceBureau* (CNIB) yang didirikan pada tahun 1958.

Kedudukan CNB berada dibawah Kementerian Dalam Negeri (*Ministry of Home Affairs*) Singapura. Empat strategi utama dari CNB adalah melakukan pencegahan terhadap bahaya Narkotika dan penyalahgunaannya, penegakan hukum, rehabilitasi (pengobtan) untuk pelaku narkoba, danproses integrasi para mantan pelaku narkoba untuk

kembali mereka ke dalam masyarakat.

CNB adalah organisasi yang besar dan memiliki sumber daya yang baik, juga melakukan operasi rutinterhadap pengendar narkotika dan pecandu. Pada tahun 2013, CNB melakukan 46 (empat puluh enam) operasi besar melawan sindikat, dan berhasil menyita hasil tindak pidana narkotika lebih dari senilai S$ 20.500.000 SGD. Lembaga ini juga melakukan banyak kerja sama dengan negaranegara lain dalam penangan tindak pidana narkotika seperti merika, Australia dan saling tukarinformasi juga mengadakan pelatihan bersama.

> Dalam serangkaian operasi yang mendapat banyak sorotan pada April 2018, CNB menyita heroin, ganja, dan berbagai zat psikoaktif sintetis senilai hampir 5,65 miliar rupiah (400 ribu dolar A.S.) dan melakukan lebih dari 270 penangkapan, demikian yang dilaporkan biro tersebut. Salah satu operasi itu adalah ketika CNB bekerja sama dengan Kepolisian Malaysia untuk membongkar sindikat penyelundupan yang bermarkas di negara bagian Johor, Malaysia selatan, ketika sindikat itu berupaya memperdagangkan beberapa kilogram heroin dan jenis narkoba sintetis yang sangat kuat efeknya, metamfetamin kristal, di jalanan Singapura.
>
> Sebelumnya, pada Februari 2018, CNB bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Indonesia dalam menangkap kapal penangkap ikan Taiwan, ditampilkan dalam foto, yang sengaja menyamarkan diri sebagai kapal berbendera Singapura, membawa lebih dari 1 metrik ton

metamfetamin kristal, demikian ungkap biro itu.

Sekretaris Parlemen Urusan Dalam Negeri Singapura Amrin Amin menjabarkan program anti-narkoba negaranya kepada rekan-rekan anggota parlemennya pada 2 Maret 2018, di Gedung Parlemen Singapura.[173]

"CNB terus melakukan upaya penindakan," ungkap Amin. "Tahun lalu, CNB membongkar 23 sindikat narkoba dan melakukan 19 operasi di seluruh pulau itu yang menargetkan pedagang dan pelaku penyalahgunaan narkoba. CNB juga melakukan 12 operasi gabungan dengan mitra asing kami untuk memotong pasokan narkoba dari luar negeri."

Amin menambahkan bahwa tantangan baru yang ditimbulkan oleh internet dalam perdagangan narkoba ilegal dan kemunculan global zat psikoaktif sintetis baru (NPS) sedang ditangani. Undang-Undang Penyalahgunaan Narkoba negara itu, yang mencantumkan zat terlarang dan jumlah kepemilikan yang mendasari maksud untuk didistribusikan, telah direvisi dengan menyertakan 21 NPS, demikian menurut CNB. Amin mengatakan bahwa kerja sama dengan Korea Selatan memungkinkan CNB mendeteksi ratusan pesanan narkoba ilegal secara online dan menangkap 177 orang yang terkait dengan pemesanan narkoba itu.

Amin dengan cepat menekankan bahwa pencegahan merupakan kunci bagi upaya Singapura untuk menjadi negara bebas narkoba.

---

173 https://ipdefenseforum.com/id/2018/06/singapura-mengambil-tindakan-tegas-terhadap-perdagangan-narkoba/

“Kami telah meningkatkan upaya pendidikan narkoba preventif kami dalam setahun terakhir ini,” ungkapnya, “baik di bawah tanah maupun di media sosial. CNB bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan para pembuat film lokal di kalangan generasi muda untuk memproduksi serangkaian video yang menunjukkan efek merusak dari narkoba.”

Promosi keliling DrugsfreeSG adalah salah satu program pencegahan yang diselenggarakan oleh CNB. Program yang menarget generasi muda Singapura itu menampilkan simulasi realitas maya yang mengajari para peserta jalan keluar saat menerima narkoba yang ditawarkan kepada mereka, serta demonstrasi langsung penindakan narkoba oleh petugas CNB aktual.

Amin juga menguraikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Singapore Corporation of Rehabilitative Enterprises (SCORE) untuk “ meningkatkan kemampuan untuk dipekerjakan” mantan pelaku melalui pelatihan, penempatan kerja, dan pembinaan. SCORE membanggakan tingkat keberhasilan 97 persen untuk penempatan kerja bagi mereka yang terdaftar dalam program ini.

Meskipun Singapura dikenal luas memberikan hukuman yang berat pada pelaku kejahatan narkoba yang tidak dapat diperbaiki, termasuk hukuman mati, Amin menjelaskan bahwa pemerintahnya mengakui bahwa pelaku dapat direhabilitasi dan bahwa mereka sering kali membutuhkan

lebih dari satu kesempatan dalam proses yang sulit ini. Dia menggambarkan kunjungannya ke seorang penjahat kambuhan di penjara, yang telah kembali melakukan penyalahgunaan narkoba setelah periode rehabilitasi yang mencakup pemberian pekerjaan.

"Dia melihat saya, dan dia berkata, 'Maafkan saya. Saya telah mengecewakan Anda.' Dan saya berkata kepadanya, 'Kami belum menyerah pada Anda,'" kisah Amin.

"Kami tidak menyerah. Kami bertindak tegas terhadap narkoba dan kejahatan, tetapi kami juga sangat percaya pada rehabilitasi dan reintegrasi para narapidana," ungkap Amin.

Analisa bahwa seperti yang telah penulis gambarkan dalam penjelasan di atas tentang lembaga penegak hukum dalam tindak pidana narkotika yang ada di Indonesia dan Singapura. Bahwa kedua negara ini memiliki persamaan yaitu lembaga penegak hukum bidang Narkotika adalah lembaga yang hanya khusus didirikan dalam penanganan tindak pidana narkotika tidak dicampur dengan penegakan tindak pidana lainnya. Indonesia dan Singapura juga aktif dalam kerja sama Internasional khusus dalam tindak pidana narkotika. BNN dan CNB mempunyai perbedaan yaitu apabila dilihat dari kedudukan lembaganya yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) berada dibawah kedudukan Presiden dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden sedangkan untuk kedudukan CNB berada di bawah Kementerian Dalam Negeri Singapura. Dalam hal tugas dan fungsi juga terdapat perbedaan

dimana Badan Narkotika Nasional (BNN) juga berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidanapencucian uang dari hasil kejahatan tindak pidana narkotika.Berdasarkan analisa dari penulis kedua lembaga penegak hukum ini baik BNN dan CNB jelas mempunyai kekurangan dan kelebihan.

Kelebihan dari CNB Singapura adalah salah satu lembaga narkotika di dunia yang mampu untuk menekan banyaknya peredaran narkotika di Singapura. CNB dikenal dengan penggunaan peralatan yang canggih dan futuristic dalam mengedukasi anak muda usia 10-18 tahun yang salah satunya melalui The Drug Buster Academy (DBA). Dengan adanya DBA ini maka diharapkan generasi muda Singapura dapat paham danmenajdi "*drug buster*" sehingga negara Singapura terbebas dari Narkotika.

Kekurangannya adalah bahwa CNB berada dibawah Kementerian Dalam Negeri sedangkan seperti kita Badan Narkotika Nasional berada dibawah Presiden sehingga dalam proses pengambilan kebijakan narkotika di Indonesia lebih mudah.

Melihat penaganan narkotika diberbagai negara dimana penyalahguna mendapatkan rehabilitasi, seperti halnya di Negara Malaysia Dalam hal peraturan perundangan yang mengatur tentang larangan narkotika terdapat dalam Akta Dadah Berbahaya 1952. Peraturan tersebut memberikan rehabilitasi kepada korban/kehendak sendiri, pelaksanaan rehabilitasi dilaksanakan di Hospital Police yang berada diwilayah Persekutuan Kerjaan Islam, adapun masa rehabilitasi dilaksanakan selama 7 Bulan sampai dengan 12 bulan.

Sedangkan di Negara Inggris Terkait aturan penyalahgunaan narkoba di Negara Inggris diatur dalam Under the Misuse of Drugs Act 1971., dalam aturan perundang-undangan tersebut korban akan mendapatkan rehabilitasi selama satu tahun serta melaksanakan kerja sosial, sedangkan bagi pengedar dalam undangundang tersebut memberikan saksi berupa denda serta penjara selama 20 tahun. Perbandingan terakhir yaitu dengan Negara Singapura Dalam hal tindakan penyalahgunaan narkoba maka dinegara Singapura menerapkan aturan yang terdapat dalam The Misuse of Drus Atc 1973. Yang termasuk korban akan dikenakan hukuman denda dan menajalani rehabilitasi hukum pidana, sehingga korban sanksinya adalah denda dan menjalani rehabilitasi. Sedangkan bagi pengedar akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara seelama 11 tahun sampai dengan 25 tahun, ditambah lagi dengan sanksi berupa denda.

Dalam tataran agama/religius, keadilan diartikan sebagai pemberian hak yang semestinya ia terima berdasarkan kadar efek perbuatan yang memang patut ia terima sesuai dengan perintah Tuhan. Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisaa (4): 58): "Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat". Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan

keadilan, sehingga Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi ia dalam berbuat adil dan menjatuhkan hukuman

Optimalisasi Integrasi kebijakan penggunaan sarana penal dan non penal dalam mencegah tindak pidana narkoba juga dilakukan oleh Kepolisian Polisi Daerah Sumatera Utara. Upaya yang dilakukan untuk pencegahan tentang peredaran narkoba di wilayah hukum Polisi Daerah Sumatera Utara bekerjasama dengan :

1) Sat Binmas telah melakukan penyuluhan terhadap warga terutama yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan bahaya tentang penyalahgunaan narkoba.
2) Sat Intelkam telah melakukan deteksi dini tentang tindak pidana konvensional dengan menambah jumlah jaringan yang ada di wilayah hukum Polisi Daerah Sumatera Utara sehingga setiap kejadian dapat termonitor dengan melaporkan tindak pidana yang ada serta memberikan informasi yang akurat tentang kejadian yang ada.
3) Sat Reskim khususnya resmob telah ikut membantu dalam ungkap kasus tindak pidana narkoba yang di temukan dalam yang terdapat shabu-shabu.
4) Sat Shabara meningkatkan patroli ke tempat-tempat yang merupakan daerah rawan peredaran narkotika di wilayah hukum Polisi Daerah Sumatera Utara sesuai dengan route yang telah ditentukan dengan

kejadian yang telah di terima oleh SPKT, sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Narkotika.

Upaya penal bagi Satuan Narkoba Polisi Daerah Sumatera Utara dimulai ketika Polisi mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindak kejahatan. Sumber informasi tersebut bisa berasal dari laporan masyarakat, media massa, diketahui langsung oleh aparat, maupun data yang diber ikan oleh intelijen kepolisian. Mengenai informasi yang berasal dari data intelijen kepolisian dan laporan masyarakat. Setelah memperoleh informasi, Satuan Narkoba Polisi Daerah Sumatera Utara Medan tentu tidak langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penegakan hukum. Namun petugas di lapangan diperintahkan untuk mencari kebenaran informasi tersebut. Dengan demikian, jika terjadi kesalahan informasi, polisi tidak akan menyia-nyiakan terlalu banyak waktu, dana, dan sumber daya manusia tanpa hasil.

Adapun teknik penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi bisa dilakukan dengan beragam cara, yakni : pengamatan, wawancara, surveillance (pembuntutan), dan undercover (penyamaran). Berdasarkan penjelasan Moore dan Trojanowics, strategi operasional ini bisa disebut sebagai proactive policing, dimana polisi mulai memanfaatkan informasi masyarakat Setelah informasi yang diterima tadi diyakini kebenarannya, barulah Satuan Narkoba Polisi Daerah Sumatera Utara bergerak melakukan penangkapan.

Dalam hal tertangkap tangan, penyelidikan juga dapat dilakukan dengan penyitaan barang bukti. Proses penangkapan, termasuk penggeledahan dan

penyitaan, yang dilakukan Satuan Narkoba Polisi Daerah Sumatera Utara di atas, secara legal didasari alasan yang kuat bahwa sebuah kejahatan telah terjadi. Alasan itu sendiri merupakan kebenaran informasi yang telah diterima kepolisian sebelumnya saat penyelidikan dilakukan. Sebagaimana yang dilakukan unit kepolisian lainnya, setelah melakukan penangkapan Satuan Narkoba Polisi Daerah Sumatera Utara pun menggelar penyidikan terhadap tersangka. Dalam tahapan ini, Satuan Narkoba Polisi Daerah Sumatera Utara menyusun laporan, membuat Berita Acara Pidana (BAP) saksi dan tersangka, hingga melakukan pemeriksaan barang bukti di laboratorium. Ruang gerak Satuan Narkoba Polisi Daerah Sumatera Utara boleh melampaui batas wilayah. Hal ini dapat dilakukan apabila Satuan Narkoba Polisi Daerah Sumatera Utara melakukan koordinasi dengan kepolisian di wilayah tertentu dalam hal izin penangkapan.

Koordinasi ini dilakukan hingga ke tingkat kesatuan polisi terkecil, yakni kepolisian sektor. Mengenai kerjasama, hal tersebut tidak hanya dilakukan dengan sesama kepolisian lain. Badan di luar kepolisian juga dilibatkan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Salah satunya adalah Badan Narkotika Nasional (BNN), yang di dalam UU Narkotika mendapat porsi kewenangan sangat besar. Tidak sekadar berperan di bidang penyuluhan, Satuan Narkoba Polisi Daerah Sumatera Utara juga melibatkan Badan Narkotika Kota (BNK) dalam kegiatan operasi berskala besar alias gabungan. Proses upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Satuan Narkoba Polrestabes Medan yang disimpulkan di atas ternyata masih memiliki kendala.

Beberapa kendala tersebut diakui pihak Satuan Narkoba Polisi Daerah Sumatera Utara sangat menghambat kinerja mereka dalam pelaksanaan tugas secara keseluruhan. Hambatan yang biasanya dialami berasal baik dari dalam maupun luar Satuan Narkoba Polisi Daerah Sumatera Utara. Khusus untuk langkah Represif dan hal Pengaduan kasus Penyalahgunaan Narkoba, apabila Satuan Narkoba ataupun yang melakukan tindaklanjut ke TKP. Apabila benar ditemukan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh masyarakat akan langsung dilakukan penangkapan berikut Barang buktinya akan dibawa ke Satuan Narkoba. Namun sebelum dilakukan penggrebekan dan penangkapan tetap menyertakan Kepala Lingkungan ataupun Kepala Dusun di lingkungan tersebut untuk menghindari terjadinya keributan dengan masyarakat sekitar.

Jumlah anggota yang masih kurang dari standar dan bocornya informasi ketika akan melakukan razia diakui menjadi hambatan dari dalam yang sering terjadi. Sedangkan sarana yang kurang memadai dan dukungan dana yang minim merupakan hambatan dari luar Satuan Narkoba Polisi Daerah Sumatera Utara. Berbagai hambatan tersebut tentu akan memengaruhi kinerja Satuan Narkoba Polisi Daerah Sumatera Utara dalam upaya proses penanganan penanggulangan narkoba yang dilakukan.

Berdasarkan data rekapitulasi di atas, langkah awal yang dilakukan oleh Tim Satuan Narkoba Polisi Daerah Sumatera Utara adalah melakukan pengecekan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Setelah dilakukan cek TKP, barulah dilakukan penindakan apabila ditemukan bukti-bukti yang mengarah kepada terjadinya

tindak pidana narkotika. Jika tidak ditemukan adanya bukti-bukti terjadinya tindak pidana narkotika, maka dilakukan penyuluhan tentang bahaya penggunaan narkotika oleh Tim Satuan Narkoba di TKP yang diduga terjadinya tindak pidana narkotika tersebut.

Adapun upaya non-penal dalam menanggulangi tindak pidana narkotika oleh Satuan Narkoba Polisi Daerah Sumatera Utara dengan menggunakan aplikasi, terdiri dari upaya preventif dan preemtif, sebagai berikut :

1). Preventif Tindakan preventif sebagaimana dikatakan oleh Momo Kelana merupakan pelaksanaan fungsi kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas.[174] Adapun penanganan secara preventif yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kegiatan kepolisian. Dalam pencegahan masalah tindak pidana narkoba, pihak Satuan Narkoba Polisi Daerah Sumatera Utara melakukan Operasi Rutin Kepolisian dan Operasi Khusus Kepolisian. Penanganan secara preventif yang dilakukan oleh pihak Satuan Narkoba Polrestabes Medan terkait adanya kesamaan kebutuhan, dalam hal ini mengurangi penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat sesuai dengan konsep pemolisian (Policing) yang diungkapkan Mark Findlay & Ugljesa Zvekic.[175]

Dimana pihak Satuan Narkoba Polisi Daerah Sumatera Utara dalam pelaksanaan tugas polisi mengacu pada hubungan antara polisi dengan pemer

[174] Momo Kelana, Memahami Undang-Undang Kepolisian: UndangUndang No 2 Tahun 2002, Latar Belakang dan Komentar Pasaldemi Pasal, (Jakarta : PTIK Press, 2002), hlm. 10
[175] Mark Findlay dan Ugljesa Zvekic, diterjemahkan oleh Kunarto, Op.cit.

intahan maupun dengan masyarakat yang didorong adanya kewenangan, kebutuhan serta kepentingan baik dari pihak kepolisian, masyarakat maupun dari berbagai organisasi lainnya. Mengenai Operasi Khusus Kepolisian yang dilakukan biasanya pihak Satuan Narkoba melakukannya bersama dengan instansi lain, seperti LSM yang bergerak di bidang pencegahan narkoba dan instansi pemerintah lainnya.

Hal ini dilakukan ketika angka kejahatan terkait penyalahgunaan narkoba semakin tinggi sehingga diperlukan operasi tersendiri (Operasi Khusus Kepolisian) di luar operasi yang dilakukan sehari-hari oleh Satuan Narkoba Polisi Daerah Sumatera Utara.. Operasi Rutin Kepolisian yang dilakukan Satuan Narkoba Polisi Daerah Sumatera Utara adalah operasi yang dilakukan sehari-hari dalam kaitannya dengan kebijakan Kapolda mengenai target minimal kasus per bulan. Operasi ini juga termasuk melakukan razia terhadap kendaraan bermotor.

Langkah-langkah preventif yang terus dilakukan oleh seluruh personil Polri seluruh jajaran Polda Sumut adalah mengedepankan fungsi Bhabinkamtibmas yang bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat. Setiap 1 (satu) orang Personil Bhabinkamtibmas yang ada di jajaran Polda Sumut menanggungjawabi masing-masing 1 (satu) Desa atau Kelurahan. Setiap personil Bhabinkamtibmas diwajibkan setiap harinya untuk mendatangi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat maupun masyarakat lainnya dengan program “Door to Door System”. Hal ini agar Polri bisa mengetahui sekecil apapun permasalahan yang ada di tengah -tengah masyarakat. Selain itu agar masyarakat juga bisa merasakan

keberadaan Polri di tengah -tengah masyarakat sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

2). Preemptif Upaya preemtif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang bersifat dengan sasaran untuk memengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang (Faktor Korelatif Kriminogen) dari adanya kejahatan tersebut. Sehingga akan tercipta suatu kondisi kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari segala ancaman narkoba.

Menyikapi maraknya penyalahgunaan narkoba, upaya preemtif merupakan salah satu kegiatan operasional yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polisi Daerah Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan sebagai tugas dan wewenang yang ada pada Unit Pembinaan dan Penyuluhan. Langkah Preemtif biasanya dilakukan dengan mengedepankan fungsi Sabhara dengan pelaksaan Patroli. Patroli menggunakan Kendaraan bermotor baik Roda 4 maupun Roda 2. Namun yang lebih dikedepankan sekarang adalah Patroli dialogis dengan mendatangi langsung tempattempat yang dianggap rawan ataupun daerah yang membutuhkan kehadiran Polri dan berdiskusi.

# B A B - VI

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari permasalahan diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang terlibat dalam penggunaan narkotika dapat dilihat dari perbuatan yang mereka lakukan. Penegakan hukum pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penggunaan narkotika berlaku bagi semua orang yakni di

# B A B - VI

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari permasalahan diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang terlibat dalam penggunaan narkotika dapat dilihat dari perbuatan yang mereka lakukan. Penegakan hukum pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penggunaan narkotika berlaku bagi semua orang yakni di

mata hukum sama. Proses hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana sudah sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oknum polisi harus melaksanakan sidang kode etik kepolisian, dan jika terbukti bersalah dengan dijatuhi hukuman diatas 5 (lima) tahun, maka oknum polisi tersebut dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat dari instansinya atau dicopot jabatannya dan jika hukuman yang dijatuhkan kurang dari 5 (lima) tahun maka oknum polisi tersebut masih bisa dipertimbangkan, apakah hanya diberikan sanksi disiplin atau dimutilasi ke suatu tempat yang jauh dari narkoba.

2. Menyadari bahwa ancaman bahaya yang ditimbulkan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang telah meresahkan masyarakat, maka untuk itu dilakukan upaya penanggulangan dengan mengunakan sarana penal maupun sarana non penal. Kedua sarana ini (penal dan non penal) merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Penegakan hukum dengan sarana penal merupakan salah satu aspek saja dari usaha masyarakat menanggulangi kejahatan. Disamping itu masih dikenal usaha masyarakat menanggulangi kejahatan melalui sarana non penal. Usaha non penal dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya non penal ini dengan sendirinya akan sangat menunjang

penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non penal. Proses penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oknum polisi yang menggunakan narkotika tetap akan diproses hukum walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Oknum polisi disangkakan menggunakan narkotika dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun pada kenyataannya, penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika belum terlaksana dengan baik dimana masih banyak oknum polisi yang terlibat penggunaan narkoba tidak direhabilitasi

3. Pihak penyidik Polri cendrung memproses tersangka pencandu narkotika, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika untuk dihukum penjara daripada direhabilitiasi. Oknum polisi harus melaksanakan sidang kode etik kepolisian, dan jika terbukti bersalah dengan dijatuhi hukuman

diatas 5 (lima) tahun, maka oknum polisi tersebut dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat dari instansinya atau dicopot jabatannya dan jika hukuman yang dijatuhkan kurang dari 5 (lima) tahun maka oknum polisi tersebut masih bisa dipertimbangkan, apakah hanya diberikan sanksi disiplin atau dimutilasi ke suatu tempat yang jauh dari narkoba.

4. Proses penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oknum polisi yang menggunakan narkotika tetap akan diproses hukum walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.. Anggota kepolisian yang terlibat tindak pidana dan sedang diproses di dalam pengadilan biasanya statusnya diberhentikan sementara dalam pekerjaannya dan bisa juga sampai dilakukan pemecatan apabila memang tidak dapat dipertahankan lagi dalam pekerjaannya.

   Oknum Polri yang menggunakan obat-obatan terlarang selain dijatuhkan sanksi pidana yang terdapat dalam UU Narkotika, ikut turut dijatuhkan sanksi oleh instansi yang bersangkutan yang dinamakan sanksi admistratif. Sesuai pasal 13 huruf b yang menjelaskan tentang tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu menegakan hukum,

seluruh aparat kepolisian diharuskan untuk menjalankan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua bentuk tindak pidana. Apabila aparat kepolisan sendiri yang melanggar suatu ketentuan yang termasuk dalam tindak pidana maka hal tersebut tidak sesuai dengan tugas pokok dari polri, sebab polrilah yang seharusnya menjadi contoh warga negara Indonesia dalam menegakan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka merekomendasikan saran-saran sebagai berikut:

a. Perlunya dikembalikan kepada aturan hukum dimana korban penggunaan narkoba harus mendapatkan rehabilitasi sebagaimana amanat dalam Pasal 127 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga untuk mendapatkan rasa keadilan bagi korban serta para penegak hukum mampu menerapkan keadilan yang bersifat religius dengan menetapkan sangsi atau tahapan sesuai dengan aturan yang ada, atau dengan bahasa lain sesuai dengan standart operasional yang telah ditentukan. Selain itu pula pihak pemerintah sudah sewajarnya serta selayaknya memberikan atau menyediakan tempat rehabilitasi sebagaimana amanat dari undang-undang diantaranya Rumah Sakit, Panti Sosial, Serta Pondok Pesantren yang ditunjuk bahkan ditetapkan oleh pemerintah untuk pelaksanaan rehabiltasi,

perlu diperhatikan pula kapasitas untuk menampung harus mampu mewadahi keseluruhan.

b. Perlunya peningkatan klasifikasi pendidikan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimilki oleh institusi penegakan hukum dalam hal ini adalah penangan terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba guna terciptanya institusi yang berintegritas, selain itu pula perlu dilakukan peningkatan kemampuan SDM yang dimiliki dengan memberikan pelatihan-pelatihan secara khusus, sehingga nantinya para SDM memiliki kejurusan atau keahlian tersendiri dalam menangani peredaran narkoba. Terkait dengan peningkatan SDM dengan pelatihan sudah sewajarnya pemerintah memberikan fasilitas tersebut, mengingat peredaran narkoba di Indonesia sudah dalam kategori darurat dan termasuk juga dalam kejahatan luar biasa. Agar tindak pidana Narkoba tidak terjadi lagi di kalangan anggota Polri perlu sering mengadakan pengawasan terhadap anggotanya, berupa pengawasan saat melakukan penyamaran saat anggota Polri harus terjun langsung dalam komunitas pengguna narkotika guna memperoleh informasi maupun sasaran.

c. Bagi anggota Polri yang sudah terlibat dalam pengunaan Narkoba sebaiknya segera melaporkan diri kepada atasannya untuk segera di rekomendasikan rehabilitasi. Pemerintah sudah sangat perlu merekonstruksi anggota Polri yang terlibat dalam pengguna Narkoba dibuat pusat rehabilitasi khusus bagi anggota Polri yang terlibat kecanduan

Narkoba. Bagi masyarakat pula perlu peningkatan kesadaran, partisipasi atau peran aktif untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang adanya tindakan penggunaan narkoba, perlu diketahui juga bagi masyarakat bahwa apabila ada salah satu pihak keluarga yang menjadi pecandu narkoba dan kemudian diantar atau diserahkan kepada pihak yang berwajib maka akan dterima dengan baik dan akan menjalani rehabilitasi.

Dalam penulisan disertasi ini maka Penulis membuat suatu Novelty atau menemukan suatu Novelty yaitu:

PELAYANAN TERPADU YANG HUMANIS DENGAN NILAI-NILAI KEADILAN.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku


Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT.* Citra Adtya, Bandung: 1996.

Arrasjid, Chainur, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil,* Kelompok Hukum dan Masyarakat, FH-Usu, Medan, 1999.

***B.*** Krause, Wayne & Sinaga, Mike Wijaya, Kamus Indonesia Inggris *(Indonesian - English Dictionary),* First Edition, Published by PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002.

Echols, John M. & Shadily, Hassan, *Kamus Indonesia Inggris: an Indonesian-English Dictionary,* Third Edition, Cetakan kesembilan, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan, CV.* Akademika pressindo, Jakarta, 1993.

Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan,* Kencana, Jakarta, 2008.

Hulsman, *Selamat Tinggal Hukum Pidana;Menuju Swa Regulasi,* (terjemah Wonosusanto), UNS press, Semarang, 1995.

Hamzah, Andi & Rahayu, Siti, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia,* Akademika PT. Pressindo, Jakarta, 1983.

Kartono, Kartini, *Psichology Abnormal,* Alumni, Bandung, 1972

Lubis, Solly, *Serba Sethi Politik dan Hukum,* Mandar Maju, Bandung, 1989.

Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, PT.* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

Manan, Abdul, *Aspek-aspek Pengubah Hukum,* Kencana Prenada Media, Jakarta 2009.

Momo Kelana, Memahami Undang-Undang Kepolisian: UndangUndang No 2 Tahun 2002, Latar Belakang dan Komentar Pasaldemi Pasal, (Jakarta : PTIK Press, 2002)

PudiRahardi , "Hukum Kepolisian (Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri)", (Surabaya:Laksbang Grafika, 2014)

L.J van Apeldoorn, Pengantar I/mu Hukum (Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht), Cetakan Kelimabelas, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1978

Sinta Ayu Lestari & Hery Firmansyah Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak PIdana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sitorus, Oloan, & Minin, Darwinsyah, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum,* Edisi Revisi, Cetakan Kedua, PT. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2006.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum,* UI Press, Jakarta, 1984.

Sri Supatmi, Mamik & Permata, Herlina, *Dasar-Dasar Teori Sosial Kejahatan,* PTIK Press, Jakarta, 2007.

Santoso, Topo, & Zulfa, Eva Achjani, *Kriminologi, PT* Raja Grafindo Press, Jakarta, 2001.

Sudarsono, *Kenakalan Remaja,* Rineke Cipta, Jakarta, 1992. Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana,* Alumni, Bandung, Alumni, 1983.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat,* Sinar Baru, Bandung, 1983.

Tim BNN, *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba,* Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2005.

Wigjosoebroto, Soetandyo, *Penelitian Hukum:Sebuah Tipologi,* Majalah Masyarakat Indonesia, Jakarta; Tahun I No. 2, 1974.

Yulia, Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan,* Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Teguh Prasetyo, 2010. Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta. Tirtaamidjaja, 1995. Pokok –pokok Hukum Pidana. Frasco, Jakarta.

E. Utrech, 1986. Hukum Pidana II. Penerbit Universitas, Bandung.

Van Bemmelen, 1979. Ons Strafrech 1, HD. Tjeen Willink, Alphen aan den Rijn.

Van Apeldoorn, L.J, *Pengantar I/mu Hukum (Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht),* Cetakan Kelimabelas, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.

Wiryono Prodjodikoro, 1989. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Eresco, Bandung.

Zainuddin Ali, 2010. Filsafat Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.

**B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1946 tentang Kitab

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kahakiman;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

PP. Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara RI

PP. Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI

PP. Nomor 2 Tahun 2003. Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI

PP. Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara RI

Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Propesi Kepolisian Negara RI

Maklumat Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Mekanisme Terapi Dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Pada Panti Rehabilitasi Dan Unit Pelaksanaan Teknis Terapi Dan Rehabilitasi (UPT &R) Lido Sukabumi

Surat Edaran No: SE/ 09 /V/2021 tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Penegakana Kode Etik Profesi Polri.

**C. Media Masa Dan Internet**

Detik News Jumat, 23 Okt 2020 21:07 WIBDiduga Pakai Narkoba, 1 Oknum Polisi di Simalungun Sumut Ditahan

Tribun Medan “Akhirnya Polda Sumut Angkat Bicara, 2 Oknum Polisi Terjerat Kasus Narkoba” 2020/03/06 7:16

Tujuh oknum polisi ditangkap saat pesta narkoba, kumparan news, 13 Februari 2020 2:05

https://ipdefenseforum.com/id/2018/06/singapura-mengambil-tindakan-tegas-terhadap-perdagangan-narkoba/

https://www.beritasatu.com/nasional/570823/belajar-pemberantasan-narkoba-dari-negaranegara-lain